Kepingan Narasi
TIONGHOA INDONESIA

THE UNTOLD HISTORIES

Hendra Kurniawan

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Ad
Dei
Maiorem
Gloriam

Kepingan Narasi
TIONGHOA INDONESIA
THE UNTOLD HISTORIES

Hendra Kurniawan

PENERBIT PT KANISIUS

Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia
The Untold Histories
1020003016
© 2020 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail : office@kanisiusmedia.co.id
Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	22	21	20

Editor : Rosa de Lima
Desainer : Oktavianus

ISBN 978-979-21-6392-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Untuk yang kukasihi:

Mellyta Karunia Yuliani

dan dua keluarga yang menyatukan kami

Keluarga Njoo Ping Tjwan (Irwan Dwidjo Seno)

Keluarga Kwee Tjien Poo (Daniel Kartipin)

PRAKATA

Kesadaran akan realitas bangsa yang berbhinneka tunggal ika merupakan hal yang sangat penting dan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan. Kemajemukan bangsa ini merupakan keniscayaan sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dimungkiri apalagi ditiadakan. Salah satu dari sekian banyak keberagaman yang mewarnai bangsa Indonesia, yakni keberadaan masyarakat Tionghoa. Dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini sejak zaman Nusantara. Masalahnya, kenyataan itu jarang diungkap apabila diungkap pun dalam porsi yang kecil. Itu pun sering kali didominasi hal-hal yang cenderung bernuansa negatif. Situasi ini berlangsung lebih dari tiga dekade semasa kekuasaan Orde Baru bercokol.

Angin Reformasi menghembuskan upaya mengubah pandangan itu, narasi kehidupan masyarakat Tionghoa mulai mendapat tempat dalam Sejarah Nasional. Hal ini tampak dari historiografi Tionghoa Indonesia melalui buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang sudah cukup jamak dilakukan oleh para sejarawan dan peneliti sejarah dewasa ini. Akan tetapi, sebagai upaya pendidikan sejarah di sekolah, upaya tersebut dirasa masih belum optimal. Untuk mengakomodasi

tak berarti kurikulum sejarah lantas menjadi sangat gemuk dan rentan menonjolkan kepentingan primordial bukan kebangsaan. Untuk itu, perlu suatu desain dengan porsi tepat dan berimbang dalam memberi ruang pada kajian masyarakat Tionghoa Indonesia dalam pembelajaran sejarah di sekolah.

Historiografi Tionghoa Indonesia yang cukup kaya sekarang ini menjadikan peluang literasi dalam pembelajaran sejarah terbuka lebar. Pasalnya sejarah kaya akan sumber belajar yang begitu beragam. Apalagi di era digital saat ini, sumber belajar sejarah semakin terbuka dan mudah diakses (sejarah publik), termasuk kajian-kajian mengenai peran masyarakat Tionghoa dalam sejarah nasional Indonesia. Peluang literasi ini harus ditanggapi secara masif agar dapat dimanfaatkan secara efektif dalam upaya pengembangan bahan ajar sejarah berbasis interkultural, secara khusus terkait sejarah Tionghoa Indonesia. Oleh karena itu, identifikasi dan penyusunan narasi-narasi sejarah masyarakat Tionghoa Indonesia yang sesuai dengan acuan kurikulum menjadi hal penting untuk dilakukan.

Buku ini hadir mencoba menjawab tantangan sekaligus peluang tersebut. Selanjutnya, agar mengakomodasi seluruhnya maka rentang waktu sejarah sosial masyarakat Tionghoa Indonesia ini dikaji sejak zaman praaksara hingga reformasi. Akan tetapi, tidak berarti buku ini menjadi bergelojoh dengan menampung sekian banyak informasi secara mendalam dari tiap-tiap masa. Acuan kurikulum sejarah yang berlaku tetap diperhatikan mengingat fokus historiografi buku ini untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran sejarah di sekolah. Sepotong demi sepotong narasi diulas sesuai dinamika sejarah nasional agar tidak menjadi anakronis. Oleh karena itu, buku ini bertajuk "Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia: *The Untold Histories*".

Ada banyak kisah tentang masyarakat Tionghoa Indonesia yang telah menjadi sejarah maupun yang masih berlangsung yang tidak diketahui banyak orang. Menyatukan kepingan-kepingan fakta yang terserak, tak berbentuk lagi, bahkan nyaris raib menjadi kerja akademik yang digali dan dihadirkan dalam buku ringan ini. Untuk memperkaya, beberapa kisah sejarah keluarga turut diangkat. Harus diakui, keluarga (diperkuat dengan adanya marga dan sistem patrilineal) menjadi embrio penulisan sejarah Tionghoa Indonesia. Dari segi penyajian, buku ini sengaja disuguhkan dalam bentuk narasi-narasi lepas yang tidak memaksa pembaca untuk menyimaknya runtut dari A sampai Z agar mengerti isinya. Pembaca dapat menjelajah setiap topik yang mana saja dengan nyaman.

Hadirnya buku ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, terutama keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendaraskan doa-doanya. Terima kasih dan buku ini pertama-tama penulis persembahkan untuk kalian. Buku ini merupakan luaran dari penelitian reguler yang penulis lakukan pada tahun 2020. Untuk itu, terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sanata Dharma yang telah menyetujui dan memberi hibah penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penerbit PT Kanisius yang telah mengupayakan buku ini dapat berada di tangan pembaca. Buku adalah monumen keabadian. Untuk itu, penulis memilih gambar sampul batik pesisiran berwarna biru yang dalam budaya Tionghoa menyimbolkan keabadian. Harapannya kajian buku ini dapat menjadi oase yang tak pernah kering (abadi) sebagai warta kebinnekaan dalam hidup berbangsa di Indonesia.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber referensi dalam pengembangan bahan ajar.

Secara khusus, bahan ajar sejarah berbasis kebhinnekaan yang mengkaji peran masyarakat Tionghoa dari masa ke masa. Secara khusus juga ada harapan bahwa buku ini dapat menjadi pemantik dalam aktivitas literasi siswa yang dapat menguatkan wawasan ke-Indonesia-an. Ada banyak narasi sejarah Tionghoa yang tidak pernah disentuh sebelumnya, namun ternyata berkontribusi besar bagi sejarah nasional. Dari situ juga digelorakan gairah Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni kebangsaan yang kuat.

Selamat menjelajah! Soja!

Solo, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA iv
DAFTAR ISI viii
CATATAN AWAL 1

1. JEJAK NUSANTARA
   Sejarah Bangsa Majemuk 9
   Silang Budaya Tionghoa Jawa 15
   Budaya Tionghoa Betawi 22
   Tionghoa di Penjuru Tanah Air 28

2. RESISTANSI TRADISI
   Merayakan Sejarah Imlek 43
   Manis Lengket Kue Keranjang 54
   Ceng Beng, Bakti pada Orang Tua 58
   Peh Cun dalam Festival 63
   Miris Pewaris Wayang Potehi 67

3. PEWARIS IDENTITAS
   Keplek Ilat Dapur Nyonya 81
   Lenggak-Lenggok Kebaya Encim 91

Ketionghoaan Kartini 97
Aku Putri Tionghoa 101

4. *SINO-JAVANESE MUSLIM*
Syiar Islam Laksamana Cheng Ho 109
Wali Sanga Keturunan Tionghoa 114
Dar Der Dor Sambut Lebaran 126
Mesranya *Bakda Kupat* dan Lontong Cap Go Meh... 129

5. BELENGGU KOLONIAL
Kisah Para Kapitan 137
Tionghoa Melawan VOC 143
Tionghoa, Keraton, Dan Pesisiran 156

6. GELORA KEBANGSAAN
Tionghoa Nasionalis Bergerak 177
Tionghoa dalam Sumpah Pemuda 186
Tionghoa dalam Riak Revolusi 191

7. PASUNGAN REZIM
Menyoal Dwikewarganegaraan 209
Hoakiau dalam Jerat PP 10/1959 216
Tionghoa dalam Pusaran 65 220
Mei 1998, Titik Balik Tionghoa 225

8. BERANEKA ARUS
Sastra dan Jurnalistik Melayu Tionghoa 237
Tionghoa Turut Mencerdaskan Bangsa 247
Sinshe di Toko Obat 253
Tionghoa dalam Perfilman dan Seni 260
Bulu Tangkis Gudangnya Tionghoa 267

CATATAN AKHIR 272

DAFTAR PUSTAKA 279
GLOSARIUM 286
INDEKS 290
TENTANG PENULIS 292

CATATAN AWAL

Indonesia Tanah Air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja-puja bangsa
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata

Dalam pencarian di *Youtube*, karya Ismail Marzuki ini menjadi lagu nasional yang paling banyak diaransemen ulang dalam versi Tionghoa. Lagu berjudul Indonesia Pusaka atau lebih familiar *Indonesia Tanah Air Beta* ini banyak diunggah dengan penampilan warga keturunan Tionghoa yang menyanyikannya penuh semangat. Bukan itu saja, jangan kaget bila ditemukan lagu ini dalam syair berbahasa mandarin dengan judul *Yin Du Ni Xi Ya Ming Ge*. Video lagu ini diunggah untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018.

Cover lagu bertema Tanah Air dalam versi mandarin kini lumrah dijumpai. Perusahaan label rekaman Gema Nada Pertiwi yang didirikan oleh Soe Sien Ming alias Hendramin

Susilo pada tahun 2005 pernah merilis produksi lagu-lagu nasional berbahasa mandarin. Dia berharap usahanya ini dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air yang semakin mendalam di kalangan Tionghoa. Apalagi setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi perkembangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000. Jaminan yang menjadi angin segar bagi warga Tionghoa maka sikap rasialis, diskriminatif, dan anti-Tionghoa harus disingkirkan jauh-jauh.

Terlepas dari cerita Soe Sien Ming dan cita-citanya lewat perusahaan rekaman Gema Nada Pertiwi, lagu *Indonesia Tanah Air Beta* ini sangat erat dengan ungkapan perasaan masyarakat Tionghoa. Setiap orang Tionghoa yang lahir, tinggal, dan menutup mata di Indonesia, dalam hati kecilnya berkobar perasaan cinta akan Tanah Air ini. Kendati pengalaman tidak mengenakkan pernah dirasakan di masa lalu, perlakuan diskriminasi dan dianggap *liyan* di tengah masyarakat mayoritas. Dalam benaknya tidak ada kebangsaan Tionghoa, tidak ada lagi bayangan akan tanah Tiongkok, yang ada hanyalah Indonesia. Sejatinya Tionghoa adalah Indonesia, Tionghoa adalah kita!

Bagian Sejarah Bangsa

Entah sadar atau tidak, tak dapat dimungkiri, dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini sejak zaman Nusantara. Payahnya kenyataan itu jarang diungkap, sekali diungkap dalam porsi yang kecil. Itu pun sering kali didominasi hal-hal yang cenderung bernuansa negatif. Situasi ini berlangsung lebih dari tiga dekade semasa Orde Baru berkuasa. Berbagai aturan pemerintah mulai dari pelarangan adat istiadat, bahasa dan aksara, kewajiban mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan

Republik Indonesia (SBKRI), himbauan ganti nama hingga praktik asimilasi telah memasung identitas warga Tionghoa.

Kondisi sosial politik yang demikian tentu saja berimbas pada pembelajaran sejarah di sekolah. Penulisan buku-buku ajar sejarah berupaya meminggirkan, bahkan melenyapkan kontribusi masyarakat Tionghoa dalam sejarah bangsa ini. Nama-nama tokoh Tionghoa yang masuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tak pernah disinggung. Bahkan jumlah orangnya pun, yakni sebanyak empat, sering kali direduksi dalam buku-buku teks dengan menyebutnya sebagai golongan timur asing. Apalagi narasi-narasi tentang Tionghoa yang hampir tidak pernah didengar orang sudah tentu tidak akan pernah dijumpai dalam pembelajaran sejarah.

Memasuki era reformasi pandangan itu berubah, narasi kehidupan masyarakat Tionghoa mulai mendapat tempat dalam Sejarah Nasional. Seiring dengan hal tersebut maka dalam pembelajaran sejarah diperlukan perubahan paradigma. Peran masyarakat Tionghoa dalam sejarah Indonesia harus disampaikan sesuai porsinya secara jujur dan proporsional. Apalagi dengan adanya mata pelajaran Sejarah Indonesia yang sifatnya wajib bagi semua peminatan dalam Kurikulum 2013. Itu artinya, sejarah mengemban cita-cita besar bagi upaya penguatan pendidikan karakter, salah satunya penyadaran akan kenyataan hidup bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Dalam konteks ini penerimaan masyarakat sepenuhnya terhadap Tionghoa sebagai bagian dari bangsa perlu ditumbuhkembangkan.

Pemikiran ini sejalan dengan Sartono Kartodirdjo yang mengemukakan bahwa Sejarah Nasional Indonesia perlu mengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya dari kaum elite dan kelompok tertentu saja yang jumlahnya mayoritas (Mulyana, 2009: 5). Sejarah nasional

harus mengarah pada integrasi bangsa dengan menghadirkan peranan berbagai kelompok dan golongan yang juga turut mewarnai kemajemukan bangsa. Untuk itu, dalam kerangka kajian sejarah nasional tentu saja semua mesti mendapat ruang dan menjadi bagian di dalamnya.

Sebagai bagian dari ilmu, ruang itu sudah terwujud lewat berbagai upaya historiografi melalui buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang dilakukan oleh para sejarawan dan peneliti sejarah. Akan tetapi, sebagai upaya pendidikan, terkhusus dalam konteks pembelajaran sejarah di sekolah, dirasa masih belum optimal dan tepat sasaran. Tentu saja mengakomodasi hal ini tak berarti kurikulum sejarah harus menjadi sangat gemuk dan justru dikhawatirkan rentan menonjolkan kepentingan kelompok (primordial) masing-masing. Untuk itu, diperlukan desain dengan porsi tepat dan berimbang dalam memberi ruang pada kajian masyarakat Tionghoa Indonesia dalam pembelajaran sejarah di sekolah.

Usaha ini tidaklah mudah, nyatanya Tionghoa justru selalu menjadi isu empuk. Kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik sering kali tanpa etika memanfaatkan isu ketionghoaan sebagai senjata. Itu artinya, masyarakat masih memberi stempel tebal-tebal bahwa Tionghoa adalah *liyan*, Tionghoa bukanlah bagian dari bangsa ini. Anggapan yang jelas 100% keliru! Pemikiran semacam ini hanya dihasilkan oleh mereka yang tidak pernah mengenal sejarah. Masyarakat Tionghoa telah ada jauh sebelum negara ini merdeka, jauh sebelum konsensus sebagai satu bangsa dikumandangkan. Bahkan banyak di antara masyarakat Tionghoa yang turut andil dalam setiap jejak langkah sejarah bangsa ini.

Adagium tak kenal maka tak sayang kiranya tepat untuk menggambarkan situasi yang melatarbelakangi hadirnya buku ini. Kesadaran sejarah akan menggerakkan siapa

saja orang Indonesia untuk mulai memungut keping demi keping sejarah yang terserak. Pun halnya bagi generasi muda Tionghoa perlu menemukenali (kembali) identitas diri yang sempat hilang. Tentu saja identitas diri ini harus ditempatkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sementara bagi yang lain seyogianya dapat membuka mata dan hati untuk mengenal lebih jauh tentang masyarakat Tionghoa dan menerima secara terbuka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Inilah harmoni Nusantara yang sejak dahulu ada dan harus dirawat bersama.

1

Jejak Nusantara

Gambar 1. Infografik Ampyang, Blasteran Tionghoa-Jawa

Sumber: https://m.solopos.com/ampyang-blasteran-tionghoa-jawa-969599?nonamp=1

SEJARAH BANGSA MAJEMUK

Tulisan ini diawali dengan sepenggal cerita tentang asal-usul Hari Sejarah Indonesia. Tak banyak orang tahu, tanggal 14 Desember 2014 untuk pertama kalinya Hari Sejarah Indonesia diperingati. Hari Sejarah Indonesia dideklarasikan dalam pertemuan Apresiasi Historiografi Indonesia yang berlangsung pada 5-8 Mei 2014 di Yogyakarta. Dipilihnya tanggal 14 Desember mengacu pada Seminar Sejarah Indonesia pertama yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 14-18 Desember 1957. Itu artinya, peringatan Hari Sejarah Indonesia yang pertama sekaligus mengenang 57 tahun Seminar Sejarah Indonesia yang menjadi landasan bagi penulisan Sejarah Nasional Indonesia.

Mengkaji mengenai Sejarah Nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika masyarakat Indonesia sampai yang terkecil sekali pun. Sartono Kartodirdjo, begawan sejarah Indonesia, mengemukakan bahwa Sejarah Nasional Indonesia merupakan sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam". Sejarah nasional harus mampu menguraikan berbagai kekuatan yang memengaruhi perkembangan masyarakat. Untuk itulah sejarah nasional

perlu mengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya dari kaum elite dan kelompok tertentu saja yang jumlahnya mayoritas. Sejarah nasional harus mengarah pada integrasi bangsa dengan menghadirkan peranan berbagai kelompok dan golongan yang juga turut mewarnai kemajemukan bangsa (Kartodirdjo, 1982).

Perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu memiliki struktur yang unik. Furnivall mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk alias *plural societies* (Nasikun, 2015: 36). Secara horizontal, masyarakat Indonesia memiliki kesatuan-kesatuan sosial atas dasar ikatan primordial seperti suku, agama, adat, daerah, hingga hubungan darah. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dengan bawah. Keanekaragaman ini apabila tidak disikapi secara bijak akan melahirkan perbedaan kepentingan yang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal.

Sejarah Tionghoa

Terkait dengan kemajemukan, sejarah yang mengungkap mengenai masyarakat Tionghoa jarang diangkat atau hanya memiliki porsi kecil dalam konteks sejarah nasional. Padahal di Indonesia, orang Tionghoa tersebar dan dapat ditemui di setiap kota dari Sabang sampai Merauke. Meskipun sama halnya dengan orang asing lain yang datang ke Indonesia, seperti Arab, India, dan Eropa, namun orang Tionghoa jumlahnya paling banyak. Keberadaan Tionghoa di Nusantara sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Orang Tionghoa berdagang, mencari penghidupan, beranak cucu, dan hidup di Indonesia. Tidak sedikit pula yang menikah dengan perempuan setempat dan memiliki keturunan yang sudah menganggap Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya.

Wajar saja bila perjalanan sejarah bangsa ini, hampir di setiap masa, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Tionghoa.

Dalam Sejarah Nasional Indonesia, peran orang-orang Indo (campuran antara Eropa dengan bumiputra) pada masa pergerakan nasional juga diungkap. Misalnya tokoh yang familiar di telinga kita adalah Eduard Douwes Dekker alias Multatuli (penulis buku *Max Havelaar*) maupun Ernest Francois Eugene Douwes Dekker alias Danudirja Setiabudi (salah satu pendiri *Indische Partij*). Beda halnya dengan masyarakat Tionghoa. Selama ini etnis Tionghoa malahan sering dianggap sebagai kelompok masyarakat yang apolitik dan asosial. Tentu ini bukan tanpa sebab, selain akibat kebijakan kolonial Belanda yang masih membekas, juga didorong oleh perlakuan diskriminatif pemerintah Orde Baru.

Tulisan pertama ini hendak menegaskan situasi konkret mengenai latar belakang adanya stigma bahwa masyarakat Tionghoa tidak memiliki peran dalam sejarah nasional, rasa nasionalisme keindonesiaannya rendah, dituduh lebih memihak Belanda di masa penjajahan dan hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Pemikiran seperti ini jelas keliru dan perlu diluruskan. Salah satu caranya dengan mengungkap berbagai peran dan keterlibatan etnis Tionghoa dalam Sejarah Nasional Indonesia.

Tak dapat dimungkiri bahwa ada banyak tokoh Tionghoa yang turut berjuang dan memiliki sumbangsih bagi terbentuknya negara Republik Indonesia. Masyarakat Tionghoa memberi warna dalam Sejarah Indonesia sejak masa Islam hingga Republik. Sebut saja Laksamana Cheng Ho, salah satu bukti peninggalannya adalah Kelenteng Sam Poo Kong di Semarang, yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Demikian pula pada masa kolonial, pergerakan nasional, persiapan kemerdekaan hingga mempertahankan

kemerdekaan, masyarakat, dan tokoh-tokoh Tionghoa ikut memainkan peran. Ini penting guna memahami secara utuh kenyataan jati diri bangsa dan negara yang majemuk.

Sejarah memang memegang peran strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan. Generasi muda hendaknya dapat memahami kenyataan akan kemajemukan bangsa yang bermuara pada penanaman sikap menghargai nilai-nilai multikultural. Dengan adanya sikap menghargai dan menghormati perbedaan maka akan semakin menumbuhkembangkan rasa toleransi yang saat ini mulai luntur. Tidak hanya Tionghoa, namun setiap kelompok suku maupun agama yang ada perlu diakui memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari Indonesia. Lantas mampukah gagasan tentang Hari Sejarah Indonesia menumbuhkembangkan kesadaran sejarah sebagai sebuah bangsa yang majemuk? Ini vital bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika.

Manusia Yunnan

Keberadaan orang Tionghoa pertama kali di Nusantara sebenarnya tidak jelas. Dugaan muncul hanya berdasarkan hasil temuan artefak-artefak kuno seperti tembikar, benda-benda neolitik yang mirip dengan temuan di Tiongkok pada zaman yang sama dan sejumlah nekara yang termasuk kebudayaan Dongson yang sama dengan temuan di Yunnan, Tiongkok barat daya. Dari dugaan-dugaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan lalu lintas pelayaran antara Tiongkok dengan Nusantara sudah berlangsung sejak zaman purba. Tentang asal-usul manusia Indonesia, menurut banyak ahli, seperti Mr. Muhammad Yamin dan Prof. Kong Yuanzhi, meyakini bahwa sebagian besar berasal dari daerah Yunnan. Dari sinilah terjadi penyebaran orang yang disebut Melayu Prasejarah, yaitu *Proto Melayu* dan *Deutro Melayu* sehingga

ada jalinan hubungan darah antara orang Tionghoa dengan sebagian besar suku bangsa yang ada di Indonesia (Setiono, 2008: 13).

Berdasarkan cerita dalam Dinasti Han, pada masa Kaisar Wang Ming (1-6 SM) sudah dikenal Nusantara yang disebut Huang-tse (Setiono, 2008: 20). Menurut Setiono (2008: 21), orang Tionghoa mulai berdatangan ke Nusantara pada abad ke-9, zaman Dinasti Tang. Pada masa ini di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten sudah muncul koloni Tionghoa yang diterima dengan baik oleh penduduk setempat dan hidup bergaul dengan damai. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik dengan jalan berdagang atau bertani. Sebelumnya pada 399-414, Fa Hian seorang pendeta dari Tiongkok berkunjung ke Jawa dalam perjalanannya ke India. Menyusul Pendeta I Tsing pada 671 dari Canton menuju Nalanda melalui Sriwijaya. Bahkan tinggal di Sriwijaya selama empat belas tahun untuk belajar Buddha.

Dari hipotesis sejarah tersebut maka masalah asli-tidak asli, pribumi-nonpribumi sangat tidak relevan untuk dipersoalkan dan menjadi sangat kabur. Secara antropologis, semua penduduk Indonesia saat ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia. Bedanya hanya masalah perhitungan waktu, kapan leluhurnya mulai berdatangan ke Nusantara (Setiono, 2008: 17). Apabila mengacu pada teori manusia Yunnan maka dari sanalah mereka menyebar ke Siam, Semenanjung Indocina, kemudian melalui Semenanjung Melayu sampai di kepulauan Nusantara. Pada akhirnya keberadaan orang Tionghoa sejak berabad-abad yang lalu mewarnai keharmonisan hidup di Nusantara.

Pada era kemerdekaan, orang Tionghoa yang sudah menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Itu artinya, keberadaan dan peran orang Tionghoa di Indonesia

tidak dapat diabaikan apalagi dihapuskan, melainkan harus diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari bangsa ini. Masyarakat Tionghoa telah menjadi produk sejarah. Jumlahnya puluhan juta orang, belum termasuk kelompok yang disebut peranakan, yaitu hasil kawin campur antara Tionghoa dengan pribumi. Mereka ini termasuk gelombang pertama dari suku Han. Menurut Suryadinata (1986: 20), kaum peranakan ini telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan hubungannya dengan negara Tiongkok sangat tipis. Keberadaan peranakan Tionghoa telah mendorong terjadinya akulturasi dengan budaya setempat. Oleh karena itu, setelah kebangsaan Indonesia lahir, istilah peranakan Tionghoa sebaiknya tidak lagi digunakan karena yang dimaksud adalah masyarakat Tionghoa Indonesia itu sendiri.

SILANG BUDAYA TIONGHOA JAWA

Wayang Cina Jawa (Wacinwa)

Salah satu magnum opus dari silang budaya Tionghoa Jawa adalah Wayang Cina Jawa (wacinwa). Pada tanggal 6 Oktober 2014 menjadi hari bersejarah bagi wacinwa. Pasalnya, untuk pertama kalinya wacinwa dipentaskan kembali setelah vakum hampir setengah abad. Pentas dengan lakon *Sie Jin Kui Ngumbara* oleh dalang Ki Aneng Kriswantoro digelar di Pendapa Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Sebelumnya tidak ada pewaris maupun pemerhati budaya yang tergerak untuk menghidupi kembali akulturasi budaya Tionghoa-Jawa ini setelah pembuat sekaligus dalang wacinwa, Gan Thwan Sing wafat pada tahun 1967. Kondisi semakin parah dengan hadirnya Orde Baru. Alhasil wayang ini pun semakin tenggelam.

Gambar 2. Wacinwa

Sumber: https://merahputih.com/, https://www.youtube.com/

Wacinwa diciptakan pada tahun 1925 oleh Gan Thwan Sing (1895-1967), warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Perpaduan budaya Tionghoa-Jawa ini tampak dari bentuk wayang dan lakon yang dimainkan. Bentuknya tidak seperti wayang potehi, wacinwa dibuat dari kulit kerbau yang kepala wayangnya bisa dilepas dan diganti-ganti sesuai karakter yang dikehendaki. Sementara lakon yang biasa dimainkan diambil dari lakon wayang potehi dan juga kisah komik Tiongkok seperti Sie Jin Kui, namun dibawakan dengan cara Jawa diiringi gamelan, kelir, dan sinden. Wacinwa berkiblat pada gaya pakeliran klasik Yogyakarta (Sonobudoyo, 2015). Sungguh harmonisasi budaya yang *akur* dan indah.

Ada dua set wacinwa yang diciptakan oleh Gan Thwan Sing, masing-masing sekitar 200 anak wayang. Satu set dengan lakon Sie Djin Koei Tjeng Tang (Sie Jin Kui menyerbu ke timur) yang menjadi koleksi Museum Sonobudoyo dan Sie Djin Koei Tjeng See (Sie Jin Kui menyerbu ke barat) yang kini disimpan di Ueberlingen-Bodensee, Jerman. Sedikit keluar konteks, kisah Tiongkok kuno yang dipopulerkan oleh Siauw Tik Kwie lewat komiknya di Star Weekly tahun 1950-an ini, pernah diadaptasi ke dalam versi Jawa. Kisah ini dimainkan dalam rupa wayang *wong* menjadi kisah ketoprak di Yogyakarta oleh seniman Tjokrojadi. Sie Djin Koei menjadi

Joko Soediro. Nama putra Sie Djin Koei, yakni Sie Teng San berubah menjadi Soetrisno. Menantu Sie Djin Koei, perempuan gagah berani bernama Hwan Lee Hwa menjadi Waryanti.

Nama-nama seperti Gan Thwan Sing pada masa-masa itu bukan hal yang mengherankan. Beberapa orang Tionghoa, termasuk di masa-masa sesudahnya, memasuki dunia seni pertunjukan Jawa sebagai cara menjadi Jawa. Kho Djien Tiong (Teguh Srimulat) menggagas sandiwara lawak Srimulat yang bermula dari kesenian wayang *wong* (Anwari, 1999). Tak ketinggalan Kwee Tjoen An dengan nama panggung Didik Nini Thowok juga sukses menjadi maestro tari Jawa. Selain mereka yang bergelut dengan seni pertunjukan, ada pula Go Tik Swan. Seorang Tionghoa dari Solo ini menjadi pelopor batik Indonesia. Go Tik Swan yang bernama lain K. P. A. Hardjonagoro ini mengembangkan batik-batik yang khas bercirikan Indonesia atas usulan dari Bung Karno (Rustopo, 2008).

Gambar 3. Searah jarum jam: para maestro budaya jawa dari kalangan Tionghoa yakni Gan Thwan Sing, Kho Djien Tiong, Go Tik Swan, dan Kwee Tjoen An

Sumber: https://twitter.com/ullensentalu, https://wayangku.id/, https://www.dewimagazine.com/, https://adhietsritongawordpress.wordpress.com/

Singkat kata, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, tak sedikit orang Tionghoa yang mendedikasikan diri pada area *antimainstream*, yakni budaya. Bahkan budaya Jawa. Ini menjadi tanda bahwa betapa masyarakat Tionghoa juga menjunjung tinggi budaya yang ada di tempatnya tinggal. Seperti peribahasa "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Tak dimungkiri pula situasi ini tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Orang Tionghoa di setiap daerah pasti sedikit banyak menghidupi pula budaya di daerah setempat. Memang budaya itu universal dan tidak mengenal sekat-sekat perbedaan sehingga membuat mereka tidak segan untuk hadir sebagai Tionghoa yang Jawa dalam konteks keindonesiaan.

Mengangkat rupa-rupa inkulturasi ini menyentil masyarakat pada eratnya hubungan Tionghoa-Jawa yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Wacinwa dan banyak hasil akulturasi budaya Tionghoa-Jawa lainnya, termasuk makanan dan pakaian yang selama ini telah dikenal luas merupakan khazanah budaya bangsa. Inilah bukti kebhinnekaan yang telah ada sejak dahulu dan harus dilihat sebagai bagian dari masa depan bangsa. Setiap kebudayaan berada dalam posisi yang sejajar dan tidak ada yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah (*superior* dan *inferior*). Dialog yang baik akan memperkaya budaya dan menemukan titik temu (*kalimatun sawa*) antarbudaya yang ada. Dalam dialog dibutuhkan toleransi dan keduanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

Masyarakat majemuk (*plural society*) tidak selalu bisa dinyatakan sebagai masyarakat multikultural (*multicultural society*). Hubungan antarbudaya yang asimetris dalam masyarakat melalui dominasi, hegemoni, dan kontestasi budaya tertentu dapat menimbulkan konflik budaya. Untuk itu, dalam konstelasi politik saat ini yang semakin tidak

karuan, hubungan antarbudaya harus dijaga agar jangan sampai ikut terjebak arus yang sama. Sikap inklusif perlu dipupuk dan dikembangkan. Bukan saatnya masih tersekat-sekat oleh perbedaan etnis, golongan, dan agama. Sikap antipati dan pengotakkan merupakan manifestasi sikap eksklusif yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai multikultural. Perbedaaan dalam masyarakat sifatnya sangat alamiah dan kodrati sebagai anugerah dari Tuhan. Menolak perbedaan merupakan sikap yang jauh dari keberadaban. Tidak layak memberi tempat di negeri ini bagi mereka yang anti-kebhinnekaan.

Tionghoa di Barometer Budaya Jawa

Dalam sejarahnya sebagai pusat kerajaan Jawa, Surakarta (Solo) dan Yogyakarta telah menjadi barometer budaya Jawa. Kota kembar ini sekaligus juga menjadi tempat bertemu dan berinteraksinya orang-orang dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Sikap keterbukaan dan keramahtamahan penduduknya telah membuat berbagai budaya masuk, tumbuh, dan berkembang. Tak heran apabila Solo dan Yogyakarta menjelma menjadi kota yang kaya akan seni dan budaya. Bukan kebetulan juga apabila kemunculan tokoh-tokoh seni dan budaya Tionghoa-Jawa seperti telah dipaparkan sangat lekat dengan kedua kota ini.

Keharmonisan dalam transformasi budaya antaretnis di pusat budaya Jawa ini sebenarnya telah terbentuk sejak lama. Yogyakarta sebagai tempat silang budaya dari berbagai penjuru Tanah Air bahkan dunia telah menumbuhkan kesadaran multikultural dalam masyarakatnya. Gelaran mulai dari Kirab Budaya Nusantara, Imlek di Ketandan, hingga Festival Peh Cun di Pantai Selatan Bantul sudah menjadi agenda rutin tahunan. Yogyakarta juga relatif berhasil dalam menahan berbagai gesekan akibat perbedaan etnis dalam masyarakat.

Karenanya, sungguh memalukan bila akhir-akhir ini kerap terjadi kasus intoleran di Yogyakarta.

Solo berulang kali menorehkan sejarah kelam konflik antaretnis, khususnya Jawa dengan Tionghoa. Kini Solo telah memangkas rantai sejarah itu. Setiap tahunnya perayaan Imlek di Solo begitu meriah. Kawasan Pasar Gede pun memerah oleh lampion dan hiasan lainnya. Bahkan sejak tahun 2007, setiap menjelang Imlek, diselenggarakan Grebeg Sudiro. Perayaan ini meneruskan tradisi Buk Teko, yakni berkumpul duduk bersama (*kongkow* alias *jagongan*) menikmati teh sebagai bentuk syukur menjelang Imlek yang sudah diselenggarakan sejak zaman Paku Buwono X (1893-1939). Sekarang Grebeg Sudiro telah berkembang menjadi dialog budaya yang elegan antara masyarakat Tionghoa dengan Jawa.

Gambar 4. Kemeriahan Grebeg Sudiro 2019

Sumber: http://soloevent.id/

Sejarah telah membuktikan bahwa keberadaan Tionghoa di tengah pusat budaya Jawa terbukti berangkulan. Kedatangan orang Tionghoa baik di Solo maupun Yogyakarta

tercatat hampir bersamaan dengan berdirinya kota-kota Keraton Jawa itu, termasuk sebelumnya ketika pusat Kerajaan Mataram masih di Kotagede hingga berpindah ke Kartasura, komunitas Tionghoa selalu dijumpai. Mereka pertama-tama memang menjadi penggerak perekonomian kota, namun relasi sosial membuahkan harmoni di berbagai bidang. Alih-alih gesekan perbedaan menguat, yang terjadi justru akulturasi budaya yang yang menjadi milik bersama. Menyitir Gus Dur, kebudayaan sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk maka keragaman budaya bangsa merupakan suatu keniscayaan yang tidak terelakkan (*sunatullah*).

BUDAYA TIONGHOA BETAWI

Masyarakat Betawi dan budayanya terbentuk karena perjumpaan berbagai anasir dalam maupun luar. Pendekatan sejarah meyakini bahwa Betawi adalah etnis yang lahir dari percampuran berbagai etnis yang ada di Batavia (Jakarta) pada kisaran abad ke-17 dan ke-18. Menurut Castles (2017), Lohanda (2004), dan beberapa ahli lainnya sepakat bahwa penyebutan Betawi ditujukan untuk generasi yang lahir dari pernikahan campuran yang tidak lagi mengenal etnis kedua orang tuanya.

Asal mula etnisitas ini menyebabkan masyarakat Betawi sejak dahulu mengalami akulturasi sosial dan budaya yang sangat kental. Bahkan sejak abad-abad pertama, Sungai Cisadane dan Sungai Citarum yang mengapit teritori budaya Betawi telah didatangi berbagai kelompok masyarakat seperti Melayu, Bugis, Makasar, Jawa, India, Tionghoa, Arab, hingga Portugis, dan Belanda. Akan tetapi, secara kebahasaan, Chaer (2015) meyakini kebudayaan Melayu menjadi dasar kebudayaan Betawi.

Munculnya bahasa Melayu sebagai *lingua franca* bagi berbagai kelompok masyarakat di Batavia tidak lepas dari fungsinya sebagai kota pelabuhan. Meskipun berganti-ganti

penguasa, bahasa Melayu terus menjadi bahasa penghubung. Akibatnya, pada pertengahan abad ke-19, bahasa Melayu di Batavia menghasilkan sebuah dialek regional dan dua dialek sosial. Dialek regional, yakni bahasa Betawi, sedangkan dialek sosial bahasa Melayu rendah atau Melayu Cina serta bahasa Melayu tinggi atau Melayu Pustaka yang kemudian menjadi bahasa Indonesia.

Dari perkembangan bahasa Melayu di Batavia, yang menarik adalah kemunculan bahasa Melayu Cina. Dialek ini banyak dituturkan oleh orang-orang Tionghoa, khususnya di Batavia. Bahasa Melayu Cina banyak digunakan dalam surat kabar Tionghoa dan sastra Tionghoa peranakan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Ini tidak lepas dari keberadaan sekian lama permukiman Tionghoa di muara sungai Ciliwung yang memberi pengaruh budaya dalam hal bahasa tutur di Batavia. Misalnya, penyebutan kata ganti *gua, lu, engkong*, hingga bilangan *cepek, nopek, gopek, ceban,* dan sebagainya.

Menariknya, selain kata-kata serapan yang sudah familiar, bahasa Melayu Cina sekarang ini sudah langka terdengar. Ridwan Saidi, budayawan Betawi, pernah mencoba mengenalkan sekaligus melestarikannya lewat kolom *Cente Manis* dalam majalah KSK (Kita Sama Kita). Tulisan-tulisan Ridwan Saidi menampilkan dialog dan monolog seorang *ce'em* (besan perempuan-nenek) Tionghoa Betawi dengan beberapa tokoh pendamping. Ciri khas bahasa Melayu Cina atau Melayu pasar ini selalu jenaka dan prosais sebagai bahasa tulis.

Surat kabar Tionghoa, *Sin Po*, sekitar tahun 1930-an mulai memuat serial komik strip mengenai seorang tokoh bujangan Tionghoa yang gemuk bernama Put On. Komik ini menggunakan gaya bahasa Melayu Cina dengan cerita yang jenaka. Kisah humor karikatural singkat ini menampilkan tingkah ulah Put On dan akibat dari yang diperbuatnya.

Serial karya Kho Wan Gie ini menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa Betawi. Komik Put On bertahan hingga tahun 1960-an seiring dengan pelarangan surat kabar Tionghoa.

Serial Put On yang lugas dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk mereka di luar Tionghoa. Komik ini tidak sekadar mengangkat dan mengingatkan konteks kesejarahan perkembangan kota Jakarta yang multikultural. Lebih jauh lagi menghadirkan tradisi masyarakat Tionghoa Betawi yang juga memengaruhi tradisi Betawi. Misalnya, nenek maupun keluarga perempuan Put On digambarkan mengenakan kebaya encim dipadukan dengan kain batik pesisiran bermotif khas Tionghoa.

Kebaya dan batik memang asalnya dari Jawa, namun diadaptasi dan dimodifikasi oleh para perempuan Tionghoa Indonesia. Kebaya yang dominan warna putih dimodifikasi dengan sulaman bordir warna-warni. Berbagai macam motif khas Tionghoa, seperti: bunga, burung *hong*, dan kupu-kupu ditorehkan termasuk dalam kain batik yang juga berwarna dominan cerah. Ujung kebaya dibuat *sonday* (meruncing) yang menjadi ciri khas kebaya encim dan kemudian menjadi tradisi kebaya perempuan Betawi.

Gambar 5. Perpaduan budaya pakaian pengantin Betawi

Sumber: https://made-blog.com/pakaian-adat-betawi/

Tak hanya perempuan, laki-laki Betawi juga biasa mengenakan baju *tui kim* alias baju koko. Padanannya celana batik dan selendang yang dikalungkan di leher. Ada pula celana *pangsi* berwarna hitam ala pesilat Tionghoa yang dipakai para jawara Betawi. Baju pengantin Betawi pun identik dengan baju pengantin Tionghoa. Sederetan hiasan kembang goyang, burung *hong*, dan penutup wajah yang disebut *siangko*. Baju pengantin khas potongan Mancu dengan bukaan di kanan (*toaki*), rok lipit (*kun*), dan bagian bahu memakai hiasan teratai.

Dalam bidang seni, pengaruh Tionghoa Betawi paling kentara dalam kesenian gambang kromong. Unsur Tionghoa tampak pada alat musik gesek *tehyan, konyahyan*, dan *sukong*. Alat musik lokalnya, yakni gambang, keromong, gendang, kecrek, dan gong. Lagu yang dimainkan seperti jali-jali, lenggang kangkung, termasuk juga lagu Tionghoa seperti *kong jilok, pho panbaw, galaypan*, dan lainnya. Tak ketinggalan, ketika Tahun Baru Imlek tiba, tanjidor juga ikut memeriahkan.

Gambar 6. Alat musik tehyan, khas Betawi diadaptasi dari erhu, khas Tionghoa

Sumber: https://moeseum.blogspot.com/

Dalam perkembangannya, musik gambang kromong sering kali tampil mengiringi penyanyi dan penari. Karenanya, muncul istilah *cokek* yang merujuk pada para perempuan penyanyi yang merangkap sebagai penari. *Cokek* pertama kali muncul dalam sebuah acara di kalangan Tionghoa. Musik gambang kromong juga dipakai untuk mengiringi seni lakon yang disebut lenong. Karena itu, tak heran apabila dalam lenong juga terdapat unsur Tionghoa.

Tak hanya Tionghoa yang menjadi unsur pembentuk masyarakat Betawi dan budayanya. Pengaruh India, Arab, Belanda, dan juga suku lainnya dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat Betawi, baik dari bahasa, kesenian, peralatan sehari-hari, hingga yang paling mudah, yakni makanan. Mana pengaruh asli, mana asing sudah sulit dipisahkan, dan apabila dipaksakan justru menjadi bias.

Situasi itu tak lepas dari sifat utama orang Betawi yang egaliter. Banyak di antara mereka yang menikah dengan etnis lain. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya masyarakat Betawi yang multikultural. Banyak ahli yang menyebut masyarakat Betawi adalah suku yang paling sering melakukan pernikahan campur dengan suku atau etnis lainnya. Bagi tumbuhnya rasa saling menghargai keberagaman dan toleransi tentu praktik ini baik, namun ada juga sisi lain yang perlu diperhatikan. Generasi-generasi baru yang lahir dari pernikahan campur akan cenderung luntur perasaannya sebagai bagian dari etnis leluhurnya.

Hilangnya identitas diri dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan budaya akibat masyarakat pendukungnya lenyap. Oelh karena itu, upaya pengenalan dan pelestarian budaya Betawi sebagai wujud multikulturalisme sangat penting bagi generasi muda. Tak hanya budaya secara fisik, namun juga bahasa dan nilai-nilai tradisi bermasyarakat, seperti sikap egaliter dan semangat interkultural. Melalui

paparan ini menjadi jelas bahwa masyarakat Betawi kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Jadi, pantaslah apabila DKI Jakarta pernah memiliki gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Tionghoa maupun Anies Baswedan yang berdarah Arab.

TIONGHOA DI PENJURU TANAH AIR

Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang senang merantau. Kebiasaan ini tidak lepas dari latar belakang kehidupan ekonomi yang sulit di negara leluhurnya. Orang Tionghoa paling banyak berhijrah ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kendati berada di berbagai tempat yang jauh dari asalnya, namun secara budaya, orang Tionghoa relatif mampu bertahan. Orang Tionghoa teguh memegang ajaran masa lampau dan menjunjung tinggi leluhurnya. Bagi mereka masa lampau merupakan cermin keberhasilan masa kini. Di era sekarang, khususnya bagi kalangan muda, identitas diri semacam ini memang mulai luntur. Akan tetapi, kesadaran atau setidaknya pemahaman bahwa dirinya berdarah Tionghoa tidak mudah hilang.

Tionghoa dianggap imigran yang sifatnya diaspora, tak terkecuali di Indonesia. Terjadinya penyebaran ini tidak lepas pula dari sifat masyarakat di Nusantara yang sejak dulu terbuka terhadap pendatang dan perubahan. Kedatangan Tionghoa membawa perubahan dalam teknologi pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Etnis Tionghoa hidup dan

berkembang bersama etnis lainnya di Nusantara maka hampir di semua daerah dijumpai etnis Tionghoa. Hidup dan berkembangnya etnis serta kebudayaan Tionghoa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari falsafah hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menariknya interaksi antaretnis ini di mana pun bersifat ganda: harmonis sekaligus konflik. Dalam bagian ini akan dipaparkan etnis Tionghoa di luar Jawa, antara lain di Sumatra, Indonesia Timur, dan beberapa daerah dengan komunitas Tionghoa yang khas.

Tionghoa di Sumatra

Kajian kita mulai dari provinsi di ujung barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sering dijuluki Serambi Mekkah. Menurut Usman (2009), hubungan Tionghoa dengan orang Aceh yang sudah lebih dulu tinggal di sana dimulai pada abad ke-12 dan ke-13. Hubungan ini dibingkai dalam bentuk kepentingan dagang yang saling membutuhkan. Interaksi dan komunikasi terjadi melalui pola permukiman, pendidikan, bisnis, sosial, dan hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Pola permukiman orang Tionghoa di Banda Aceh masih berkelompok terutama di pusat kota, Peunayong. Adaptasi Tionghoa dengan penduduk Aceh, antara lain melalui bahasa, pendidikan, pernikahan, makanan, peraturan, dan transformasi budaya.

Masih menurut Usman (2009), mayoritas Tionghoa di Aceh adalah orang Khek, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua dan sangat sedikit yang dapat berbahasa Aceh. Mereka yang dapat berbahasa Aceh lebih terbuka dan bersahabat. Melalui adaptasi dalam masyarakat terjadilah transformasi budaya seperti nama, tempat, makanan, dan alat rumah tangga. Orang Tionghoa di Aceh pada masa Belanda terhitung berhasil dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Setelah kemerdekaan dan terjadinya revolusi kebudayaan di

Tiongkok tahun 1966 muncul perubahan besar. Pada waktu itu etnis Tionghoa dianggap berhaluan komunis sehingga pudarlah kebudayaan Tionghoa di Aceh yang agamis. Kala itu sebagian orang Tionghoa memilih hijrah ke Medan, bila tidak mereka pulang ke Tiongkok. Mereka ini di Medan disebut *nan min* (pengungsi). Tentu situasi pada era sekarang sudah berubah.

Kini kita ke Medan. Untuk sebuah kota, Medan menyiratkan sesuatu yang spesial, unik, dan penuh dinamika. Mulai dari cara hidup masyarakat, karakter, bahasa, gaya bicara, birokrasi, lalu lintas, dan juga makanannya. Tionghoa Medan katanya hobi makan di luar. Mereka sangat menikmati makanan dan boleh dikata pemakan segalanya. Tidak heran apabila bisnis kuliner tumbuh subur di Medan. *Chinesse food* yang populer di Medan adalah *cha kue tiau*. Ada puluhan penjual makanan ini di berbagai kawasan. Konon kue bika ambon khas Medan dirintis oleh warga Tionghoa.

Setiawan (2018) menyebut, orang Tionghoa Medan sebagai komunitas memiliki ciri khas yang spesifik. Tionghoa Medan cenderung agresif, banyak akal, berkemauan keras, dan pantang menyerah. Konon karena sifat ini sebagian besar orang Tionghoa Medan berani berspekulasi dalam bisnis. Banyak di antara mereka juga yang merantau ke Jakarta dan meraih sukses. Pada tahun 2004 menjadi tahun kebangkitan politik bagi kalangan Tionghoa Medan ditandai dengan berhasilnya empat orang Tionghoa dari Sumatra Utara yang mendapatkan kursi di DPR. Etnis Tionghoa merupakan kelompok etnis ketiga terbesar di Medan yang diperhitungkan (Hamdani, 2012).

Orang Tionghoa di Sumatra memang tidak seperti di Jawa yang secara umum tampak tidak begitu banyak perbedaan. Setelah Aceh dan Medan, masyarakat Tionghoa Padang juga memiliki konstruksi kehidupan sosial yang khas. Setelah

ratusan tahun hidup di Padang, orang Tionghoa beradaptasi dan membentuk sistem kehidupan dan lingkungan yang unik. Masyarakat Tionghoa di Padang memiliki tiga struktur sosial utama, yakni yakni kongsi *gedang* (besar), kongsi *kecik* (kecil), dan kelenteng. Kelenteng See Hin Kiong yang berdiri sejak tahun 1841 berfungsi sebagai pengikat adat yang menaungi perkumpulan-perkumpulan masyarakat Tionghoa.

Untuk kongsi *gedang* ada dua, yakni Himpunan Bersatu Teguh atau Heng Beng Tong (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman atau Hok Tek Tong (HTT). Kedua kongsi ini bergerak di bidang yang sama, yakni sosial, kebudayaan, dan pemakaman. Sementara untuk kongsi *kecik* ada delapan yang merupakan perkumpulan berdasarkan marga (*she*) atau Jie She Kongsi. Kongsi *kecik* ini meliputi himpunan marga Liem (Kioe Liong Tong), Lie-Kwee (Long See Tong), Tan (Eng Chuan Tong), Go (Jan Leng Tong), Huang atau Oei (Kang Ha Tong), Tjoa & Kwa (Tjee Jang Tong), Wang atau Ong, dan Kho atau Xu (Makmur, 2018).

Sebagian besar orang Tionghoa yang ada di Padang adalah orang Hokkian yang kebanyakan pedagang. Pusat komunitasnya ada di Kampung Pondok atau Kampuang Cino. Sejak zaman Hindia Belanda, Kampung Pondok sudah menjadi kawasan pecinan. Kawasan ini meliputi Jalan Tanah Kongsi, Pondok, Niaga, Sei Bong, Pulau Karam, Kampung Sebelah, dan Batang Harau. Pasar Tanah Kongsi menjadi sentra dagang orang-orang Tionghoa. Saat ini masyarakat Tionghoa Padang masih banyak yang memegang teguh tradisi Tionghoa, terutama dalam hal perkawinan, kematian, dan sembahyang leluhur. Hal ini juga tidak lepas dari kuatnya kongsi-kongsi yang ada di sana.

Gambar 7. Gedung Himpunan Bersatu Teguh atau Heng Beng Tong (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman atau Hok Tek Tong (HTT)

Sumber: Dokumentasi penulis

Seperti orang Nias atau sebagian orang Dayak, orang Palembang ternyata memiliki ciri fisik yang identik dengan orang Tionghoa, yakni bermata sipit dan berkulit putih. Konon dalam kisah sejarah, Sultan Mahmud Badaruddin I yang memimpin Kesultanan Palembang (1724-1757) menikah dengan seorang putri Tionghoa. Hal ini lantas diikuti oleh bangsawan-bangsawan lainnya. Perkawinan seperti ini sudah terjadi sejak kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Palembang pada tahun 1407.

Komunitas Tionghoa di Palembang pertama kali menetap di Kampung Kapitan, pinggiran Sungai Musi, tepatnya di Seberang Ulu. Nama Kapitan berasal dari gelar Kapitan Tionghoa yang disematkan pada Tjoa Kie Tjuan yang diangkat sebagai kapitan pertama oleh Belanda pada tahun 1830. Ini berlanjut sampai pada keturunannya, yakni Tjoa Ham Ling tahun 1871. Dalam sejarah, orang Tionghoa di Palembang bahu membahu dengan orang Melayu menghadapi penjajahan Belanda. Tak heran apabila mereka

hidup dengan harmonis. Bahkan nama makanan khas Palembang, pempek, konon berasal dari panggilan apek (empek), yakni laki-laki Tionghoa berusia lanjut yang banyak menjajakan makanan itu.

Kajian menarik lainnya datang dari Bangka. Menurut Theo & Lie (2014) di pulau ini proses silang budaya dan pembauran antaretnis berlangsung dengan sangat unik. Ada istilah *thong ngin fan ngin jit jong*, artinya Tionghoa maupun Melayu sama saja. Lebih dari 300 tahun lamanya orang Tionghoa dan Melayu berbaur dan berinteraksi dengan harmonis. Bangka menjadi museum terbuka budaya Tionghoa, khususnya suku Hakka. Mereka berdatangan sejak abad ke-17 yang didominasi laki-laki. Mereka bekerja sebagai buruh tambang, utamanya timah.

Sementara etnis Tionghoa di Lampung yang kendati sudah cukup tua, namun sifatnya merupakan perkembangan dari komunitas-komunitas Tionghoa yang ada di Sumatra lainnya. Diduga mereka datang pada abad ke-13 sampai 14, namun apakah menjadikan Lampung sebagai tujuan atau sekadar persinggahan belum diketahui secara pasti. Apalagi di Lampung juga tidak didapati kampung pecinan, orang Tionghoa berbaur dengan masyarakat setempat. Akan tetapi, ada daerah bernama Tulang Bawang yang disebut-sebut telah menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok sejak berabad lalu. Peninggalan berupa pecahan keramik banyak ditemukan di sekitaran hulu Sungai Tulang Bawang (Agustina, 2016).

Berbagai Komunitas Khas

Kendati didominasi pengaruh Jawa (budaya Majapahit) dan India, namun Bali juga menyerap pengaruh Tionghoa. Menariknya hal ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Itu artinya, pengaruh Tionghoa di Bali telah memberi warna khas.

Salah satu tonggak peleburan budaya Bali dan Tionghoa adalah perkawinan Raja Jaya Pangus dan Kang Tjin We di akhir tahun 1200-an. Peristiwa ini lantas diabadikan dalam sosok sepasang barong landung. Barong landung lelaki menampilkan sosok Raja Jaya Pangus berkulit sawo matang cenderung hitam, berhidung besar, dan bermata bulat. Barong landung perempuan menampilkan sosok Kang Tjin We yang berkulit kuning, bermata sipit, cantik, dan tersenyum (Santosa, 2012: 2). Inikah yang membuat istilah barong (Bali) dan barongsai (Tionghoa) merujuk pada bentuk kesenian yang serupa? Barong di Bali juga memiliki tradisi *ngelawang*, yakni membawa barong melewati pintu-pintu rumah dan toko seperti barongsai.

Selain barong, di Bali juga lazim ditemukan pura-kelenteng. Kompleks rumah ibadah Hindu ini di dalamnya terdapat *pelinggih* (tempat pemujaan) Tionghoa bahkan kelenteng. Contohnya, di Pura Ulun Danu Batur, Tanjung Benoa dan Pura Agung Besakih. Benda suci yang menjadi salah satu sarana upakara atau ritual ada pula yang mengadopsi unsur Tionghoa seperti dupa dan uang kepeng. Uang kepeng menjadi wujud persembahan pada Tuhan. Itu terjadi sejak zaman dulu ketika uang kepeng masih berlaku, namun uniknya hingga kini umat Hindu di Bali masih memilih uang kepeng sebagai sarana upakara. Uang kepeng diyakini mengandung aspek kesucian, mitos, dan kekuatan magis yang tidak dimiliki mata uang lainnya (Harthawan, 2011). Penghormatan pada Betara Kawitan (leluhur) menjadi kunci dari harmoni Tionghoa dan Bali.

Komunitas Tionghoa yang khas di Indonesia juga ditunjukkan di Kalimantan, khususnya Singkawang. Kota ini termasuk yang terkemuka di antara kota-kota lain di Kalimantan Barat. Kehidupan masyarakat Tionghoa yang sangat kental di sini sungguh-sungguh digarap oleh

pemerintah daerahnya sebagai ikon pariwisata. Perayaan Imlek, Cap Go Meh, kehidupan masyarakat Tionghoa, kelenteng, dan lainnya menjadi faktor kuat penarik wisatawan. Orang-orang Tionghoa di Singkawang mayoritas orang Hakka atau Khek, sisanya Tiociu, Kanton, dan Hokkian (Rahmayani, 2014: 18). Kedatangan mereka di pesisir pantai Kalimantan menggunakan perahu jung dan membawa serta *toapekong* (patung dewa atau *pak kung*). Waktu mereka datang tidak diketahui pasti, namun pada abad ke-18 sudah dijumpai permukiman Tionghoa di Singkawang (Tanggok, 2016: 17).

Berdasarkan sumber mata pencarian, permukiman orang Tionghoa di Kalimantan Barat diklasifikasikan menjadi kelompok penambang emas dan kelompok tanaman perdagangan. Mereka yang bekerja di tambang, tinggal di daerah Montrado, Mandor, dan sekitarnya. Sementara lainnya banyak bermukim di kawasan pantai seperti Singkawang, Pemangkat, Mempawah, dan Pontianak. Mempawah dimungkinkan menjadi permukiman Tionghoa di Kalimantan Barat yang paling awal sejak tahun 1780. Singkawang sekarang ini dihuni oleh mayoritas Tionghoa. Bentuk tempat tinggal menjadi salah satu penanda yang membedakan antara Tionghoa dengan lainnya (Poerwanto, 2014).

Satu lagi komunitas Tionghoa yang khas di Indonesia dapat dijumpai di Tangerang, Banten. Berkulit gelap, mata lebar, dan mayoritas bekerja sebagai petani maupun buruh kasar. Sepintas seperti orang Sunda atau Betawi kebanyakan. Mereka ini disebut masyarakat Cina Benteng. Penyebutan ini mengacu pada keberadaan benteng VOC atau kongsi dagang Belanda yang berada di sisi timur Sungai Cisadane. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 untuk melindungi Batavia. Karena itu, masyarakat Tionghoa yang tinggal di sepanjang

alur Sungai Cisadane hingga Cikupa dan Tanjung Kait dikenal sebagai Cina Benteng. Kendati sebenarnya mereka jauh lebih dahulu ada sebelum benteng VOC dibangun. Masyarakat Cina Benteng memiliki darah Sunda maupun Betawi. Mereka juga membaur dengan warga sekitarnya dan hidup senasib (Santosa, 2012: 18).

Gambar 8. Pernikahan tradisional (*chio thau*) masyarakat Cina Benteng

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=lT3GjKvdCow

Rumah-rumah mereka kental dengan arsitektur Tionghoa bahkan memasang kertas jimat beraksara Tionghoa. Tentu tak ketinggalan meja abu tepat di depan pintu masuk dengan *hiolo* yang berisi dupa dengan asap mengepul. Upacara kematian juga masih sesuai tradisi nenek moyang. Peti matinya berbentuk *siu pan* dengan hitung-hitungan hari pemakaman yang sangat diperhatikan. Akan tetapi, uniknya mayoritas mengaku tidak tahu makna dari simbol atau ritual yang mereka jalankan. Mereka merasa sudah dari dahulu tradisi itu dilakukan sehingga tinggal meneruskan saja (Santosa, 2012; Wibisana, 2016). Secara ekonomi, warga Cina Benteng jauh dari stereotip etnis Tionghoa yang mapan, mereka justru hidup pas-pasan.

Tionghoa di Indonesia Timur

Kajian seputar masyarakat Tionghoa di Indonesia Timur terbilang langka. Kendati demikian bukan berarti di wilayah timur Indonesia ini tidak dijumpai masyarakat Tionghoa. Kita akan memulainya dari Manado, sebuah kota yang masyarakatnya sangat toleran di ujung utara Sulawesi ini. Kedatangan orang Tionghoa di Manado diperkirakan terjadi tahun 1655. Mereka didatangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk membantu mendirikan benteng pertahanan yang diberi nama *Fort Amsterdam*. Orang-orang Tionghoa ini lantas menetap dan membuat permukiman yang dikenal sebagai Kampung Cina di Manado Tengah. Mereka ini kebanyakan orang Hokkian, Kanton, Hakka, dan Hainan (Gunawan, 2013).

Masih di Sulawesi, Makassar juga memiliki komunitas Tionghoa yang menonjol dengan kekayaan budayanya yang sangat dipengaruhi budaya setempat. Setelah VOC berhasil merebut Makassar maka hubungan dagang Makassar dengan Tiongkok mulai dibuka. Orang-orang Tionghoa yang berdagang mulai berdatangan ke Makassar kendati jumlahnya terbatas. Cukup banyak dari mereka yang beragama Islam dan keluarga Nio tampak mendominasi. Keturunan Nio inilah yang nantinya menjadi orang-orang berpengaruh di masyarakat dan menjadi pemimpin komunitas Tionghoa di Makassar. Salah satunya yang terkenal adalah Kapitan Nio Tek Hoe yang menjabat tahun 1864-1876 (Wirawan, 2013).

Menjejakkan cerita tentang masyarakat Tionghoa berikutnya di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memang tak sesemarak di tempat lain, apalagi Jawa. Akan tetapi, di kawasan ini bukan berarti tidak dapat dijumpai orang Tionghoa. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), orang Tionghoa dapat dijumpai di kawasan Pecinan Ampenan yang sudah

berusia cukup tua. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), permukiman Tionghoa ada di Atapupu, Belu. Keberadaan mereka di sana sudah sejak 500 tahun yang lalu lewat perdagangan. Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1880 mengangkat Letnan Lay Djoe Lin sebagai kapitan di Atapupu. Kapitan selanjutnya ada Lay Leon Hie, Lay Phi Lan, dan Lay Soen Long. Pada masa itu komunitas Tionghoa tumbuh bersama dengan komunitas Arab dan penduduk setempat. Bahkan ada temuan menarik di Timor, NTT, Cina Timor (mereka enggan disebut Tionghoa) banyak yang melakukan pernikahan dengan kalangan keluarga istana atau kaum bangsawan setempat.

Di Maluku, orang Tionghoa masuk ke Ternate diduga sekitar tahun 1300-an. Kedatangan mereka antara lain disebabkan oleh pesatnya perdagangan rempah-rempah. Pengaruh budaya Tionghoa di Ternate juga tampak dari pakaian pengantin perempuan yang memiliki rumbai penutup wajah persis seperti pengantin perempuan Betawi. Di Ternate terdapat sistem kapitan Tionghoa. Ambon juga memiliki Kapitan Tionghoa terkenal bernama Njio Tjoen Ean (1860-1925). Tjoen Ean sangat berjasa sebagai orang pertama yang menerjemahkan buku-buku klasik Tionghoa ke bahasa Melayu. Usahanya ini dibantu oleh L.H.M. Thoriq seorang pengusaha Belanda-Jerman yang memiliki penerbitan dan percetakan Ambonsche Drukkerij. Setelah Thoriq pindah ke Malaysia, perusahaannya ini dijual kepada Ong Kie Hong yang sangat mendukung penerbitan buku-buku. Njio Tjoen Ean juga salah satu pendiri Sekolah Tionghoa Pai Tek Hak Tong di Ambon tahun 1903. Orang-orang Tionghoa di Ambon juga berjasa dalam pekabaran Injil lewat Gereja Hok Im Tong (kini menjadi GPM Betlehem) yang didirikan tahun 1930.

Gambar 9. Warga Papua turut mempersiapkan Imlek

Sumber: https://www.liputan6.com

Beda lagi Papua. Orang Tionghoa di Papua merayakan Imlek dengan menghias Taman Kota Imbi di Jayapura dengan lampion dan pernak-pernik lainnya. Uniknya, masyarakat Tionghoa di Papua yang melakukan kawin campur justru lebih mempertahankan tradisi Tionghoa. Keturunan Tionghoa di Papua kebanyakan disebut Prancis alias Peranakan China-Serui. Komunitas Prancis ini juga tak segan menyebut dirinya Ciko alias Cina Komin atau Cina Papua. Mereka yang kawin campur selain menggunakan marga Tionghoa dari ayahnya juga memakai nama marga Ibu. Misalnya, keluarga Thung memakai nama Raweyai, keluarga Chung memakai marga Erari, ada pula marga lainnya, seperti Imbiri, Wairara, Abba, Sengkui, Ayorbaba, dan lainnya.

Resistansi Tradisi

Gambar 10. Infografik *Cap Go Meh*

Sumber: https://travel.kompas.com

MERAYAKAN SEJARAH IMLEK

Syahdan ketika Dinasti Qing runtuh dan mengakhiri sejarah panjang kekaisaran pada tahun 1912, tarikh Masehi ditetapkan sebagai penanggalan umum di seluruh daratan Tiongkok. Selanjutnya, menyusul keputusan pemerintah baru, Republik Tiongkok, yang membatasi perayaan Tahun Baru Imlek karena dianggap sebagai warisan kekaisaran yang kuno. Akan tetapi, kenyataannya batasan-batasan itu gugur juga. Sebagai negeri berbasis pertanian, rakyat menganggap penanggalan berdasarkan perhitungan bulan (*imlek* atau *lunar calender*) lebih cocok digunakan.

Pasalnya, kehidupan pertanian sangat bergantung pada alam sehingga penanggalan *lunar* menjadi kebutuhan mutlak bagi petani. Perhitungan berdasarkan peredaran matahari (*janglek* atau *solar calender*) tidak begitu berpengaruh. Dengan mengamati peredaran bulan, petani dapat menentukan dimulainya musim tanam dan panen. Sebelum ditemukan teknologi penunjuk waktu yang tepat maka kemampuan *niteni* (intuisi) menjadi alat interpretasi jitu atas situasi alam.

Mayoritas penduduk Tiongkok bermatapencarian sebagai petani. Mereka menjadi golongan terbesar yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kerakyatan di negeri

itu. Sebagai sebuah tradisi lintas generasi yang erat dengan kehidupan ekonomi sehari-hari, Imlek tetap saja dirayakan meski dilarang oleh penguasa. Apalagi konon Tahun Baru Imlek yang resminya dihitung berdasarkan tahun kelahiran Nabi Khongcu (551 SM) sudah biasa dirayakan sejak tahun 600 SM.

Gambar 11. Sajian buah dalam sembahyang leluhur ketika Imlek

Sumber: https://bengcumenggugat.com/

Perayaan Imlek alias *chuen cia* (*sincia*) merupakan pesta untuk menyambut datangnya musim semi. Para petani seakan merasa hidup lagi setelah sejenak mengalami "kematian" pada musim dingin yang suram. Para petani kembali mempersiapkan tanah, bibit, dan perlengkapan pertanian untuk mulai bertanam. Perayaan Imlek dimaknai sebagai ungkapan syukur atas karunia dan anugerah Tuhan selama satu tahun sembari berharap kemakmuran yang berlimpah di tahun yang akan datang. Berbeda dengan situasi di Indonesia, perayaan Imlek yang selalu jatuh di bulan Januari atau Februari ditandai dengan curah hujan yang lebat dan

musim panen buah-buahan, seperti: rambutan, jeruk, durian, manggis, alpukat, sawo, dan lainnya.

Tahun baru pasti dijadikan sebagai patokan untuk merencanakan harapan pada tahun mendatang alias resolusi. Tentu pada masa itu, sebagai masyarakat tani yang masih sederhana, pergantian tahun pada prinsipnya menjadi momentum penanda bahwa manusia terikat dengan waktu. Bahwa yang lalu telah berlalu dan patut disyukuri, sementara yang mendatang harus disiapkan dengan baik. Tak heran mitosnya apabila pada malam menjelang Imlek bumi diguyur hujan lebat berarti akan ada harapan rezeki yang bakal mengalir di tahun yang baru. Mayoritas warga Tionghoa di Indonesia percaya dengan mitos ini dan tentu saja menanti-nantikannya.

Kebaikan Alam

Tahun Baru Imlek melambangkan keharmonisan dalam tata kehidupan di muka bumi. Selama perputaran waktu itu banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, terutama perubahan gejala alam. Manusia tunduk pada kekuasaan Tuhan, Sang Penguasa Jagad Raya. Manusia hanyalah makhluk kecil di tengah alam semesta yang begitu agungnya. Relasi erat dengan alam membuat perayaan Imlek menjadi momentum ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan alam. Syukur itu hendaknya diwujudkan dengan menjaga dan melestarikan alam.

Lingkungan alam adalah harta kita bersama, warisan seluruh umat manusia, dan tanggung jawab semua orang. Untuk itu, perlu visi perubahan relasi manusia dengan alam dan antarmanusia yang secara universal mengajak seluruh umat manusia agar tergerak menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama. Apalagi ternyata selama ini telah tercipta utang ekologis antara Utara dan Selatan. Negara-negara

Selatan yang mayoritas berada di daerah tropis memiliki potensi hutan dan kekayaan alam yang berkontribusi penting bagi revitalisasi lingkungan hidup. Padahal polusi, kebakaran hutan, pembalakan liar, hingga disfungsi sungai juga menjadi masalah serius di tengah kelembaman hukum yang semakin masif.

Akhirnya, di tengah krisis relasi antarumat dewasa ini dibutuhkan misi pemersatu seperti upaya pemulihan bumi (*heal the world*). Setiap pemimpin umat beragama perlu mengundang semua orang keluar dari zona nyaman untuk menghadapi berbagai perubahan nyata dewasa ini, termasuk bagi umat yang merayakan Imlek, semangat memulihkan bumi juga diamini dengan memaknai Imlek. Perayaan Imlek tidak melulu identik dengan kemeriahan, namun juga menjadi momentum untuk berefleksi atas anugerah alam ini.

Akutnya, kerusakan lingkungan dan kesadaran manusia yang masih sulit bertumbuh hendaknya mendorong setiap umat beriman untuk berbuat sesuatu sekalipun sederhana. Imlek mengusung makna kebaikan alam dan menggerakkan upaya timbal balik dari manusia guna memulihkan relasinya dengan alam semesta sebagai rumah bersama. Imlek sejatinya perayaan syukur dan hormat kepada Sang Khalik atas karunia alam semesta yang telah memberi anugerah kehidupan bagi setiap insan. Makna ini tentu sifatnya sangat universal dan relevan dengan setiap orang. Oleh karena itu, perayaan Imlek merupakan perayaan tradisi dan bukan semata-mata terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu saja.

Kekangan dan Kebebasan

Perayaan Imlek di Indonesia juga pernah mengalami pembatasan bahkan pelarangan. ebebasan merayakan Imlek sekarang ini tak dapat lepas dari sejarah panjangnya. Tionghoa di Indonesia memiliki kisah unik yang pada kurun

waktu tertentu sempat dilanda praktik diskriminasi. Meski demikian, tak berarti berbicara soal Tionghoa melulu berkutat pada rentetan aturan dan kebijakan diskriminatif pada masa lalu, termasuk soal batasan merayakan Imlek pada masa Orde Baru. Jika hal itu yang terus ditekankan maka niscaya Tionghoa senantiasa dipandang sebagai korban.

Dalam konteks sekarang butuh perspektif baru dalam mengkajinya. Keberadaan Tionghoa dalam relasi sosial di masyarakat dewasa ini perlu dipandang sebagai bagian dari keharmonisan bersama yang sejatinya sudah dihidupi sejak dulu. Salah satu tokoh nasional yang menaruh perhatian terhadap upaya ini adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beliau dengan tegas menolak persepsi bahwa Tionghoa merupakan *foreign subject* atau *outsider*. Menurutnya, keharmonisan yang masih terus diupayakan sesungguhnya telah dihidupi oleh nenek moyang di zaman Nusantara.

Dalam perspektif itulah, kita perlu menilik sejarah. Kenyataan sejarah menyimpan catatan bahwa Tionghoa telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sepenuhnya. Wawasan pluralisme sudah dihayati oleh bangsa Indonesia sejak masa lampau. Buktinya, semboyan Binneka Tunggal Ika kali pertama muncul pada zaman Majapahit sebagaimana tersurat dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Ketika itu komunitas Tionghoa telah menjadi bagian dari masyarakat Nusantara. Dalam penyebaran Islam pun, Tionghoa ikut ambil peranan.

Pada masa kolonialisme, orang-orang Tionghoa bergabung dalam laskar koalisi Tionghoa-Jawa pimpinan Kapitan Sepanjang (Khe Panjang alias Tay Wan Soey) melawan dominasi kekuasaan Belanda tahun 1740-1743. Memasuki masa pergerakan juga berdiri Partai Tionghoa Indonesia pimpinan Liem Koen Hian. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 selain digelar di rumah seorang Tionghoa,

Sie Kong Liong, juga dihadiri setidaknya empat pemuda Tionghoa. Demikian pula saat awal kemerdekaan, beberapa tokoh Tionghoa turut didapuk menjadi anggota BPUPK maupun PPKI.

Hadirnya Tionghoa dalam setiap lintas masa perjalanan sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa kemajemukan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Keberagaman yang ada merupakan rahmat yang telah digariskan oleh Tuhan. Menolak kemajemukan berarti mengingkari pemberian Illahi. Gus Dur memandang perbedaan sebagai *ethic of dignity*. Sebagai karunia Tuhan, Gus Dur optimis bahwa kemajemukan tidak akan memecah belah namun justru akan membawa manfaat bagi bangsa.

Sejak sebelum menjadi presiden, Gus Dur telah menaruh perhatian pada orang-orang yang termarginalkan termasuk Tionghoa. Gus Dur pernah membela Budi Wijaya dan Lanny Guito, pasangan pengantin beragama Konghucu yang ditolak pencatatan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Surabaya. Polemik ini kelak mendorong pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama keenam sehingga kebebasan bagi para pemeluknya untuk beribadah lebih terjamin.

Tidak sampai di situ, kala Tionghoa ditempatkan sebagai *economic animal*, Gus Dur menganjurkan agar orang Tionghoa dapat memiliki akses dalam semua bidang kehidupan tanpa pembatasan. Saat menjadi presiden, Gus Dur mengakomodasi keresahan masyarakat Tionghoa yang merasa terpinggirkan. Bahkan Gus Dur berani menyatakan bahwa dalam dirinya mengalir darah Tionghoa bermarga Tan. Inilah cara Gus Dur menabur keharmonisan sebagai bentuk *nation building* Indonesia.

Bahkan warga Tionghoa di Semarang, setelah sebelumnya memohon izin kepada keluarga dan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), membuat Sinci untuk mendiang Gus Dur.

Sinci adalah papan nama seseorang yang telah tiada untuk penghormatan. Papan nama bertuliskan K.H. Abdurrahman Wahid ini diletakkan di altar gedung Perkumpulan Sosial Boen Hian Tong atau Rasa Dharma, Gang Pinggir, Semarang. Hal ini menjadi salah satu wujud untuk memberi penghormatan pada Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

Penghormatan itu tidak berlebihan. Pasalnya saat Gus Dur menjadi Presiden RI keempat, katup penyumbat kebebasan warga Tionghoa terbuka. Ada dua kebijakan penting yang dikeluarkan Gus Dur terkait keberadaan Tionghoa di Indonesia. *Pertama*, Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Dalam inpres yang dikeluarkan oleh penguasa Orde Baru ini dinyatakan bahwa segala wujud budaya dan tradisi Tionghoa seperti Tahun Baru Imlek, pertunjukan wayang potehi, barongsai, dan sebagainya hanya boleh dirayakan di kalangan keluarga di dalam rumah atau kelenteng.

Kedua, Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Tidak lama kemudian Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa Reformasi ini pula Konghucu diakui sebagai agama keenam di Indonesia sehingga kebebasan bagi para pemeluknya untuk beribadah lebih terjamin.

Kebijakan Gus Dur ini sangat bertolak belakang dengan perlakuan diskriminatif yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Saat ini hingar-bingar dan gegap-gembita perayaan Tahun Baru Imlek sangat terasa. Bahkan menariknya setelah Tahun Baru Imlek resmi dinyatakan sebagai hari libur nasional, banyak warga bukan Tionghoa ikut pula

menikmati kemeriahannya. Tentu suasana ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Gambar 12. Atraksi liong dan barongsai saat Imlek di Taman Safari Cisarua Bogor

Sumber: https://www.liputan6.com/

Melalui kebijakan diskriminatif dan asimilasi yang dipaksakan, Orde Baru telah menjerumuskan masyarakat Tionghoa menjadi *economic animal* yang memiliki sifat apolitis dan asosial. Masyarakat Tionghoa merasa sebagai *outsider* yang pada akhirnya semakin menutup diri dan cenderung memosisikan dirinya secara eksklusif dalam masyarakat. Sikap apolitis dan asosial ini akhirnya menjadi turun-temurun dan selalu muncul perasaan curiga dalam diri warga Tionghoa sendiri bahwa dirinya akan selalu mendapat perlakuan diskriminatif dari orang lain. Karenanya, generasi baru Tionghoa kebanyakan lebih memilih profesi yang menurut mereka "aman" dan "sesuai jatah" seperti pedagang, pengusaha, pegawai bank, pemborong, dan sejenisnya. Jarang yang melirik pekerjaan sebagai guru, dosen, pegawai negeri sipil, pejabat pemerintahan, polri, maupun militer.

Sejak zaman kejayaan Nusantara, masyarakat Tionghoa telah turut mewarnai kehidupan bernegara saat itu. Tionghoa

merupakan bagian dari entitas kebangsaan Indonesia seperti halnya suku bangsa lainnya. Di era reformasi sekarang ini, dengan hak dan kewajiban yang sama, warga Tionghoa mulai berani terjun ke berbagai bidang, termasuk politik. Keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap hal ini menunjukkan kedewasaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Setelah Reformasi 1998 bermunculan berbagai perkumpulan masyarakat Tionghoa, seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI). Belum lagi perkumpulan sejenis yang sifatnya lokal. Pada ranah politik juga muncul beberapa partai Tionghoa, yaitu Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) yang berhasil menjadi partai peserta Pemilu 1999.

Partisipasi warga Tionghoa dalam kehidupan bernegara makin dipertegas. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahirlah UU Kewarganegaraan Indonesia yang baru Nomor 12 Tahun 2006. UU ini menempatkan warga Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga negara lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hubungan warga Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya juga lebih terbuka. Budaya Tionghoa seperti Barongsai, Wayang Potehi, perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan lainnya saat ini telah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Penerimaan yang baik ini dibaca oleh masyarakat Tionghoa sebagai kesempatan untuk terlibat pula dalam politik praktis. Dalam panggung politik nasional sejak tahun 2000-an bermunculan nama seperti Kwik Kian Gie, Tjandra Wijaya Wong, Murdaya Po, Daniel Budi Setiawan, Rudianto Tjen, Alvin Lie, Marie Elka Pangestu, Enggartiasto

Lukita, dan lainnya. Dalam kabinet beberapa nama juga sempat menduduki jabatan sebagai menteri baik pada masa pemerintahan Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo.

Sejak Pemilu 2004 belum satu pun partai Tionghoa yang kembali berhasil lolos sebagai peserta pemilu. Meskipun demikian, sejumlah calon legislatif Tionghoa tersebar dalam berbagai partai politik. Beberapa pengamat menilai bahwa keikutsertaan Tionghoa dalam pemilu cenderung sekadar untuk menarik pemilih (*vote getter*) dan sebagai pendukung dana kampanye partai. Akan tetapi, apa pun itu kehadiran warga Tionghoa dalam politik praktis menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam partisipasi politik Tionghoa, mereka tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, tetapi juga peduli pada nasib bangsa dan negara. Hal ini juga menunjukkan pembauran yang alami bahwa dalam alam demokrasi upaya warga Tionghoa untuk berpolitik tidak bersifat eksklusif melalui suatu partai bercirikan Tionghoa, namun terintegrasi dalam partai-partai politik yang sudah ada.

Di tingkat politik lokal juga muncul tokoh-tokoh Tionghoa yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Paling fenomenal tentu saja Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Tjung Ban Hok (Ahok) yang pernah duduk sebagai Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, Wakil Gubernur, hingga Gubernur DKI Jakarta. Adiknya, Basuri Tjahaja Purnama, juga berhasil menjadi Bupati Belitung Timur. Di Kalimantan Barat terpilih pula Christiandy Sanjaya (Bong Hou San) sebagai wakil gubernur dan Hasan Karman (Bong Sau Fan) sebagai walikota Singkawang, termasuk juga Bupati Banjarnegara yang sempat viral, Budhi Sarwono alias Kho Wing Tjien.

Seiring dengan kebebasan perayaan Imlek maupun budaya Tionghoa lainnya, kini masyarakat umum pun telah mafhum dan dapat menerima kehadiran Tionghoa dalam berbagai lini kehidupan. Budaya Tionghoa bebas tampil dan menghibur semua kalangan di berbagai tempat secara terbuka. Hampir tiap kota besar menggelar festival maupun acara lainnya untuk merayakan Imlek secara meriah. Tempat-tempat umum tak canggung memasang hiasan Imlek berwarna merah berbagai rupa. *Best practice* semacam ini menjadi indikator tumbuhnya keharmonisan masyarakat multikultural dan harus terus dikembangkan di tengah krisis persatuan dewasa ini.

MANIS LENGKET KUE KERANJANG

Suasana berbeda kini terasa setiap menjelang Tahun Baru Imlek, berbagai pusat perbelanjaan, *mall*, toko, bank maupun tempat umum lainnya berlomba mempercantik diri dengan simbol-simbol Imlek. Dominasi warna merah, ditambah lampion merah, *angpao-angpao* yang bergelantungan di tangkai bunga *meihwa*, dan pernak-pernik lainnya semakin menyemarakkan Imlek. Pusat perbelanjaan menjual aneka kue keranjang (*nian gao*), kembang api, berbagai hiasan, dan pakaian-pakaian khas Tionghoa (*qipao, cheongsam*). Berbagai simbol ini tidak semata-mata hendak menunjukkan ciri khas Imlek, namun juga mengandung makna mendalam. Tulisan ini mengkaji secara khusus makna dari makanan khas Imlek, yakni kue keranjang.

Simbol Kerukunan

Sehari sebelum Tahun Baru Imlek, keluarga Tionghoa mulai sibuk mengatur persiapan untuk menyambutnya. Mereka mengadakan sembahyang untuk mendoakan leluhur keluarganya. Sebelum ritual sembahyang dimulai, orang

harus bersih lahir dan batin. Selain itu, juga disiapkan meja altar di ruang depan untuk meletakkan foto para leluhur, *hiolo* (tempat hio), dan berbagai sajian. Dalam sembahyang ini, kue keranjang (*nian gao*) menjadi sajian wajib dengan berbagai macam ukuran. *Nian gao* berasal dari bahasa Mandarin, *nian* artinya tahun dan *gao* artinya kue. Dalam bahasa Hokkian disebut *Thiam Pan*.

Dalam persembahyangan, kue keranjang disusun bertingkat meninggi. Semakin ke atas bentuk kuenya semakin mengecil. Ini dimaknai adanya harapan peningkatan rezeki (kemakmuran) di tahun yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi kue keranjang yang digunakan dalam sembahyang juga menandakan kemakmuran keluarga. Kue keranjang biasanya diletakkan di pojok kanan altar dengan sarung hiasan dari kertas warna merah atau kadang terbuat dari sulaman. Disebut kue keranjang karena cetakan untuk membuat kue itu berbentuk keranjang.

Menurut legenda, pembuatan kue keranjang bermula ketika Tiongkok mengalami paceklik. Penduduk di daerah yang mengalami kekeringan mengungsi ke daerah subur. Dalam perjalanan panjang itu mereka membuat makanan yang tahan lama dan mengenyangkan. Bahan dasar kue keranjang adalah tepung ketan dan gula. Gula dicairkan kemudian diaduk bersama dengan tepung ketan dan dikukus. Adonan ini dicetak dengan menggunakan keranjang-keranjang bulat berdiameter 8-10 cm yang telah dilapisi dengan daun pisang atau plastik kemudian dibungkus. Kue keranjang teksturnya kenyal mirip seperti dodol. Kue keranjang dapat bertahan dengan kualitas yang tetap baik hingga enam bulan, bahkan hampir satu tahun.

Selain harapan akan datangnya kemakmuran, rasa kue keranjang yang sangat manis dan lengket hendak memberi makna pada eratnya persatuan dan kerukunan. Dalam filosofi

Tionghoa dikatakan bahwa rumpun bambu yang tumbuh bersama dan lebat tidak akan mudah roboh oleh tiupan angin. Orang Jawa juga menggambarkan kuatnya persatuan melalui ikatan lidi. Satu batang lidi dengan mudah dipatahkan, namun seikat batang lidi bakal menjadi lentur dan liat tak mudah patah. Layaknya rumpun bambu yang tidak tumbuh sendiri dan batang lidi yang berguna tatkala diikat menjadi satu maka manusia pun demikian. Sebagai *homo socius*, sikap menghargai *liyan* sangat diperlukan dalam hidup sosial yang sangat *plural*.

Gambar 13. Sajian kue keranjang

Sumber: Dokumentasi penulis

Bentuk kue keranjang yang bulat juga menjadi simbol kebulatan tekad dalam hidup bersama di masyarakat. Kue keranjang memiliki makna filosofis yang mendalam bagi hubungan sosial antarmanusia. Persaudaraan merupakan nilai yang sangat universal dan dianut oleh setiap orang. Awetnya kue keranjang juga dapat menjadi simbol bahwa persaudaraan hendaknya tak mudah lekang oleh waktu. Agama Konghucu juga mengajarkan hidup guyup dan sejahtera dengan semangat "di empat penjuru lautan semua bersaudara".

Nilai-nilai persaudaraan ini dapat ditemukan dalam Grebeg Sudiro yang diselenggarakan di Pasar Gede Solo

setiap menjelang peringatan Imlek. Pawai budaya Jawa-Tionghoa ini menunjukkan simbol toleransi dan kerukunan. Simbol-simbol itu tampak pada gunungan kue keranjang yang dikirab, kemudian diperebutkan oleh masyarakat yang hadir. Kue keranjang, produk makanan khas Tionghoa, tampil kompak dengan *gunungan sebagai* tradisi khas Jawa.

Kehadiran Imlek yang dahulu sempat dilarang, kini memberi ajakan untuk menemukan kembali makna Pancasila yang mulai bergeser. Keanekaragaman yang ada mendorong kita untuk bisa memahami orang lain sebagai bagian dari bangsa ini. Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan bahwa mengenali kelompok-kelompok minoritas dengan baik akan membawa pada pemahaman yang jelas tentang Indonesia yang sejati. Inilah manifestasi dari kesadaran kita akan kenyataan kebhinnekaan yang tidak mungkin diingkari. Imlek tak sekadar menawarkan euforia kemeriahan, namun terlebih semangat hidup damai dan harmonis. Sebuah harapan mulia yang disimbolkan melalui sepotong kue keranjang.

CENG BENG, BAKTI PADA ORANG TUA

Masyarakat Tionghoa sarat akan tradisi dan budaya. Tidak hanya kalangan totok, namun juga peranakan masih cukup banyak yang memelihara tradisi yang dianggap utama. Setelah merayakan *Sincia* alias Tahun Baru Imlek, lima belas hari kemudian disusul *Cap Go Meh* sebagai penutup rangkaian perayaan. Mengenai *Cap Go Meh* akan dibahas tersendiri dalam tulisan lain yang dikaitkan dengan kekayaan akulturasi budaya di Indonesia. Kini akan dibahas tradisi pada bulan ketiga penanggalan Imlek (*Sha Gwee*), yakni *Ceng Beng* (*Qing Ming*) atau bersih kubur. *Ceng Beng* dalam penanggalan Masehi jatuh antara tanggal 4-5 April setiap tahunnya.

Ceng Beng artinya bersih atau terang (*Ceng* berarti bersih dan *Beng* berarti terang). Pengertian ini hampir mirip dengan saat menjelang Imlek. Sebelum merayakan Imlek, orang Tionghoa akan membersihkan rumah dari sampah dan debu. Tujuannya untuk mempersiapkan diri bersih lahir batin menyambut tahun yang baru. Demikian pula saat *Ceng Beng* tiba, orang Tionghoa tidak hanya membersihkan

rumah, namun juga kuburan leluhur. Ini sebagai bentuk penghormatan dan bakti pada leluhur (orang tua) yang telah meninggal.

Asal Mula

Menurut cerita rakyat, tradisi *Ceng Beng* berawal dari zaman kekaisaran Zhu Yuan Zhang (Chu Goan Ciang), pendiri Dinasti Ming (1368-1644). Zhu Yuan Zhang berasal dari keluarga miskin yang ketika dewasa bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah untuk menggulingkan Dinasti Yuan (Mongol). Berkat kecakapannya, Dinasti Yuan (1271-1368) berhasil ditaklukan. Zhu Yuan Zhang kemudian mendirikan pemerintahan baru, yakni Dinasti Ming dan diangkat menjadi kaisar yang pertama.

Setelah menjadi kaisar, Zhu Yuan Zhang ingat akan desa dan kedua orang tuanya. Dia pun kembali ke desa, namun sayang kedua orang tuanya telah meninggal dan tidak diketahui keberadaan makamnya. Untuk mengetahui keberadaan makam orang tuanya, kaisar memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melakukan ziarah kubur dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing pada hari yang ditentukan. Setiap makam yang telah diziarahi dan dibersihkan wajib diberi tanda berupa kertas panjang yang terbuat dari merang (*tee coa*).

Setelah semua rakyat selesai melaksanakan titah tersebut, kaisar memeriksa makam yang ada di desanya dan menemukan beberapa makam tanpa tanda yang belum dibersihkan. Kaisar menziarahi makam-makam tersebut dengan keyakinan bahwa di antaranya pasti terdapat makam kedua orang tuanya, sanak saudara, dan leluhurnya. Sejak saat itu kebiasaan ziarah dan bersih kubur dilakukan setiap tahunnya, termasuk memberi tanda makam yang telah dibersihkan dengan *tee coa*.

Ketika pagi tiba di hari *Ceng Beng*, keluarga Tionghoa akan mempersiapkan diri. Mereka membawa hio, lilin, bunga, kertas *tee coa*, kertas uang-uangan (*gin coa*-kertas perak atau *kim coa*-kertas emas), dan tak jarang juga membawa makanan untuk sesaji. Makanan sesaji di antaranya tiga jenis daging (*sam seng*), nasi, buah, manisan, dan arak. Beberapa keluarga Tionghoa modern biasanya cukup membawa hio, lilin, bunga, dan kertas *tee coa*. Sesampai di pemakaman, terlebih dahulu kubur dibersihkan. Setelah itu, lilin dan hio dinyalakan kemudian mereka mendoakan para leluhur. Terakhir bunga ditabur, kertas uang-uangan dibakar, dan setelah dibersihkan maka *bongpay* (nisan) diberi tanda dengan *tee coa*.

Gambar 14. *Bongpay* yang telah dibersihkan dan ditandai dengan *tee coa*

Sumber: https://travel.tempo.co/

Wujud Berbakti

Ceng Beng merupakan tanda bakti anak kepada orang tua atau leluhur yang telah tiada. Karena itu, selagi orang tua masih sehat, alangkah baiknya bila setiap anak mampu menunjukkan baktinya. Miris rasanya tatkala pernah terdengar kasus anak yang menggugat ibunya ke pengadilan

di Garut, Jawa Barat. Persoalannya gara-gara utang piutang keluarga tahun 2001 silam sebesar Rp 21,5 juta. Setelah sekian tahun belum dilunasi, si anak dan suaminya ini tega menggugat ibu kandungnya sendiri tak tanggung-tanggung sebesar Rp1,8 miliar sebagai ganti rugi.

Kasus ini tentu sangat mencengangkan. Uang telah membutakan segalanya. Si anak seakan tidak ingat betapa selama ini orang tuanya begitu menyayangi dengan melahirkan, membesarkan, merawat, dan membiayai segala keperluan hingga jadi orang. Bukan membalas budi baik dan segala pengorbanan orang tua selama ini, malahan mengajukan orang tuanya ke pengadilan dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Padahal persoalan utang piutang keluarga sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan penuh keikhlasan.

Kasus menggegerkan yang menyedot perhatian banyak pihak ini jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai tradisi *Ceng Beng*. Belajar dari *Ceng Beng*, tak hanya wujud bakti pada orang tua, namun *Ceng Beng* juga sarana mempererat persaudaraan antarkeluarga dan kerabat. Tradisi *Ceng Beng* memiliki makna mendalam terkait dengan ikatan keluarga. Anak-anak dikenalkan dengan para leluhurnya, kakek-neneknya, juga keluarga besar lainnya, terutama yang telah tiada. Apalagi bila *Ceng Beng* dilakukan bersama seluruh sanak saudara maka dapat menjadi momentum silaturahmi. *Ceng Beng* adalah reuni keluarga baik yang masih hidup maupun dengan yang sudah meninggal.

Sayangnya, banyak generasi muda Tionghoa yang sudah mulai meninggalkan tradisi ini. Alasan utamanya karena tidak lagi menganut kepercayaan leluhur. Sebagian besar kalangan muda sudah menganut agama modern dan tidak lagi memedulikan untuk menjenguk makam leluhur, hanya orang-orang tua saja yang masih berusaha berkunjung

ke makam leluhur meski tanpa kehadiran anak cucu. Tentu pada usia senja, kesedihan orang tua semakin bertambah karena khawatir siapa kelak yang akan mengurus makam leluhurnya. Di masa depan sangat dimungkinkan akan semakin sedikit orang Tionghoa yang mau memperhatikan tradisi *Ceng Beng* (Santosa, 2012: 66).

Tak heran banyak kalangan Tionghoa yang memilih cara kremasi dan membiarkan abu jenazah dilarung ke laut. Pasalnya, abu jenazah yang disimpan di rumah abu (di-*bongpay*-kan) juga masih perlu dirawat oleh anak cucunya. Apalagi bila dimakamkan, banyak yang khawatir kuburannya akan telantar. Terlepas dari cara yang dipilih setelah meninggal, fenomena lunturnya kepedulian generasi muda terhadap tradisi dan penghormatan kepada generasi tua tentu menjadi keprihatinan. *Ceng Beng* memang bukan pesta seperti dalam perayaan Imlek. Akan tetapi, *Ceng Beng* mengajarkan nilai penghormatan pada tradisi yang dapat menguatkan jati diri. Inikah hari-hari terakhir tradisi *Ceng Beng*?

PEH CUN DALAM FESTIVAL

Duan Wu Jie atau yang dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia disebut Peh Cun diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 (*Go Gwee*) menurut kalender Imlek. Ada banyak versi mengenai asal-usul perayaan Peh Cun. Salah satunya yang paling terkenal, yaitu untuk memperingati suatu kisah patriotisme pada zaman Tiongkok kuno. Dalam buku sejarah Shi Ji, dikisahkan ada seorang pujangga yang menjadi pejabat tinggi di Kerajaan Chu yang letaknya di daerah selatan sekitar tahun 475-221 SM bernama Qu Yuan. Tiongkok saat itu terbagi menjadi tujuh kerajaan yang saling berperang. Kerajaan Qin di barat laut kedudukannya semakin kuat dan mengancam keamanan kerajaan-kerajaan lainnya. Qu Yuan kemudian mengusulkan pada Raja Chu agar bersekutu dengan Kerajaan Qi untuk bersama-sama memerangi Kerajaan Qin. Akan tetapi, keluarga raja dan beberapa pejabat lain yang memihak Kerajaan Qin menjadi tidak senang dengan Qu Yuan dan berusaha menyingkirkannya.

Upaya penyingkiran itu berhasil. Qu Yuan dipecat dari jabatannya dan hidup dalam pengasingan. Pada tahun 278 SM, Kerajaan Chu akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Qin. Qu Yuan sangat sedih dan terpukul. Kekecewaannya yang

mendalam ini membuat Qu Yuan bunuh diri dengan terjun ke sungai Mi Luo pada tanggal 5 *Go Gwee* tahun itu. Sebelum bunuh diri, Qu Yuan sempat menulis sebuah puisi yang berisi ungkapan kecemasannya terhadap bahaya peperangan yang terjadi. Qu Yuan khawatir akan keselamatan rakyat dan merasa geram dengan para penguasa kerajaan yang hanya memikirkan dirinya sendiri.

Gambar 15. Sajian bakcang saat Peh Cun tiba

Sumber: tridharma.or.id/festival-perayaan-duan-wu-bak-cang/

Rakyat yang bersimpati dan merasa kehilangan kemudian mencari jenazah Qu Yuan di sungai tersebut. Mereka melemparkan nasi dan makanan lainnya ke dalam sungai agar ikan dan udang tidak mengganggu jenazah Qu Yuan. Untuk menjaga supaya makanan itu tidak dimakan naga maka dibungkuslah dengan daun bambu yang banyak tumbuh di Tiongkok. Makanan itu dikenal dengan sebutan bakcang. Sekarang umumnya bakcang terbuat dari beras ketan berisi daging maupun tanpa isi (*kwecang*) yang dimakan dengan cairan gula dan dibungkus dengan daun bambu berbentuk prisma segitiga.

Selain bakcang, perayaan Peh Cun juga dimeriahkan dengan lomba perahu naga (*Dragon Boat Festival*). Perahu naga ini biasanya didayung secara beregu yang jumlahnya disesuaikan dengan panjang perahu. Konon festival perahu naga ini dilatarbelakangi kisah para penduduk sekitar Sungai Mi Luo yang berusaha mencari jenazah Qu Yuan. Lambat laun kegiatan itu justru menjadi tradisi penduduk setempat yang setiap tanggal 5 *Go Gwee* mengadakan lomba dayung untuk memperingati wafatnya Qu Yuan sebagai bagian dari perayaan Peh Cun.

Kesadaran Multikultural

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai cara untuk merayakan Peh Cun. Di Yogyakarta, Peh Cun biasa dihelat di Laguna Depok dan Pantai Parangtritis, Bantul yang biasanya jatuh pada pertengahan tahun. Berbagai kegiatan seperti lomba perahu naga, barongsai, dan melukis berhasil menarik antusiasme pengunjung. Puncak acara Peh Cun diisi dengan doa keselamatan untuk bangsa. Ritual ini unik karena tersedia tumpeng dan kelengkapannya seperti acara selamatan ala Jawa. Setelah itu, dilanjutkan dengan tradisi mendirikan telur. Pada puncak Peh Cun, posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar sehingga terjadi daya tarik-menarik yang bisa membuat telur berdiri tegak bertumpu pada bulatannya.

Sementara itu, di Palembang biasa diadakan lomba dayung perahu naga yang digelar di Sungai Musi. Berbagai kegiatan semacam ini bukan saja positif bagi dunia pariwisata, namun juga bermanfaat bagi pendidikan multikultural masyarakat. Perayaan Peh Cun sebagai aset budaya Tionghoa telah menjadi bagian dari kebhinnekaan bangsa Indonesia. Pelestarian budaya bukanlah eksklusivisme kesukuan atau lokalitas tertentu, namun justru menghadirkan kenyataan multikultural yang ada guna mempererat integrasi bangsa.

Selain Peh Cun, hampir semua perayaan Tionghoa identik dengan makanan khas. Pada bulan ke-8 Imlek ada perayaan Tiong Ciu Ciat dengan kue tiong ciu phia (*moon cake*) sebagai hidangan. Sembahyang Tang Ceh di bulan ke-10 atau 11 menyuguhkan wedang ronde. Biasanya bulan ini sudah memasuki musim penghujan sehingga hidangan hangat sangatlah cocok. Dalam kalender masehi, sembahyang Tang Ceh biasanya jatuh pada 22 Desember. Sembahyang Rebutan (*Cio Ko*) di bulan ke-6 juga menyuguhkan samseng atau tiga sajian daging, yakni ayam/bebek, babi, dan ikan bandeng.

MIRIS PEWARIS WAYANG POTEHI

Selain makanan khas, hari raya Tionghoa semakin semarak dengan pertunjukan seni budaya. Tidak seperti pertunjukan liong atau barongsai yang banyak pemain dan penontonnya, wayang potehi hampir tidak dikenali lagi. Seni pertunjukan boneka tradisional ini berasal dari Fujian, daerah asal utama imigran Tionghoa Indonesia. Potehi berasal dari kata *poo* (kain), *tay* (kantong), dan *hie* (wayang). Potehi adalah boneka kayu berukuran kecil, bagian kepala tersambung dengan kantong kain dan di luarnya dikenakan pakaian karakter wayang. Tangan dalang dimasukkan ke dalam kantong untuk mengendalikan gerak boneka pada bagian kepala dan kedua tangan (Kong, 1999: 319).

Konon wayang potehi berawal dari kisah lima orang narapidana mati pada masa Dinasti Tang (617-918). Menurut Wardani & Widiyastuti (2013: 70-71) sambil menunggu eksekusi tiba, mereka mengisi waktu dengan memainkan sepotong kain berbentuk persegi panjang yang salah satu ujungnya diikat menyerupai bentuk kepala. Gerakan boneka kain ini diiringi musik dari alat-alat makan yang ada. Kaisar

mengetahuinya dan membebaskan mereka agar dapat mengembangkan kesenian yang baru itu. Wayang potehi disebut mengadopsi kesenian opera Peking dalam bentuk mini. Boneka-boneka dirias secara unik dengan arti simbolis sesuai karakternya.

Seiring perjalanan waktu, fungsi hiburan dari wayang potehi berkembang pula menjadi fungsi ritual. Pertunjukan wayang potehi sering kali dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan rasa syukur, pujian, dan doa pada para dewa maupun leluhur. Pementasan wayang potehi diyakini akan mendatangkan berkah dan rezeki yang melimpah. Terkait dengan fungsi ritual, wayang potehi biasa dimainkan di depan kelenteng dengan terlebih dahulu memanjatkan doa. Sekarang ini pentas wayang potehi dapat dilakukan di mana saja dalam fungsinya sebagai sarana hiburan.

Wayang potehi termasuk ke dalam jenis wayang tiga dimensi. Varian wayang tiga dimensi di Indonesia cukup banyak. Mastuti (2014: 40) menyebutnya antara lain wayang golek dari Jawa Barat, wayang unyil dari Betawi, wayang dangkluk dari Bali, wayang si gale-gale dari Tapanuli, wayang kaet/gaet dari Riau, wayang cicak di Tanjung Pinang, wayang baco-puraga di Makassar, dan wayang gantung/marionette di Kalimantan Barat. Beberapa di antaranya juga mendapat pengaruh Tionghoa sehingga pada beberapa sisi mirip dengan wayang potehi.

Wayang cicak misalnya, diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa di Tanjung Pinang. Wayang baco-puraga juga dimainkan seperti wayang potehi dengan cerita lakon kehidupan dan relasi sehari-hari masyarakat Tionghoa Makassar. Wayang gantung alias *chiao theu* yang berkembang di Singkawang, Kalimantan Barat malahan menggunakan bahasa Hakka sebagai pengantar. Sementara wayang potehi umumnya lebih berkembang di Jawa. Secara khusus,

di Yogyakarta juga ditemukan wayang kulit Cina-Jawa (wacinwa) karya Gan Thwan Sing (Kuardhani, 2012: 13–20).

Di Batavia, pada abad ke-17, pertunjukan wayang potehi sudah populer. Lantas wayang potehi mulai disebarluaskan oleh suku Hokkian hingga ke Semarang dan Surabaya sekitar tahun 1880-an. Tak aneh bila sebelum masa Orde Baru, pertunjukan wayang potehi sangat akrab dengan masyarakat, termasuk di Jawa. Tercatat sekitar tahun 1960-an di pasar malam Sekaten Yogyakarta, sebuah teater kecil didirikan khusus untuk pertunjukan wayang potehi. Pada tahun 1963 di Semarang juga dengan mudah dijumpai panggung wayang potehi yang diletakkan di atas sebuah gerobak sapi. Desain panggung ini unik karena tidak perlu bongkar pasang bila berpindah tempat pentas.

Gambar 16. Panggung wayang potehi dalam Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Ketandan

Sumber: Dokumentasi penulis

Selain itu pentas wayang potehi dijumpai dalam perayaan-perayaan hari besar masyarakat Tionghoa atau upacara kaul dan hajatan yang diadakan oleh masyarakat

Tionghoa. Wardani & Widiyastuti (2013: 75) menjelaskan fungsi wayang potehi tidak terbatas pada masalah keagamaan, namun juga pernikahan, ruwatan, supitan, dan lainnya. Waktu pementasannya disesuaikan dengan lamanya hajatan, bisa beberapa hari atau beberapa jam.

Potehi Dilarang!

Setelah meletusnya Peristiwa 1965, masyarakat Tionghoa ikut terkena getahnya. Dengan tuduhan masih berafiliasi pada Republik Rakyat Tiongkok yang komunis maka Tionghoa di Indonesia memperoleh perlakuan diskriminatif. Kebijakan asimilasi diterapkan untuk melebur Tionghoa dengan masyarakat lokal setempat. Khusus mengenai budaya Tionghoa, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang pelarangan perayaan ibadah, adat, dan budaya Tionghoa di muka umum, melainkan hanya boleh dilakukan secara intern dalam keluarga atau perorangan.

Pelarangan ini tentu menimbulkan dampak yang signifikan pula bagi perkembangan wayang potehi. Wardani & Widiyastuti (2013: 72) mewawancarai salah seorang *sehu* bernama Thio Tiong Gie. Menurut dalang senior ini sejak terbitnya inpres selama masa Orde Baru, beliau hanya satu kali mementaskan wayang potehi di hadapan umum. Saat itu beliau terdesak karena ada seorang anak laki-laki yang bersikeras tidak mau disunat apabila tidak mengundang pertunjukan wayang potehi. Sejak keluarnya pelarangan tersebut, wayang potehi hanya dipentaskan di kompleks kelenteng pada perayaan-perayaan tertentu saja.

Berkurangnya tawaran panggung di muka umum, membuat pergelaran wayang potehi mengalami perubahan format pertunjukan. Wayang potehi tampil secara serial, biasanya berlangsung selama dua jam pada sore hari (pukul 15.00-17.00) dan dua jam pada malam hari (pukul 19.00-21.00)

dengan lakon berbeda pada masing-masing sesi. Satu kisah pada setiap serial baru selesai secara keseluruhan setelah satu hingga tiga bulan. Penentu lamanya pentas tergantung pada jumlah dana yang terkumpul dari para donatur yang memiliki nazar. Berbeda dengan wayang kulit misalnya, penanggap harus membayar keseluruhan pementasan untuk satu lakon cerita sekaligus dalam durasi enam sampai tujuh jam lamanya (semalam suntuk).

Situasi sulit ini berpengaruh juga pada pakem wayang potehi. Suluk yang wajib diucapkan dalam bahasa Hokkian menjadi hafalan khususnya bagi dalang yang tidak lagi menguasai bahasa Hokkian. Apalagi kemudian banyak *sehu* yang bukan dari kalangan Tionghoa. Sementara mereka yang Tionghoa cenderung apatis dan enggan melestarikan wayang potehi. Selain secara ekonomis profesi *sehu* kurang menjanjikan, tekanan politik Orde Baru juga menjadi ancaman yang menakutkan. Tak jarang suluk mengalami pergeseran dari kata-kata aslinya (misalnya, keliru pelafalan) dan tidak sesuai lagi dengan pakem.

Keberadaan wayang potehi yang telah berabad-abad di Jawa secara alami membawanya pada nuansa akulturasi. Perjumpaan produk budaya dan manusia pendukungnya yang berbeda satu sama lain menghasilkan kolaborasi yang harmonis. Meskipun demikian, wayang potehi tidak diperbolehkan berkembang bebas pada masa Orde Baru. Penguasa saat itu memberi stigma *liyan* (*the other*) pada wayang potehi. Sekalipun sudah banyak para penghidupnya (dalang, pemusik, penonton) dari kalangan Jawa, namun wayang potehi tetap dianggap sebagai "milik" Tionghoa dan bukan bagian dari budaya Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, pentas wayang potehi tidak lagi merujuk pada kesenian opera Peking. Para dalang banyak memperoleh wawasan baru dari wayang Jawa seperti

wayang kulit maupun wayang golek. Selain itu, karena wayang potehi banyak terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah maka akulturasi dengan budaya Jawa begitu kental. Penggunaan bahasa, dialek, alat musik, hingga lagu-lagu selingan pertunjukan mengadopsi budaya setempat. Tentu tidak menutup peluang terjadinya kolaborasi dengan budaya lokal selain Jawa. Apalagi terdapat beberapa bentuk kesenian serupa wayang potehi yang tersebar di berbagai daerah (Mastuti, 2014: 40).

Penggunaan bahasa dan dialek setempat, misalnya Jawa sering digunakan saat bagian dagelan. Akan tetapi, tidak seperti pementasan wayang kulit yang saat adegan *goro-goro* dalang berani menyelipkan guyonan bernada satire tentang persoalan-persoalan politik pemerintah. Seorang *sehu* saat itu tidak berani menyinggung masalah politik. Jangankan menyindir pemerintah, mendapat izin pementasan wayang potehi di lingkungan kelenteng saja bukan perkara mudah.

Selain bahasa dan dialek, akulturasi terjadi pada penggunaan alat musik. Alat musik Tionghoa dalam pertunjukan wayang potehi, yakni rebab (*erhu*), kecapi, terompet, suling (*bien siauw*), tambur, gembreng besar (*toa loo*), dan kayu kotak berlubang (*piak ko*). Sementara alat musik Jawa yang merupakan bagian dari gamelan juga sering digunakan antara lain *bonang*, *saron*, *kendang*, dan *gong*. Lagu selingan sering kali menggunakan lagu berbahasa Jawa, namun dengan irama musik Tionghoa.

Dialog budaya dalam pentas wayang potehi juga dapat diciptakan melalui lakon yang diangkat. Umumnya, tema lakon mengisahkan cerita kepahlawanan, sejarah, kerajaan, hingga kehidupan para dewa. Beberapa tema yang sering dipentaskan masih mengacu pada cerita-cerita Tiongkok seperti legenda *Samkok* (tiga kerajaan), *Poei Sie Giok, Sie Djien Kui Ceng Tang, Sie Djien Kui Ceng See, Soen Go Kong*

(Kera Sakti) alias *See Yu* (Perjalanan ke Barat), dan beberapa lainnya. Dibanding wayang kulit, memang wayang potehi masih minim kreasi cerita (lakon *carangan* atau gubahan).

Mastuti (2014: 50–51) menyebut ada dua faktor utama yang menghambat perkembangan wayang potehi, yakni Peristiwa 1965 dan Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Situasi ini menyebabkan setiap pertunjukan wayang potehi, khususnya di kota besar memerlukan surat izin dari aparat keamanan setempat. Satu-satunya yang sedikit berbeda terdapat di Gudo, sebuah desa di Jawa Timur, sentimen politik relatif kecil dan tidak memengaruhi perkembangan wayang potehi. Bahkan kini Gudo menjadi basis utama wayang potehi dan para *sehu*. Akan tetapi, secara umum, masa Orde Baru menjadi masa suram bagi perkembangan dan pelestarian wayang potehi.

Putusnya Generasi Pewaris Wayang Potehi

Selama lebih dari tiga dekade, budaya Tionghoa menghadapi upaya genosida. Akibatnya, paling tidak satu generasi Tionghoa mengalami kegamangan terhadap identitas budayanya sendiri. Angin segar reformasi telah membawa budaya Tionghoa berani tampil tanpa malu-malu di muka umum. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan terhadap budaya Tionghoa melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000. Sejak itulah budaya Tionghoa termasuk wayang potehi mulai menggeliat.

Euforia kebebasan budaya Tionghoa tidak lantas menambah jumlah peminat wayang potehi secara signifikan. Kekangan selama tiga dekade lebih telah membuat wayang potehi miskin pewaris apalagi kader penerus sebagai dalang dan pemusik. Mastuti (2014: 140–141) mendata, pemelihara budaya wayang potehi di Indonesia hanya sekitar 54 orang

yang terdiri dari 14 orang dalang dan sisanya asisten dalang maupun pemusik. Menariknya banyak di antara mereka merupakan orang Jawa yang sebelumnya tidak memiliki ikatan terhadap tradisi Tionghoa dan wayang potehi.

Menurut Mastuti (2014: 104), para *sehu* berdarah Jawa ini kebanyakan berasal dari kota-kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Tulungagung. Awalnya, mereka mengikuti dalang Tionghoa dengan menjadi pemain musik wayang potehi. Lama-kelamaan mereka dipercaya sebagai asisten dalang. Selanjutnya, mereka mulai belajar mendalang dari dalang senior, terutama *sehu* Tionghoa. Kemahiran mereka semakin berkembang secara autodidak dari pengalaman menggantikan dalang inti yang sedang berhalangan.

Kurangnya minat generasi muda Tionghoa terhadap wayang potehi dipengaruhi erat oleh faktor ekonomis dan politis. Profesi dalang wayang potehi tidak menjanjikan penghasilan yang tetap. Kenyataan itu diperparah dengan faktor politis selama Orde Baru yang telah berhasil memati-surikan wayang potehi. Padahal keberadaan sebuah karya seni sangat bergantung pada masyarakat pendukungnya. Pelestarian wayang potehi terutama sangat bergantung pada pewarisnya, yakni masyarakat meliputi dalang, pemusik, perajin boneka potehi, penonton, hingga pemerhati dan *maecenas*.

Tentu selain masyarakat pendukung, pewarisan budaya hanya akan terjadi tatkala ada kebebasan berekspresi. Alam reformasi telah menghembuskan angin kebebasan bagi budaya Tionghoa. Karenanya, muncullah upaya *resinicization* atau pentionghoaan kembali yang bermakna hidupnya kembali minat pada akar-akar budaya Tionghoa (Chang, 2012: 81). Akan tetapi, terlanjur putusnya mata rantai satu generasi mengakibatkan reifikasi ketionghoaan tidaklah

mudah. Kesadaran diri sebagai Tionghoa barangkali masih ada, namun minat generasi muda untuk menghidupi kembali budayanya tidaklah lekat.

Gambar 17. Pameran boneka potehi dalam Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Ketandan

Sumber: Dokumentasi penulis

Upaya reifikasi ini akan semakin mengalami kendala tatkala budaya Tionghoa masih dipandang sebagai produk yang harus dikenalkan dan diterima begitu saja. Kenyataan ini tidak dapat dimungkiri dengan kuatnya pandangan esensialisme-diri. Kleden (1986) berpandangan bahwa

budaya perlu dilihat sebagai sebuah proses bukan sekadar produk. Oleh karena itu, jangan melulu ditilik dari perspektif esensialisme karena hanya akan melahirkan pemelihara dan penikmat budaya. Padahal wayang potehi sekarang ini hampir kehabisan masyarakat pendukungnya.

Dengan memahami budaya sebagai proses yang terus terbentuk maka generasi muda harus dibawa untuk mengenal warisan budaya sesuai dengan konteks saat ini. Wayang potehi sebagai budaya lokal harus memelihara identitas yang terbuka, cair, dan dinamis dalam pergulatannya di tengah budaya nasional dan global. Lagi pula, akibat tekanan politik penguasa pada masa lalu dan seiring perkembangan zaman, masyarakat pendukungnya juga telah mengalami perubahan identitas diri yang tak dapat dihindari.

Sebagai salah satu warisan budaya, wayang potehi diharapkan dapat tetap terpelihara sesuai dengan konteks zamannya. Kedinamisan dan fleksibilitas untuk tetap bertahan di tengah arus serba-kekinian sejatinya merupakan wujud dari keunggulan budaya itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menyambung kembali rantai pewarisan budaya wayang potehi antara lain (1) wayang potehi bukan produk budaya yang final dan kaku, namun dinamis dan cair; (2) wayang potehi harus dapat dapat diterima banyak kalangan termasuk generasi muda; dan (3) wayang potehi merupakan sarana mengembangkan daya kreatif.

Hal terpenting lainnya, yakni harus disadari bersama bahwa wayang potehi juga merupakan bagian dari budaya Nasional. Wayang potehi harus ditempatkan sejajar dengan kesenian wayang lainnya. Dalam buku petunjuk Museum Wayang yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984, nama wayang potehi tidak disebut. Satu-satunya yang mungkin mendekati ialah wayang golek

Canton Cina (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984: 78). Ini menegaskan bahwa pada masa Orde Baru, betapa tersistematisnya upaya pengasingan wayang potehi dari khazanah budaya Nasional.

Tak kalah penting, pengembangan budaya Tionghoa lewat pendidikan. Selama ini para calon dalang wayang potehi belajar secara autodidak atau *nyantrik* dengan dalang senior. Akibatnya, tidak ada upaya yang terlembaga untuk melestarikan wayang potehi. Secara formal hendaknya keterampilan mendalang wayang potehi juga dapat dipelajari di institut-institut seni, misalnya pada jurusan pedalangan. Harapannya dapat muncul generasi penerus budaya yang sungguh terlibat dan *melu handarbeni* (merasa ikut memiliki). Dengan demikian, wayang potehi tidak berhenti sebagai produk budaya, namun menjadi proses budaya yang dihidupi dari generasi ke generasi.

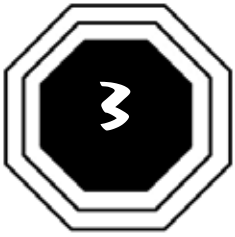

Pewaris Identitas

Gambar 18. Infografik 10 menu tionghoa di Nusantara

Sumber: https://www.tionghoa.info/

KEPLEK ILAT DAPUR NYONYA

Bicara soal *keplek ilat*, orang Tionghoa memang juaranya. Konon lidah orang Tionghoa tak bisa dibohongi. Layak apabila sejarah kuliner mencatat masyarakat Tionghoa dan budayanya memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam bidang gastronomi sejak ratusan tahun yang lalu. Tak harus menunggu digelarnya festival kuliner pun, setiap hari dengan mudah menu Tionghoa kita jumpai di pinggir jalan dan sudut-sudut gang. Ada banyak makanan khas Tionghoa yang kini telah menjadi menu makanan semua orang. Setiap lidah pasti akrab dengan makanan ber-*genre* Tionghoa seperti nasi goreng, segala macam masakan berbahan mie, capcai, bakso, soto, pangsit, siomay, tahu, bakwan, bakpao, bakpia, onde-onde, wingko, lunpia, cakue, dan lainnya. Makanan-makanan universal ini banyak penggemarnya dan mudah dijumpai dengan banyak ragam di seluruh pelosok daerah.

Gambar 19. Lunpia gang lombok Semarang yang legendaris

Sumber: https://travel.tribunnews.com/

Jika merunut sejarah kuliner maka para *hoakiau* (pendatang Tionghoa) mungkin saja awalnya mencoba makanan setempat, namun ternyata kurang cocok dengan seleranya. Orang Tionghoa berasal dari beragam suku, seperti Hokkian, Khek, dan lainnya, kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Tak heran apabila di tiap daerah dapat dijumpai berbagai wujud budaya kuliner yang spesifik sebagai hasil akulturasi dengan kuliner Tionghoa. Mereka mencoba membuat bahan makanan seperti di tempat asalnya. Akibatnya, banyak bahan maupun pelengkap makanan yang dikenalkan oleh orang-orang Tionghoa menjadi familiar bagi masyarakat umum. Misalnya, mie, miehun, soun, tahu, kembang tahu, kecap, taoge, tauco, bermacam-macam jamur, dan sebagainya.

Lombard (1996) dalam bukunya *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia* menyebut beberapa sayuran yang dikenalkan oleh masyarakat Tionghoa. Kucai dan lokio sejenis bawang, lobak dan pecai alias sawi, caisim sejenis kubis, kailan sejenis bayam, termasuk juga cincau (*Cyclaea barbata*), yakni tanaman rambat yang daunnya digunakan untuk membuat semacam

agar-agar. Beberapa tanaman buah juga dibawa oleh Tionghoa ke Nusantara, seperti lengkeng dan lici. Tanaman lici yang dibawa orang-orang Tionghoa ini banyak dibudidayakan di Bali.

Tanaman sumber protein yang juga dikenalkan oleh orang Tionghoa, yakni kacang hijau dan hasil olahannya seperti taoge (kecambah), tahu, dan tauco (sejenis bumbu masak). Sebuah fakta menarik mengenai keberadaan tahu pertama kalinya di Jawa dikemukakan oleh Rahman (2016: 20). Prasasti Watukara dari Jawa Timur (bertarikh 824 C atau 902 M) menyebut kata tahu sebagai salah satu jenis makanan saat itu. Tahu ditafsirkan merujuk pada pengaruh Tionghoa. Kata *tahu* dalam prasasti itu diserap dari bahasa Hokkian atau dialek Tiongkok selatan (Hainan), *tau-hu*. Jika benar begitu, berarti pada abad 10 M kedelai telah dimanfaatkan sebagai jenis makanan yang dibuat melalui teknik pengolahan tertentu di Jawa.

Budidaya tanaman kacang-kacangan lantas berkembang di Indonesia. Masyarakat Tionghoa dengan penduduk setempat membudidayakannya dan mengolahnya menjadi sejenis saus yang disebut dengan kecap. Sejak itu kuliner Nusantara mulai mengenal penggunaan kecap baik itu kecap manis, asin, dan turunan lainnya di masa sekarang ini. Kasus budidaya besar yang dilakukan di Indonesia terjadi pada tanaman perkebunan, khususnya teh. Tanaman untuk minuman yang sangat familier di masyarakat ini juga dibawa oleh para pendatang Tionghoa.

Lombard (1996: 321) juga menyebut fakta menarik lain bahwa dalam kelengkapan masak juga banyak alat yang berasal dari masyarakat Tionghoa. Seperti kuali, penggorengan, pisau besar, mangkok, piring, dan beberapa lainnya, kecuali cobek dan ulegan, besek, serta barang anyaman lainnya. Anglo yang terbuat dari tembikar dan

menggunakan bahan bakar arang juga dibawa oleh pendatang Tionghoa dari Fujian. Selain peralatan masak, diperkenalkan pula macam-macam cara memasak. Paling tidak ada tiga cara memasak dominan yang diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa, yakni ca, tim, dan kuah.

Persatuan dalam Persotoan

Patut diduga bahwa orang Tionghoa-lah yang memperkenalkan makanan berkuah. Salah satunya yang kemudian dikenal di setiap daerah dengan sekian banyak varian, yakni soto. Lombard (1996: 320) berpendapat bahwa soto berawal dari *caodu* (*jao to*) yang artinya jeroan (hewan) berempah. Makanan ini pertama kali populer di Semarang pada abad ke-19. Pada perkembangannya lantas bercampur dengan tradisi kuliner lokal. Jejak Tionghoa tampak dari isian bihun atau soun, taoge, taburan bawang putih, dan tauco yang digunakan di beberapa daerah.

Akulturasi budaya ternyata sangat kaya dalam semangkuk kecil soto. Selain asal-usul Tionghoa, penggunaan kari pada soto sulung, soto madura, dan soto betawi mencerminkan adanya perpaduan dengan tradisi kuliner India. Sementara penggunaan kunyit, koya, daun salam, gula merah, tempe goreng, bawang merah goreng, emping, dan rambak menunjukkan peran akulturasi kuliner Jawa. Ketumbar, seledri, kubis, kentang, dan tomat mewakili budaya Eropa (Barat), termasuk menikmati soto dengan perkedel juga meniru gaya Barat yang melengkapi sup dengan perkedel.

Uniknya kini Indonesia mengenal beragam jenis soto. Berawal dari dapur keluarga Tionghoa yang kemudian menjajakan soto keliling dan mulai merakyat sekitar tahun 1920-an. Misalnya, soto semarang, soto lamongan, soto madura, soto kediri, soto betawi, dan lainnya. Setiap daerah dikenal istilah soto khas untuk membedakan cita rasa, seperti

soto seger, soto bangkong, soto rempah, soto grombyang, soto sulung, soto ambengan, soto tangkar, dan lain sebagainya. Di beberapa daerah juga menyebut soto dengan nama berbeda-beda, seperti sroto sokaraja, banyumas, wangon, purwokerto, dan purbalingga, taoto pekalongan, dan coto makassar. Ada persatuan dalam persotoan.

Gambar 20. Soto khas Gombong bikinan Pak Pardi, Kemukus dengan isian yang sangat kaya, dilengkapi *gethuk* bercita rasa gurih

Sumber: Dokumentasi penulis

Menyantap soto dengan sate, tak hanya kelezatan yang semakin terasa, namun juga perpaduan budaya di dalamnya. Sate diduga berasal dari paduan kuliner Arab, India, sekaligus Tionghoa. Di Arab, daging kambing yang diolah dengan cara dibakar dikenal dengan istilah *shish kebab* yang populer sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah. Sebelum sampai di Nusantara, kebab mendapat pengaruh India. Sementara dari namanya diduga merupakan pelokalan dari bahasa Tionghoa, *sa tae bak* artinya tiga potong daging. Kini sate tidak hanya terbuat dari daging. Ada sate ikan, sate telur puyuh, sate kerang, sate usus, sate kere, dan lain sebagainya.

Saham Tionghoa dalam Kuliner Nusantara

Cerita lain datang dari nikmatnya nasi goreng. Konon nasi goreng diperkirakan sudah ada sejak 4000 SM di kota Yangzhou, Provinsi Jiangsu Timur pada masa Dinasti Sui. Nasi goreng memanfaatkan nasi, bawang, kecap, telur, dan hampir semua bahan lainnya. Munculnya nasi goreng berawal dari budaya masyarakat Tionghoa yang tidak senang menyantap makanan dingin, namun juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena itu, nasi dingin sisa semalam digoreng keesokan harinya dengan tambahan bumbu dan ternyata menghasilkan citarasa yang nikmat. Karena itu, sejatinya nasi goreng semula disajikan untuk sarapan. Beda dengan sekarang ketika nasi goreng menjelma menjadi makanan yang biasa dijual malam hari.

Pada masa kolonial, nasi goreng menjadi salah satu santapan kelas elite. Rahman (2016b) mengungkap dalam hidangan meja berisi sajian masakan lokal Hindia (*Indische rijsttafel*) dapat dipastikan tersedia nasi goreng. Kini nasi goreng dengan mudah dapat ditemui di tenda-tenda kaki lima pinggir jalan dan telah menjadi makanan yang begitu merakyat. Varian nasi goreng juga semakin beragam yang dipadupadankan dengan bumbu dan lauk khas daerah. Mulai kencur, terasi, ikan asin, teri, kambing, petai, nanas, rendang, dan lainnya. Akibatnya, nasi goreng pun ikut menyematkan lokalitasnya, seperti nasi goreng surabaya, nasi goreng madura, nasi goreng semarangan, dan lainnya.

Inilah satu sisi yang menarik dalam akulturasi kuliner, berbagai makanan yang awalnya kental pengaruh Tionghoa, di kemudian hari justru ada yang menjelma menjadi makanan khas daerah di Indonesia. Sebut saja yang begitu terkenal bakpia pathuk khas Yogyakarta, lunpia Semarang, tahu Sumedang, mie kocok dan siomay khas Bandung, termasuk

juga ketoprak Jakarta yang berbahan taoge, tahu, dan bersiram kecap. Masih banyak makanan lain yang menjadi kekhasan daerah setempat yang ternyata banyak mendapat anasir Tionghoa. Anasir-anasir Tionghoa dalam makanan-makanan itu tak membuatnya menjadi asing, melainkan justru semakin akrab di lidah.

Tak ayal, soal kuliner Nusantara, saham Tionghoa dapat dibilang paling besar dibanding lainnya. *Pertama*, soal iklim yang memiliki kesamaan antara Indonesia dengan Tiongkok. Sayuran yang tumbuh dan dapat disantap di kedua daerah ini sama. Beda halnya dengan Arab dan India yang beriklim subtropis lebih senang dengan makanan beraroma rempah yang kuat. *Kedua*, masakan Tionghoa dari segi rasanya lebih bisa diterima lidah masyarakat secara umum. *Ketiga*, orang Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak sehingga pengaruhnya juga lebih besar.

Juru masaknya pun tak melulu Tionghoa, sekarang ini banyak mereka yang bukan Tionghoa tak kalah piawai dalam mengolah makanan. Selain bakpia, Yogyakarta juga begitu terkenal dengan bakmi Jawa-nya. Hampir di setiap sudut kota ini hingga ke desa mudah dijumpai tenda kaki lima yang menyediakan masakan bakmi Jawa. Bakmi yang khas Tionghoa ini ternyata tak kaku diadopsi sebagai makanan Jawa. Dalam warungnya pun tak hanya mie yang tersedia, namun juga saudaranya yang lain seperti nasi goreng, capcai, dan lainnya.

Kala matahari ambruk ke barat, malam di kota-kota Pulau Jawa dari kota besar hingga kota kecil juga terkenal dengan wedang rondenya. Di Solo, minuman yang biasa disajikan dalam mangkok kecil khas gerabah Tionghoa ini disebut juga wedang dongo. Bulatan-bulatan manis nan kenyal yang terbuat dari tepung ketan dengan siraman kuah jahe hangat ini merupakan makanan tradisional Tionghoa. Bahkan bukan

minuman sembarangan karena dijadikan sajian khas dalam sembahyang Tang Ceh. Wedang ronde alias *tang yuan* kini telah jadi minuman yang biasa diteguk siapa saja. Berbagai varian dan *topping* kini ditambahkan mulai dari agar-agar, kolang-kaling, kacang, roti, dan lainnya.

Gambar 21. Wedang ronde Cap Kauw King, Wotgandul Semarang

Sumber: Dokumentasi penulis

Di sisi lain, orang-orang Tionghoa Indonesia juga sudah begitu akrab dengan menu-menu lokal. Jangan salah, gudeg yang asli Jawa pun menjadi semakin nikmat disantap dengan tahu sebagai tambahan lauk. Rawon dari Jawa Timur semakin segar dengan taburan taoge. Tahu dan taoge diperkenalkan oleh pendatang Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa soal *keplek ilat* tak mengenal sekat. Cita rasa Jawa dan Tionghoa telah menyatu dan mengalir dalam kenikmatan kuliner yang begitu beragam. Keragaman tercipta karena masyarakat pendukung kedua budaya saling berinteraksi dan beradaptasi membentuk akulturasi budaya.

Semarak kuliner Jawa-Tionghoa mengajak masyarakat luas untuk menyadari lekatnya akulturasi budaya yang perlu terus ditumbuhkan. Adagium Pramoedya Ananta Toer, bahwa Tionghoa adalah orang asing yang tidak asing, perlu direvisi. Tionghoa memang bukan orang asing bahkan telah menyatu-larut dalam kebangsaan Indonesia.

Tak ubahnya perpaduan cita rasa dalam kuliner Jawa-Tionghoa. Di balik terciptanya olahan-olahan yang berpadu lezat tentu tak lepas dari peran penting perempuan. Cita rasa Tionghoa yang mulai mengakrabi lidah setiap orang sekarang ini bersumber dari kepulan asap dapur rumah tangga. Tempat kaum perempuan, khususnya para ibu, menyiapkan menu favorit sehari-hari untuk keluarga. Sayang minimnya catatan sejarah mengenai perempuan menjadi kesulitan tersendiri untuk mengungkap peran mereka dalam perkembangan kuliner Tionghoa.

Dapur Nyonya

Perempuan Tionghoa selama ini tampak diam termenung di sudut terdalam historiografi lokal maupun nasional. Meij (2009) mengungkapkan kenyataan pahit bahwa perempuan Tionghoa seolah menyandang identitas yang tidak mereka kehendaki. Terlahir sebagai perempuan Tionghoa berarti siap menjadi kaum *double marginal*. *Pertama*, masih kuatnya kecenderungan *androsentric* akan memaksa perempuan menempati posisi *second sex*. *Kedua*, Tionghoa menjadi kelompok minoritas yang selama ini kenyang menerima perlakuan diskriminatif.

Bersyukur pada era kini, kemerdekaan tradisi dan budaya Tionghoa telah diproklamirkan. Di lain pihak, pandangan modern juga membawa perempuan pada perjuangan akan hak-haknya. Situasi ini juga secara umum terjadi di kalangan perempuan Tionghoa yang pada masanya pernah tunduk dalam relasi kuasa akibat sistem paternalistik. Pada masa kolonialisme, benturan budaya Timur dan Barat mau tak mau memberi pengaruh sedemikian kuat terhadap masyarakat Tionghoa kala itu akibat perbedaan kelas sosial.

Pada masa lalu di Tiongkok, mekanisme kontrol laki-laki terhadap perempuan dilakukan dengan membebat kaki perempuan sejak usia dini. Pengikatan kaki ini dikenal dengan istilah *foot binding*. Tradisi ini menjadi cermin *prestise* budaya dan peradaban Tiongkok. Dalam konteks masyarakat Tionghoa Indonesia tentu saja tradisi yang menyiratkan status kebangsawanan dan tingkat ekonomi ini jauh dari praktik nyata.

Perempuan Tionghoa Indonesia dengan gempuran berbagai budaya yang ada justru mampu *survive* hingga melahirkan budaya yang berbeda. Perempuan Tionghoa Indonesia berhasil menemukan identitas kulturalnya sendiri. Munculnya berbagai olahan kuliner Tinghoa-Jawa juga tak lepas dari tangan dingin perempuan Tionghoa. Makanan asal negeri Tiongkok dimodifikasi dengan cita rasa khas yang berbeda. Oleh karena itu, tak ayal setiap daerah di Indonesia pasti mengenal makanan Tionghoa yang serupa, namun dengan pengaruh cita rasa lokal masing-masing. Lantas menjelma menjadi resep rahasia dapur nyonya di tiap-tiap keluarga Tionghoa.

LENGGAK-LENGGOK KEBAYA ENCIM

Ampat penari kian ke mari/jalan berlenggang, aduh .../
Langkah gayanya menurut suara/irama gambang
Sambil bernyanyi, jongkok berdiri/kaki melintang, aduh .../
Sungguh jenaka tari mereka/tari berdendang
Bersuka ria, gelak tertawa/semua orang/
kar'na hati tertarik gerak-gerik/si tukang gendang
Ampat penari membikin hati/menjadi senang, aduh .../
itulah dia malam gembira/Gambang Semarang

Lagu "*Ampat Penari*" atau yang terkenal sebagai "*Gambang Semarang*" ini diciptakan oleh Oei Yok Siang, buaya keroncong, pada tahun 1940. Liriknya ditulis oleh Sidik Pramono. Lagu ini biasa dimainkan dalam kesenian Gambang Semarang. Dahulu *Gambang Semarang* dimainkan oleh penari dan penyanyi Tionghoa peranakan. Salah satunya yang terkenal, yakni Ong Sam Nio (Nyah Sam). Dengan berkebaya nyonya berbatik semarangan, para penari berlenggak-lenggok diiringi kecrek, suling, *tehyan*, *konyahyan*, *sukong*, bonang, gambang, dan gong. Tampaklah bila *Gambang Semarang* mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa-Jawa. Kini lagu

dan tarian itu telah menjadi kekayaan budaya dari Semarang. Bahkan menjadi *icon* Semarang yang diperdengarkan di setiap stasiun kereta api di kawasan Semarang.

Tulisan ini tidak bicara mengenai *Gambang Semarang*, namun menyoroti pakaian nyonya yang dikenakan para penari dalam *Gambang Semarang*. Munculnya kebaya dan batik nyonya tidak lepas dari pengaruh Jawa. Pada mulanya hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perempuan Tionghoa di Jawa memakai baju kurung dengan bawahan sarung batik. Baju kurung berasal dari pakaian orang Melayu yang saat itu sudah tersebar di mana-mana. Baju kurung terbuat dari bahan yang tidak transparan, mempunyai belahan di bagian lehernya, disemat dengan semacam bros atau peniti *tak* (Intisari & Indonesia, 2009: 140).

Setelah baju kurung, muncul baju panjang dengan bukaan di bagian depan. Potongannya mirip kebaya Panjang, tapi tidak disambung di bagian bahu dan lengan. Bagian dadanya dirapatkan dengan tiga buah peniti mas atau perak berantai halus. Polanya masih dua dimensi. Ini yang membedakan baju panjang dengan kebaya yang sudah tiga dimensi. Kendati disebut mirip pakaian wayang cokek, para pecinta baju kurung saat itu menganggap baju kurung lebih tertutup dan sopan dipakai daripada baju panjang (Intisari & Indonesia, 2009: 141). Baju panjang menjadi cikal bakal pakaian yang disebut kebaya dan batik nyonya.

Berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), organisasi modern Tionghoa, pada tahun 1900 menumbuhkan kesadaran identitas. Pada periode ini berkembang baju *pehki* dan *hoakun*. Baju *pehki* berwarna putih dengan bukaan samping kanan, panjangnya sepinggul. Baju *pehki* dikenakan bersama *hoakun*, semacam rok lipit yang dipakai di luar celana panjang. Baju modern ini populer di kalangan gadis-gadis muda THHK. Sementara generasi tua tetap bertahan dengan baju panjang

dan sarung batik. Kenyataannya baju *pehki* dan *hoakun* juga hanya bertahan sebentar. Baju panjang juga lama-kelamaan memendek, untuk selanjutnya menjadi kebaya nyonya yang pendek dan berenda (Intisari & Indonesia, 2009: 148).

Kebaya renda dibuat dari bahan transparan (*voile, paris, batis*, dan *antekres*) yang diimpor dari Eropa. Pelopornya adalah perempuan Indo-Belanda pada abad ke-19 menyesuaikan diri dengan iklim tropis. Pada awal abad ke-20, kebaya renda diadopsi oleh kaum nyonya di Surabaya yang lalu dimodifikasi sesuai selera. Tepi bawah kebaya model ini dimodifikasi, yang awalnya rata menjadi meruncing (*sonday*). Selanjutnya, dari Surabaya mode pakaian ini menular ke Batavia dan kota lainnya. Kebaya renda lantas berkembang menjadi kebaya nyonya, identitas perempuan Tionghoa di Nusantara (Intisari & Indonesia, 2009: 148). Kendati demikian, tak jarang pula dijumpai perempuan Tionghoa Indonesia yang dalam kesehariannya mengenakan kebaya bergaya Jawa.

Gambar 22. Busana harian Emak Oei Akiem Nio dari Wangon, Banyumas dengan kebaya dan batik bergaya Jawa pada akhir 1970-an

Sumber: Dokumentasi penulis

Padanan baju kurung, baju panjang, maupun kebaya umumnya adalah kain panjang, namun rupanya kaum nyonya cenderung menyenangi sarung. Kain yang dipertemukan kedua ujungnya dan dijahit ini dianggap lebih praktis. Akan tetapi, ini tidak mutlak, nyatanya banyak pula nyonya yang memakai kain panjang. Kaum nyonya mengenakan sarung atau kain batik yang diproduksi para pengusaha batik nyonya di pesisir pantai utara Jawa, utamanya Pekalongan. Batik pesisir alias batik nyonya bercirikan warna-warni ceria dan bebas memadukan ragam hias Eropa dan Tionghoa. Warna-warna *ngejreng*, seperti kuning, oranye, merah, pink, hijau, biru, dan lainnya dihasilkan dari perwarna sintetik. Sementara ragam hias yang muncul, seperti: burung hong, naga, teratai, mega mendung, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan batik *vorstenlanden* di wilayah keraton Jawa, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Gaya batik *vorstenlanden* cenderung berwarna sogan dan bermotif tradisional Jawa.

Intisari & Indonesia (2009: 158) mencatat beberapa nama produsen batik nyonya di antaranya The Tie Sit, Oei Soen King, Oei Kok Sing, Liem Giok Kwie, Liem Siok Hien, Liem Boen In, dan Liem Boen Gan dari Pekalongan, serta Oei Soe Tjoen dari Kedungwuni. Menariknya, batik nyonya ternyata juga digandrungi oleh perempuan Tionghoa di Singapura dan Malaysia. Untuk kebaya nyonya juga mengalami perkembangan. Pada zaman Jepang berkembang kebaya kerancang dengan model lubang-lubang. Memasuki zaman kemerdekaan juga berkembang kebaya bordir. Apabila sebelumnya cenderung berwarna putih, kebaya kerancang dan kebaya bordir mulai menggunakan warna lain, tetapi tetap bernuansa pastel.

Gambar 23. Emak Oei Ting Nio (kanan) dari Gombong, Kebumen bersama anak dan mertuanya mengenakan kebaya encim ber-*sonday* dan batik pesisir (1959)

Sumber: Dokumentasi penulis

Penamaan kebaya nyonya dan batik pesisir menjadi kebaya dan batik encim pada akhirnya menjadi penanda terancamnya mode pakaian ini. Sampai akhir tahun 1950-an, pakaian ini masih populer di kalangan Tionghoa Indonesia usia paruh baya. Sementara generasi mudanya beralih ke pakaian gaya barat. Hanya generasi tua saja alias *encim-encim* (perempuan Tionghoa setengah baya, kadang termasuk juga nenek-nenek) yang masih bertahan. Dari alasan itulah muncul istilah kebaya dan batik encim. Kendati sebenarnya yang menggunakan kebaya dan batik ini awalnya juga para gadis belia, termasuk sekarang juga dapat dipakai oleh segala jenis usia, tidak hanya nenek-nenek saja. Kini kebaya dan batik encim terus mengalami modifikasi semenjak dipopulerkan kembali oleh para desainer Indonesia. Para perempuan Betawi kini pun biasa mengenakannya sebagai baju daerah. Dalam kesempatan tertentu, kebaya dan batik encim memang masih

lebih cocok dijadikan ikon perempuan Tionghoa Indonesia, ketimbang *qipao, shanghai dress*, atau *cheongsam.* Semoga masih ada gadis muda Tionghoa Indonesia masa kini yang bangga memakainya!

KETIONGHOAAN KARTINI

Ibu Kartini keturunan Tionghoa? Tentu bukan itu maksud dari tulisan ini. Akan tetapi, ada sebuah kisah menarik mengenai Raden Ajeng Kartini bersama masyarakat Tionghoa. Tokoh sentral kaum perempuan Indonesia ini semasa hidupnya pernah bersentuhan langsung dengan kearifan masyarakat Tionghoa. Bahkan perjumpaan ini sangatlah bermakna karena telah menyelamatkan hidupnya. Kisah ini bukan isapan jempol belaka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan sejarah. Sayangnya, memang tidak banyak orang tahu karena jarang sekali diungkap saat berceloteh tentang kehidupan Ibu Kartini.

Gejolak perjuangan Kartini didorong oleh kesempatan pendidikan yang pernah diperolehnya sebagai keturunan darah biru. Selama masa kebebasannya itu, Kartini banyak bergaul dengan kalangan feminis asal Belanda, seperti Estelle "Stella" Zeehandelaar, Marie Ovink-Soer, dan Rosa Manuela Abendanon-Mandri. Persahabatan Kartini dengan mereka berlangsung cukup lama dan intens melalui surat-menyurat. Kepada para sahabat penanya, Kartini banyak berkisah tentang belenggu adat, tradisi pingit, pernikahan, keluarga, pendidikan, kehidupan pribadinya hingga per-

soalan candu. Sikap Kartini yang memberontak terhadap nilai-nilai kekolotan, poligami, dan adat yang mengungkung perempuan terungkap dalam surat-suratnya. Jejak-jejak korespondensi persahabatan Kartini itu lantas diterbitkan dalam buku *Door Duisternis Tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang) oleh J.H. Abendanon pada tahun 1911.

Sejarah mengungkap bahwa ternyata tidak semua surat Kartini diterbitkan. Surat yang bersifat sangat personal tidak dipublikasikan. Demikian juga dengan surat-surat yang dianggap sensitif terhadap isu tertentu harus disortir. Misalnya, kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda, persoalan candu hingga yang bersinggungan dengan Tionghoa. Dalam surat kepada Rosa Manuela Abendanon-Mandri bertanggal 27 Oktober 1902, Kartini bercerita tentang kedekatan batinnya dengan masyarakat dan budaya Tionghoa pada masa itu.

Setiono (2008) mencatat bahwa Kartini dengan gamblang mengaku dirinya adalah "*Boeddha-kind*" atau "anak Buddha". Kisah ini berawal saat Kartini kecil terserang penyakit berat dan tak ada lagi dokter yang sanggup menyembuhkan. Di tengah keputusasaan, sahabat sang ayah, seorang Tionghoa, menawarkan diri untuk menolong. Kartini sembuh dari sakit setelah meminum air yang telah dicampur dengan abu bakaran hioswa (dupa) persembahan dari sebuah kelenteng di Welahan. Sejak saat itu Kartini menganggap dirinya menjadi anak dari Santikkong atau Kongco Welahan, orang suci yang dipuja di kelenteng tersebut. Inilah alasan yang kemudian mendasari Kartini menjadi seorang vegetarian.

Dalam surat Kartini tersebut, yang dimaksud dengan Santikkong atau Kongco Welahan sebenarnya Hian Thian Siang Tee atau Siang Tee Kong. Tokoh ini di-*toapekong*-kan sebagai Dewa Langit (ada yang menyebutnya sebagai Dewa Obat) di Kelenteng Welahan. Kelenteng ini konon merupakan

kelenteng tertua yang ada di Indonesia. Menurut cerita sejarah, Kelenteng Welahan didirikan oleh kakak beradik Tan Siang Boe dan Tan Siang Djie sekitar tahun 1830-an. Sejak didirikan, kelenteng ini memang dianggap memiliki daya penyembuh sehingga banyak orang datang berkunjung, tidak hanya dari kalangan Tionghoa.

Gambar 24. Kelenteng Hian Thian Siang Tee, Welahan, Jepara

Sumber: http://tic.jepara.go.id

Membaca kisah yang dituturkan Kartini mengenai mukjizat kesembuhan dirinya melalui perantaraan Santikkong, memperlihatkan betapa Kartini memiliki ikatan batin yang erat dengan Kelenteng Welahan. Buktinya pada suatu waktu, Kartini menyempatkan diri berkunjung ke sana. Sebagai seorang gadis Jawa, daya sinkretis yang berasal dari leluhurnya masih begitu kuat. Inilah yang membuat Kartini dengan lugas menyebut dirinya sebagai "anak Buddha" dari Kelenteng Welahan.

Kisah lengkap dengan ungkapan batin terdalam yang dituturkan oleh Kartini ini menjadi bukti kerapatan relasi antara Jawa dengan Tionghoa. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu. Pada masa Hindia Belanda, Tionghoa

menjadi korban politik. Pasca-Geger Pacinan tahun 1740-an, relasi antara Jawa dengan Tionghoa sengaja dibuat renggang. Pemerintah Hindia Belanda menganggap eratnya relasi Jawa-Tionghoa sebagai ancaman berbahaya. Inilah salah satu yang mendasari sortir Abendanon atas kisah Tionghoa dalam surat Kartini.

Keterbukaan Kartini soal persentuhannya dengan Tionghoa tidak menutup kemungkinan adanya respek terhadap perempuan Tionghoa. Tentu saja analisis ini perlu dikaji lebih lanjut. Namun, satu hal yang menguatkan, yakni konsistensi perjuangan Kartini yang menaruh kepedulian terhadap nasib kaum perempuan atas dasar prinsip egaliter. Pada zaman Kartini, tercatat beberapa perempuan Tionghoa yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Mereka berani menyerukan pentingnya pendidikan dan emansipasi bagi perempuan. Di antaranya Caroline dan Leonie Tan yang menulis artikel mengenai pendidikan untuk perempuan di harian *Sin Po* pada tahun 1914.

AKU PUTRI TIONGHOA

Aku putri Indonesia, peranakan Tionghoa
Namun ku sangat cinta Nusa dan Bangsa, Tanah Air Indonesia;
Aku bangsa Indonesia, dari etnik Tionghoa
Wahai Nusa dan Bangsa nan sangat kucinta, Kau kubela senantiasa;
Padamu Indonesia, aku berjanji; Padamu Indonesia, aku berbakti
Padamu Indonesia, aku mengabdi; Inilah seruanku pada Pertiwi
Aku putri Tionghoa, kebangsaan Indonesia
Wahai Nusa dan Bangsa nan sangat kucinta, Kau kubela selamanya

Tanpa penjelasan berkepanjangan, lirik lagu bertajuk Putri Tionghoa yang diciptakan Guruh Soekarnoputra ini berbicara banyak. Tak hanya ungkapan rasa nasionalisme dan kecintaan masyarakat Tionghoa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ada sisi lain yang hendak disentuh oleh lagu yang populer tak lama pascareformasi, yakni soal kebanggaan sebagai seorang Tionghoa. Menjadi Tionghoa di Indonesia bukan berarti kesalahan dan kesialan. Tak ada alasan untuk malu atau takut mengakui ketionghoaan dalam diri seorang Tionghoa, termasuk bagi kaum perempuan Tionghoa yang menjadi ujung tombak pendidikan dan internalisasi budaya bagi anak-anaknya.

Terlahir sebagai perempuan Tionghoa memang acapkali dipandang kurang menguntungkan. Meij (2009) mengungkapkan, adanya stigma *double marginal* yang tersemat (disematkan) dalam diri perempuan Tionghoa. Masyarakat *androsentric* memosisikan perempuan dalam strata kedua sebagai objek yang tidak boleh lebih dari kaum lelaki. Marginalisasi bertambah kuat dengan takdir darah etnis yang mengalir dalam tubuhnya. Keduanya tak pelak lagi semakin menyudutkan posisi perempuan Tionghoa pada ruang ketidakberdayaan dan diskriminasi.

Berbicara mengenai persamaan derajat antara perempuan dan lelaki di Indonesia tak bisa lepas dari ketokohan Raden Ajeng Kartini. Perempuan Jawa bersanggul dan berkebaya yang senantiasa dikenang pada tanggal 21 April ini menjadi simbol perjuangan perempuan. Padahal selain Kartini, pejuang-pejuang perempuan lainnya juga andil demi kemerdekaan bangsa. Ratu Kalinyamat, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, hingga Nyi Ageng Serang merupakan sebagian di antaranya. Kendati demikian, para perempuan perkasa yang turut angkat senjata menghadapi penjajah ini kalah gaungnya dibanding Kartini. Apalagi para perempuan Tionghoa yang menanggung nasib sebagai *double marginal* semakin tak pernah diperdengarkan kisahnya dalam sejarah.

Sejarah Perempuan Tionghoa

Tak banyak orang tahu, kaum perempuan Tionghoa juga menggoreskan tinta sejarah bagi bangsa ini. Seperti Kartini, beberapa perempuan Tionghoa tercatat ambil peran bagi kemajuan masyarakatnya. Nyonya Lie Tjian Tjoen, misalnya, mendirikan panti asuhan *Ati Soetji* (Hati Suci) yang dikenal juga dengan nama Po Liang Kiok di Batavia pada tahun 1914 bagi anak-anak terlantar dan mendidik mereka dengan

penuh kasih sayang. Sekitar tahun 1920-an, terdapat beberapa perempuan Tionghoa yang berhasil memperoleh gelar sarjana dari Belanda. Kemudian, kakak beradik Caroline dan Leonie Tan juga pernah menulis artikel di harian *Sin Po* mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.

Gambar 25. Nyonya Lie Tjian Tjoen dan gedung panti asuhan Ati Soetji yang didirikannya

Sumber: https://twitter.com/cataya/status/989146143232688129, https://www.liputan6.com/

Tantangan serupa, sebagaimana terjadi di masyarakat Jawa kala itu, kuatnya sistem paternalistik juga dialami para perempuan Tionghoa terutama di keluarga yang masih memegang teguh tradisi lama. Meski demikian, menariknya, perempuan Tionghoa Indonesia, kecuali kaum pendatang pertama kali, tidak lagi menjalani tradisi ikat kaki (*foot binding*). Dalam buku Riwayat Semarang tulisan T. J. Liem (2004) dikisahkan para perempuan Tionghoa Indonesia bengong saat menonton sekelompok pendatang perempuan dari Tiongkok yang berpakaian aneh dengan kaki kecil diikat.

Selain tidak lagi mengenal tradisi ikat kaki, keleluasaan bagi tumbuhnya benih-benih pencarian identitas baru bagi kaum perempuan Tionghoa Indonesia juga diungkap dalam biografi Quenny Chang. Bahkan dalam kesehariannya, putri Tjong A Fie, hartawan terkenal di Medan ini, lekat dengan

gaya hidup kebarat-baratan bercampur Tionghoa. Perubahan pola pikir dan gaya hidup juga dialami oleh Oei Hui Lan, putri Oei Tiong Ham, Raja Gula dari Semarang. Memang bagi kalangan atas, hal itu wajar karena gaya hidup bakal mengokohkan status sosial. Kendati tidak sepenuhnya lepas dari tradisi, namun kisah-kisah ini menggambarkan perempuan Tionghoa terpelajar yang mengenalkan kultur baru.

Identitas Kultural

Meski dalam situasi inferioritas dan kekolotan, namun gempuran budaya Barat dan Timur justru mendorong perempuan Tionghoa menemukan identitas kulturalnya. Hasilnya semisal ragam pakaian batik nyonya atau yang populer dengan istilah kebaya *encim*. Corak batik baru ini menyuguhkan perpaduan budaya Jawa-Tionghoa. Batik ini banyak diproduksi di kota-kota pantai utara Jawa mulai dari Cirebon, Pekalongan, Semarang, hingga pesisir Jawa Timur. Berbeda dengan batik *vorstenlanden* yang cenderung berwarna sogan gelap dan bermotif tradisional Jawa, batik nyonya menggunakan warna-warna merah, hijau, oranye, kuning, hingga biru yang *ngejreng* dengan motif Tionghoa.

Untuk soal gambar, cukup banyak corak batik nyonya yang terkenal. Batik Cirebon dengan motif awan khas Tionghoa yang dikenal sebagai batik mega mendung. Batik Pekalongan dengan motif bunga teratai, naga, dan burung hong. Batik Lasem, batik tulis dengan pola sulur-suluran khas sentuhan Jawa-Tionghoa. Kemunculan batik nyonya yang kemudian identik sebagai batik pesisiran ini merupakan wujud pencarian identitas kultural baru sebagai perempuan Tionghoa yang hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa. Adaptasi sosial dan proses pendidikan menjadi pendorong pencapaian identitas kultural bagi mereka.

Gambar 26. Berbagai motif batik pesisiran

Sumber: https://duniabatiknusantara.blogspot.com/, http://www.bentarabudaya.com, http://modelbajuinfo.blogspot.com/

Sebagai produk identitas kultural, tak hanya mode pakaian. Tangan dingin perempuan Tionghoa juga terampil dalam bab *olah-olah* urusan perut. Berbagai ragam kuliner yang saat ini begitu familiar di lidah banyak orang keluar dari dapur para perempuan Tionghoa. Hasilnya makanan asal Tiongkok dimodifikasi dengan cita rasa lokal. Setiap daerah di Indonesia pasti mengenal rupa-rupa makanan Tionghoa dengan pengaruh cita rasa lokal masing-masing. Sebut saja bakmi, bakso, capcai, soto, siomay, aneka masakan *cah*, tahu, bakpao, bakpia, kecap, sampai wedang ronde. Sajian turun-temurun ini bermula dari resep dapur nyonya di tiap-tiap keluarga Tionghoa dan kini bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Pungkasan, dalam konteks kekinian, kesempatan bagi pelestarian budaya dan identitas Tionghoa terbuka luas. Sayang peluang ini dihadapkan pada pudarnya kesadaran untuk mengenal (kembali) dan melestarikan budaya Tionghoa. Selain akibat upaya genosida terhadap budaya Tionghoa pada masa lalu, kehadiran modernitas dan pandangan-pandangan baru juga menjadi ancaman. Hal ini menjadi tanggung jawab moral bersama, termasuk kaum perempuan Tionghoa yang sejak dulu hadir sebagai elemen penting dalam keluarga. Sejarah tak berbohong soal kontribusi *makco, popo, mama*, dan *jiejie*. Merekalah para putri penjaga dan penerus budaya bagi generasi Tionghoa Indonesia.

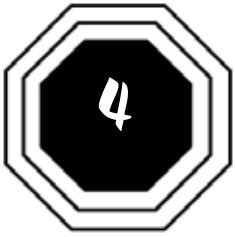

Sino-Javanese Muslim

Gambar 27. Infografik Tan Go Gwat

Sumber: https://id.pinterest.com/pin/559572322443723516/

SYIAR ISLAM LAKSAMANA CHENG HO

Masa Dinasti Tang dan Dinasti Song pada abad ke-7 diyakini menjadi permulaan masuknya Islam ke Tiongkok. Selanjutnya, Islam mendapat perhatian besar pada masa Dinasti Ming sekitar abad ke-14. Bukti mengenai ini bahkan sampai ke Indonesia. Pada tahun 1953, Museum Nasional Jakarta memamerkan sebuah mangkuk dan piring porselen dengan tulisan Arab di dalamnya yang ternyata peninggalan dari Dinasti Ming yang dibawa ke Nusantara sekitar tahun 1456-1478 (Kong, 2013: 51). Bukti-bukti ini sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Tionghoa memiliki peran dalam penyebaran Islam di Jawa yang sudah dimulai sejak abad ke-15 atau tahun 1400-an.

Pengaruh pelayaran dan hubungan dagang antara Nusantara dengan Tiongkok dalam penyebaran Islam tidak dapat lepas dari peran Laksamana Cheng Ho. Armada Cheng Ho menjadi simbol kejayaan Dinasti Ming yang berlayar pertama kali di Samudra Pasifik dan Hindia pada tahun 1405 dan secara periodik berlanjut hingga tahun 1433. Ekspedisi Cheng Ho ini tercatat lebih awal hampir satu abad dari

pelayaran Colombus yang baru dimulai tahun 1492 maupun Vasco da Gama pada tahun 1497 (Kong, 2013: 5).

Cheng Ho (Ma He) berasal dari Provinsi Yunnan, dikenal sebagai Kasim San Bao dari suku Hui yang menganut Islam. Ayahnya bernama Ma Hazhi (Haji Ma), ayah dan kakeknya telah menunaikan rukun Islam kelima. Cheng Ho mengabdi pada Kaisar Yong Le dari Dinasti Ming. Sekitar awal abad ke-15, Kaisar Yong Le memerintahkan agar dilakukan pelayaran-pelayaran ke Samudra Barat demi memajukan persahabatan dan memelihara perdamaian. Cheng Ho diperintahkan untuk memimpin pelayaran tersebut sebagai laksamana. Tidak sedikit kaum muslim yang diajak oleh Cheng Ho dalam pelayaran-pelayarannya, seperti Wang Jinghong, Hou Xian, Ma Huan, Guo Chongli, Hasan, Sha'ban, dan Pu Rihe (Kong, 2013: 37).

Dalam tujuh kali pelayaran Cheng Ho tercatat armadanya setiap kali berkunjung ke Sumatra dan enam kali ke Jawa. Setiono (2008: 45) memaparkan tahun 1405, Cheng Ho singgah di Samudra Pasai menemui Sultan Zainal Abidin Bahian Syah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan. Pada 1407, Cheng Ho juga mampir di Palembang dan membentuk masyarakat muslim Tionghoa yang pertama di Nusantara. Oleh karenanya, orang-orang Tionghoa sudah ada jauh sebelum Cheng Ho datang. Tujuh kali pelayaran Cheng Ho ini dapat dilihat dalam prasasti Tain Fei Ling Ying Zhi Ji (Catatan tentang Kemujaraban Dewi Sakti) yang dibangun Cheng Ho di Changle, Provinsi Fujian (Hokkian).

Dalam "*Malay Annals of Semarang and Cirebon* (MASC)", De Graaf & dkk. (1997) menyebut bahwa sejarah orang-orang muslim Tionghoa di Jawa dimulai pada abad ke-15 atau ke-16 dengan kedatangan armada Cheng Ho. Cheng Ho banyak membantu dalam menyebarkan Islam di kalangan Tionghoa Melayu. Tahun 1419, Cheng Ho menunjuk Haji Bong Tak

Keng di Campa untuk mengatur komunitas muslim Tionghoa mazhab Hanafi di Asia Tenggara. Berikutnya Haji Gan Eng Cu ditugasi mengurus orang-orang muslim Tionghoa di Filipina dan pernah dikirim ke Tuban untuk mengawasi komunitas muslim Tionghoa di Jawa. Kedatangan Cheng Ho mendorong lebih banyak orang Tionghoa memeluk Islam (Tan, 2010: 276).

Gambar 28. Selain di Kelenteng Sam Po Kong, patung Laksamana Cheng Ho juga dapat dijumpai di Kelenteng Tay Kak Sie Semarang

Sumber: Dokumentasi penulis

Kong (2013: 24) memberi keyakinan bahwa sebelum abad ke-13, sudah terdapat muslim Tionghoa di Indonesia. Jauh pada paruh abad ke-9, ketika tentara pemberontak pimpinan Huang Chao menduduki Guangzhou, muslim Tionghoa serta saudagar dari Arab dan Persia berjumlah besar dari Guangzhou berbondong-bondong mengungsi ke Palembang dan Sriwijaya. Jumlah komunitas muslim Tionghoa lambat laun menurun. Penyebabnya, yakni putusnya hubungan antara mereka yang di Jawa dengan Tiongkok karena kemunduran Dinasti Ming (Parlindungan, 2007: 667). Selain itu, juga mazhab Hanafi yang dibawa para muslim Tionghoa

kemungkinan besar kalah populer dengan perkembangan mazhab Syafi'i yang dibawa dari Gujarat dan Timur Tengah.

Menurut Al Qurtuby (2003), selain mengemban misi persahabatan dengan negara-negara lain sekaligus menunjukkan supremasi politik dan ekonomi Tiongkok, ekspedisi Cheng Ho membawa agenda tersembunyi, yakni persebaran juru dakwah Islam di hampir setiap kota yang disinggahi. *Hidden Agenda* ini memang di luar kepentingan Kekaisaran Ming, namun lebih pada kepentingan "primordial Islam" Cheng Ho sebagai seorang muslim. Di Palembang, Cheng Ho membentuk komunitas Tionghoa Islam pertama. Demikian juga di Sambas yang berlanjut ke Jawa hingga Filipina.

Kehadiran Cheng Ho di Jawa pada pelayaran tahun 1405 dan 1413 disambut antusias oleh masyarakat Islam setempat yang telah ada, termasuk para pemuka agamanya. Maulana Malik Ibrahim, wali di Gresik, menyambut baik rombongan Cheng Ho dan Ma Huan. Konon Cheng Ho bahkan meninggalkan juru dakwah dan beberapa pengikutnya untuk berbaur dengan komunitas Islam yang telah ada guna syiar Islam.

Tak hanya di Gresik, namun hampir di setiap pesisir Jawa mulai dari Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, Tuban, hingga Surabaya, Cheng Ho selalu menempatkan juru dakwah dan orang-orang Islam Tionghoa. Tak heran apabila di beberapa kota dijumpai peninggalan-peninggalan Cheng Ho dan para pengikutnya yang kental bernuansa Islam, termasuk penamaan beberapa Masjid untuk mengenang sekaligus meneguhkan peran mereka dalam penyebaran Islam. Sementara sebagai seorang Tionghoa, Cheng Ho sendiri tetap dihormati oleh masyarakat Tionghoa bahkan juga dipuja di kelenteng-kelenteng.

Gambar 29. Masjid Cheng Ho di Surabaya dibangun tahun 2001

Sumber: https://www.wego.co.id

Berbagai bukti sejarah telah berbicara banyak bahwa orang Tionghoa berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa dan Sumatra. Komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia telah ada sebelum bangsa Portugis dan Belanda datang ke Indonesia. Orang-orang Tionghoa di abad ke-15 datang untuk tinggal di Indonesia, sekaligus menyebarkan agama Islam. Masyarakat Tionghoa Muslim hidup membaur dengan penduduk setempat dengan harmonis. Sampai kemudian Belanda datang dan memberlakukan strata sosial yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Eropa atau Belanda; (2) Timur Asing, termasuk Tionghoa, Arab, dan India; dan (3) Bumiputra (Onghokham, 2008: 2).

Perbedaan status sosial membuat hubungan menjadi berjarak antara Tionghoa dengan penduduk setempat. Hal ini berakibat pula pada berkurangnya jumlah orang Tionghoa yang memeluk Islam karena dianggap sebagai agama mayoritas pribumi. Orang Tionghoa lantas lebih memilih menjadi Kristen atau Katolik, agama yang dibawa golongan Eropa atau kembali pada kepercayaan asli Tionghoa. Beda halnya relasi Arab dengan penduduk setempat yang relatif tidak ada gesekan karena direkatkan oleh persamaan agama, yakni Islam.

WALI SANGA KETURUNAN TIONGHOA

De Graaf & dkk. (1997: 81) memberi penjelasan bahwa mazhab Hanafi selalu dikaitkan dengan pendatang Tionghoa generasi pertama (asal Yunnan dan Swatow), yang merupakan orang Hui. Kedatangan Tionghoa generasi selanjutnya (mayoritas orang Han asal Fujian atau Hokkian) bukanlah penyebar agama Islam. Karenanya, peralihan mazhab dari Hanafi yang mulai berkurang pengaruhnya menjadi Syafi'i sangat dimungkinkan terjadi. Alasan peralihan ini cukup kuat meskipun sejarah belum dapat mengungkap secara jelas prosesnya yang masih sarat interpretasi.

Terkait dengan peralihan mazhab juga tidak bisa dilepaskan dari peran Walisanga atau sembilan pendakwah yang sebenarnya hidup pada masa yang berbeda-beda. Muljana (2005) dalam bukunya yang berjudul "Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara" (pertama kali terbit tahun 1968) mengungkap hal kontroversial mengenai keberadaan Walisanga. Slamet Muljana menyebut beberapa dari Walisanga diduga keturunan Tionghoa. Salah satunya, yakni Sunan Ampel dari Surabaya yang disebutnya bernama Bong Swie Hoo.

Senada dengan Slamet Muljana, Setiono (2008: 47) menyebut Bong Swie Hoo merupakan cucu Haji Bong Tak Keng, penguasa Campa yang ditunjuk oleh Cheng Ho. Sunan Ampel menikah dengan Nyi Gede Manila, anak dari Gan Eng Cu. De Graaf, H.J dan Pigeud (1997: 183-184) menyebut Sunan Ampel awalnya menganut mazhab Hanafi, namun pada pertengahan abad ke-15, Sunan Ampel mulai memberi perhatian pada perkembangan mazhab Syafi'i. Alasannya karena telah putus hubungan sosial dan budaya dengan muslim Hanafi di Tiongkok akibat kemunduran Dinasti Ming. Sejak saat itu, Sunan Ampel memusatkan perhatiannya pada masyarakat muslim non-Tionghoa di Jawa Timur.

Sunan Ampel ingin membangun komunitas muslim Jawa untuk mengganti kemerosotan komunitas muslim Tionghoa mazhab Hanafi. Tan (2010: 325-326) mengungkap lebih lanjut bahwa rencana ini terwujud ketika Jin Bun alias Raden Patah berhasil mendirikan Kerajaan Demak tahun 1479 yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Majapahit kemudian mengalami kemunduran. Sunan Ampel berhasil menjadi peletak dasar perkembangan Islam di Jawa, meskipun sayangnya dia tidak diberi usia yang panjang untuk melihat cita-citanya itu terwujud. Sembilan wali yang beberapa di antaranya berasal usul Tionghoa atau sering disebut *Sino-Javanese* berdasarkan Slamet Muljana yang memeriksa silang catatan-catatan Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan *Malay Annals of Semarang and Cirebon* (MASC), sebagai berikut.

1. Sunan Ampel-Raden Rahmat alias Bong Swie Hoo, pendiri komunitas muslim Jawa mazhab Syafi'i.
2. Sunan Bonang-Raden Makhdum Ibrahim alias Bong Tak Ang, putra Sunan Ampel.
3. Sunan Drajad-Raden Qosim alias Bong Tak Keng, adik Sunan Bonang.

4. Sunan Giri-Raden Paku (kemungkinan bukan Tionghoa meskipun sejak kecil dirawat oleh Sunan Ampel).
5. Sunan Kalijaga-Raden Said alias Gan Si Cang, seorang Kapten Tionghoa, anak dari Gan Eng Cu, pemimpin komunitas muslim Tionghoa di Filipina. Sunan Kalijaga adalah pecinta seni dan budaya sebagai sarana dakwah Islam. Orkestra Gamelan Sekaten yang terkenal diciptakan olehnya untuk digunakan di Masjid Demak yang dibangunnya.
6. Sunan Kudus-Ja'far Sadik, ulama dari Arab, pembaharu Islam di Kasultanan Demak, pendorong perubahan mazhab dari Hanafi menjadi Syafi'i.
7. Sunan Muria-Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga (nama Tionghoa tidak diketahui, kemungkinan besar tidak diberi nama Tionghoa karena ayahandanya, Sunan Kalijaga sangat menghidupi budaya dan kehidupan masyarakat Jawa).
8. Sunan Gunung Jati-Syarif Hidayatullah/Faletehan alias Du Anbo atau Toh A Bo, pendiri Kasultanan Cirebon.
9. Raden Patah alias Jin Bun, pendiri Kasultanan Demak (Sunan Kota).

Tujuh dari sembilan wali, dengan pengecualian Sunan Giri dan Sunan Kudus, diduga kuat berasal usul *Sino-Javanese*. Menariknya, Sunan Kudus dalam Parlindungan (2007: 661) disebut bernama Ja Tik Su atau Zha Dexu. Mengenai status Raden Patah juga agak membingungkan. Dalam beberapa daftar, nama Raden Patah tidak masuk, selain itu dia juga tidak diberi gelar sunan sebagaimana lainnya. Meskipun demikian, ada juga yang mencoba memberinya gelar sebagai Sunan Kota (Tan, 2010: 340). Sementara Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik justru biasa dimasukkan dalam daftar Walisanga meskipun hidup pada masa awal ketika

dewan wali baru mulai terbentuk. Maulana Malik Ibrahim diduga berasal dari Gujarat atau Timur Tengah.

Berdasarkan penjelasan Tan (2010: 344-345) dapat disimpulkan peran Tionghoa dalam masuknya Islam ke Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Ekspedisi Cheng Ho merupakan gelombang pertama Islam yang dibawa oleh Tionghoa mazhab Hanafi. Mereka bukan guru agama atau pendakwah, melainkan diplomat dan pedagang. Penyebaran pengaruh Islam terbatas pada lingkungan hoakiao (para perantau Tionghoa). Kemunculan para pendakwah Walisanga yang berasal usul *Sino-Javanese* dapat disebut sebagai generasi kedua. Mereka tidak lagi menganut mazhab Hanafi, namun mulai melebur dalam mazhab Syafi'i yang lebih kompatibel dan mengapresiasi semangat kebudayaan masyarakat muslim Jawa yang tidak bisa dilepaskan dari akar-akar tradisi lokal (Al Qurtuby, 2003: 196).

Perpindahan mazhab (*intiqal al-mazhab*) merupakan hal yang wajar terjadi tatkala tidak mampu lagi menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. Keyakinan bahwa mazhab Syafi'i lebih sesuai dengan kondisi dan relasi sosial masyarakat Jawa mendorong para Walisanga dan para pendakwah Islam selanjutnya mengenal lebih jauh budaya Jawa. Inilah penanda yang memisahkan antara komunitas muslim Tionghoa bermazhab Hanafi dengan komunitas muslim *Sino-Javanese* mazhab Syafi'i (Tan, 2010: 346). Komunitas baru ini mendorong lahirnya silang budaya yang oleh Al Qurtuby (2003: 177) disebut sebagai *Sino-Javanese Muslim Culture*.

Gambar 30. Dua Muslim Tionghoa dari Jawa dan dua Muslim Jawa singgah di Yaman dalam perjalanan haji menuju Mekkah

Sumber: Instagram Album Sejarah Indonesia

Masuknya pengaruh Tionghoa menyebabkan terjadinya silang budaya Tionghoa-Jawa termasuk dalam perkembangan agama Islam. Hal ini diungkap Lombard (1996: 261) yang menduga masuknya pengaruh Tionghoa ke Jawa melalui Campa. Dugaan ini muncul dari atap masjid bersusun seperti meru yang mengingatkan pada struktur Zhenhailou di Kanton yang dipakai sebagai pos pengamatan. Menurut Al Qurtuby (2003: 178), informasi Lombard sejalan dengan penuturan penghulu Pendeglang, seorang Tubagus yang masih keturunan Sultan Banten. Bentuk atap bertingkat (Masjid Banten dengan lima susun dan Masjid Demak dengan tiga susun) merupakan pengaruh Tionghoa.

Masjid Agung Banten dibangun oleh arsitek Tionghoa bernama Cek Ban Cut pada tahun 1620 (Setiono, 2008: 61). Ia membuat menara Masjid tampak seperti pagoda. Selain itu, Maulana Hasanuddin, Raja Banten, ternyata pernah menikah dengan seorang putri Tionghoa. Pada waktu VOC di bawah Cornelis de Houtman mendarat pertama kalinya di Banten,

telah dijumpai adanya orang-orang Tionghoa beragama Islam. Orang-orang muslim Tionghoa ini disebut sebagai Cina Cukuran (*Geschoren Chineezen*).

Di samping itu, termasuk juga keberadaan bedug dan kentongan di Masjid. Bedug diilhami dari tambur yang ada di kelenteng-kelenteng. Sementara kentongan merupakan peninggalan yang sudah ada sejak zaman Hindu. Bedug dan kentongan tidak ditemukan di masjid-masjid di luar Indonesia. Kedua alat ini berfungsi untuk penanda waktu shalat dan mengundang para jemaat untuk melakukan shalat. Konon bunyi kentongan "*thong, thong, thong*" dimaknai "*kothong*" alias kosong; Masjid masih kosong. Bunyi bedug "*dheng, dheng, dheng*" dimaknai "*sedheng*" alias cukup; Masjid masih cukup tempatnya. Beberapa motif hiasan pada Masjid-masjid kuno identik dengan ciri Tionghoa. Bekas-bekas pengaruh arsitektur Tionghoa pada bangunan religius lokal di tempat-tempat yang pernah dikunjungi Cheng Ho masih tampak jelas. Seperti atap bertingkat, menara berbentuk pagoda, sudut atap membentuk kurva dan berukir kayu. Kubah ala Timur Tengah justru tidak tampak pada Masjid-masjid periode awal.

Gambar 31. Bedug atau tambur yang ada di Kelenteng Sam Po Kong, Semarang

Sumber: https://lifestyle.okezone.com/

Al Qurtuby (2003: 189-193) meyakini bahwa beberapa kelenteng kuno pada awalnya mungkin berupa masjid yang dibangun oleh komunitas-komunitas muslim Tionghoa pada abad ke-15 atau 16. Salah satunya Kelenteng Soeh Boen Pang Gie Soe atau Kelenteng Talang di Cirebon. Awalnya merupakan masjid yang dibangun oleh kaum muslim Tionghoa sekitar tahun 1428. Nama Talang berasal dari kata Toa Lang yang artinya orang besar atau paduka tuan yang terhormat. Ini merujuk pada Sam Po Toa Lang atau Sam Po Tay Jin atau Sam Po Thay Kam (tiga pendekar besar), yakni Cheng Ho, Kung Wu Ping, dan Fa Hien.

Setiono (2008: 50) mengisahkan lebih lanjut mengenai Kasultanan Cirebon yang didirikan tahun 1552 oleh Haji Tan Eng Hoat alias Maulana Ifdil Hanafi bersama Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah atau Faletehan) alias Toh A Bo. Pada tahun 1553, Sunan Gunung Jati menikah dengan Ong Tien (Tan Hong Tien Nio), putri dari Haji Tan Eng Hoat. Upacara iring-iringan mempelai dipimpin oleh Tan Sam Tjay alias Muhammad Sjafei bergelar Tumenggung Arya Dipawiracula. Tan Sam Tjay nantinya menjadi orang kepercayaan di Kasultanan Cirebon.

Tan Sam Tjay ini yang mendirikan Masjid Talang yang nantinya berubah menjadi kelenteng. Konstruksi Kelenteng Talang ini serupa bentuknya dengan yang ditemukan pada Masjid Demak. Arah kelenteng juga menghadap kiblat, terdapat sumur dan padasan, tulisan kaligrafi bergaya Tionghoa, mimbar khotbah, dan tempat imam yang menjorok ke dalam. Haji Tan Eng Hoat dan Tan Sam Tjay berjasa dalam penyebaran agama Islam ke Priangan Timur dan daerah Garut.

Gambar 32. Kelenteng Talang Cirebon
yang dahulunya merupakan masjid

Sumber: https://www.aroengbinang.com/2018/03/kelenteng-talang-cirebon.html

Demikian pula di Semarang, untuk menghormati Cheng Ho, dibangun Kelenteng Sam Poo Kong (Gedong Batu). Awalnya, kelenteng ini juga sebuah masjid. Bangunan ini dibangun di sebuah gua yang pernah menjadi tempat tinggal Wang Jinghong (Ong King Hong) dan pengikutnya. Dalam ekspedisi kelima, Wang Jinghong, seorang pembantu penting Cheng Ho jatuh sakit dan dibawa beristirahat di sebuah gua di daerah Simongan, Semarang. Setelah membaik, Wang Jinghong dan beberapa pembantunya menginginkan tinggal di situ. Cheng Ho membekalinya dengan sebuah kapal kecil dan memberi pesan untuk menyebarkan agama Islam.

Kelenteng Sam Poo Kong juga menjadi sumber penting atas peran Tionghoa dalam penyebaran Islam dan pembentukan kasultanan Islam pertama di Jawa (Demak). Pada tahun 1928, dengan alasan menumpas perlawanan komunis (ISDV dan Sarekat Islam Merah yang berpusat di Semarang), Residen Poortman melakukan penggeledahan di kelenteng ini. Hasilnya ditemukan tiga gerobak berisi berbagai catatan dalam bahasa Tionghoa. Catatan yang telah tersimpan selama 400-500 tahun ini menceritakan peran

Tionghoa dalam penyebaran Islam dan berdirinya Kerajaan Demak dengan raja pertama Raden Patah alias Jin Bun.

Beberapa kelenteng lain yang dahulunya diduga kuat sebagai masjid, yakni Kelenteng Ancol Jakarta atau Kelenteng Nyai Ronggeng, Kelenteng Sam Po Kong Tuban, dan Kelenteng Mbah Ratu Surabaya. Selain bekas masjid yang kini menjadi kelenteng, terdapat pula jejak historis lain berupa beberapa makam keramat dari awak kapal Cheng Ho di Jawa. Makam-makam ini masih kerap dikunjungi oleh umat Islam maupun non-Islam, baik murni untuk berziarah maupun mencari berkah (*ngalap berkah*).

Sino-Javanese Muslim Culture juga tampak pada tembok Masjid Agung Demak (Masjid Glagah Wangi), beberapa masjid lain hingga makam Sunan Bonang di Tuban dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Banyak dijumpai hiasan piring porselen Tiongkok dari Dinasti Ming, guci-guci antik, gentong kuno, dan lainnya. Gentong Kong hadiah dari Dewi Kiem atau Putri Campa (seorang Tionghoa) dapat dijumpai di museum Masjid Agung Demak. Dewi Kiem merupakan putri pedagang Tionghoa bernama Ban Hong yang menikah dengan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan melahirkan Raden Patah (Jin Bun), raja pertama Demak.

Gambar 33. Gentong Kong dari Dinasti Ming, hadiah Putri Campa abad ke-14 yang kini menjadi koleksi Museum Masjid Agung Demak

Sumber: https://travel.detik.com/

Pada bagian mihrab di Masjid Agung Demak terdapat ornamen kura-kura yang menunjukkan tahun berdirinya masjid, yakni 1401 Caka (kepala=1, kaki=4, badan=0, ekor=1) atau candrasengkala *Sarira Sunyi Kiblating Gusti* (1479 M). Penggunaan kura-kura, binatang dalam mitologi Tionghoa, mempunyai banyak makna. Dalam tradisi setempat diartikan sebagai kehati-hatian saat memasuki masjid yang suci, sedangkan dalam tradisi Tionghoa, kura-kura menjadi simbol panjang umur. Tafsir lain mengatakan kura-kura menjadi simbol kemenangan Dinasti Ming mengalahkan rezim sebelumnya. Dengan analogi sama, dapat diartikan sebagai kemenangan Demak atas Majapahit tahun 1478. Tafsir ini sangat mungkin mengingat pembangunan Masjid Agung Demak bersamaan dengan masa romantisme hubungan Jawa dengan Tiongkok, khususnya Dinasti Ming.

Al Qurtuby (2003: 180) juga mengomentari fenomena saka tatal yang membuat Masjid Agung Demak sangat terkenal. Saka tatal merupakan satu-satunya dari empat saka guru yang dibuat tidak dari balok kayu utuh, melainkan dari potongan-potongan kayu yang disusun dan diikat jadi satu secara akurat. Dalam tradisi lisan, saka tatal dibuat oleh Sunan Kalijaga dengan kesaktiannya yang hanya memakan waktu satu malam. Sementara tiang-tiang lain masing-masing dipersembahkan oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Penyusunan potongan balok menjadi saka tatal mirip dengan teknik penyambungan tiang-tiang kapal jung dari Tiongkok. Setiono (2008:47) melihat sosok Sunan Kalijaga diduga seorang Tionghoa bernama Gan Si Cang, anak dari Gan Eng Cu, yang ahli dalam perkapalan dan sebelumnya pernah menjadi kapten kapal Tiongkok.

Wujud *Sino-Javanese Muslim Culture* selain tampak dalam masjid, makam kuno, hingga keterlibatan Tionghoa dalam berdirinya pusat-pusat kerajaan baru (Islam) di Jawa juga

hadir dalam budaya yang sekarang sudah menjadi begitu lekat. Baju koko milik para muslimin memiliki kesamaan model kerah dengan *cheongsam* yang biasa dikenakan oleh laki-laki Tionghoa. Model kebaya muslimah yang tertutup tidak jauh berbeda dengan kebaya encim milik perempuan Tionghoa Indonesia.

Tradisi lebaran juga menampakkan adanya anasir Tionghoa. Acara makan bersama dengan menu utama ketupat opor saat merayakan Lebaran begitu identik bagi masyarakat muslim Jawa. Filosofinya sama dengan kalangan Tionghoa bahwa aktivitas berkumpul dan makan bersama keluarga menjadi inti sari dari berbagai perayaan. Saat Imlek, terutama pada malam penutupan Imlek (Cap Go Meh), seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Menariknya khusus di Indonesia, perayaan Cap Go Meh begitu mirip dengan Lebaran, yakni dirayakan dengan menyantap makanan khas berupa lontong Cap Go Meh yang tidak ada di negara lain, termasuk di Tiongkok.

Lebaran juga dirayakan dengan saling berbagi dan memberi uang untuk anak-anak. Bahkan sekarang ini, banyak orang tak canggung menyebutnya dengan istilah angpao (istilah Tionghoa untuk amplop merah berisi uang yang biasa dibagikan saat Imlek). Baju baru saat lebaran juga memiliki makna yang sama dengan baju baru saat Imlek. Kembali bersih, kembali ke fitrah. Pun juga dengan menyalakan petasan sejak bulan puasa tiba hingga malam takbir berkumandang.

Bagi kelompok Abangan Jawa, ritual menghormati leluhur masih dihidupi dengan mengadopsi doa-doa sesuai ajaran Islam. Entah melalui tradisi Selamatan, Kenduri, hingga ziarah ke makam-makam keramat. Penghormatan terhadap leluhur sejak dahulu dihidupi oleh orang-orang Tionghoa sebagai wujud bakti kepada orang tua. Kong (1999:

30) juga memaparkan sumbangsih kaum muslim Tionghoa dalam konteks *Sino-Javanese Muslim Culture* melalui karya-karya Islami. Identitas *Sino-Javanese Muslim Culture* perlu disadari sebagai alat integrasi sosial.

DAR DER DOR SAMBUT LEBARAN

Sejak bulan puasa, suara petasan alias mercon berkali-kali menggelegar. Intensitasnya semakin meningkat saat malam takbiran hingga hari lebaran tiba. Beberapa sudut ruas jalan menjadi penuh dengan tebaran potongan kertas sisa-sisa petasan yang dibakar. Meski dilarang, namun petasan senantiasa menjadi teman setia kala bulan puasa dan lebaran tiba. Suara yang mengagetkan, percikan api yang membahayakan, dan sisa-sisa kertas yang mengotori tentu sangat mengganggu, namun membakar petasan tetap dirasa jadi hiburan menyenangkan.

Penemuan petasan terjadi sekitar abad ke-9 di Tiongkok. Peledak sederhana ini dibuat dari bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas dengan sumbu yang menjuntai. Pertama kali dibuat, racikannya terdiri dari campuran bahan bubuk hitam kalium nitrat, belerang (*sulfur*), dan arang kayu (*charcoal*) yang gampang terbakar dalam wadah bambu yang disebut *baouzhu*. Saat ini, bahan baku petasan dengan mudah diperoleh di pasaran. Tak heran bila pembuatan petasan banyak dilakukan oleh industri rumahan.

Suara ledakannya yang keras dipercaya dapat menakut-nakuti roh jahat. Sejak itu petasan menjadi *ubo rampe* dalam perayaan pernikahan, tahun baru, dan upacara-upacara keagamaan masyarakat Tionghoa. Petasan menjadi pelengkap ritual yang harus ada untuk menjamin setiap acara berlangsung lancar tanpa gangguan dari roh jahat. Begitu pentingnya, sampai-sampai didirikan pabrik petasan pertama di dunia pada masa Dinasti Song (960-1279 M).

Kemajuan zaman yang ditandai haus akan hiburan didukung kreativitas tinggi menginovasikan kembang api. Soal suara menjadi nomor dua, yang diutamakan dari kembang api ialah warna-warni dan pijaran api di angkasa. Petasan dan kembang api kemudian dikenalkan oleh para *hoakiau* di tanah rantau, membuat tradisi ini menyebar ke seluruh dunia. Lekatnya petasan dengan lebaran membuka kemungkinan bahwa Tionghoa yang datang ke Indonesia juga berperan dalam penyebaran Islam.

Mayoritas cenderung melulu yakin pada dua teori bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat India atau langsung dari Arab Selatan. Padahal merujuk pada Muslim Nusantara yang bermazhab Sunni-Syafi'i dan adanya pengaruh bahasa-budaya Muslim Persi, memiliki kecocokan dengan kaum Muslim di Tiongkok. Sayang teori masuknya Islam dari Tiongkok selama ini masih dianggap aneh dan mustahil.

Berita *Ming Shi* dan *Ying-yai Sheng-lan* yang ditulis oleh Ma Huan (1416) sewaktu pelayaran Cheng Ho mencatat hal menarik. Para *hoakiau* dari Kanton dan Quanzhou yang menetap di pesisir utara Jawa sejak awal telah memeluk Islam dan taat beribadah. Perkembangannya muncul tokoh-tokoh Tionghoa yang menjadi *mubaligh* kondang dan banyak berelasi dengan penguasa-penguasa lokal. Kiai Telingsing (The Ling Sing) menjadi sahabat dakwah Sunan Kudus.

Bahkan seperti telah dipaparkan sebagian besar Wali Sanga kemungkinan besar berdarah Tionghoa.

Al Qurtuby (2003) menyebut dalam bentang abad ke-15-16 telah terbentuk budaya yang disebut *Sino-Javanese Muslim Culture*. Konstruksi *soko tatal*, ukiran, dan hiasan pada beberapa masjid di Indonesia menunjukkan pengaruh Tiongkok. Keberadaan bedug yang bertalu menandai waktu shalat dan Malam Takbiran tak ada bedanya dengan tambur di kelenteng. Baju koko para muslimin juga memiliki kesamaan model kerah dengan *cheongsam* yang biasa dikenakan oleh pria Tionghoa. Begitu juga dengan petasan yang menjadi salah satu bukti kecil di antara sekian banyak bukti lain itu.

Larangan Petasan

Boleh jadi gegara identik dengan Tionghoa, petasan semakin empuk untuk dipolitisasi. VOC melarang keras petasan karena pernah mengalami trauma. Penyebabnya saat Geger Pacinan yang meletus di Kartasura (1740-1743), pasukan koalisi Jawa-Tionghoa menggunakan petasan untuk mengelabui musuh. Pasukan VOC yang terkejut lari tunggang langgang karena mengira bunyi senapan memburu. Sejak kejadian itu, Belanda berupaya memecah belah rakyat melalui stratifikasi sosial yang dibuatnya untuk mencegah persekutuan Jawa-Tionghoa yang dianggap sangat berbahaya.

Memasuki alam kemerdekaan, tahun 1971, keluar serangkaian instruksi yang melarang petasan. Hanya petasan jenis cabe rawit yang diperbolehkan, itu pun harus bikinan dalam negeri. Petasan dari Tiongkok dilarang masuk, bertimbalan dengan pemutusan hubungan diplomatik pascaperistiwa 1965. Kini menjelang lebaran atau tahun baru, polisi selalu merazia penjual petasan. Menyulut petasan memang membahayakan keselamatan maka perlu tindakan preventif.

MESRANYA BAKDA KUPAT DAN LONTONG CAP GO MEH

Jiwa zaman (*zeitgeist*) yang kini telah berubah menghadirkan perspektif baru soal keberadaan Tionghoa dalam relasi sosial di masyarakat dewasa ini. Masyarakat Tionghoa perlu disadari telah menjadi bagian dari keharmonisan hidup bersama. Gus Dur dengan tegas menolak persepsi Tionghoa sebagai *foreign subject* atau *outsider*. Keharmonisan yang masih terus diupayakan sekarang ini sejatinya telah dihidupi oleh nenek moyang Nusantara sejak zaman kuda gigit besi. Salah satunya mewujud dalam khazanah kuliner Nusantara.

Kekayaan kuliner Nusantara tidak lepas dari interaksi sosial berbagai etnis sehingga budaya-budaya yang mereka miliki saling memengaruhi, termasuk budaya Tionghoa dengan budaya setempat. Pengaruhnya tampak dalam budaya materiil maupun non-materiil. Proses ini bersifat alamiah dan tidak dapat dihindari. Adanya akulturasi dalam makanan juga menjadi simbol sikap saling menghargai dan toleransi yang terbina indah.

Selain pengaruh Barat, Tionghoa diakui mengambil porsi besar dalam membentuk citra kuliner Indonesia. Perpaduan

unsur-unsur ini saling mengisi dalam memanjakan lidah setiap generasi turun-temurun. Kuliner menjadi warisan budaya yang sulit dihapuskan karena telah menjadi bagian dari budaya kolektif masyarakat. Warisan akulturasi ini tampak dari bahan dan bumbu yang digunakan, citarasa yang dihasilkan, hingga gaya penyajian makanan.

Pengaruh Barat diperlihatkan dari perubahan kebiasaan makan lesehan sembari *muluk* (makan langsung dengan jari tangan) menjadi gaya *buffet style* ala Eropa alias prasmanan. Bahkan kini dalam resepsi-resepsi lumrah digelar konsep *standing party* yang menyuguhkan berbagai "etalase" makanan yang dapat dinikmati sambil berdiri. Tentu tak ketinggalan dengan ragam variasi menu ala Barat. Rahman (2016b) menyebut wujud modifikasi dan perpaduan bahan makanan serta etiket makan antarbudaya ini dengan istilah *rijsttafel*.

Dari segi citarasa, pengaruh Barat boleh dibilang masih terasa agak canggung. Tidak demikian dengan anasir Tionghoa. Pasalnya banyak budaya kuliner Tionghoa yang mudah beradaptasi dengan citarasa setempat. Bahkan keduanya saling mengisi. Boleh jadi ada ratusan olahan bergenre Tionghoa yang mengakrabi lidah banyak orang, seperti tahu, mie, bakso, capcay, bakpia, bakpao, dan lainnya. Makanan-makanan ini begitu universal dan mudah menyesuaikan diri dengan selera masyarakat lokal.

Lontong Cap Go Meh

Adaptasi citarasa makanan antarkelompok masyarakat memang begitu cair. Makanan tradisi bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, misalnya ketika Imlek, juga tidak lepas dari pengaruh setempat. Imlek merupakan perayaan panjang yang tidak lekas usai. Paling tidak masyarakat Tionghoa merayakan Imlek selama lima belas hari sampai Cap Go Meh

tiba. Dalam perayaan malam kelima belas di bulan pertama tahun Imlek ini disajikan makanan khas lontong Cap Go Meh.

Mengapa setiap perayaan budaya Tionghoa selalu ada makanan? Syahdan pada zaman dahulu nenek moyang orang Tionghoa mengalami kehidupan yang serba sulit di negerinya. Pertanian mereka sering dilanda bencana seperti kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Inilah yang mendorong orang-orang Tionghoa melakukan migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Karenanya, konon di mana pun orang Tionghoa berjumpa, bukan kabar yang pertama kali ditanyakan, namun soal sudah makan atau belum.

Tak heran apabila hampir semua tradisi Tionghoa identik dengan makanan tertentu yang menjadi kekhasan. Aktivitas berkumpul dan makan bersama keluarga menjadi inti sari dari berbagai perayaan Tionghoa, termasuk saat Cap Go Meh. Pada malam penutupan Imlek ini, seluruh anggota keluarga biasanya berkumpul untuk makan bersama. Hanya saja, khusus di Indonesia, perayaan Cap Go Meh dirayakan dengan menyantap makanan khas yakni Lontong Cap Go Meh yang tidak ada di negara lain.

Pada malam tersebut seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama sebagai puncak sekaligus penutupan perayaan Imlek. Mereka menyantap lontong Cap Go Meh yang merupakan wujud budaya Tionghoa Indonesia. Makanan ini dapat disebut sebagai hasil negosiasi antara budaya Tionghoa yang dibawa dari negeri Tiongkok dengan budaya Jawa. Tradisi kuliner ini identik dengan *Bakdo Kupat* (Lebaran Ketupat) di kalangan masyarakat Jawa yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri.

Gambar 34. Lontong Cap Go Meh bikinan Mama Lie Siok Lan dan ketupat opor lebaran

Sumber: Dokumentasi penulis, https://cookpad.com/

Bahan utama lontong Cap Go Meh tentu saja beras yang ditanak dengan bungkus daun pisang bulat memanjang. Lontong disajikan dengan cara dipotong-potong bulat menyerupai bentuk bulan purnama dan menjadi lambang keutuhan dan keberuntungan. Lontong yang padat dan kenyal berkebalikan dengan bubur yang encer. Bubur memang dihindari untuk dihidangkan pada saat Imlek karena melambangkan kemiskinan dan orang sakit. Bentuk lontong yang panjang melambangkan panjang usia dan teksturnya yang lengket dimaknai sebagai rekatnya kekeluargaan. Di beberapa daerah, lontong kadang diganti dengan ketupat yang dibungkus janur. Hal ini semakin menegaskan kuatnya pengaruh lokal.

Sepiring potongan lontong disajikan dengan siraman kuah opor, ayam suwir, dan sambal goreng. Kuah opor yang berwarna kuning melambangkan kemakmuran. Gurihnya opor dan sambel goreng rebung atau waluh lengkap ati ampela ayam menjadi unsur lokal yang mendominasi. Semuanya dipadukan dengan taburan bubuk kedelai sebagai penambah selera. Jika lengkap, maka setidaknya terdapat tiga

belas elemen masakan dalam satu porsi lontong Cap Go Meh. Beberapa di antaranya asli masakan Indonesia, khususnya Jawa. Lontong Cap Go Meh menjadi wujud adaptasi masyarakat Tionghoa terhadap masakan lokal Indonesia.

Akulturasi Budaya

Adaptasi ini berhasil menciptakan akulturasi budaya yang bisa diterima setiap kalangan. Terbukti bahwa Tionghoa fasih hidup berdampingan dengan masyarakat lokal dan mampu berinteraksi dengan budayanya. Akulturasi merupakan proses alami dan wajar sehingga perubahan beserta hasil budaya yang dihasilkannya harus diterima dengan penuh kesadaran. Konstruksi multikulturalisme merupakan anugerah Sang Pencipta dan bukan semata-mata faktor bentukan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa diajak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kesadaran multikulturalisme diharapkan mampu mengakomodasi perbedaan untuk meredam konflik dalam masyarakat yang heterogen. Masyarakat perlu saling belajar untuk menerima, mengakui, dan menghargai eksistensi serta keunikan budaya lain yang lumrah terjadi. Apalagi tatkala budaya itu telah mampu beradaptasi dan saling mengisi.

Menariknya sajian lontong Cap Go Meh pada hari kelima belas setelah Imlek di Indonesia bukanlah hal baru. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi dalam keluarga Tionghoa. Buktinya di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya lontong Cap Go Meh dengan mudah ditemukan di depot-depot lawas. Sementara tradisi semacam ini justru tidak ada di Tiongkok. Perayaan Cap Go Meh di negeri asalnya dirayakan dengan makanan khas yang disebut Yuan Xiao. Demikian pula di Timur Tengah, tempat lahirnya

Islam, juga tidak dikenal ketupat opor untuk merayakan Idul Fitri.

Akhirnya, sepiring lontong Cap Go Meh dan ketupat opor Lebaran menyimpan memori multikultural dan keharmonisan masyarakat yang berpadu mesra. Bukti bahwa relasi Tionghoa telah begitu erat dengan budaya lokal hingga membentuk kultur dan identitas baru. Bahasa makanan ternyata menjadi sarana ampuh yang mampu menerabas sekat-sekat ruang geografis dan etnis. Karenanya, melalui edukasi sejarah yang baik, masyarakat akan lebih memahami kenyataan ini kendati praktiknya tanpa sadar sebenarnya telah terinternalisasi dalam hidup keseharian.

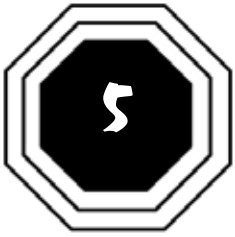

Belenggu Kolonial

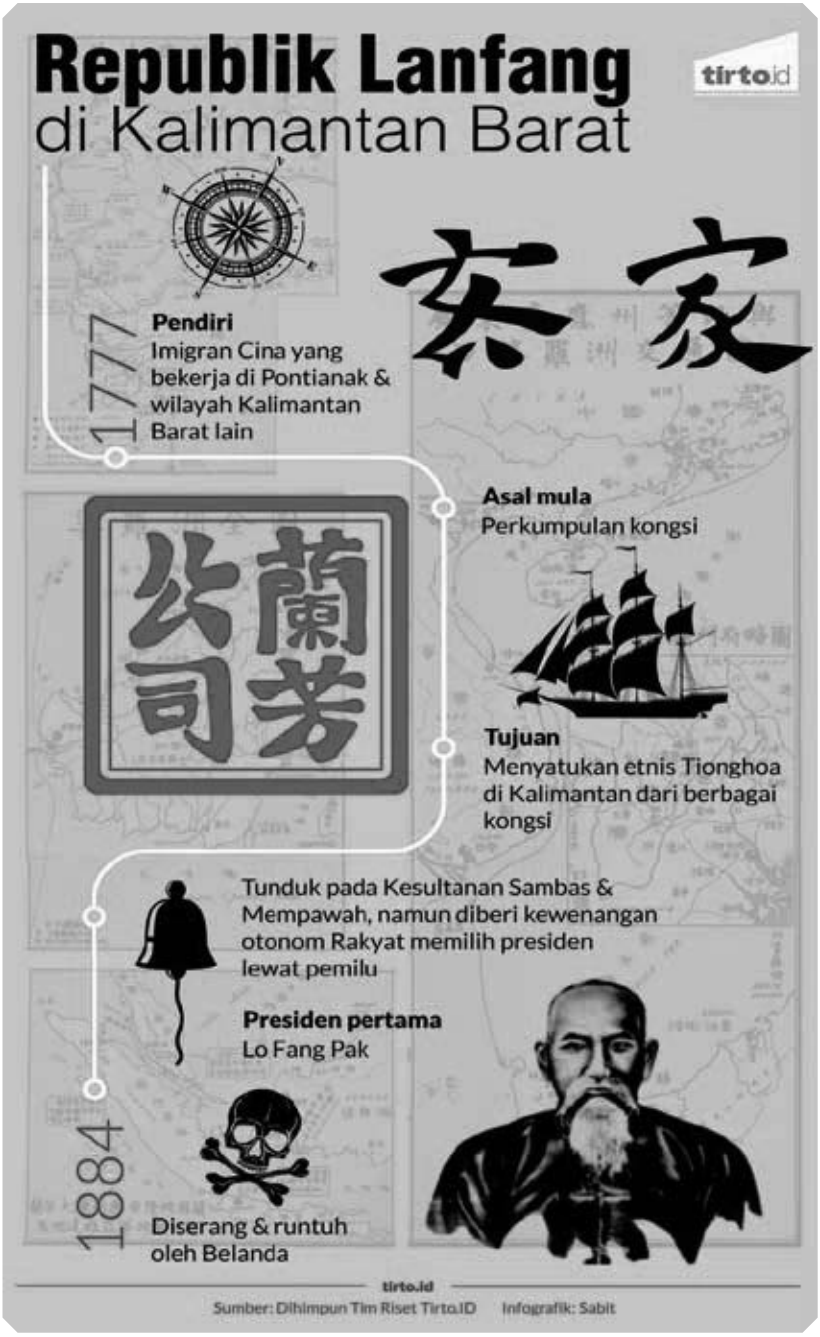

Gambar 35. Infografik Republik Lanfang

Sumber: https://tirto.id/republik-lanfang-republik-pertama-di-nusantara-cwtg

KISAH PARA KAPITAN

Berbicara secara khusus tentang Kapitan Tionghoa tentu sangatlah kompleks. Di setiap kota besar dan hampir di beberapa kota kecil asal ada komunitas Tionghoa atau pecinan maka dipastikan ada pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Kolonial Belanda. Entah berpangkat *Majoor*, *Kapitein*, atau *Luitenant der Chinezen*, secara umum biasa disebut sebagai opsir atau kapitan (Lohanda, 2001). Kapitan Tionghoa yang pertama dijumpai di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan sejak Hindia Belanda maka Batavia (sekarang Jakarta) telah menjadi kota multikultur terbesar di Indonesia. Kenyataan ini tak lepas dari perjalanan sejarahnya. Batavia sejak dahulu memegang kendali penting sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan.

Sejak bernama Sunda Kelapa, kota ini menjadi pintu masuk sekaligus bandar utama perdagangan bagi Kerajaan Pajajaran. Kala itu sungai-sungai begitu besar perannya sebagai jalur transportasi perdagangan dari pesisir menuju ke pedalaman maupun sebaliknya. Setelah ditaklukkan oleh Fatahillah dari Kerajaan Demak, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Dalam bahasa Sanskerta berarti "telah membuat kemenangan". Masih sebagai kota dagang,

Jayakarta semakin ramai dan menjanjikan. Kelak sebagai peringatan sejarah, perubahan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta.

Kedatangan VOC di Banten pada akhir abad ke-16 tak ayal melirik pula potensi Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen mengerahkan seribu pasukan dan berhasil merebut Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619. Peristiwa ini mengawali berdirinya Batavia yang berkembang menjadi kota dagang terpenting di Asia pada zamannya. Batavia juga menjadi pusat pemerintahan dari masa VOC hingga Hindia Belanda selama lebih dari tiga abad. Pada masa Jepang, Batavia kembali disebut Jayakarta (Jakarta) sampai sekarang.

Perkembangan Batavia sebagai kota dagang membuatnya banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai penjuru dunia, terutama pedagang Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Mereka tak hanya mampir berdagang, namun juga sebagian lantas menetap dan berbaur dengan masyarakat. Pada masa itu, golongan Tionghoa menjadi yang terbesar jumlahnya. Banyak di antara mereka yang kemudian menikah dan beranak pinak dengan perempuan setempat.

Keberadaan Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Batavia yang multikultur memberi warna bagi perkembangan selanjutnya. Ciri akulturasi yang tampak dari budaya Betawi tak lepas dari anasir-anasir Tionghoa seperti pakaian adat, baju pengantin, orkes Gambang Kromong, hingga makanan khasnya. Pembangunan Batavia baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik ternyata juga melibatkan peran masyarakat Tionghoa.

Peran Kapitan Tionghoa

Batu nisan khas Tionghoa (*bongpay*) yang menyembul di tengah perumahan padat penduduk di Kampung Mangga Dua, Gang Taruna, Jalan Pangeran Jayakarta (*Jacatraweg*) menjadi bukti kontribusi Tionghoa dalam pembangunan Batavia. Pada bagian tengah *bongpay* tertulis riwayat orang yang dimakamkan bernama Kapitan Souw Beng Kong (1580-1644). Dia merupakan Kapitan Tionghoa pertama di Batavia yang menjabat sejak tahun 1619 sampai 1636.

Gambar 36. Bongpay Souw Beng Kong di Jalan Pangeran Jayakarta setelah dipugar

Sumber: https://www.republika.co.id/

Souw Beng Kong dilahirkan di kota Tang Oa, Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan (Heuken, 1997: 177). Dia mencoba mengadu nasib dan tiba di Banten pada tahun 1604. Souw Beng Kong berhasil menjadi pedagang sekaligus pemilik perkebunan lada yang sukses. Kesuksesan dan relasi dagang yang luas membuatnya dikenal baik oleh J.P. Coen. Tatkala hendak membangun Batavia sebagai pusat kekuasaan,

pemimpin VOC ini pun menggandeng Souw Beng Kong untuk membantunya.

Meskipun awalnya menolak, akhirnya Souw Beng Kong bersedia pindah dari Banten ke Batavia. Dia tidak sendirian, namun membawa serta 400-an orang Tionghoa dari Banten untuk ikut pindah dan membangun Batavia. Souw Beng Kong kemudian diangkat sebagai Kapitan Tionghoa di Batavia pada tahun 1619 dibantu seorang Tionghoa muslim bernama Gouw Cay (Jan Con) sebagai sekretaris. Gouw Cay pernah mendapat sebidang tanah di Kampung Bebek (Angke) dan mendirikan masjid di sana. Sejak saat itu permukiman Tionghoa juga tumbuh di sana.

Souw Beng Kong (orang Belanda menyebutnya Bencon) menjadi sosok yang diandalkan oleh J.P. Coen. Terlebih saat itu J.P. Coen sempat gagal membuka Batavia sebagai pusat perdagangan. Kedatangan Souw Beng Kong dan ratusan orang Tionghoa terbukti berhasil mendorong perekonomian Batavia berkembang pesat. Keterampilan dan keuletan orang-orang Tionghoa dalam berdagang menjadi modal penting yang sulit ditandingi termasuk oleh orang-orang Belanda. Souw Beng Kong bahkan berhasil menjadi penghubung perdagangan antara Formosa (sekarang Taiwan) dengan Batavia.

Sebagai Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, Souw Beng Kong boleh disebut peletak dasar bagi pembangunan perekonomian Batavia. Meskipun tidak tampil sebagai pejuang di medan perang, Souw Beng Kong berjasa dalam memajukan Batavia. Pengganti Souw Beng Kong, yakni Kapitan Lim Lak Tjo atau Lim Lacco (1636-1645). Pada masa ini VOC hendak membangun tembok batu sebagai benteng batas kota. Kapitan Lim Lacco bertugas menggalang dana pembangunan dari kalangan Tionghoa Batavia.

Kontribusi masyarakat Tionghoa bagi pembangunan awal kota Batavia berlanjut pada masa Kapitan Phoa Beng Gam (1645-1963). Salah satu jasa besar Phoa Beng Gam, yakni pembangunan Kanal Molenvliet yang kini menjadi pemisah Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Hasil karya yang dibangunnya tahun 1648 ini sampai sekarang masih dapat dilihat. Berkat "Sang Insinyur Air" inilah Sungai Ciliwung yang sebelumnya berkelok-kelok hingga ke muara kini menjadi lebih lurus agar lancar aliran airnya.

Sejarah Batavia mencatat pula kisah tragis Kapitan Nie Hoe Kong (1736-1744). Pada tanggal 8-10 Oktober 1740 terjadi perlawanan hebat orang-orang Tionghoa terhadap VOC di Batavia. Gubernur Jenderal VOC, Andriaan Valckenier membalasnya dengan membantai orang-orang Tionghoa yang dikenal sebagai Tragedi Muara Angke. Nie Hoe Kong dianggap bertanggung jawab atas perlawanan itu dan dijatuhi hukuman buang ke Ambon sampai ajal menjemputnya. Di bidang lain, Nie Hoe Kong juga berjasa dalam mengembangkan orkes Gambang Kromong (Hoetink, 2007).

Berbagai Daerah

Keberadaan Kapitan Tionghoa tidak hanya dijumpai di Batavia, namun juga di berbagai kota yang terdapat permukiman Tionghoa (pecinan). Semarang misalnya, memiliki Oei Tiong Ham sebagai kapitan yang sangat terkenal. Beliau ini seorang saudagar gula yang kaya raya. Tanahnya sangat luas dan di banyak tempat, salah satunya dihibahkan untuk kampus Universitas Diponegoro. Kapitan Liem Kie Djwan yang terkenal dengan julukan Babah Blengor dari Yogyakarta dikenal sebagai sosok dermawan yang senang membantu orang miskin. Sayangnya, beliau kemudian terjerat utang dalam perdagangan candu. Di beberapa kota

lain juga ditemui jabatan Kapitan Tionghoa, misalnya di Bagelen (Purworejo), Batang, Purbalingga, Kediri, Jombang, Pasuruan, dan lainnya. Jabatan Kapitan Tionghoa tak jarang sifatnya turun-temurun di keluarga tertentu saja.

TIONGHOA MELAWAN VOC

Kisah dimulai dari Batavia yang sejak abad ke-17 dihujani imigran Tionghoa. Sebelumnya orang-orang Tionghoa memang sudah mulai berdatangan bahkan membangun komunitas-komunitas di banyak kota pelabuhan Sumatra dan Jawa, namun belum terhitung deras. Masyarakat Tionghoa pandai berbaur, ramah, suka membantu, dan taat aturan serta tatanan sosial setempat. Sayangnya, *softskill* tersebut ditambah keuletannya dalam bekerja justru menimbulkan kekhawatiran Belanda. Belanda yang kala itu direpresentasikan oleh kongsi dagang VOC menyimpan ketakutan suatu ketika masyarakat Tionghoa akan lebih dominan dan memengaruhi penduduk setempat. Apalagi warga lokal cenderung lebih bersimpati dengan Tionghoa daripada Belanda. Ini hal yang wajar karena Tionghoa sudah jauh lebih dulu hidup bersama di Nusantara dalam keharmonisan dan damai sejahtera.

Kecemburuan sosial semakin diperparah oleh persaingan dagang antara VOC dengan para pedagang Tionghoa yang semakin menguat. Akibatnya, masyarakat Tionghoa kerap mendapat perlakuan yang tidak adil berujung pemerasan dari penguasa VOC. Kendati demikian, masyarakat Tionghoa berusaha sabar dan mencari cara-cara damai dengan ha-

rapan hidup mereka akan tetap aman dan tenang dalam mencari nafkah. Sikap inilah yang di kemudian hari sering disalahartikan sebagai oportunisme, alih-alih terhimpit situasi. Sikap rasialis VOC semakin terang-terangan, tak jarang VOC menangkap, menganiaya, dan merampas harta benda orang-orang Tionghoa. Alasan penangkapan, antara lain karena tidak adanya surat izin tinggal (*permissiebrifje*).

Muara Angke

Puncak dari semua itu terjadi pada akhir tahun 1739 sampai Imlek di bulan Februari 1740. VOC di bawah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengadakan penangkapan besar-besaran ratusan orang Tionghoa mulai dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Tindakan VOC ini membuat masyarakat Tionghoa panik dan cemas. Beberapa di antaranya menyusun rencana dan strategi untuk menghadapi VOC. Serangan-serangan kecil terhadap penjaga penjara untuk membebaskan tahanan mulai terjadi. Akibatnya, VOC semakin tidak senang dan penjagaan diperketat. Tanggal 25 Juli 1740 keluarlah resolusi untuk menangkapi orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan (Wijayakusuma, 2005: 95). Aturan ini lantas dijadikan alasan untuk memeriksa dan berbuat sewenang-wenang pada siapa saja orang Tionghoa yang dijumpai. Sebagai reaksi, Kapitan Nie Hoe Kong tidak peduli dengan resolusi tersebut.

Pada akhir September 1740 berkumpul kira-kira seribu orang di pabrik gula Gandaria. Di bawah pimpinan Wang Tai Pan alias Wang Pan Kuan yang dijuluki Khe Panjang alias Kapitan Sepanjang, mereka merencanakan perlawanan terhadap VOC. Tepat tanggal 27 September 1740, sebanyak 600-an orang Tionghoa bergerak mendekati pos penjagaan dan berhasil menghabisi lima puluh orang tentara VOC (Wijayakusuma, 2005: 98). Beberapa hari kemudian, VOC

mengutus van Imhoff dan van Aaerden menuju Tanah Abang untuk berunding dengan Tan Wan Soei, salah satu pimpinan perlawanan Tionghoa, namun gagal. Malahan pada tanggal 7 Oktober 1740, tepat pukul 09.00, pos de Qual diserang sekelompok pejuang Tionghoa berjumlah kira-kira 500 orang. Pada sore harinya, mereka bahkan sudah berada di depan tembok kota Batavia dan siap menyerang. VOC pun semakin khawatir perlawanan Tionghoa ini terus bertambah dan melibatkan penduduk yang berada di dalam kota Batavia.

Pada tanggal 9 Oktober 1740 VOC dapat memukul mundur para pejuang Tionghoa dan menahan mereka untuk diasingkan ke Sri Lanka. Kabar angin yang beredar di kemudian hari, dalam pelayaran menuju Sri Lanka, para tahanan ini dibuang ke tengah lautan. Pada tanggal yang sama, rumah Kapitan Nie Hoe Kong dan rumah-rumah di sekitarnya dikepung oleh VOC (Vermeulen, 2010: 71–72; Wijayakusuma, 2005: 98). Meriam ditembakkan bertubi-tubi, warga Tionghoa pun mencoba melarikan diri, namun mereka telah dihadang oleh pasukan VOC. Orang-orang Tionghoa yang ketahuan menyelamatkan diri ini diburu dan dibantai. VOC terus melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah. VOC sudah bulat tekat menghabisi semua warga Tionghoa dengan alasan curiga bahwa orang-orang Tionghoa di dalam maupun di luar benteng kota sudah bersekutu untuk melawan VOC dan didukung oleh Kapitan Nie Hoe Kong.

Keesokan harinya, 10 Oktober 1740, pembunuhan massal belum mereda bahkan semakin mengerikan (Wijayakusuma, 2005: 103). Valckenier, Gubernur Jenderal VOC, bahkan mendukung upaya pembantaian yang dilakukan oleh orang ketiga dengan hadiah uang untuk setiap kepala warga Tionghoa yang berhasil dipancung. Mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan, kali, dan kanal dilempar ke aliran Kali Angke. Karenanya, istilah Angke berasal dari bahasa Tionghoa, *ang*

berarti merah, dan *ke* yang artinya kali. Disebut Angke karena air sungai saat itu memerah tercampur darah segar dari orang-orang Tionghoa yang dibantai. Kendati ada sumber lain mengatakan bahwa nama Angke sudah ada jauh sebelum tragedi muara angke tahun 1740 terjadi. Sementara itu, perlawanan dari warga Tionghoa di luar kota Batavia terus berlangsung sampai tanggal 11-12 Oktober 1740. Serangan demi serangan dapat dilumpuhkan pihak VOC dan jatuh banyak korban dari Tionghoa.

Sejak tragedi ini, kondisi perekonomian di Batavia hancur. Lumpuhnya perekonomian yang selama ini hidup karena keberadaan orang-orang Tionghoa menyadarkan VOC. Tak lama VOC menyerukan pengampunan umum pada orang-orang Tionghoa. Mereka ini lantas dialokasikan pada suatu tempat di luar benteng kota yang disebut *Dietsport* atau sekarang bernama Glodok. Peristiwa ini juga menjadi awal dari rangkaian peristiwa rasis anti-Tionghoa yang berlangsung ratusan tahun pada zaman Belanda maupun Republik Indonesia. Mulai saat itu berlaku *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* (Setiono, 2008: 130). *Wijkenstelsel* merupakan aturan mengenai permukiman khusus bagi orang Tionghoa (*ghetto*) yang berkembang menjadi pecinan dan dipimpin oleh *wijkmeester* (*loh tia*). *Passenstelsel* merupakan izin bepergian keluar daerah pecinan dari penguasa Belanda lewat para opsir Tionghoa (kapitan).

Gambar 37. Kawasan Glodok tahun 1938 dengan deretan toko obat

Sumber: Instagram Ringkasan Sejarah

Valckenier selaku gubernur jenderal dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi Muara Angke 1740. Akan tetapi, Valckenier melemparkan tanggung jawab itu pada van Imhoof, anggota dewan majelis VOC, yang disebutnya ikut menyetujui keputusan pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa. Pada akhirnya ,Valckenier diberhentikan dari jabatannya dan kembali ke Belanda. Sementara itu, van Imhoff yang turut ke Belanda malahan diperintahkan untuk kembali dan menjabat sebagai gubernur jenderal VOC yang baru (1741-1750). Gubernur jenderal baru inilah yang memberi pengampunan umum dan menyediakan kawasan Glodok sebagai pusat permukiman Tionghoa di Batavia. Sementara itu, tuduhan terhadap Kapitan Nie Hoe Kong yang dianggap mendukung perlawanan orang-orang Tionghoa tetap menjalani persidangan. Pada tanggal 16 Juni 1744 keluar putusan VOC untuk mengasingkan Nie Hoe Kong bersama istri dan anaknya ke Ambon, Maluku. Nie Hoe Kong wafat di pengasingan pada tanggal 25 Desember 1746.

Laskar Gabungan Tionghoa-Jawa

Setelah semua mereda, ternyata di luar Batavia masih banyak kelompok-kelompok Tionghoa yang melakukan gerakan. Beberapa ribu orang Tionghoa terdapat di Kampung Melayu, Selapanjang, Tanjung Priok, Sukapura, Kaliabang, dan Bekasi. Upaya pengejaran yang terus dilakukan VOC membuat kelompok-kelompok ini menyebar antara lain ke Priangan dan sebagian ke timur. Kelompok Tionghoa di bawah pimpinan Khe Panjang mencari perlindungan ke Semarang. Tidak sedikit pimpinan daerah yang mencoba bersikap menolak rombongan ini sekadar agar tidak dicurigai oleh VOC. Misalnya, di Cirebon, laju kedatangan pasukan Khe Panjang seolah dihambat, namun kenyataannya rombongan bisa tetap lewat dengan menyeberangi Sungai Losari. Pada dasarnya, memang para penguasa setempat dan para pasukan bersimpati dengan perjuangan orang-orang Tionghoa (Daradjadi, 2013: 163).

Jumlah pasukan Khe Panjang cukup besar dan selama perjalanan menuju Semarang terus bertambah. Di Tegal, orang-orang Tionghoa di bawah pimpinan Kwee Lak Kwa menyambut gembira dan bergabung untuk menyerang pos-pos VOC di kawasan Tegal. Pada tahun 1742, Kwee Lak Kwa tertangkap VOC, namun kemudian dikabarkan menghilang. Sejak saat itu para nelayan kerap melihat penampakan sosok Kwee Lak Kwa yang menolong saat mereka mengalami kesusahan di lautan. Untuk menghormati kepahlawanan Kwee Lak Kwa, yang dianggap dewa asli Indonesia, dibangunlah Kelenteng Tek Hay Kiong di Tegal. Kelenteng ini menjadi kelenteng terbesar yang menghormati Kwee Lak Kwa. Sementara kelenteng pertama untuk menghormati Kwee Lak Kwa atau Kongco Tek Hay Cin Jin dibangun di Gang Pinggir Semarang dan bernama Kelenteng Tek Hay

Bio. Kelenteng ini merupakan kelenteng keluarga atau marga (she) Kwee.

Pasukan Tionghoa dari Tegal meneruskan perjalanan ke Semarang, namun ada juga yang bergerak menuju daerah Kedu. Kala itu memang secara sporadis terbentuk satuan-satuan Tionghoa di berbagai wilayah Jawa. Akan tetapi, yang paling banyak berada di Tanjung atau Welahan dan sekitar Semarang. Di Semarang dan sekitarnya juga mulai meletus pertempuran-pertempuran melawan VOC. Hal ini ternyata cukup mengejutkan Bartholomeus Visscher, pimpinan wilayah VOC di Semarang.

Perkembangan situasi ini sebenarnya menarik perhatian Sunan Paku Buwana II, Raja Mataram yang bertakhta di Keraton Kartasura. Paku Buwana II sempat berpikir untuk memihak pasukan Tionghoa dengan membantu mereka melawan VOC setelah sebelumnya meragukan kemampuan berperang orang-orang Tionghoa yang tampak lemah. Akan tetapi, beberapa bupati pesisir menyarankan agar Paku Buwana II tidak melawan VOC karena akan berakibat fatal bila kalah. Paku Buwana II yang terombang-ambing dalam mengambil keputusan ini akhirnya memilih diam. Paku Buwana II menanti jawaban VOC tentang imbalan yang diberikan bila Mataram membantu VOC menumpas pasukan Tionghoa. Jika tidak ada imbalan maka Mataram akan membantu pasukan Tionghoa untuk menggempur VOC.

Pada tanggal 1 Agustus 1741 pasukan Tionghoa tiba di Kartasura. Mereka menghadap Paku Buwana II untuk diambil sumpah kesetiaannya. Dalam pertemuan itu, selain pasukan Tionghoa pimpinan Khe Panjang, juga ada laskar Tionghoa setempat di bawah pimpinan Tan Sin Ko alias Singseh. Pada tanggal 5 Agustus 1741, pasukan gabungan Tionghoa-Jawa ini melakukan serangan atas benteng pertahanan VOC di Kartasura. Serangan ini berhasil melumpuhkan VOC.

Pada tanggal 10 Agustus 1741, VOC di Kartasura di bawah pimpinan Van Velsen resmi menyatakan menyerah (Daradjadi, 2013: 182). Sementara itu, di Semarang ternyata pertahanan pasukan Tionghoa melemah karena terlalu berkonsentrasi di Kartasura. Sisa-sisa pasukan dan permukiman Tionghoa di Semarang diserang oleh VOC. Mendengar kabar ini, Paku Buwana II memerintahkan Notokusumo dan Khe Panjang untuk menyiapkan pasukan ke Semarang.

Kala itu Keraton Mataram menyerukan perang semesta di seluruh Jawa terhadap kekuatan VOC. Sayangnya, tidak semua bupati di daerah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seruan ini. Bala bantuan pasukan VOC dari Batavia juga terus berdatangan ke Semarang. Sementara itu, pasukan Tionghoa-Jawa di tempat-tempat persembunyian juga merasakan keletihan dan kejenuhan luar biasa. Salah seorang pimpinan pasukan Tionghoa, Kwee An Say berinisiatif membangun benteng kayu (*Pan Shia*) di belakang Pacinan barat (Daradjadi, 2013: 194). Sayangnya, pertahanan ini ketahuan dan dimusnahkan oleh VOC. Bahkan Kwee An Say juga terbunuh dalam pertempuran mempertahankan benteng. Pasukan Tionghoa sulit mempertahankan benteng karena kurangnya tenaga. Pasalnya banyak di antara mereka yang dikirim untuk membantu pasukan Tionghoa di berbagai tempat yang menghadapi kekalahan saat melawan VOC. Pasukan Khe Panjang masih bertahan di Bukit Bergota, sementara pasukan Singseh membangun barikade di sekitar Terboyo dan Kaligawe. Akan tetapi, berbagai kekalahan beruntun mulai terjadi.

Gambar 38. Monumen Perang Laskar Tionghoa-Jawa melawan VOC di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Sumber: https://tirto.id

Berbagai situasi yang menyulitkan ini, membuat Paku Buwana II menyatakan keinginannya untuk berhenti melawan VOC. Negosiasi antara Keraton Mataram dan VOC segera diadakan. Hasilnya Keraton Mataram bersedia memisahkan diri dari pasukan Tionghoa. Bahkan Notokusumo lantas diperintahkan untuk berbalik membantu VOC dan memerangi pasukan Tionghoa. Notokusumo dan Bupati Martapuro dari Grobogan menolak perintah ini maka dibuatlah perjanjian rahasia. Pasukan Mataram akan berpura-pura menyerang laskar Tionghoa. Serangan pura-pura ini kemudian dilancarkan di sekitar Bukit Bergota, pertahanan pasukan Khe Panjang. Pasukan Tionghoa dibiarkan lari ke arah Demak, bahkan Martapuro bergabung dengan pasukan Tionghoa.

Sunan Kuning

Sisa-sisa pasukan Tionghoa-Jawa ini menaruh simpati pada Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning. Julukan Sunan

Kuning berasal dari kata *cun ling* (bangsawan tertinggi) atau orang Tionghoa menyebutnya Soen An Ing. Sunan Kuning adalah cucu dari Amangkurat III. Pengangkatannya sebagai Amangkurat V merupakan bentuk kekecewaan terhadap Paku Buwana II yang berbalik dan bersekutu dengan VOC. Pada tanggal 30 Juni 1742, pasukan Sunan Kuning bersama dengan Khe Panjang dan Martapuro memasuki Kartasura (Daradjadi, 2013: 221). Keraton Kartasura pun luluh lantak, bahkan Paku Buwana II bersama Kapten Von Hohendorff, pemimpin VOC di Kartasura, dan beberapa pengawal raja melarikan diri ke timur menyeberangi Kali Bengawan Solo menuju arah Magetan.

Pada waktu Paku Buwana II meninggalkan keraton, Sunan Kuning masih berada di Desa Ngasem. Karenanya, di saat tidak ada raja yang bertakhta di singgasana, masuklah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi berhasil mengamankan tombak Kyai Pleret dan Raden Mas Said mendapatkan pusaka Kyai Bedudak. Menurut keyakinan, kelak kedua pusaka keramat ini mengantarkan keduanya sebagai raja. Pangeran Mangkubumi menjadi Hamengku Buwana I dan Raden Mas Said memerintah suatu daerah praja dengan gelar Mangkunegara I (Daradjadi, 2013: 226).

Mulai tanggal 1 Juli 1742, Sunan Kuning yang bergelar Amangkurat V resmi bertakhta di Keraton Kartasura. Kekuasaannya tidaklah lama, tanggal 26 November 1742, pasukan Madura di bawah pimpinan Cakraningrat IV menyerang Keraton Kartasura. Setelah berhasil menduduki keraton, ada gelagat kurang baik maka VOC membujuk Cakraningrat IV agar mau menyerahkan keraton pada Paku Buwana II. Sembari menunggu kepulangan Paku Buwana II, penjagaan di Kartasura diperketat oleh VOC. Sementara itu, Sunan Kuning dengan penjagaan laskar Tionghoa meninggalkan

keraton menuju Randulawang, dekat Candi Prambanan. Sejak saat itu persembunyiannya selalu berpindah-pindah. Sunan Kuning nantinya tertangkap di Surabaya dan diasingkan oleh VOC ke Sri Lanka (Daradjadi, 2013: 276).

Keraton Kartasura tidak pernah dibangun kembali setelah kehancurannya. Dengan anggapan keraton sudah tercemar maka Paku Buwana II mendirikan keraton baru di Desa Sala yang kemudian menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Tak hanya itu sebagai kompensasi perang, Paku Buwana II harus menandatangani kontrak penyerahan beberapa wilayah kepada VOC. Perang yang berlangsung pada tahun 1740-1743 oleh Luc Nagtegaal disebut sebagai perang terbesar yang pernah dihadapi oleh VOC (Daradjadi, 2013: 273). Khe Panjang tak diketahui rimbanya, konon dia berkelana sampai di wilayah Bali. Terakhir terlihat di muka umum pada tahun 1758 di Istana Gusti Agung Bali. Beberapa tempat yang pernah disinggahinya oleh masyarakat setempat dinamakan dengan memakan nama Sepanjang. Jauh sebelumnya, ketika perang masih berkecamuk, Singseh terbunuh dalam suatu pertempuran di daerah Rembang.

Kendati diyakini sebagai perang terbesar yang konon lebih besar dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), namun kisah sejarah tentang perang persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC ini tidak pernah dibicarakan dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Terkait Perang Jawa juga didapati kontribusi Tionghoa. Tercatat sekelompok pasukan Pangeran Diponegoro ada yang dicukupi makan dan kemungkinan juga dilatih silat oleh Tan Jin Sing atau KRT Secodiningrat, Bupati Yogyakarta (Carey, 2014). Sebutan sebagai perang terbesar di Jawa tampaknya tidak berlebihan karena memang pengaruhnya cukup signifikan dan memicu perlawanan-perlawanan terhadap VOC di berbagai daerah. Hampir seluruh Jawa terlibat dalam peperangan ini mulai

dari Tegal, Semarang, Rembang, Kedu, Kartasura, hingga Jawa Timur. Salah satunya pertempuran yang terjadi di Lasem.

Gambar 39. Altar Raden Panji Margono di Kelenteng Gie Yong Bio Lasem

Sumber: Dokumentasi penulis

Perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap VOC di Lasem berlangsung pada tahun 1742 dan 1750. Perlawanan itu dipimpin oleh tiga orang bersaudara. Atas dasar semangat dan cita-cita bersama, ketiga orang ini menjalankan upacara sumpah sebagai saudara angkat. Mereka adalah Raden Ngabehi Widyadiningrat (Oei Ing Kiat), Raden Panji Margono (putra dari Tedjakusuma V), dan Tan Kee Wie. Oei Ing Kiat adalah Adipati Lasem (1727-1743), kemudian menjadi Mayor Lasem (1743-1750). Oei Ing Kiat gugur dalam perlawanan terhadap VOC di Layur, Lasem Utara tahun 1750 dan dimakamkan di Gunung Bugel, Lasem. Raden Panji Margono adalah Adipati Lasem (1714-1727). Beliau juga gugur dalam perlawanan terhadap VOC di Narukan, Lasem Barat tahun 1750 dan dimakamkan di Dorokandang, Lasem. Tan Kee Wie

adalah seorang pendekar kungfu dan pengusaha di Lasem. Tan Kee Wie gugur tertembak meriam VOC di selat antara Pulau Mandalika dan Ujung Watu, Jepara pada tahun 1742. Untuk menghormati ketiganya didirikan Kelenteng Gie Yong Bio Lasem pada tahun 1780. Ini menjadi satu-satunya kelenteng yang memiliki altar khusus untuk kongco dari kalangan Jawa, Raden Panji Margono.

TIONGHOA, KERATON, DAN PESISIRAN

Secara demografis, pada masa tumbuh kembang keraton-keraton Jawa (kerajaan-kerajaan Islam) sekitar abad ke-16, dikenal perbedaan antara Jawa pedalaman dan Jawa pantai atau pesisir (De Graaf & Pigeud, 1974: 301). Pedalaman dimaksudkan pada kawasan yang jauh dari pantai utara Jawa, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Jawa terbesar, yakni Mataram. Pesisir utara Jawa dianggap sebagai kawasan yang relatif lebih terbuka, termasuk dalam menerima pengaruh dari para pendatang baru. Hal ini tampak dari dialek bahasa, budaya yang berkembang, dan sifat masyarakatnya. Salah satu yang tajam, yakni perbedaan warna dan corak batik. Batik keraton atau batik *Vorstenlanden* cenderung didominasi warna gelap (hitam atau coklat) dan putih dengan corak yang relatif seragam. Batik pesisir berwarna cerah (merah, hijau, kuning, biru) dengan corak yang sangat beragam.

Selain budaya, perbedaan lebih spesifik terkait dengan status politik di Keraton Mataram (Moertono, 2017: 145). Kawasan keraton disebut sebagai *kutagara* (kota negara). Wilayah seputar keraton atau daerah pusat, inti, dalam,

disebut *nagaragung* (negara agung atau daerah besar). Wilayah luar keraton disebut *mancanegara* terdiri dari *mancanegara kilen* (wilayah barat: Kedu, Purworejo, Banyumas) dan *mancanegara wetan* (wilayah timur: Jawa Timur). Wilayah luar di pantai utara Jawa yang disebut *pasisiran*. Pasca-Perjanjian Giyanti 1755, wilayah pesisir jatuh ke tangan VOC. Sementara wilayah yang masih di bawah kekuasaan keraton inilah yang disebut daerah *Vorstenlanden* atau daerah swapraja (otonom). Wilayah ini terbagi antara milik Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Tionghoa Yogyakarta

Ada banyak kisah mengenai perjumpaan Tionghoa dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Salah satu kisah menarik tentang Tionghoa di Keraton Mataram terkait dengan kemunculan Kadipaten Pakualaman. Kekuasaan Paku Alam muncul sebagai pecahan terakhir dari keturunan trah Mataram. Sebelumnya ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang muncul akibat Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kemudian, disusul Kadipaten Mangkunegaran yang merupakan pecahan Kasunanan Surakarta melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757.

Kadipaten Pakualaman resmi berdiri tanggal 17 Maret 1813 ditandai dengan ditandatanganinya kontrak politik antara Pangeran Notokusumo dengan Residen Yogyakarta, John Crawfurd. Kala itu pemerintah Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles tengah bercokol setelah berhasil merebut Pulau Jawa dari tangan Janssens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pengganti Daendels. Pangeran Notokusumo adalah putra dari Sri Sultan HB I yang berjasa dalam memberi dukungan atas naiknya Pangeran Surojo sebagai Sri Sultan HB III.

Atas jasanya itu Pangeran Notokusumo berhak atas 4000 cacah tanah yang meliputi wilayah di sebelah timur Kasultanan Yogyakarta dan Kabupaten Adikarto. Pangeran Notokusumo kemudian diangkat sebagai Pangeran Amardika (pangeran yang merdeka) dan menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam I. Bahkan Notokusumo juga diperkenankan memiliki 100 orang prajurit dan membangun istananya di dekat Keraton Yogyakarta.

Kisah dimulai dengan naiknya Pangeran Surojo sebagai Sri Sultan HB III selain karena dukungan Notokusumo juga tidak lepas dari peran Tan Jin Sing, seorang Kapitan Tionghoa di Yogyakarta (1802-1813). Sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa, Tan Jin Sing menjadi tokoh yang cukup berpengaruh di Yogyakarta. Beliau memiliki relasi yang baik dengan John Crawfurd selaku kepanjangan tangan dari Raffles. Notokusumo dan Tan Jin Sing kemudian dipercaya menjadi penghubung antara pihak keraton dengan Inggris (Werdoyo, 1990).

Setelah Pangeran Surojo berhasil naik takhta dan Notokusumo juga diangkat sebagai Paku Alam I, maka Tan Jin Sing pun diberi jabatan prestisius sebagai Bupati Yogyakarta (1813-1831). Tan Jin Sing juga dipercaya untuk membantu mengurus pungutan pajak di daerah Kedu. Tan Jin Sing kemudian diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Secodiningrat. Tan Jin Sing pun tinggal tidak jauh dari keraton, yang kini disebut sebagai Kampung Ketandan. Nama ini berasal dari kata *tandha* yang artinya pemungut pajak. Karenanya, terjalinlah relasi kepemimpinan yang baik antara Sri Sultan HB III, Paku Alam I, dan KRT Secodiningrat sebagai Bupati Yogyakarta.

Kedudukannya sebagai Bupati membuat Tan Jin Sing semakin menghayati kebudayaan Jawa. Ia bahkan dianggap menghasilkan suatu akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa.

Kemampuan menjembatani berbagai budaya membuat Tan Jin Sing dijuluki *Cina wurung, Landa durung, Jawa tanggung* (tidak lagi Tionghoa, Belanda belum, Jawa pun setengah-setengah). Saat itu pun mulai banyak pedagang Tionghoa yang tidak lagi menguasai bahasa Tionghoa dan lebih sering menulis dengan aksara Jawa. Orientasi sosial budaya Tionghoa pada waktu itu lebih mengarah ke Jawa. Peran diplomatik yang dimainkan oleh Tan Jin Sing memperlihatkan bahwa hubungan Tionghoa dengan keraton sejak dahulu begitu baik.

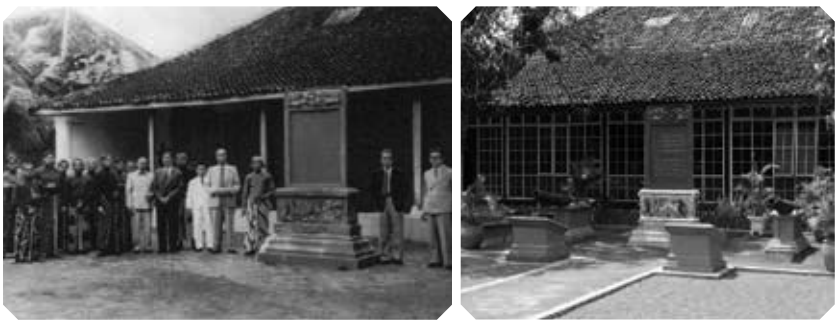

Gambar 40. Prasasti Tionghoa di bangsal Trajumas (dahulu dan sekarang)

Sumber: http://jogjadiluhung.blogspot.com/ dan http://leonyleony.blogspot.com/

Relasi erat Tionghoa-Jawa juga tampak saat peringatan *Jumenengan Dwi Windu* Sultan Hamengku Buwono VIII tahun 1936. Masyarakat Tionghoa bersama pegawai pemerintahan mempersembahkan tugu jam sebagai rasa hormat dan terima kasih. Tugu jam ini masih dapat dijumpai di bagian depan pintu barat keraton. Awalnya hanya beraksara Jawa, namun tahun 2002 dilengkapi dengan aksara Tionghoa, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pada masa perang kemerdekaan, tepatnya 18 Maret 1940, masyarakat Tionghoa juga memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih atas jaminan perlindungan dari Sultan Hamengku Buwono IX. Penghargaan tersebut berupa prasasti besar yang terbuat

dari marmer asli dari Tiongkok bertuliskan aksara Tionghoa dan Jawa. Prasasti ini dapat dijumpai di depan Tepas Dwarapura sebelah timur Bangsal Trajumas.

Terkait hubungan Tionghoa dengan pihak keraton yang sampai sekarang kontroversial terkait dengan masalah hak kepemilikan tanah. Sebagian besar, kalau tidak disebut seluruhnya, tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dimiliki oleh keraton entah Kasultanan Yogyakarta (*Sultan Ground*) maupun Kadipaten Pakualaman (*Pakualaman Ground*). Pada tahun 1975 keluarlah Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang larangan kepemilikan hak atas tanah bagi warga nonpribumi. Kendati disebut nonpribumi, namun aturan ini lebih banyak menjerat warga keturunan Tionghoa saja. Sementara keturunan lain, asalkan sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), hampir tidak pernah diberitakan bersinggungan dengan aturan ini.

Kendati diakui bersifat diskriminatif oleh banyak ahli, namun aturan ini dianggap sebagai diskriminasi positif. Alasannya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Hal ini konon efektif, hampir tidak pernah ada gesekan antaretnis selama ini di Yogyakarta. Akan tetapi, masihkah ini relevan? Apakah semua orang Tionghoa kaya? Atau bisa juga dibalik, apakah semua orang kaya itu Tionghoa? Lebih jauh lagi, tepatkah Tionghoa dianggap nonpribumi? Siapa sebenarnya nonpribumi? Apakah nonpribumi merujuk pada Warga Negara Asing (WNA)? Jika demikian, bagaimana dengan Tionghoa yang sudah menjadi WNI? Malahan sejak 1999, istilah pribumi dan nonpribumi sudah dihapus oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang Kewarganegaraan yang baru Nomor 12 Tahun 2006 juga patut menjadi rujukan, atau sudah tepatkah aturan keistimewaan daerah menjadi pijakan instruksi ini? Berefleksi dari per-

tanyaan-pertanyaan tersebut akan mendorong perlunya kita mengkaji kembali hal ini.

Tionghoa Solo

Meski berdekatan, bahkan sering disebut kota kembar, ada yang berbeda antara Yogyakarta dengan Solo terkait relasi Tionghoa-Jawa. Solo sempat menyandang predikat kota dengan sumbu pendek soal konflik antaretnis. Tentu ada akar sejarahnya sehingga hal demikian bisa terjadi. Gelombang kedatangan etnis Tionghoa di Solo berawal dari konflik internal Keraton Surakarta yang berpihak pada VOC. Persoalan ini kemudian berujung pada serangan Pasukan Kuning atau Geger Pacinan di Kartasura. Keraton lantas berpindah dari Kartasura ke Surakarta. Orang-orang Tionghoa berdatangan ke Solo bersamaan dengan didirikannya keraton baru. Pola ini sama dengan yang terjadi di Kotagede maupun Yogyakarta. Di Solo awalnya mereka hanya boleh tinggal di daerah Pasar Gede yang kemudian dikenal sebagai Kampung Balong. Pasar Gede juga merupakan kota pelabuhan dalam pelayaran sungai dan kota dagang. Untuk mengontrol warga Tionghoa, Belanda menunjuk seorang pimpinan dengan pangkat mayor. Babah Mayor yang terkenal bernama Babah Long sehingga kampungnya disebut Balong. Akan tetapi, ada versi lain yang mengatakan bahwa Kampung Balong merupakan bekas bong (pekuburan Tionghoa) sehingga Balong dari kata balung (tulang). Beberapa kampung lain yang juga ditinggali etnis Tionghoa sejak dulu dan hidup harmonis dengan penduduk setempat antara lain Sudiroprajan, Kepanjen, Ketandan, Mijen, dan Limolasan.

Kini masyarakat Tionghoa di Solo sudah semakin berpencar-pencar tinggalnya, namun sebagian besar meyakini nenek moyangnya berasal dari Kampung Balong. Kebanyakan dari mereka adalah Tionghoa menengah ke bawah. Anak

hasil kawin lokal ini disebut *ampyang* yang sudah tidak menggunakan bahasa Tionghoa lagi, namun bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari (Kinasih, 2005: 92). Struktur masyarakat Tionghoa Solo sifatnya khas, berbentuk belah ketupat. Lapisan atas adalah kalangan elite yang jumlahnya sedikit sama halnya dengan lapisan bawah yang hidupnya kekurangan. Kelas menengah jumlahnya paling banyak dan paling rawan terhadap gesekan konflik. Miris selama ini ketika gejolak sosial terjadi maka kelompok menengah biasa menjadi sasaran.

Sejarah telah membuktikan bahwa sentimen kolektif di Solo sudah berakar. Perkelahian antara Rekso Rumekso (perkumpulan pengusaha batik Jawa) dengan Kong Sing (perkumpulan pengusaha batik Tionghoa) menjadi awal konflik. Hal ini seiring dengan lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) di Laweyan tahun 1905 oleh H. Samanhudi. Gerakan anti-Tionghoa kemudian muncul pula menjelang kedatangan Jepang tahun 1940. Pada masa kemerdekaan, di Solo juga pernah terjadi kerusuhan anti-Tionghoa tahun 1963, 1980, hingga 1998. Untuk ketiga terakhir ini penyebabnya beragam. Ada yang memang dipengaruhi situasi politik saat itu, namun ada pula yang bermula dari masalah pribadi seperti kerusuhan tahun 1980.

Kelenturan komunikasi pasca 1998, membawa perubahan besar bagi relasi Tionghoa-Jawa di Solo. Salah satu hal yang membantu dalam proses interaksi ini adalah adanya organisasi-organisasi sosial Tionghoa yang bersifat paguyuban. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan karitatif dengan mengandalkan fokus pada kalangan bawah. Misalnya, Persatuan Masyarakat Surakarta (PMS), Perkumpulan Hoo Hap, dan lainnya. Oleh karena itu, tidak heran bila kini saat Hari Raya Imlek, kawasan Pasar Gede termasuk Kampung Balong berubah merah dengan hiasan

khas Tionghoa. Grebeg Sudiro juga digelar menyambut keharmonisan antaretnis di Solo. Inilah yang harus kita jaga.

Sejarah juga mencatat kontribusi masyarakat Tionghoa yang besar di Solo. Pascareformasi tahun 2008 diresmikan nama sebuah ruang jalan di kawasan Jagalan, Jebres: Jalan Drs. Yap Tjwan Bing. Pemerintah Kota Surakarta memberi penghargaan atas jasa beliau sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Drs. Yap Tjwan Bing adalah seorang apoteker asal Slompretan, Solo. Tokoh lainnya, yakni dr. Oen Boen Ing yang mendirikan Rumah Sakit Panti Kosala. Rumah sakit ini bermula dari Poliklinik Tsi Sheng Yuan yang didirikannya. Sepeninggal dr. Oen tahun 1982, nama rumah sakit diubah menjadi RS dr. Oen. Perubahan nama ini sempat menuai kontroversi karena prosesnya terjadi pada zaman Orde Baru berkuasa. Ketika itu seluruh hal yang berkaitan dengan Tionghoa dilarang. Pada masa Orde Baru hanya RS Mata dr. Yap di Yogyakarta dan RS dr. Oen di Solo yang menggunakan nama Tionghoa. Rumah Sakit Mata dr. Yap didirikan pada tahun 1923 oleh dr. Yap Hong Tjoen. Oen Boen Ing mendapat penghargaan dari Pura Mangkunegaran atas jasa-jasa dan juga perhatiannya pada rakyat miskin. Sang dokter terakhir diganjar gelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Obi Darmohoesodo (Ravando, 2017).

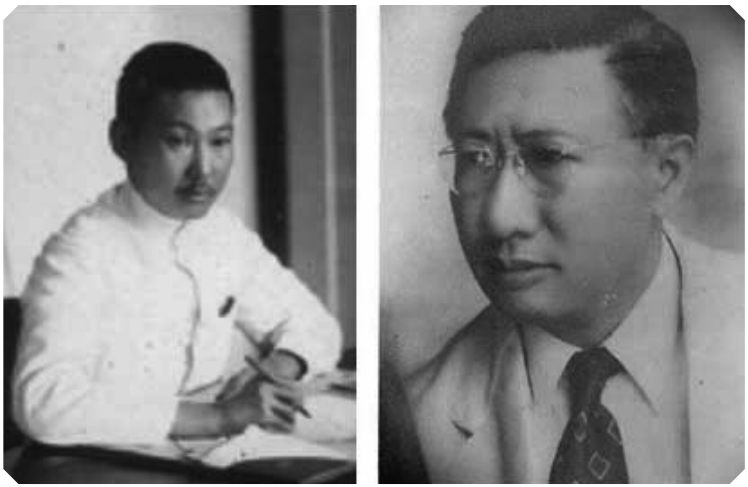

Gambar 41. dr. Yap dan dr. Oen

Sumber: https://yap.or.id/sejarah-1.html dan https://www.wikitree.com/wiki/Oen-12

Kisah dr. Oen yang peduli pada rakyat kecil ini ternyata menginspirasi dr. Lo Siaw Ging. Dokter berjiwa sosial ini juga menjadi salah satu pendiri RS Kasih Ibu Solo. Dalam menolong pasien yang tidak mampu, dr. Lo tidak mau dibayar. Bahkan kalau perlu dia ikut membiayai pasiennya itu sampai sembuh. Selama lima belas tahun, dr. Lo memang pernah belajar dari dr. Oen dengan bekerja di poliklinik Tsi Sheng Yuan. Kini dr. Lo sudah berusia senja dan kesehatannya labil, namun masih setia membuka praktik dan menggratiskan biayanya. Kisah dermawan para dokter Tionghoa ini juga dapat kita dengar dari dr. Lie Tek Bie (Lie Augustinus Dharmawan) yang mendirikan rumah sakit apung pertama di Indonesia. Rumah sakit di atas kapal milik dr. Lie ini melayani penduduk pulau-pulau terpencil di seluruh pelosok Tanah Air. Sudahkah kita menghargai jasa mereka yang luar biasa? Terinspirasikah kita dengan perjuangan mereka?

Lasem: Tiongkok Kecil

Bergeser ke salah satu kota pesisir pantai utara Jawa yang cukup dominan pengaruh Tionghoa, yakni Lasem. Sejarah mencatat kota kecil di Jawa Tengah ini mendapat julukan sebagai *Petit Chinois* atau Tiongkok kecil. Ada banyak peninggalan Tionghoa di sana yang menunjukkan betapa masyarakat Tionghoa dan budayanya telah membaur secara harmonis selama berabad-abad. Rumah-rumah kuno berarsitektur Tionghoa dengan mudahnya dijumpai, kampung-kampung bergaya Tionghoa dengan kehidupannya sehari-hari, dan berbagai kegiatan adat yang khas Tionghoa.

Selain peninggalan budaya, artefak, dan bangunan khas Tionghoa, Lasem dapat menjadi contoh baik harmoni sosial di Indonesia. Lasem menyimpan *sosiofact* yang dapat menjadi warisan penting bagi kehidupan bersama dewasa ini. Budaya Tionghoa di Lasem tumbuh bersama dengan budaya Jawa yang ada. Keduanya menyatu dan menjelma menjadi sebuah kebudayaan lokal yang baru, khas Lasem. Hal ini menjadi kekuatan yang mampu mempersatukan elemen-elemen sosial masyarakat di sana dalam kehidupan penuh harmoni.

Pada awalnya Lasem berkembang dari sebuah kota pelabuhan Kerajaan Majapahit di pesisir pantai utara Jawa. Pada masa kolonial Belanda, Lasem pernah menjadi kota kabupaten. Sejak tahun 1750, ibukota kabupaten dipindahkan ke Rembang. Lasem lantas berubah menjadi kota kecamatan sampai sekarang. Sejarah panjang yang membentuknya membuat Lasem memiliki keistimewaan. Lasem menjadi satu-satunya kota kecamatan di Indonesia yang memiliki tiga buah kelenteng, yaitu Kelenteng Cu An Kiong, Gie Yong Bio, dan Poo An Bio.

Keistimewaan ini membuktikan bahwa Lasem menjadi pusat permukiman orang-orang Tionghoa di Jawa. Tak

heran ketika terjadi perlawanan Tionghoa di Batavia yang berakhir pada pembantaian massal di Muara Angke tahun 1740, pelarian orang-orang Tionghoa memilih menuju Lasem untuk berlindung. Lasem lantas dianggap sebagai sarang perlawanan laskar Tionghoa-Jawa ketika Perang Kuning atau Geger Pacinan meletus (1740-1743). Daradjadi (2013) menceritakan peristiwa bersejarah ini dalam bukunya dengan begitu menarik.

Handinoto (2015) mencatat bahwa kota-kota di Pantura biasanya memiliki dua domain utama yang terpisah. *Pertama*, domain politik yang dikuasai oleh penguasa lokal setempat. *Kedua*, domain ekonomi yang biasanya (hampir selalu) dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Kedua domain ini meskipun terpisah namun saling bergantung. Para pemain di domain politik bisa dengan leluasa memasuki domain ekonomi, namun tidak demikian sebaliknya. Tak heran apabila sampai memasuki era baru pun, orang-orang Tionghoa membawa stempel *animal economics* yang apolitis.

Menariknya hukum ini seolah tidak berlaku di Lasem kala itu. Lasem menghadirkan kekhususan. Handinoto (2015) mengungkapkan bahwa domain politik yang sulit ditembus justru pernah beberapa kali dikuasai oleh Tionghoa. Adipati Lasem tahun 1632-1679 adalah seorang Tionghoa bernama Cik Go Ing (Singawijaya) yang ditunjuk oleh Sultan Agung. Berikutnya pada tahun 1727 atas penunjukkan Sunan Pakubuwana I, Oei Ing Kiat menjadi Tumenggung Lasem dengan gelar Tumenggung Widyadiningrat.

Gambar 42. Salah satu sudut rumah kuno Lasem

Sumber: http://bacasayasaja.blogspot.com/2012/08/

Kemajemukan yang terjadi di Lasem menjadi modal berharga bagi pembangunan dan masa depan kota ini. Budaya mampu membuktikan pemikiran konstruktif ini dengan merangkum keanekaragaman menjadi sebuah karya cipta (*masterpiece*) peradaban umat manusia yang bernilai luhur. *Masterpiece* ini terwujud dalam banyak hal. Arsitektur bangunan kuno di Lasem didominasi perpaduan antara Tionghoa, Jawa, dan pengaruh Belanda. Akulturasi ini tampak pada bangunan kelenteng, rumah tempat tinggal, maupun deretan toko. Selain arsitektur, perpaduan serasi berbagai budaya juga dapat ditemukan dalam batik Lasem. Batik Lasem tergolong dalam batik pesisir dengan ciri khas warna-warna terang yang berbeda dengan batik *vorstenlanden*. Dahulu batik Lasem banyak dipakai oleh kaum perempuan Tionghoa yang disebut sebagai batik nyonya atau batik encim.

Perpaduan budaya yang ditemukan di Lasem masih terus dihidupi hingga kini menggambarkan sebuah harmoni. Keselarasan hidup bersama tertuang dalam simbol budaya yang lantas memberi penguatan pada lokalitas Lasem. Tak heran apabila kini nuansa pecinan di Lasem berkembang

menjadi objek wisata *heritage* yang diburu. Tiongkok kecil, *heritage* Lasem menawarkan objek fotografi dengan bangunan kuno berlanggam perpaduan Tionghoa, Jawa, dan Eropa yang *instagramable*, wisata edukasi, kuliner, hingga pesona batik. Tertarik berkunjung ke Lasem?

Pesisir Jawa Lainnya

Jika komunitas Tionghoa dilihat dari pendekatan historis maka tampak kendati berstatus pendatang, namun bukanlah berarti asing sama sekali. Sejak berabad-abad yang lalu, orang-orang Tionghoa telah membentuk permukiman-permukiman kecil jauh sebelum bangsa Eropa berdatangan di banda-bandar perdagangan pantai Nusantara (Coppel, 1994: 21). Hubungan dagang antara Tiongkok dengan Jawa sudah berlangsung sejak lama. Pada zaman Majapahit, abad XIV, para bangsawan Jawa sudah terbiasa mengimpor barang-barang mewah dari Tiongkok seperti porselen dan kain sutra (Winarni, 2009: 3).

Tak heran apabila sepanjang pesisir Pulau Jawa, orang-orang Tionghoa menjadi pedagang yang berkedudukan penting. Apalagi kemudian terjadi perkawinan antara Tionghoa dengan penduduk setempat. Selanjutnya, banyak Tionghoa peranakan yang lahir dari perkawinan campur ini dan memeluk agama Islam. Dalam kisah tentang Lasem telah diungkap Sultan Agung dari Keraton Mataram mengangkat Cik Go Ing (Singawijaya) seorang pedagang Tionghoa di Lasem sebagai abdi. Para bupati Lasem berikutnya dan berbagai daerah pesisir utara Jawa yang berdekatan, seperti: Tuban, Kudus, Blora, dan Bojonegoro (Rajegwesi) diambilkan dari keturunannya lewat perkawinan dengan keluarga-keluarga Tionghoa maupun dengan keluarga istana (Carey, 1985: 31).

Menurut (Liem, 2004: 1-2) catatan arsip milik seorang Tionghoa, leluhur Tionghoa pertama kali mendarat di Pantai Utara Jawa, yakni di Bantam (Banten) baru kemudian berpencar ke berbagai daerah. Terkait hal ini, pantai utara Semarang memiliki kisah yang terkenal. Semarang menurut C. Lekkerkerker berasal dari kata *asem arang* karena di situ banyak tumbuh pohon *asem* yang daunnya *arang* (jarang). Tokoh yang pertama kali mendarat di pantai utara Semarang setelah dari Banten adalah Sam Poo Tay Djin alias Laksamana Cheng Ho. Peninggalannya sampai sekarang masih ada, yakni Kelenteng Sam Poo Kong. Selanjutnya, orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Semarang memilih tinggal di sekitar Sam Poo Kong, Gedong Batu. Alasannya karena ingin mendapatkan berkah dari Sam Poo Kong.

Alkisah di Gedong Batu pernah tinggal seorang Tionghoa yang terkenal pandai silat bernama Souw Pan Djiang. Selain jago silat, relasinya dengan banyak sahabat di berbagai daerah juga sangat baik. Di rumah Souw Pan Djiang sering kedatangan tamu sahabat-sahabatnya membicarakan soal perdagangan. Latihan silat rutin juga kerap diadakan di sana. Suatu hari Souw Pan Djiang diminta oleh sahabat-sahabatnya yang tinggal di Kartasura untuk ikut ambil bagian dalam menghadapi VOC. Kendati akhirnya berhasil dipukul mundur, namun perang besar tidak terelakkan dan sempat membuat pasukan Sunan Paku Buwana II bersama VOC kewalahan. Sejak itulah VOC meminta agar orang-orang Tionghoa di Gedong Batu pindah ke tengah Semarang agar memudahkan pengawasan. Ada kekhawatiran dari VOC bila kelak orang-orang Tionghoa akan kembali melakukan perlawanan (T. J. Liem, 2004: 5).

Untuk mengatur komunitas Tionghoa yang semakin banyak jumlahnya, Kompeni mengangkat seorang *officer* Tionghoa atau Kapitan Tionghoa. Pada tahun 1672 diangkatlah

Kapitan Tionghoa pertama di Semarang bernama Kwee Kiauw Loo (Kwee Kiauw Khong), seorang saudagar yang sudah berusia tua. Setelah wafat, abu jenazahnya disimpan di Kelenteng Tek Hay Bio (kelenteng keluarga Kwee), Gang Pinggir, Semarang sampai saat ini. Salah seorang Kapitan Tionghoa yang terkenal, yakni Mayor Oei Tiong Ham (1866-1924). Oei Tiong Ham seorang pengusaha sukses bahkan orang terkaya di Asia Tenggara pada awal abad ke-19. Dia dijuluki sebagai Raja Gula dan berhasil mendirikan Oei Tiong Ham Concern sebagai perusahaan multinasional yang menjangkau Asia dan Eropa (T. L. Liem, 2013).

Gambar 43. Mayor Oei Tiong Ham, Raja Gula dari Semarang

Sumber: https://siyusup.wordpress.com/2011/04/21/oei-tiong-ham/

Oei Tiong Ham juga merupakan orang Tionghoa pertama di Jawa yang diizinkan berpakaian Barat setelah mengajukan permohonan (*rekest*) pada pemerintah Kolonial Belanda. Sebelumnya, dengan adanya stratifikasi sosial yang dibuat Belanda, orang-orang Tionghoa tidak boleh memakai jas dan celana pantalon seperti orang Eropa. Bahkan para lelaki Tionghoa harus memelihara kuncir rambut atau *taucang* (*pig tail*). Adat ini dibawa dari Tiongkok sebagai simbol takluk

pada bangsa Manchu yang tengah berkuasa di Tiongkok. Baru pada tahun 1905, orang Tionghoa memperoleh keleluasaan dalam berpakaian dan soal *taucang* (T. J. Liem, 2004: 184). Selanjutnya, pada tahun 1911 ketika Revolusi Tiongkok meletus yang dipimpin oleh dr. Sun Yat Sen dan berhasil menumbangkan Dinasti Manchu maka semua orang Tionghoa memotong kuncirnya.

Dalam kajian filologis de Graaf dan Pigeud tentang naskah Catatan Tahunan Melayu Semarang dan Cirebon (De Graaf, H.J dan Pigeud, 1997) memperlihatkan adanya kaitan antara Tionghoa Semarang dan Cirebon. Menurut kajian itu, sejarah komunitas Tionghoa di Cirebon yang bisa dipercaya dimulai setelah sejarah Semarang, yakni pada periode Demak. Tome Pires menyebutkan adanya hubungan antara Demak dengan Cirebon pada dekade akhir abad ke-15. Keterlibatan orang Tionghoa dalam pendirian Kasultanan Cirebon berkaitan dengan sosok legendaris Sunan Gunung Jati dan penghulu Tionghoa bernama Tan Eng Hoat. Sunan Gunung Jati diajak oleh Tan Eng Hoat untuk mengikuti langkah Tan Jin Bun atau Raden Patah yang mendirikan Kerajaan Demak (Wahid, 2009: 53).

Tokoh legendaris lain yang terkait dengan masyarakat Tionghoa Cirebon, yakni sosok Tan Ong Tien Nio atau putri Ong Tien. Ada pendapat yang mengatakan Ong Tien adalah seorang putri raja dari Tiongkok. Sementara beberapa lainnya berpendapat bahwa Ong Tien adalah putri dari penguasa Kerajaan Campa. Putri Ong Tien menjadi salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Kendati masa hidupnya singkat di Tanah Jawa (1481-1485), namun Putri Ong Tien menjadi bagian dari misi penyebaran agama Islam di Jawa Barat (Gunarti, 2010: xi). Ada banyak bukti peninggalannya yang masih dapat ditemukan, yakni keramik, porselen, dan juga tempat yang dipercaya sebagai makamnya di Kompleks Pemakaman

Gunung Sembung Sunan Gunung Jati. Istimewa karena tidak semua istri Sunan Gunung Jati dimakamkan di tempat itu. Muljana (2005: 103) malahan mengidentifikasi Sunan Gunung Jati sebagai seorang Tionghoa bernama Toh A Bo.

Gambar 44. Makam Putri Ong Tien dengan hiolo dan hiasan keramik

Sumber: https://www.tripadvisor.com/

Berbicara mengenai kota-kota di Pesisir Jawa tentu tak lengkap bila belum menyentuh Surabaya. Sejak dahulu kota ini merupakan kota pesisir terbesar kedua di Jawa setelah Batavia (Jakarta). Komunitas Tionghoa di kota ini termasuk besar dan memiliki ciri khas tersendiri, khususnya soal dialek kaum peranakan. Sejarah mencatat pada tahun 1293 telah didapati komunitas Tionghoa di pinggir timur Kali Mas (daerah Ngampel/Ampel). Komunitas ini dipimpin oleh Bong Swie Hoo yang kelak bernama Raden Rachmad atau Sunan Ampel (De Graaf & Pigeud, 1974: 67; Muljana, 2005: 97). Tokoh besar ini merupakan salah satu dari Wali Sanga yang dihormati sebagai penyiar Islam di Jawa.

Surabaya merupakan kota dagang sejak dahulu. Sebelum ada transportasi darat yang memadai maka aktivitas

perdagangan memanfaatkan transportasi sungai. Kali Mas merupakan muara dari Sungai Brantas yang menjadi jalur transportasi utama. Sungai terbesar di Jawa ini melewati beberapa kota di Jawa Timur. Karenanya, patut diduga kedatangan orang-orang Tionghoa di kawasan pedalaman Jawa Timur, seperti Kediri, Kertosono, dan Mojokerto terjadi melalui pelayaran dan perdagangan sungai hingga kemudian menetap di kota-kota tersebut dan membangun permukiman. Salah satu bukti sejarah yang menguatkan, yakni Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri dibangun menghadap ke Sungai Brantas dan secara khusus menghormati Makco Tian Shang Sheng Mu atau dewi para pelaut dan nelayan. Jelas ini dimaksudkan untuk mengenang para leluhur yang datang lewat Sungai Brantas. Permukiman Tionghoa di Kediri sampai sekarang pun masih eksis di kawasan sekitar kelenteng, seperti di Jalan Yos Sudarso, Jalan dr. Wahidin, Jalan Monginsidi, Jalan Kyai Mojo, Jalan Trunojoyo, hingga Jalan Dhoho.

Gambar 45. Kawasan pelayaran dan perdagangan Kali Mas (circa 1900)

Sumber: https://id.pinterest.com/

Menurut Handinoto (2015), pada abad ke-19, Surabaya semakin menjadi tujuan utama bagi orang-orang Tionghoa untuk bermukim di sana, terlebih setelah surutnya pelabuhan utara Jawa lainnya, seperti: Lasem, Tuban, dan Gresik. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah kolonial Belanda yang sejak tahun 1800-an secara bertahap mulai menguasai Surabaya. Kontrol Belanda terhadap pecinan semakin ditingkatkan. Saat itu sudah ada tiga keluarga besar Tionghoa yang sukses sebagai pedagang dan pemimpin masyarakat Tionghoa. Mereka adalah keluarga Han, Tjoa, dan The yang memiliki kelenteng (rumah abu) masing-masing di Jalan Karet. Tak heran apabila penunjukkan beberapa pemimpin masyarakat Tionghoa di Surabaya dari Mayor, Kapten, dan Letnan berasal dari ketiga keluarga tersebut. Mereka ini juga melakukan kawin campur sehingga timbul masyarakat peranakan.

Pada akhir abad ke-19 muncul gerakan resinisasi di kalangan masyarakat Tionghoa, yakni upaya menghidupkan kembali budaya Tionghoa asli yang sudah lama dilupakan masyarakat peranakan. Di Surabaya gerakan ini ditandai dengan munculnya perkumpulan Hok Kian Kong Tek Soe yang berpusat di Kelenteng Boen Bio. Selain itu, imigran baru dari Tiongkok juga bermunculan sehingga timbul kelompok Tionghoa totok yang meruntuhkan dominasi Tionghoa peranakan dalam usaha dagang.

6

Gelora Kebangsaan

Gambar 46. Infografik Kwee Kek Beng

Sumber: https://tirto.id/kwee-kek-beng-sang-pendekar-pena-dari-batavia-ddvu

TIONGHOA NASIONALIS BERGERAK

Setelah berbagai perjuangan Tionghoa di masa VOC yang di kemudian hari menuai perlakuan diskriminatif dari pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Tionghoa tidak lantas tinggal diam. Pada tahun 1900 di Batavia, Bogor, Sukabumi, dan kota-kota lainnya muncul gerakan *Jong Chineesche Beweging* atau Gerakan Kaum Muda Tionghoa. Anggotanya terdiri dari orang-orang Tionghoa baik muda maupun tua yang berpikiran maju, bercita-cita menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme Tiongkok di kalangan Tionghoa di Hindia Belanda. Mereka menuntut dihapuskannya pembatasan atas gerak komunitas Tionghoa, meminta kesamaan hak penuh secara hukum, dan meminta pendirian sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa (Jusuf, 2012: 40; Setiono, 2008: 304).

Tiong Hoa Hwee Koan

Terkait tuntutan tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Pan-Tionghoa, yaitu Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tanggal 17 Maret 1900 di Patekoan, Batavia. Presiden

THHK yang pertama, yaitu Phoa Keng Hek. Tujuan THHK dalam Anggaran Dasarnya disebutkan mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran Konghucu, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendirikan gedung perkumpulan untuk tempat pertemuan, dan mendirikan perpustakaan. THHK awalnya menjadi suatu organisasi sosial biasa semacam *study club*. THHK juga berusaha menggalang persatuan Tionghoa perantauan (Hoakiao) baik yang peranakan maupun totok (Jusuf, 2012: 48-49; Setiono, 2008: 306; Suryadinata, 1984: 43, 1986: 23). Tionghoa peranakan, yaitu hasil kawin campur antara orang Tionghoa dengan pribumi yang telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan hubungannya dengan negeri Tiongkok sangat tipis berbeda dengan Tionghoa totok.

THHK berkembang pesat dan muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Tionghoa. Pada tanggal 17 Maret 1901 berdirilah sekolah THHK yang pertama bernama Tionghoa Hak Tong berbahasa pengantar Mandarin (*Tjeng Im*). Sekolah ini berlokasi di Jalan Patekoan Batavia sehingga disebut sekolah Pa Hoa. Sekitar tahun 1904, sekolah THHK ini semakin berkembang hingga ke berbagai kota dengan ribuan siswanya (Jusuf, 2012: 52; Setiono, 2008: 308). THHK juga bergerak di bidang sosial ekonomi dan persuratkabaran. Perkembangan THHK telah menumbuhkan rasa nasionalisme Tionghoa, baik peranakan maupun totok di Hindia Belanda meskipun masih dalam koridor Gerakan Pan-Tionghoa (Gerakan Tiongkok Raya). Hal ini tak ubahnya seperti Pan-Islamisme yang mendorong munculnya organisasi dan gerakan nasionalis umat Islam di Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir dan segera mendirikan Biro Urusan Tionghoa. Tugas dari biro ini ialah memberi masukan pada pemerintah dalam menjalankan politiknya terhadap orang Tionghoa di Hindia

Belanda. Biro Urusan Tionghoa yang dipegang oleh L.H.W. van Sandick dan P.H. Fromberg menganjurkan agar pemerintah kolonial mengekang perkembangan nasionalisme Tionghoa. Untuk itu, Belanda mulai melonggarkan berbagai peraturan yang diskriminatif dan mendirikan Sekolah Cina Belanda (*Hollandsche-Chineesche School*-HCS). Belanda juga menggagas UU Kekawulaan Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*-WNO) yang di dalamnya mengakui Tionghoa peranakan sebagai kawula Belanda (*onderdanen*). Strategi politik ini bertujuan untuk menggalang Tionghoa peranakan agar lebih berorientasi ke Hindia Belanda (Setiono, 2008: 312-313; Suryadinata, 1986: 26).

Gambar 46. THHK Cabang Tegal yang berdiri tahun 1906

Sumber: http://zh.tridharmategal.or.id/?page_id=47

Kelompok Tionghoa yang berorientasi ke Hindia Belanda sangat antusias ketika pada tahun 1917 dikeluarkan aturan yang menetapkan orang Tionghoa boleh memiliki wakilnya di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Kan Hok Hoei (H.H. Kan), seorang tuan tanah, berminat masuk dalam *Volksraad*. Sementara itu, kelompok surat kabar *Sin Po* dan *Pewarta Soerabaia* menentangnya. Kebanyakan dari mereka

masih memegang teguh nasionalisme Tionghoa dan curiga terhadap maksud-maksud Belanda (Suryadinata, 1986: 26-32). Sejak awal Sin Po memang menyokong keikutsertaan Tionghoa dalam perpolitikan di negeri Tiongkok. Mereka menolak untuk ambil bagian dalam masalah politik di Hindia Belanda. Maka ketika *Volksraad* dibentuk tahun 1918, ternyata H.H. Kan, Kapitan Liem A Pat, dan Mayor Khouw Kim An menerima pengangkatan mereka sebagai anggota (Setiono, 2008: 486).

Hal ini langsung menimbulkan protes keras dari pihak Sin Po. Tjoe Bou San, tokoh terkemuka Sin Po, mengungkapkan alasan bahwa Tionghoa di Hindia Belanda merupakan bagian integral dari bangsa Tiongkok yang besar. Tionghoa di Hindia Belanda tidak berarti apa-apa, namun menjadi kuat ketika digabung dengan ratusan juta penduduk di negeri Tiongkok. Akan tetapi, negeri Tiongkok sendiri tetap menghormati persetujuan konsuler tahun 1911 yang menyebut bahwa Tionghoa di Hindia Belanda harus tunduk pada hukum Belanda (Suryadinata, 1984: 47).

Elite Tionghoa yang menempuh pendidikan di Belanda mendirikan Chung Hwa Hui Nederland dengan pusat di Leiden pada tahun 1911. Organisasi ini meskipun mempunyai rasa nasionalisme Tiongkok, namun lebih memosisikan diri sebagai bagian dari Hindia Belanda yang mereka akui sebagai Tanah Airnya. Mereka memperjuangkan persamaan status antara orang Tionghoa dengan Eropa. Ketika kembali ke Hindia Belanda, kelompok ini mendirikan Chung Hwa Club pada bulan Agustus 1926. Sementara itu, tokoh-tokoh Tionghoa yang berada dalam *Volksraad* merasa tidak didukung oleh organisasi maupun partai politik tertentu, berbeda dengan kaum Indo yang didukung oleh *Indo Europeesche Verbond*. Gayung bersambut, pada bulan April 1928, saat Chung Hwa menyelenggarakan kongres

kedua di Semarang bersama tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di *Volksraad*, diputuskan untuk membentuk Chung Hwa Hui (CHH) yang diketuai oleh H.H. Kan (Setiono, 2008: 486-488, 493-494).

Munculnya CHH menuai reaksi kelompok Sin Po, Keng Po, dan Sin Tit Po. CHH dianggap sebagai antek Belanda dan memusuhi orang Indonesia. CHH dituduh memecah belah persatuan orang Tionghoa di Hindia Belanda dengan hanya menerima kaum peranakan sebagai anggota. Sebelumnya juga terjadi perdebatan karena CHH lebih memilih menggunakan sebutan Hindia Belanda daripada Indonesia, padahal saat itu sedang hangat-hangatnya semangat nasionalisme ke-Indonesia-an tumbuh seiring dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927. Pada perkembangannya terbukti bahwa H.H. Kan semakin menggiring CHH menjadi pro-Belanda. CHH menentang usulan mengenai mayoritas bumiputra dalam *Volksraad*, padahal pers Tionghoa kebanyakan mendukung usulan tersebut (Setiono, 2008: 496). Kendati demikian, CHH tetap menjadi bagian dari pergerakan nasional. Ini dikarenakan istilah pergerakan bermakna luas, salah satunya pergerakan bukan hanya kelompok yang ingin lepas dari Belanda, namun juga gerakan yang bersifat kooperatif (Pringgodigdo, 1994).

Bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia juga membawa pengaruh bagi orang Tionghoa. Saat PNI berdiri, beberapa orang Tionghoa tertarik bergabung di dalamnya, sayangnya menurut Anggaran Dasar PNI, orang-orang bangsa Asia lain hanya boleh menjadi anggota luar biasa. Ada satu kasus yang terjadi, Kwee Tjing Hong, seorang Tionghoa dari Palembang menggagas pendirian cabang PNI di daerahnya. Rapat pembentukan diselenggarakan di rumahnya, namun Tjing Hong jangankan menjadi pengurus, dia hanya diperkenankan menjadi anggota luar biasa. Tjing

Hong tetap aktif di PNI, namun akhirnya mengundurkan diri. Teman-teman separtai terus memandangnya sebagai orang Tionghoa yang berarti orang asing, sekalipun ia sudah berusaha keras menjadi orang Indonesia (Setiono, 2008: 501).

Ternyata tidak hanya PNI, Soetomo salah seorang tokoh Parindra pernah memuji peranakan Tionghoa sebagai putra Indonesia yang mencintai Tanah Airnya, Indonesia. Soetomo mendukung gagasan *Indonesierschap* yang digagas oleh Liem Koen Hian, yaitu orang Indonesia baik asli maupun peranakan adalah anggota dari bangsa Indonesia dan bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soetomo tidak pernah mengembangkan konsep kebangsaan yang menempatkan Tionghoa dalam Indonesia merdeka. Soetomo berpandangan bahwa orang Tionghoa masih memiliki ikatan emosional dengan Tiongkok. Sebaliknya, Hoesni Thamrin, seorang tokoh Parindra, mengembangkan konsep kebangsaan dengan mengikutsertakan orang Tionghoa di dalamnya. Akan tetapi, Hoesni Thamrin menyarankan agar golongan peranakan apa pun untuk sementara tidak diterima sebagai anggota partai (Setiono, 2008: 506).

Saat itu konsep *nation* atau kebangsaan Indonesia masih belum dewasa. Para pemimpin partai politik menganggap Tionghoa sebagai orang asing yang memiliki ikatan kuat dengan negeri leluhurnya. Sekalipun ada orang Tionghoa yang sudah menganggap Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya dan memiliki keinginan untuk turut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia tetap tidak beroleh kesempatan masuk dalam partai. Akhirnya, orang-orang Tionghoa yang berjiwa nasionalis Indonesia berpendapat bahwa mereka harus membentuk partai politik sendiri.

Pada tanggal 23 Agustus 1932, Liem Koen Hian, seorang Tionghoa yang juga wartawan *Soeara Publiek* menyampaikan gagasannya di Surabaya dan diterbitkan dalam surat kabar *Sin*

Tit Po tanggal 24, 25, dan 26 Agustus 1932. Beliau menegaskan bahwa Indonesia adalah tanah air dan negara dari golongan Tionghoa. Untuk itu, orang Tionghoa di Hindia Belanda harus menjadi Indonesia (*Indonesierschap*). Koen Hian tidak sependapat dengan kelompok Sin Po yang menganjurkan nasionalisme Tiongkok dan menolak CHH yang pro-Belanda (Suryadinata, 2005: 88-94). Pemikiran Koen Hian ini dapat digunakan untuk mengelompokkon golongan Tionghoa di Indonesia ke dalam tiga aliran politik, yaitu (1) kelompok yang tetap ingin mempertahankan statusnya sebagai orang asing dengan berorientasi pada negeri Tiongkok (Sin Po), (2) kelompok yang pro-Belanda dengan menerima status setara dengan kawula Belanda (CHH), dan (3) kelompok nasionalis Indonesia yang digagas oleh Koen Hian.

Gambar 47. Liem Koen Hian

Sumber: https://ms.wikipedia.org/wiki/Liem_Koen_Hian

Partai Tionghoa Indonesia

Pada bulan September 1932 di Surabaya, Liem Koen Hian mendeklarasikan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia

(PTI) yang berkiblat ke Indonesia. Tujuan dari PTI, yaitu membantu rakyat Indonesia untuk membangun ekonomi, sosial, dan politik menuju Indonesia yang berdaulat penuh dan rakyatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam Anggaran Dasarnya, PTI dengan tegas menyatakan ikut aktif memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka (Setiono, 2008: 509). Liem Koen Hian banyak bergaul dengan para pemimpin perjuangan Indonesia. Menurutnya, demi kepentingan Tionghoa, mereka harus bergabung dan berpihak dengan kaum nasionalis dan bukan dengan Belanda. Ia mengajak orang Tionghoa untuk menyadari bahwa mereka harus menjadi bangsa Indonesia karena dilahirkan, dibesarkan, dan akan mati dikubur di bumi Indonesia bukan di Tiongkok atau negeri Belanda. Tokoh-tokoh PTI bertambah, seperti Ong Liang Kok, Kwee Thiam Tjing, dr. Tjoa Sik Ien, dan Tan Ling Djie yang mengelola surat kabar Sin Tit Po.

PTI semakin mendapat simpati dari kalangan Tionghoa. Keberadaan PTI bersaing ketat dengan CHH termasuk di dalam *Volksraad*. H.H. Kan sebagai wakil CHH sangat pro Belanda dan bersikap mendua terhadap usulan Petisi Soetardjo. Sementara itu, Ko Kwat Tiong sebagai wakil dari PTI sangat bersemangat dan tegas mendukung Petisi Soetardjo. Sikap Kwat Tiong ini mendapat simpati dari kelompok-kelompok nasionalis Indonesia lainnya, sedangkan nasib kelompok Sin Po mulai meredup. Sekolah-sekolah milik THHK mulai kurang peminat sejak pemerintah kolonial Belanda mendirikan HCS. Surat kabar berbahasa Cina tidak populer di kalangan Tionghoa peranakan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada totok. Kegiatan Sin Po juga kemudian lebih fokus membantu Tiongkok berperang melawan Jepang pada akhir dasawarsa 1930-an (Suryadinata, 1986: 107-108).

PadaMei 1939, sesuai garis politik *front* persatuan nasional untuk menghadapi agresi militer Jepang, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI terdiri dari Gerindo, Parindra, Pasoendan, Persatoean Minahasa, Partai Katolik Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Arab Indonesia. CHH tidak berusaha menggabungkan diri karena memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok nasionalis. Sementara itu, PTI berusaha keras bergabung ke dalam GAPI, namun berbeda dengan Partai Arab Indonesia yang menerima posisi sebagai anggota luar biasa, PTI menolak bila harus menjadi anggota luar biasa (Suryadinata, 1986: 152). PTI kemudian dikritik sebagai oportunis, padahal bukan itu maksud penolakan PTI. "PTI bersedia menerima tanggung jawab dan konsekuensi sebagai anggota penuh dari GAPI, tetapi tidak mau menjadi anggota luar biasa … karena PTI tidak ingin menjadi anak tiri dari seorang ibu Indonesia" (Setiono, 2008: 518).

TIONGHOA DALAM SUMPAH PEMUDA

Akhir-akhir ini dalam setiap ingar bingar pemilu, polemik pribumi-nonpribumi masih sering menjadi alat *black campaign* yang dianggap efektif. Sebenarnya, gagasan semacam itu merupakan warisan kolonial. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kala itu Belanda membagi masyarakat Hindia menjadi tiga golongan, (1) Eropa, (2) Timur Asing, termasuk Tionghoa, Arab, dan India, serta (3) Bumiputra (pribumi). Stratifikasi sosial ini pada hakikatnya telah ditumbangkan dengan adanya konsensus bersama pada 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda dengan tegas menyatakan ikatan satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Karenanya, bagi bangsa kita, sejak Sumpah Pemuda, persoalan pribumi-nonpribumi sudah selesai dan tidak relevan lagi diangkat ke permukaan.

Sayangnya, persepsi tersebut kadung lekat dan tidak mudah hilang begitu saja. Repotnya lagi memasuki era kemerdekaan, dikotomi ini justru terus dipelihara dengan kambing hitam masyarakat Tionghoa. Pada masa Orde Baru, dikotomi pribumi-nonpribumi meruncing pada perlakuan

diskriminatif, khususnya terhadap masyarakat Tionghoa. Padahal sejarah mencatat masyarakat Tionghoa tidak absen dalam Sumpah Pemuda sebagai konsensus bersama terbentuknya bangsa ini yang menyudahi soal asli-tidak asli.

Masyarakat Tionghoa sejak masa Hindia Belanda telah mengalami berbagai diskriminasi. Melalui aturan *wijkenstelsel*, permukiman Tionghoa dipisah yang disebut sebagai kawasan pecinan dan berkembang menjadi kelompok yang eksklusif. Tujuannya agar masyarakat Tionghoa tidak berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya yang ditakutkan dapat berkolaborasi melawan pemerintah kolonial. Dengan adanya permukiman khusus maka aktivitasnya mudah diawasi. Aturan lain, *passenstelsel*, juga diberlakukan untuk mencegah orang Tionghoa leluasa berdagang ke berbagai daerah.

Kondisi yang sangat tidak mengenakkan ini diberlakukan sebagai akibat dari munculnya resistensi masyarakat Tionghoa tahun 1740 di Batavia. Dalam narasi sebelumnya telah dipaparkan bahwa gerakan sosial yang berakhir dengan banjir darah di Muara Angke ini memang belum mengarah pada cita-cita kebangsaan Indonesia. Akan tetapi, gerakan tersebut menjadi gerakan sosial pertama yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari gerakan Tionghoa saat itu lebih pada perjuangan hak-hak warga negara bagi orang Tionghoa di Hindia Belanda.

Pemuda Tionghoa

Dilatarbelakangi oleh aura kebangkitan gerakan pemuda di Batavia, Bogor, Sukabumi, dan beberapa kota lainnya muncul gerakan pemuda Tionghoa yang disebut *Jong Chineesche Beweging* (Pergerakan Pemuda Tionghoa). Menarik bila yang lain hanya menamakan diri sebagai Pemuda Jawa (*Jong Java*), Pemuda Sulawesi (*Jong Celebes*), Pemuda Ambon (*Jong Ambon*), Pemuda Batak (*Jong Batak*), dan sebagainya,

pemuda Tionghoa berani terang-terangan menyebut perkumpulannya sebagai sebuah bentuk pergerakan.

Jong Chineesche Beweging didirikan untuk memperjuangkan emansipasi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Mereka meminta berbagai pembatasan terhadap Tionghoa dihapus, kesamaan hak di depan hukum, dan menuntut didirikannya sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Gerakan ini di kemudian hari berhasil mendorong pemerintah Hindia Belanda mengadakan suatu peraturan kewarganegaraan, yaitu *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* atau UU Kekawulaan Belanda.

Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, berbagai gerakan pemuda sepakat menyatukan kebulatan tekad menuju kemerdekaan Indonesia. Meskipun berbagai organisasi Tionghoa yang ada, termasuk *Jong Chineesche Beweging* tidak mengirimkan wakilnya, namun beberapa orang Tionghoa hadir atas nama pribadi atau organisasi lain. Di antaranya adalah Ong Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie, Kwee Thiam Hong (Daud Budiman) yang juga wakil dari Jong Sumatranen Bond,dan Djohan Mohammad Tjhai. Hal ini merupakan bukti betapa relasi para pemuda saat itu tidak tersekat oleh perbedaan suku maupun agama.

Gambar 48. Sie Kong Liong dan rumahnya yang menjadi tempat Sumpah Pemuda

Sumber: https://twitter.com/Docian73/media, https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id

Tak banyak pula yang tahu bahwa gedung di Jalan Kramat Raya 106 tempat berlangsungnya Sumpah Pemuda juga milik seorang Tionghoa. Bahkan sejak tahun 1925, sang pemilik bernama Sie Kong Liong telah menyediakan rumahnya sebagai tempat indekos mahasiswa Indonesia dari berbagai daerah. Rumah kos itu menjadi tempat para mahasiswa berdiskusi masalah politik dan pergerakan. Tentu perlu keberanian yang luar biasa untuk menyediakan tempat bagi kelompok pemuda pergerakan pada masa itu. Karenanya, sayang apabila peran sang bapak kos yang Tionghoa ini tenggelam dalam sejarah.

Semangat Persatuan

Sumpah Pemuda pada zamannya berhasil menyatukan seluruh elemen bangsa ini. Berbagai kekuatan yang ada turut ambil bagian demi meraih kemerdekaan, khususnya kaum muda, termasuk kalangan Tionghoa yang sering kali dianggap tidak memiliki rasa nasionalisme ke-Indonesia-an. Kenyataannya fakta sejarah tidak dapat berbohong, Tionghoa juga memiliki sumbangsih nyata sehingga tujuan mulia Sumpah Pemuda terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam era kemerdekaan, masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari bangsa ini tentu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Tidak ada lagi diskriminasi maupun eksklusivitas bagi masyarakat Tionghoa. Nusantara menggambarkan betapa kita sejak dahulu bukanlah bangsa yang gemar memelihara konflik. Sikap saling menerima atas keberadaan *liyan* dalam masyarakat majemuk sungguh diperlukan. Berbangsa harus dapat menjadi ruang yang menjembatani sekat-sekat dalam masyarakat. Bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak dahulu dan diperkokoh dengan Sumpah Pemuda.

Peringatan Sumpah Pemuda sudah semestinya menjadi momentum tepat untuk menghadirkan kembali nilai persatuan dalam hidup berbangsa. Saatnya semangat persaudaraan segenap anak bangsa diwujudkan demi masa depan. Kebangsaan Indonesia yang diawali dalam Sumpah Pemuda harus ditata ulang. Kesadaran bersama akan tumpah darah, bangsa, dan bahasa yang satu harus diaktualisasikan. Bukan justru bersikap kontraproduktif dengan melontarkan persepsi usang yang mengancam persatuan kita.

TIONGHOA DALAM RIAK REVOLUSI

Agustus bagi Bangsa Indonesia merupakan bulan keramat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan. Kala itu kesepakatan *the founding fathers* kita bahwa negara Indonesia yang didirikan akan berbentuk Republik maka dibutuhkan aturan-aturan dasar yang disebut konstitusi. Roda pemerintahan wajib dijalankan atas dasar konstitusi itu agar pemerintah yang berkuasa tidak menyimpang dari kehendak rakyat. Jika tanpa konstitusi maka pemerintah bisa berubah otoriter.

Dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari setelah Proklamasi, disepakati UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Karena itu, tanggal 18 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Lahirnya Konstitusi. Di tanggal yang sama, pemerintahan baru dibentuk dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Menilik sejarahnya, UUD 1945 disusun melalui proses panjang. Pembicaraan yang berlangsung melibatkan berbagai golongan. Karena itu, UUD 1945 menjadi cerminan aspirasi dan harapan setiap bagian masyarakat yang mengisi ruang-ruang kemajemukan bangsa ini.

Pendiri negara menyadari bahwa UUD 1945 merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Meskipun harus diakui UUD 1945 disusun dalam keadaan serba darurat karena pertama-tama demi terpenuhinya kelengkapan berdirinya negara. Akan tetapi, dinamika perjalanan sejarah konstitusi telah membuktikan bahwa UUD 1945 mampu mewadahi kepentingan dan keanekaragaman rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau pun Reformasi mengamandemen, tidak sampai mereduksi jiwa dan semangat UUD 1945.

PPKI

Komposisi keanggotaan PPKI yang dipimpin dwitunggal Soekarno-Hatta menjadi fakta sejarah yang meyakinkan betapa UUD 1945 mewakili gagasan berbagai golongan bangsa ini. Anggota PPKI terdiri dari banyak kalangan, termasuk Tionghoa yang diwakili oleh Drs. Yap Tjwan Bing. Bahkan sebelumnya dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) terdapat empat orang wakil golongan Tionghoa, yakni Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, dan Tan Eng Hoa.

Yap Tjwan Bing yang berasal dari keluarga pedagang Tionghoa, pertama kali melihat dunia tanggal 31 Oktober 1910 di Slompretan, Solo. Beliau bersekolah di HCS Kristen Gemblekan, Solo, meneruskan Mulo (setingkat SMP) di Madiun dan AMS B (setingkat SMA) di Malang. Yap Tjwan Bing kemudian masuk ke Fakultas Farmasi di Universitas Kotapraja Amsterdam. Setelah lulus menjadi sarjana farmasi, beliau terlibat aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan menjadi anggota PPKI. Yap Tjwan Bing bukan sekadar pelengkap, namun menjadi corong aspirasi masyarakat Tionghoa yang sejak awal meyakini menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang hendak merdeka.

Yap Tjwan Bing kemudian terjun dalam politik praktis dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk, beliau diangkat menjadi anggota DPR-RIS bersama Siauw Giok Tjhan mewakili golongan Tionghoa. Setelah RIS bubar dan kembali pada NKRI, Yap Tjwan Bing menjadi anggota DPR sebagai wakil dari PNI. Terakhir beliau juga menjadi anggota DPR-Gotong Royong yang dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam mengemban tugas sebagai anggota legislatif, Yap Tjwan Bing tidak melulu memperjuangkan kelompoknya, namun juga aspirasi rakyat kebanyakan.

Sayang, pengabdiannya bagi negara tidak dilihat orang. Yap Tjwan Bing menjadi korban situasi politik yang tidak menentu saat itu dan lagi-lagi karena takdirnya sebagai Tionghoa. Beliau memilih mundur karena trauma dan kecewa akibat peristiwa rasialis tanggal 10 Mei 1963 di Bandung. Rumah dan mobilnya dirusak massa yang tidak mengerti makna hidup bersama dalam negara yang ber-Binneka Tunggal Ika. Padahal saat itu selain menjadi anggota DPR-GR, Yap Tjwan Bing juga duduk sebagai Dewan Pimpinan PNI, Dewan Kurator ITB, dan anggota Panitia Ujian Fakultas Farmasi di Universitas Padjadjaran.

Gambar 49. Drs. Yap Tjwan Bing

Sumber: http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id

Segala pengorbanan yang telah diberikan Yap Tjwan Bing bagi bangsa dan negara selama ini terhapus begitu saja gara-gara status Tionghoa yang melekat pada dirinya. Ketionghoaan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dimanipulasi, hanya dapat diterima dan dijalani. Menjadi Tionghoa bukanlah suatu pilihan maka saling menerima satu sama lain merupakan keharusan. Keberagaman memang patut disyukuri sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini.

Tatkala keturunan Indo, yakni Ernest Douwes Dekker alias Setiabudi sudah sekian lama masuk ke dalam daftar Pahlawan Nasional, belum lama ini keturunan Tionghoa baru menyusul. Laksamana Muda John Lie alias Daniel Yahya Dharma menjadi Tionghoa pertama yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2009. Untuk Drs. Yap Tjwan Bing, salah satu pejuang kemerdekaan, penghargaan diberikan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2008 dengan mengabadikan namanya pada sebuah ruas jalan di kawasan Jagalan, Jebres. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan ini merupakan perjuangan segenap elemen bangsa.

Rengasdengklok

Setelah Jepang luluh lantak akibat bom atom *Little Boy* di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan *Fat Man* di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945, para pemuda yang saat itu melakukan perjuangan bawah tanah seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin segera bergerak. Bersama para pemuda lainnya mereka mendesak kelompok senior terutama Soekarno dan Hatta untuk lekas memproklamasikan kemerdekaan tanpa perlu menunggu pembicaraan terlebih dahulu dengan PPKI. Situasi *vacuum of power* karena kekalahan Jepang dari Sekutu merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk merdeka.

Sementara itu, golongan tua cenderung lebih hati-hati dan memilih jalan diplomatis. Mereka dengan jeli menganalisis perubahan politik yang terjadi saat itu agar jangan sampai salah langkah yang justru dapat merugikan bangsa sendiri. Bung Hatta yang sangat cermat berpendapat bahwa walaupun diangkat oleh Jepang, namun PPKI mewakili Indonesia karena anggotanya berasal dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan etnis lain seperti Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa segala keputusan yang diambil melalui PPKI merupakan kehendak seluruh rakyat.

Para pemuda sadar bahwa tidak mungkin mereka mengambil alih begitu saja dan meninggalkan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Bagaimanapun ketokohan para pemimpin seperti Soekarno dan Hatta masih sangat dibutuhkan untuk meyakinkan rakyat. Inilah yang mendorong para pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Chaerul Saleh membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda beralasan situasi Jakarta saat itu sangat genting. Mereka juga khawatir apabila Soekarno-Hatta tetap di Jakarta maka akan mudah dipengaruhi oleh Jepang untuk menunda proklamasi.

Di Rengasdengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang petani Tionghoa bernama Djiauw Kie Siong untuk beristirahat. Ironisnya bila di tahun 1945 rumah seorang Tionghoa turut berperan dalam kemerdekaan bangsa ini maka setengah abad kemudian semuanya berubah. Kamis, 30 Januari 1997 terjadi huru-hara rasial dan agama yang menyasar warga Tionghoa di Rengasdengklok seakan-akan mereka bukan bagian dari bangsa ini. Kenyataan sejarah mengenai sumbangsih Tionghoa bagi negeri ini sering kali

dilupakan, padahal penting untuk membangun kerukunan hidup dalam rumah damai bersama yang bernama Pancasila.

Pertempuran Surabaya

Setelah tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan masih harus diperjuangkan karena Belanda menunggangi Sekutu datang kembali ke Indonesia. Meletuslah pertempuran mempertahankan kemerdekaan di berbagai tempat. Dalam pertempuran heroik Surabaya tanggal 10 November 1945 yang menjadi momentum Hari Pahlawan, masyarakat Tionghoa tercatat ambil peranan. Cerita ini bukan isapan jempol. Beberapa surat kabar kala itu menuliskan fakta dukungan Tionghoa bagi kemerdekaan Republik. Para pemuda Tionghoa di Surabaya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) *Chungking* yang turut terjun ke medan tempur. Barisan Palang Merah Tionghoa juga ikut memberi pertolongan kepada para korban perang.

Siauw Giok Tjhan dalam Renungan Seorang Patriot Indonesia menulis bahwa di Malang berdirilah Angkatan Muda Tionghoa (AMT) yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Beberapa di antara mereka kemudian bergabung dengan Bung Tomo, seperti Giam Hian Tjong dan Auwyang Tjoe Tek. Upaya pembersihan mata-mata juga dilakukan oleh para pemuda Tionghoa yang tergabung dalam TKR *Chungking* pimpinan Tse An Hui.

Sikap patriotisme Tionghoa ini menunjukkan rasa ikut memiliki bangsa dan tanah tumpah darah ini. Mereka rela berkorban (*melu hangrungkebi*) demi tegaknya kemerdekaan. Selama masa revolusi fisik di daerah lain juga banyak didapati pejuang Tionghoa. Tang Kim Teng dari Riau, Tony Wen dari Bangka, dan juga Ferry Sie King Lien dari Solo yang makamnya dapat kita jumpai di Makam Pahlawan Bahagia, Jurug. Salah satu yang sudah dianugerahi gelar pahlawan

nasional adalah Laksda TNI (Purn) John Lie Tjeng Tjoan alias Jahja Daniel Dharma pada tanggal 9 Novermber 2009. Tionghoa asal Manado yang terjun dalam bidang militer ini berjasa melakukan operasi penyelundupan senjata tahun 1947 untuk mempersenjatai TNI dalam menghadapi Agresi Militer yang dilancarkan Belanda. John Lie juga berjasa dalam operasi penumpasan DI/TII Kartosuwirjo, RMS, dan PRRI/ Permesta. Pada 5 Oktober 2014, pemerintah juga memberi nama KRI John Lie untuk salah satu kapal perang TNI AL bersanding dengan KRI Bung Tomo dan KRI Usman-Harun.

Serangan Oemoem 1 Maret

Peran Tionghoa Yogyakarta dalam epik monumental Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 juga tak luput dikisahkan. Film Sebelum Serangan Fadjar yang dirilis pertengahan tahun 2014 lalu menghadirkan kisah sejarah SO 1 Maret dalam perspektif berbeda. Film non komersial ini diproduksi oleh Dinas Kebudayaan DIY bekerja sama dengan Sanggit Citra Films. Sutradara Triyanto Hapsoro dengan jeli menyoroti detail-detail yang tidak pernah tersentuh dalam film-film bertema sama sebelumnya. Meskipun berdurasi singkat, film ini mampu membuka wawasan kebangsaan secara lebih utuh.

Salah satu detail menarik yang digarap dalam film tersebut, yakni mengenai kontribusi Tionghoa. Dalam satu adegan muncul tokoh Tionghoa bernama Jong Twan yang mengantar sendiri bahan makanan ke dapur rumah Ibu Ruswo. Kala itu Ibu Ruswo dan para perempuan lainnya membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi tentara Republik yang tengah bergerilya. Dalam adegan berikutnya, bantuan juga rutin dikirim oleh para pemilik toko di Gondomanan yang dapat diinterpretasikan sebagai para pedagang Tionghoa.

Dengan hadirnya kontribusi berbagai elemen bangsa, termasuk Tionghoa, film ini hendak menunjukkan kenyataan bangsa yang majemuk. Jika selama ini Tionghoa dianggap bersikap oportunis maka film ini menyuguhkan persepsi yang berbeda. Tionghoa pada kenyataannya juga memiliki jiwa nasionalisme Indonesia yang tinggi. Bantuan bahan makanan yang dikirim Jong Twan dan lainnya, meski tak seberapa menjadi bukti dukungan Tionghoa dalam perjuangan yang sedang bergelora.

Meskipun erat dengan unsur seni, namun film sejarah tidak dapat meninggalkan begitu saja fakta historis yang ada. Jika ditelusuri lebih lanjut, sejarah mencatat dinamika masyarakat Tionghoa di Yogyakarta pada masa Revolusi memang tidak seperti di kota-kota lain. Kala itu penjarahan dan kerusuhan berdarah anti-Tionghoa terjadi di beberapa tempat seperti Tangerang dan Bagansiapi-api. Mereka dianggap lebih memihak Belanda, sementara tentara Republik juga tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Apalagi ketika itu wilayah Republik kian sempit, meliputi Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akhirnya, kalangan Tionghoa sepakat membentuk satuan keamanan tersendiri yang disebut Pao An Tui.

Hampir di setiap perbatasan daerah pendudukan, pihak Republik melakukan strategi bumi hangus untuk menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sasaran bumi hangus antara lain jembatan-jembatan penghubung, pabrik, dan tempat-tempat yang memiliki nilai ekonomi. Tujuannya sebagai antisipasi apabila Belanda berhasil menguasainya maka tempat-tempat tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Para pedagang Tionghoa yang menjadi pemilik tempat-tempat bernilai ekonomi tersebut tentu mengalami kerugian besar.

Situasi yang serba tidak menguntungkan ini mendorong orang-orang Tionghoa di Yogyakarta semula ingin mengikuti nasihat Belanda untuk membentuk Pao An Tui. Niat tersebut kemudian dibatalkan setelah mendapat petunjuk dari dr. Sim Kie Ay. Sewaktu mengobati Sri Sultan HB IX di keraton, dr. Sim Kie Ay diberi pesan agar kalangan Tionghoa di Yogyakarta jangan sampai membentuk satuan keamanan sendiri (Suwarno, 1994: 251). Hal ini dapat menimbulkan kesan bermusuhan dengan pihak Republik. Sri Sultan HB IX memberi jaminan keselamatan bagi masyarakat Tionghoa di Yogyakarta.

Pada masa revolusi, perkumpulan-perkumpulan Tionghoa bernaung di bawah Organisasi Chung Hua Tsung Hui (CHTH). Sikap Sri Sultan HB IX yang mengayomi rakyat tanpa membeda-bedakan etnis mendorong CHTH Yogyakarta menggalang bantuan untuk mendukung Republik. Tokoh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sekaligus redaktur harian Keng Po, Injo Beng Goat, juga begitu getol mendorong agar Tionghoa jangan ragu-ragu untuk mendukung perjuangan Republik (Setiono, 2008).

Kontroversi Pao An Tui

Seperti telah disinggung, komunitas Tionghoa di berbagai daerah sepakat membentuk satuan keamanan tersendiri yang disebut *Pao An Tui* ketika revolusi bergejolak. *Pao An Tui* berarti Badan Pelindung Keselamatan. Badan ini dibentuk pertama kali pada 28 Agustus 1947 di Jakarta, selanjutnya bermunculan di berbagai daerah terutama yang dikuasai Belanda dan banyak terdapat komunitas Tionghoa (Sulardi, 2015: 40), antara lain Bandung, Bogor, Tangerang, Sukabumi, Semarang, Tegal, Malang, Jember, Medan, Pematang Siantar, Bagansiapi-api, Padang, dan Tanjung Balai.

Tujuan didirikannya *Pao An Tui* untuk memberi perlindungan bagi orang-orang Tionghoa dari ancaman perampasan, penjarahan, penculikan, penggedoran, dan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi di masa revolusi. Peristiwa kejahatan seperti itu dilatarbelakangi oleh motif ketidaksenangan terhadap aktivitas perekonomian yang cukup sukses dilakukan oleh kalangan Tionghoa. Situasi revolusi yang tidak menentu semakin mendorong terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oknum-oknum tidak jelas atas nama kepentingan perang.

Mencermati kenyataan tersebut maka harus disadari bahwa pembentukan *Pao An Tui* sebenarnya berangkat dari keterdesakan situasi yang dihadapi masyarakat Tionghoa. *Pao An Tui* merupakan respons dari masyarakat Tionghoa atas kondisi keamanan yang tidak menentu. Buktinya *Pao An Tui* urung dibentuk di Yogyakarta karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi orang-orang Tionghoa dari Sri Sultan HB IX. Jaminan tersebut menyadarkan kalangan Tionghoa di Yogyakarta bahwa pihak Republik Indonesia yang baru berdiri siap pasang badan untuk melindungi siapa saja rakyat termasuk orang-orang Tionghoa.

Kontroversi terhadap pasukan milisi Tionghoa ini muncul karena pembentukannya justru memperoleh izin dan dukungan dari Belanda. Sikap Belanda yang memberi angin disambut oleh *Pao An Tui* dengan condong memihak Belanda. Inilah yang di kemudian hari menjadi ekses berkepanjangan. Manfaat *Pao An Tui* bagi kalangan Tionghoa tidak sebanding dengan tebusan yang harus dibayar. Pasalnya dampak psikologis dari *Pao An Tui* menimbulkan luka bagi banyak orang, termasuk orang-orang Tionghoa sendiri. Tidak mudah menghapus noda hitam *Pao An Tui* yang terlanjur terjadi. Sering kali latar belakang situasi dan alasan di baliknya tidak gampang dipahami orang pada umumnya.

Pejuang Tionghoa Pro Republik

Pao An Tui jauh lebih sering diingat orang. Tidak banyak yang tahu apabila di Solo sekelompok pemuda Tionghoa di bawah pimpinan Yap Tek Thoh mendirikan organisasi perjuangan yang pro Republik bernama Barisan Pemberontak Rakjat Tionghoa (BPRT) yang berdiri pada 4 Januari 1946. Dalam kurun waktu yang sama di Pemalang juga dibentuk Lasjkar Tionghoa Indonesia (LTI) atau Lasjkar Pemuda Tionghoa. Laskar ini dipimpin Tan Djiem Kwan yang giat memberi kursus antikolonialisme pada pemuda Tionghoa dan mendorong pengibaran bendera Merah Putih. Laskar ini juga turut melucuti balatentara Jepang di Pemalang. Sementara itu, di Kudus, para pemuda Tionghoa menyatu dalam pasukan Matjan Poetih. Seolah ternafikan, padahal layaknya pemuda dari suku lain, Tionghoa ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga, Kampung Rawagede, Karawang dijumpai makam seorang bernama Tongwan. Pemuda Tionghoa ini bergabung dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) dan tewas dalam pertempuran melawan Belanda di Rawagede pada 9 Desember 1947.

Gambar 50. Markas Barisan Pemberontak Rakjat Tionghoa (BPRT) di Solo

Sumber: https://historia.id/politik/articles/pemuda-tionghoa-pun-berjuang-PyRRr

Tak banyak yang tahu juga kisah perjuangan Oei Hok San, veteran pejuang kemerdekaan yang merupakan mantan tentara pelajar di Kediri, Jawa Timur. Engkong berusia lebih dari 80 tahun ini kini tinggal di Tulungagung. Dia masih ingat jelas 300-an pejuang suku Jawa dan 50-an pejuang Tionghoa ditembaki Belanda di dalam dua toko dan sebuah gudang. Ayahnya, Oei Djing Swan, pernah meminta Tan Bun Yin untuk balas dendam pada seorang mayor KNIL. Mayor ini telah menembak mati dr. Tan Ping Djiang, republiken yang menentang Belanda saat Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Di Surabaya juga ada seorang mantan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bernama Liauw Thian Moek alias Leo Wenas. Bersama arek-arek Surabaya, dia ikut melawan Sekutu-Belanda dalam Pertempuran Surabaya. Tidak kalah seru cerita Letkol (Purn) Ong Tjong Bing alias Daya Sabdo Kasworo. Dia ikut merawat korban Pertempuran Surabaya yang dibawa ke Malang.

Gambar 51. The Sin Nio, perempuan pejuang kemerdekaan dari Wonosobo

Sumber: https://www.picuki.com/tag/azmiabubakar

Perempuan Tionghoa juga tak kalah kontribusinya. Di Wonosobo, Jawa Tengah tercatat nama The Sin Nio, seorang prajurit perempuan TNI yang bergabung dalam Kompi 1

Batalion 4 Resimen 18. Sin Nio bahkan menjadi satu-satunya prajurit perempuan dalam kompi tersebut. Semasa berjuang, dia hanya bermodalkan senjata golok, bambu runcing, dan tombak. Suatu waktu Sin Nio pernah dipindahkan ke bagian perawat atau Palang Merah karena kekosongan juru rawat. Sin Nio pun dengan tulus merawat banyak pejuang yang terluka akibat perang. Terakhir pada tanggal 29 Juli 1976, The Sin Nio mendapatkan pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain nama-nama itu, ada temuan menarik di bong (makam Tionghoa) Yayasan Gotong Royong Ambarawa. Tepat di jalan masuk makam sebelah kiri, didapati sebuah *bongpay* bertuliskan aksara Tionghoa. Di bagian bawah *bongpay* terdapat tulisan "Di Sini Mengasoh (beristirahat) 16 dari pada 34 Sdr2 (Saudara-saudara) Korban Revolusi 1945". Selanjutnya, tertera tanggal *bongpay* dibuat, yakni 5 April 1952. Tidak banyak informasi yang berhasil didapat soal makam ini. Akan tetapi, ada kemungkinan 16 orang yang di-*bongpay*-kan di sini adalah orang-orang Tionghoa (*wong cilik*) di Ambarawa yang menjadi korban dari pertempuran Palagan Ambarawa.

Wong Cilik

Sama dengan narasi sejarah lainnya, berbicara tentang kontribusi Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan juga tidak hanya soal orang besar dan kaum elite saja, namun juga *wong cilik*, orang pada umumnya. Justru mereka yang biasa-biasa saja ini yang menjalani kehidupan sehari-hari sebagaimana rakyat jelata begitu merasakan berat perihnya perjuangan mencapai kebebasan yang dinanti-nanti. Situasi perang tentu saja bukan situasi yang mengenakkan bagi siapa pun termasuk kalangan Tionghoa yang kala itu dipandang hidup lebih baik dengan berdagang. Tentu ada banyak

kisah kecil yang hampir-hampir tidak pernah tertoreh tinta sejarah. Seperti sebuah kisah kecil berikut yang menyeruak dari Karanganyar dan Gombong, dua kota kecamatan yang bersebelahan di Kabupaten Kebumen.

Pada masa Hindia Belanda, Karanganyar pernah menjadi kadipaten sekaligus kota terpenting setelah Yogyakarta di kawasan selatan Jawa Tengah. Menginjak paruh abad ke-19, kota ini semakin ramai didatangi kaum peranakan Tionghoa yang hendak berdagang. Wajar saja mereka sampai masuk ke daerah pedalaman yang jauh dari pesisir karena kalah saing dengan sesama Tionghoa yang bermodal lebih besar dengan jaringan dagang lebih luas. Salah satu perantau Tionghoa ini bernama Njoo Tjing Liong. Keuletan Njoo Tjing Liong dalam bekerja menurun kepada anak laki-lakinya yang bernama Njoo Kiong Oen hingga menjadi juragan tembakau sukses.

Usaha tembakau yang semula dijajakan Njoo Kiong Oen dengan bersepeda dari desa ke desa perlahan semakin maju. Tidak hanya tembakau eceran yang dijual, namun mulai menjadi pedagang grosir. Pelanggannya semakin banyak dan dapat membuka kios di pasar Karanganyar. Rumah dan tanahnya luas di pinggir jalan utama dekat bantaran Kali Karanganyar. Setelah Persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948, Kali Kemit di barat Karanganyar ditetapkan sebagai batas demarkasi Van Mook. Daerah Kemit menjadi gerbang batas yang memisahkan Karanganyar ke timur (Yogyakarta) sebagai daerah Republik Indonesia dan Gombong ke barat yang diduduki oleh Belanda.

Perjanjian Renville dipatuhi dengan hijrahnya pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Mereka melakukan perjalanan darat dengan kereta api sampai di Gombong, kemudian dilanjutkan berjalan kaki hingga Kebumen untuk seterusnya menumpang kereta api lagi sampai di Yogyakarta. Sementara Belanda justru melanggar

Perjanjian Renville dan dari arah Gombong hendak merangsek masuk ke Kebumen. Pasukan Republik yang berjaga di Kemit berusaha bertahan dengan membumihanguskan akses jalan dan tempat-tempat vital dari Kemit sampai Karanganyar. Tak terkecuali rumah Njoo Kiong Oen yang terletak di pinggir jalan utama Karanganyar ikut ludes dilalap api.

Njoo Kiong Oen dan sebagian keluarga besarnya mengungsi ke Gombong, sebagian lagi ke Purworejo. Tidak banyak harta benda yang bisa dibawanya. Njoo Kiong Oen merelakan tetesan keringatnya selama ini demi kemerdekaan bangsa dan tumpah darah yang dicintainya. Ketika situasi sudah pulih, Njoo Kiong Oen tidak kembali ke Karanganyar. Dengan sisa-sisa barang dagangannya, dia mencoba peruntungan di Gombong. Njoo Kiong Oen sempat mencoba mengurus hak atas tanah yang pernah dimilikinya di Karanganyar, sayang surat keterangan kepemilikan tanah yang hanya selembar sudah hilang turut terbakar. Berbagai bukti disodorkan, tapi apa daya pemerintah setempat tak jua memberi jawaban menggembirakan.

Gambar 52. Kongco Njoo Kiong Oen dan Kong Njoo King Poen

Sumber: Dokumentasi penulis

Kisah serupa juga dialami oleh anak dari Njoo Kiong Oen, yakni Njoo King Poen yang ketika itu sudah tinggal

lebih dahulu di Gombong. Menurut cerita keluarga, pada awal kemerdekaan, Njoo King Poen bersama istri serta anak pertama dan keduanya pernah mengungsi di sebuah pabrik limun yang terletak di Sempor. Pada tahun 1947, keluarga ini juga kembali mengungsi ke Purworejo. Dikarenakan mama mertuanya memilih tetap di Gombong maka Njoo King Poen harus menyamar sebagai penjual petai setiap kali menengok ke Gombong. Perjalanannya dari Purworejo ke Gombong pun tidak mudah, Njoo King Poen berjalan menyusuri rel kereta api dan melewati pemeriksaan demi pemeriksaan.

Berbagai kisah semacam ini tentu menarik untuk mengungkap kehidupan orang-orang Tionghoa yang kala itu juga lebur bersama masyarakat lain dan merasakan sulitnya hidup dalam derita penjajahan. Akhirnya, ketika sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, sejarah tak bisa berbohong bahwa sekian banyak orang Tionghoa telah turut berjuang dan berkorban demi kemerdekaan bangsa dan Tanah Air Indonesia. Mulai dari Khe Panjang, Singseh, Liem Koen Hian, Yap Tjwan Bing, Siauw Giok Tjhan, John Lie, hingga banyak kalangan kecil lainnya. Dahulu dalam pertunjukan Ludruk tahun 1960-an, sering dilantunkan syair: *Es gandul ditaleni merang, Cina gundul ora wani perang*. Teks ini dapat diterjemahkan: es yang tergantung diikat jerami, Tionghoa berkepala gundul tidak berani maju berperang. Tembang sinisme itu kini sumbang oleh fakta sejarah. Tionghoa terbukti tidak tinggal diam. Tionghoa juga menyabung nyawa meski sonder gelar pahlawan!

Pasungan Rezim

Gambar 53. Infografik Yap Thiam Hien

Sumber: https://tirto.id/dari-yap-thiam-hien-kita-belajar-arti-keadilan-cJfw

MENYOAL DWIKEWARGANEGARAAN

Film Susi Susanti: *Love All* yang tayang pada bulan Oktober 2019 lalu tidak sekadar bicara tentang biopik legenda bulu tangkis Indonesia. Lebih dalam lagi, film ini menyoroti lensa sejarah diskriminatif terhadap Tionghoa di Indonesia. Momen bersejarah yang dicetak Susi Susanti saat meraih medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade Barcelona 1992 tentu banyak diingat orang sebagai memori kolektif. Akan tetapi, apakah semua mafhum apabila Susi Susanti (dan juga suaminya, Alan Budikusuma) adalah keturunan Tionghoa? Setinggi apa pun prestasinya dalam mengharumkan nama Indonesia, mereka tetap dianggap bukan warga negara Indonesia "seutuhnya". Terbukti mereka harus tetap repot mengurusi segala hal terkait dengan berkas kependudukannya. Ini sungguh ironis!

Situasi yang dialami orang-orang Tionghoa di Indonesia ini bermula dari soal dwikewarganegaraan. Pada tanggal 12 Desember 1892, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan Undang-Undang Kekawulaan Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*-WNO) untuk pertama

kalinya. Pada tahun 1907 dan 1910, undang-undang ini pernah mengalami revisi. Undang-undang ini menganut asas *ius soli* dalam menentukan kewarganegaraan seorang warga. Menurut undang-undang ini yang disebut sebagai warga negara kerajaan (Belanda) adalah mereka yang pernah tinggal di kerajaan atau tanah jajahannya (termasuk Hindia Belanda) selama lebih dari 18 bulan dan kini masih tetap bermukim di tempat tersebut. Karena itu, undang-undang Kekawulaan Belanda di dalamnya juga mengakui Tionghoa peranakan (yang memenuhi syarat tinggal tersebut) sebagai kawula Belanda (*onderdanen*).

Masalah muncul ketika Kekaisaran Qing yang berkuasa di Tiongkok pada 18 Maret 1909 mengumumkan UU Kewarganegaraan Tiongkok yang pertama. undang-undang ini didasarkan pada prinsip *ius sanguinis*. Salah satu isinya, yakni mengatur para perantau Tionghoa (Hoakiao) yang sudah begitu lama menetap di luar Tiongkok, bahkan beranak cucu di sana bila berkeinginan tetap berkewarganegaraan Tiongkok maka tetap dianggap sebagai warga negara Tiongkok. Prinsip ini berseberangan dengan asas *ius soli*, termasuk yang ditetapkan di Hindia Belanda. Dengan demikian, masalah dwikewarganegaraan orang-orang Tionghoa di perantauan muncul ke permukaan.

Ketika itu *ius soli* jauh lebih populer dan menjadi prinsip kewarganegaraan yang banyak dianut negara-negara Barat. Situasi berbeda dihadapi oleh Tiongkok di bawah pemerintahan Dinasti Qing sehingga cenderung memilih *ius sanguinis* sebagai asas kewarganegaraan. Alasannya, Tiongkok mempunyai konsep patriarkal feodalis yang sudah berumur ribuan tahun. Kekaisaran Qing juga tengah mengalami kemunduran drastis dan tidak rela negara adiluhung ini melemah. Dari yang awalnya bersikap tidak peduli, pemerintah Qing menjadi begitu aktif mendirikan

kantor konsulat dan melindungi warga Tionghoa perantauan. Salah satu tujuannya memanfaatkan kekuatan ekonomi Tionghoa perantauan (Xi, 2014: 45).

Memasuki era kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 April 1946 mengumumkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Kependudukan RI yang juga menganut asas *ius soli* peninggalan Belanda. Keputusan ini menimbulkan permasalahan berkepanjangan dengan pemerintah Tiongkok. Pada pertengahan Juli 1954, Indonesia dan Tiongkok memulai persiapan untuk perundingan masalah dwikewarganegaraan. Harapannya kesepakatan bisa dicapai dan ditandatangani ketika Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai hadir dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Hasilnya, para perantau Tionghoa di Indonesia dapat memilih kewarganegaraan yang dikehendakinya dan melepas salah satunya. Caranya dengan mengajukan permohonan pada pemerintah. Pada tahun 1966, penerimaan permohonan warga Tionghoa untuk menjadi WNI sempat dihentikan oleh pemerintah Orde Baru.

SBKRI dan Ganti Nama

Pemerintah Orde Baru melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 3/4/12 Tahun 1978 mengatur tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Sejak saat itu muncul suatu dokumen khusus bernama SBKRI dan sangat sistematis digunakan dalam setiap urusan kependudukan bagi orang-orang Tionghoa. Sesuai namanya, SBKRI berlaku tidak hanya untuk warga Tionghoa saja. Akan tetapi, implementasinya SBKRI sebagian besar ditujukan pada kalangan Tionghoa (Effendi & Prasetyadji, 2008: 17). Hanya beberapa kasus saja ditemukan pada warga keturunan India. Dokumen ini konon bertujuan sebagai pembuktian yang sah tentang kewarganegaraan seseorang.

Gambar 54. Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia (STKI) dan SBKRI

Sumber: https://historia.id/politik/articles/warga-tanpa-negara-vYbOa

Permasalahan SBKRI semakin diperkusut oleh ordonansi catatan sipil yang masih menggunakan warisan kolonial Belanda, yakni *Indische Staatregeling* (IS). Untuk pencatatan setiap kelahiran didasarkan pada pembedaan etnis dan keagamaan. *Staatblad* 1849-25 untuk golongan Eropa, *Staatblad* 1917-130 jo. 1919-81 untuk golongan Tionghoa, *Staatblad* 1920-751 jo. 1927-564 untuk bumiputra non-Kristiani, dan *Staatblad* 1933-75 jo. 1936-607 untuk golongan bumiputra Kristiani. Rangkaian sistem administrasi kependudukan, catatan sipil, dan kewarganegaraan menjadi kebijakan sempurna dalam mendiskriminasi orang-orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia.

Parahnya lagi, prosedur dalam mengurus dokumen ini tidaklah mudah. Selain membutuhkan waktu lama, berbelit, tak jarang juga menguras dompet. Kesibukan mengurus dokumen seperti ini membuat bermunculan calo-calo SBKRI yang siap membantu. Akan tetapi, tak sedikit orang Tionghoa yang dianggap berkecukupan secara ekonomi mengalami

pemerasan. Ketika mengurus SBKRI lewat calo, mereka rutin dimintai uang dengan alasan keperluan administrasi dan sebagainya. Maka saat itu berkembang pemeo "Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?" yang menjadi prinsip pelayanan birokrasi.

Tak hanya itu, mereka juga dihimbau untuk mengganti namanya yang khas Tionghoa menjadi berbau keindonesiaan. Akhirnya banyak Tionghoa yang mengganti namanya menjadi bernuasa Jawa, misalnya *she* (marga) Liem menjadi Salim, Halim, Limanto, dan lainnya; Tan menjadi Sutansjah, Tanusudibjo, dan lainnya; Njoo menjadi Seno; Oei menjadi Wijaya, Winoto; Ong menjadi Ongkowijoyo; dan masih banyak lainnya. Sebenarnya cukup aneh karena mereka yang menggunakan nama Arab, India (Sansekerta), atau kebarat-baratan tidak pernah dihimbau untuk mengganti namanya menjadi berbau keindonesiaan. Bahkan nama Jawa tentu saja bisa diartikan menonjolkan identitas suku Jawa. Lantas apakah Bejo semestinya perlu berganti nama menjadi Untung, Siti menjadi Tanah, Slamet menjadi Selamat, Bagas menjadi Kuat, Lintang menjadi Bintang, Wicaksana menjadi Bijaksana, Yuda menjadi Perang, Eka menjadi Satu, dan seterusnya? Apabila nama Jawa dianggap mencerminkan bagian dari keindonesiaan, lantas apa masalahnya dengan Tionghoa yang juga sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri?

Soal ganti nama, ada pula yang enggan mengganti namanya dan memilih mempertahankan nama Tionghoanya. Bagi orang seperti ini, mereka beralasan bahwa nama adalah pemberian orang tua, pasti bermaksud baik, pamali bila harus diganti. Mereka ini, antara lain Ong Hok Ham, sejarawan yang kemudian memilih menulis namanya menjadi Onghokham; Yap Thiam Hien, seorang pengacara yang berani membela keadilan; Auwjong Peng Koen memilih menyingkat namanya menjadi P.K. Ojong; dan beberapa lainnya. Tentu pemerintah

tak bisa melarang, ganti nama hanya himbauan. Akan tetapi, serba salah juga, mempertahankan nama Tionghoa saat itu akan membuat semakin jelas ketionghoaannya. Dampak yang dirasakan, yakni sering kali tidak mulus ketika mengurus berbagai keperluan.

Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 56 Tahun 1996 memutuskan untuk menghapus SBKRI bagi mereka yang sejak kelahirannya sudah menjadi WNI. Sayangnya, keputusan ini tidak berjalan efektif di lapangan. Memasuki era Reformasi, paradigma seputar ini juga semestinya berubah. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah pri-nonpri. Itu artinya, sejak saat itu secara persepsi sosial maupun legal hukum tidak ada lagi yang disebut pribumi maupun nonpribumi di negara ini. Hanyalah ada warganegara dan bukan warganegara (orang asing). Pada masa selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juga telah menghapus dikotomi rasial tentang Indonesia asli dan bukan asli. Karenanya, tuntutan SBKRI dalam setiap kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan sudah jelas-jelas tidak relevan lagi.

Terakhir di penghujung pemerintahannya, Presiden SBY kembali membawa angin segar bagi warga Tionghoa. Tanggal 14 Maret 2014 keluarlah Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES. KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres ini istilah orang dan/atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi Tionghoa, sedangkan penyebutan negara Republik Rakyat Cina dikembalikan menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Aturan tersebut diharapkan semakin memperkuat produk-produk hukum sebelumnya yang sudah semakin berpihak pada hak-hak warga Tionghoa. Bahkan kini mulai marak lagi pemberian nama Tionghoa pada bayi yang baru lahir di keluarga-keluarga Tionghoa modern. Tidak ada yang salah dengan hal ini dan tidak ada aturan yang melarang. Nama Tionghoa juga bagian dari identitas keindonesiaan!

HOAKIAU DALAM JERAT PP 10/1959

(Orang-orang Tionghoa) bukan pendarat dari luar negeri. Mereka sudah ada sejak nenek moyang kita. Mereka itu sebenarnya orang-orang Indonesia yang hidup dan mati di Indonesia juga, tetapi karena suatu tabir politik, tiba-tiba menjadi orang asing yang tidak asing.
(Pramoedya Ananta Toer, Maret 1960)

Inilah pendapat dari Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan yang berjaya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, saat bicara tentang Tionghoa. Anehnya, kritik dalam buku Hoakiau di Indonesia (1960) tidak banyak disadari orang. Padahal tulisan Pram itu merupakan tanggapan terhadap puncak dikembangkannya politik anti-Tionghoa yang berlangsung sejak tahun 1956. Akibat tulisannya ini Pram sempat dipenjara hampir satu tahun tanpa proses pengadilan. Bukunya juga kemudian dilarang edar. Dalam buku tersebut, Pram juga yang pertama kali memopulerkan kata *Hoakiau* alih-alih Tionghoa sebagaimana saat itu sudah biasa digunakan. *Hoakiau* berarti Tionghoa perantauan.

Pilihan Pram menggunakan kata *Hoakiau* bukan tanpa alasan. Kata *Hoakiau* jarang digunakan dan masih asing bagi

telinga Indonesia. Kata *Hoakiau* tidak pernah dipakai sebagai bentuk penghinaan, berbeda dengan kata Tionghoa apalagi Cina. Jika ada istilah keturunan Tionghoa atau keturunan Cina menjadi aneh istilah keturunan *Hoakiau*. Alasan-alasan inilah yang membuat Pram sengaja memilih kata *Hoakiau* dengan maksud agar para pembacanya memikirkan kembali arti Tionghoa. Satu hal yang bertentangan dengan definisi tentang Tionghoa dari negara yang justru merangsang sikap anti-Tionghoa. Bagi Pram, *Hoakiau* adalah orang Indonesia pribumi dengan adat istiadat dan norma-norma Tionghoa (Toer, 1998).

PP 10/1959

Kritik Pram ini bermula dari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10/1959. Tanpa diduga-duga pada bulan November 1959, Presiden Soekarno tiba-tiba menandatangani PP 10/1959. Peraturan ini berisi larangan bagi orang asing (terutama tertuju pada Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah tingkat I dan II yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960 (Setiono, 2008: 811). Tentu saja peraturan rasialis ini sangat mengejutkan kalangan Tionghoa, apalagi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 saat itu belum dilaksanakan. Para penguasa militer di daerah seenaknya mengusir orang-orang Tionghoa tanpa peduli Warga Negara Asing (WNA) maupun yang sudah menjadi WNI.

Sebenarnya, PP 10/1959 bermula dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang kala itu dijabat oleh Rachmat Moeljomiseno. Permendag ini berisi larangan bagi orang asing untuk berdagang di daerah pedalaman. Presiden Soekarno sangat marah dengan keluarnya aturan tersebut. Dalam kabinet selanjutnya, Rachmat Moeljomiseno tidak diikutsertakan. Akan tetapi, apa yang lantas membuat

Presiden Soekarno mendatangani PP 10/1959? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno mendapat tekanan dari militer dan partai-partai Islam. Dugaan hal ini dilatarbelakangi oleh pedagang Islam yang mulai bermunculan dan sulit bersaing dengan pedagang Tionghoa (Setiono, 2008: 812). Akibat dari PP 10/1959 itu puluhan ribu orang Tionghoa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman. Kendati aturan hanya melarang berdagang eceran, namun pelaksanaannya sampai melarang bertempat tinggal.

Gambar 55. Pedagang kelontong Tionghoa sudah ada sejak zaman Hindia Belanda

Sumber: http://baltyra.com

Tindakan paling buruk dilakukan pihak militer di Jawa Barat demi tegaknya PP 10/1959. Insiden memilukan terjadi, seorang perempuan Tionghoa di Cimahi pada bulan Juli 1960 tewas tertembak karena ia bersama keluarganya mencoba bertahan dan tidak mau meninggalkan tempat kediamannya (Setiono, 2008: 813). Insiden ini membuat Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi kepada para penguasa militer

agar tidak memaksa orang Tionghoa meninggalkan tempat tinggalnya. Apalagi mereka yang terusir menimbulkan masalah baru terkait dengan tempat penampungan di kota-kota.

Pelaksanaan PP 10/1959 juga mengundang ketegangan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melayangkan protes dan menyatakan kesediaan menampung para korban PP 10/1959. Beberapa kapal dikirim ke Indonesia dan disambut baik oleh sebagian kalangan Tionghoa. Ketika itu lebih dari 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia untuk bermukim di Tiongkok (Setiono, 2008: 815). Akan tetapi, kondisi dan kebiasaan yang berbeda, belum lagi kendala bahasa menimbulkan kesengsaraan bagi orang-orang Tionghoa yang pindah ke tanah harapan itu. Banyak di antara mereka yang pindah ke Hongkong, Macau, dan sebagainya. Cerita-cerita penuh penderitaan ini sampai juga ke telinga orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dampaknya menurunkan minat orang-orang Tionghoa untuk pergi ke Tiongkok. Sampai akhir tahun 1960-an, gelombang migrasi pun surut.

TIONGHOA DALAM PUSARAN 65

Persoalan mengenai Tionghoa pada masa Orde Baru bermula dari meletusnya Peristiwa 1965. Tak hanya kaum komunis maupun simpatisannya yang menjadi sasaran, pun juga masyarakat Tionghoa terkena getahnya. Tuduhan adanya dukungan negeri Tiongkok terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sebab. Bahkan pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan ini kembali normal pada tahun 1990-an, itu pun belum bisa cair sepenuhnya.

Imbas pertama bagi orang Tionghoa melanda Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang didirikan oleh Siauw Giok Tjhan tahun 1954. Baperki dituduh telah menjadi alat PKI. Padahal organisasi ini bermaksud untuk menyatukan tujuan politik orang-orang Tionghoa yang telah menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan atas dasar ini, Baperki tidak beranggotakan orang-orang Tionghoa saja. Pada tanggal 15 Oktober 1965, Universitas Res Publica (cikal bakal Universitas Trisakti) milik Baperki dirusak dan dibakar oleh massa.

Gambar 56. Massa merusak gedung Universitas Res Publica (Ureca) pada 14 Oktober 1965

Sumber: http://indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com/

Sejak itu dimulailah kampanye anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa. Media massa saat itu juga dimanfaatkan untuk membentuk opini yang terus memupuk suasana permusuhan terhadap pemerintah Tiongkok dan masyarakat Tionghoa (Setiono, 2008). Melihat situasi yang semakin panas, pada 21 Oktober 1965, Presiden Soekarno menyerukan untuk menghentikan segala tindakan destruktif seperti rasialisme, perusakan, dan pembakaran. Akan tetapi, peringatan ini tidak diindahkan, bahkan desas-desus yang menjurus pada pecahnya rasialisme anti-Tionghoa terus berhembus. Upaya menggiring opini publik dilakukan untuk memperkeruh situasi dan mencari kambing hitam.

Sementara itu, beberapa tokoh politik Tionghoa yang menjadi bagian dari pemerintahan Soekarno juga mulai dicurigai dan ditangkapi. Pada tanggal 4 November 1965, Siauw Giok Tjhan, Ketua Umum Baperki ditahan pihak militer. Ia kemudian dipecat dari keanggotaan DPR-GR, MPRS, dan DPA. Demikian pula dengan Menteri Negara

Oei Tjoe Tat juga ditangkap dan dipenjarakan. Setelah sekian tahun, keduanya dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru, namun KTP-nya dibubuhi kode ET (Eks Tapol).

Beberapa menteri berdarah Tionghoa yang sekalipun bukan loyalis Soekarno juga bernasib mirip. David G. Cheng, Menteri Cipta Karya dan Konstruksi, disingkirkan dan tidak digunakan lagi dalam pemerintahan. Sejak itu, tidak pernah ada lagi orang Tionghoa yang masuk ke dalam pemerintahan. Satu-satunya hanya Mohammad Hasan (Bob Hasan) yang diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada kabinet Orde Baru yang terakhir tahun 1998.

Sinophobia

Situasi politik yang tidak menentu pasca 1965, membuat intensitas kerusuhan anti-Tionghoa semakin menjadi-jadi. Penjarahan, perusakan, pembakaran rumah, toko, sekolah, dan mobil milik orang Tionghoa terjadi di mana-mana. Sejak itu dimulailah kampanye aksi *Sinophobia* atau anti-Tionghoa. Kondisi ini ditambah dengan tindakan represif penguasa yang kemudian menimbulkan rasa was-was dan trauma berkepanjangan. Inilah yang menyebabkan masyarakat Tionghoa di kemudian hari berusaha mati-matian menghindari wilayah politik.

Kerusuhan anti-Tionghoa pertama sesudah 30 September 1965, meletus pada tanggal 10 November 1965 di Makassar. Bermula dari demonstrasi pemuda dan mahasiswa kemudian merembet pada penjarahan, perusakan, dan pembakaran terhadap rumah, toko, dan mobil milik orang Tionghoa. Kerusuhan berikutnya terjadi di Medan tanggal 10 Desember 1965. Bahkan dalam peristiwa ini ratusan orang Tionghoa dilukai dan dibunuh.

Kuatnya sentimen anti-Tionghoa membuat pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap sebagai solusi penyele-

saian masalah Tionghoa. Alih-alih solusi, justru semakin menjauhkan relasi yang harmonis dan menjadi alat yang mempertajam diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Orde Baru menolak pandangan yang membedakan identifikasi historis dan kultural dengan identifikasi politik. Padahal senyatanya *Hoakiao* cenderung mengindentifikasikan diri dengan peradaban besar Tionghoa bukan dengan negara Republik Rakyat Tiongkok yang menganut komunis.

Peristiwa 1965 dianggap menjadi bukti bahwa Tionghoa tidak memiliki sentimen kebangsaan. Tionghoa dicurigai telah mendukung politik kaum kiri dan identifikasi antara Tionghoa dengan komunisme terus berkembang. Stigma yang dipaksakan ini secara simbolis diwujudkan tahun 1967 dalam bentuk pelarangan resmi penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok yang lantas diganti dengan sebutan Cina. Sebuah istilah yang seolah menekankan bahwa masyarakat Tionghoa merupakan *outsider* yang bukan bagian dari bangsa Indonesia. Karenanya, segala perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa lengkap dengan penindasan budayanya dianggap benar dan wajar.

Mulai tahun 1966, semua sekolah yang berbahasa Tionghoa ditutup. Pada tahun 1967 juga diberlakukan pelarangan terhadap penggunaan aksara Tionghoa di tempat umum, termasuk majalah maupun surat kabar. Melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1967 dinyatakan bahwa segala bentuk dan wujud budaya serta tradisi Tionghoa, seperti Tahun Baru Imlek, pertunjukan wayang potehi, barongsai, sembahyang leluhur, dan sebagainya hanya boleh dirayakan di kalangan keluarga di dalam rumah atau kelenteng. Berbagai kebijakan ini merupakan upaya untuk menghapus komponen Tionghoa dari kebudayaan Indonesia.

Inilah agresi kebudayaan gaya Orde Baru yang menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Diskriminasi budaya

terhadap masyarakat Tionghoa yang terjadi pada masa Orde Baru entah disadari atau tidak telah menjelma menjadi genosida kultural. Padahal sebagai bagian dari bangsa ini, masyarakat Tionghoa berhak untuk memiliki identitas kulturalnya. Budaya Tionghoa juga merupakan salah satu pilar yang memperkaya khazanah budaya bangsa. Untuk itulah kesadaran multikultural harus ditumbuhkan demi terciptanya hidup yang harmonis agar Bhinneka Tunggal Ika tidak sekadar slogan.

MEI 1998, TITIK BALIK TIONGHOA

Jangan panggil aku Cina! Ungkapan ini muncul tidak lama setelah tragedi Mei 1998. Bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia sebutan Cina memberi stereotipe kurang mengenakan. Mereka lebih nyaman dan merasa diterima menjadi bagian dari Indonesia ketika disebut Tionghoa. Dalam sejarah bangsa ini, Tionghoa menjadi warga negara yang paling sering mendapat perlakuan diskriminasi. Kebijakan Kolonial Belanda mengenai stratifikasi masyarakat telah menempatkan Tionghoa sebagai warga Timur Asing (*Vremde Oosterlingen*) bersama orang Arab dan India. Warga Timur Asing kedudukannya di atas penduduk pribumi dalam posisi *middle class* setelah orang-orang Eropa. Hal inilah yang kemudian mempertajam jurang perbedaan hingga masa-masa selanjutnya.

Pada awal kemerdekaan muncul sistem perekonomian Benteng yang membatasi gerak etnis Tionghoa dalam ekonomi yang juga berimbas pada bidang politik, sosial, dan budaya. Kebebasan Tionghoa masih terus dikebiri oleh pemerintah rezim Orde Baru dengan menerapkan peng-

gunaan istilah dikotomi pribumi dan non-pribumi, termasuk adanya kebijakan SBKRI dan ganti nama sebagai upaya meng-Indonesia-kan warga Tionghoa. Pada masa itu dikeluarkan pula Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang semua bentuk ekspresi keagamaan dan budaya Tionghoa di ruang publik. Kondisi-kondisi inilah yang menyulut api sentimen pribumi vs Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhirnya memuncak pada kerusuhan Mei 1998.

Gambar 57. Matahari Beteng saat pecah kerusuhan Mei 98 di Solo

Sumber: https://lifeisjustsoso.wordpress.com/2017/05/21/mengenang-mei/

Tragedi Mei 1998 menyisakan kepedihan bagi sebagian warga Tionghoa di Indonesia. Mereka menjadi sasaran pengalihan amuk massa yang terjadi siang malam antara tanggal 12-16 Mei 1998. Tak terhitung jumlah toko dan rumah milik warga Tionghoa yang dirusak. Selain kerugian ekonomi akibat penjarahan dan perusakan, kekerasan fisik, termasuk juga seksual dan tekanan mental harus dirasakan warga Tionghoa pada masa-masa itu. Pada tanggal 14 Mei 1998 terjadi eksodus ribuan warga Tionghoa ke luar negeri. Selain di Jakarta, beberapa kota di Indonesia pernah menjadi

saksi bisu pecahnya konflik SARA yang menyasar warga Tionghoa, misalnya di Solo, Kebumen, Kudus, Pekalongan, Situbondo, Rengasdengklok, Bagan Siapi-api, hingga Makassar. Kerusuhan akibat isu rasial terhadap Tionghoa kebanyakan terjadi karena provokasi. Beberapa penduduk pribumi mayoritas justru membantu dan menyelamatkan orang-orang Tionghoa yang sedang diserang. Meskipun demikian, sentimen anti-Tionghoa memang tidak mudah dihapus begitu saja.

Selama ini bertahun-tahun telah tercipta stereotip negatif terhadap warga Tionghoa yang diidentikkan dengan perilaku tidak patriotik, eksklusif, bersifat asosial, dan apolitik. Suburnya sentimen -ionghoa layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kekerasan Mei 1998 dapat disebut sebagai klimaks dari sentimen anti-Tionghoa dalam sejarah Indonesia. Tidak saja karena soal besarnya skala kejadian, namun juga aspek brutalitas dari kekerasan tersebut. Kekerasan anti-Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998 sering kali dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Bagaimanapun sangat ironis apabila mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru terlibat dalam aksi biadab ini.

Terlepas dari bumbu politis, rasa kemanusiaan telah mendorong perlunya mengungkap secara gamblang mengenai siapa pelaku dan konteks yang melatarbelakanginya. Tak hanya itu perhatian terhadap para korban untuk mendapat *trauma healing* juga sangat diperlukan. Saat itu tak hanya kerugian harta benda, namun juga perlakuan keji dan tidak senonoh (penyerangan dan perkosaan) harus diterima oleh masyarakat Tionghoa yang menjadi korban. Tak heran apabila banyak yang kemudian berbondong-bondong pergi ke negara lain dan enggan kembali ke Indonesia meskipun dalam hati kecilnya muncul kerinduan.

Tragedi Mei 1998 merupakan bukti bahwa konsep asimilasi yang diusung oleh Orde Baru gagal dan bersifat memaksa. Sentimen anti-Tionghoa begitu mudahnya disulut. Pembauran yang dianjurkan pemerintah Orde Baru tidak mengarah pada kerukunan hidup bermasyarakat, namun justru memicu kerentanan sosial sekaligus mematikan demokrasi. Pembauran semestinya dapat berjalan secara wajar dan alamiah sebagaimana pernah terjadi pada masa kejayaan Nusantara dahulu. Ini mengindikasi bahwa gagasan integrasi jauh lebih tepat. Tionghoa harus diakui sebagai salah satu suku yang kedudukannya sama seperti halnya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Bugis, dan suku-suku lainnya di Indonesia.

Pengakuan terhadap identitas kultural merupakan hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat termasuk Tionghoa. Orang Tionghoa tidak dapat sepenuhnya menanggalkan nilai-nilai budaya dan peradaban asalnya yang telah mendarah daging. Meskipun demikian, sebenarnya orang Tionghoa merasa *melu handarbeni lan hangrungkebi* terhadap negara tempat mereka dilahirkan, mencari penghidupan, dan menjalani hidup hingga ajal menjemput. Masyarakat Tionghoa memiliki *sense of belonging* yang tinggi terhadap negara tempat tinggalnya.

Salah besar apabila ada yang mengatakan bahwa orang Tionghoa tidak memiliki rasa nasionalisme dan tidak memiliki sumbangsih bagi negeri ini. Sejarah telah mencatat sekian banyak tokoh Tionghoa yang turut berperan pada masa pergerakan nasional, Proklamasi, ikut serta dalam pemerintahan, hingga berjasa mengharumkan nama bangsa ini melalui bidang-bidang yang ditekuninya. Sayangnya, tidak banyak yang memahaminya dengan baik. Penguasa seolah sengaja mengaburkan sementara pembelajaran sejarah di sekolah juga tidak pernah mengungkapnya. Menyadari

keprihatinan ini tidak hanya menggerakkan Tionghoa untuk bangkit, namun kiranya juga mengetuk kesadaran sejarah (*historical consciousness*) seluruh elemen bangsa.

Titik Balik

Kondisi membaik dirasakan warga Tionghoa setelah Gus Dur menduduki kursi kepemimpinan republik ini pascareformasi. Melalui PP Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut semua peraturan yang selama ini mendiskriminasi warga Tionghoa. Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya. Sudah sewajarnya bila etnis Tionghoa memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suku bangsa-etnis lain yang sudah sejak lama hidup dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang multikultural. Oleh karena itu, sudah saatnya warga Tionghoa tidak hanya berkecimpung dalam bidang perekonomian. Tionghoa memiliki hak yang sama seperti warga negara lain di Indonesia untuk turut mengabdi di bidang politik pemerintahan, sosial kemasyarakatan, bahkan militer yang selama ini dianggap bukan bagiannya.

Pada masa Orde Baru, warga Tionghoa memiliki perasaan sebagai *outsider* dan dianggap apolitik-asosial. Perlahan warga Tionghoa menempatkan dirinya menjadi *economic animal* yang pada gilirannya menimbulkan konflik dengan warga lain. Selama ini konflik yang muncul antara Tionghoa dengan pribumi dianggap menjadi bahaya laten. Orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasikan warga Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sejarah menorehkan bahwa kaum Tionghoa memiliki peran yang tidak kecil dalam membidani lahirnya negara ini bahkan hingga tahun-tahun sesudahnya. Ada banyak tokoh Tionghoa yang turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini, seperti Liem Koen Hian, Drs. Yap Tjwan Bing, dan Mr. Tan Po Gwan dalam masa-masa pergerakan nasional. Beberapa lainnya juga pernah turut menentukan hidup bangsa ini di awal kemerdekaan, seperti Siauw Giok Tjhan, John Lie, dr. Lie Kiat Teng, Oei Tjoe Tat, dan Ong Eng Die. Kota Solo juga patut berbangga memiliki budayawan Jawa yang seorang Tionghoa, yaitu Go Tik Swan yang dianugerahi gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta. Ironisnya, nama-nama mereka tidak banyak dikenal orang, apalagi diketahui pengabdian dan perjuangannya karena memang jarang (atau tabu) untuk diekspos.

Tragedi Mei 1998 tidak semata-mata menjadi catatan kelam bagi warga Tionghoa, namun menjadi titik balik bagi warga Tionghoa untuk memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang menempatkan warga Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga negara yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan warga Tionghoa dengan warga lainnya juga lebih terbuka dan kecurigaan sudah jauh berkurang. Situasi ini membuka kesempatan bagi warga Tionghoa untuk terlibat dalam kancah politik. Tahun 2007, Christiandi Sanjaya, seorang etnis Tionghoa, terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru menjadi tokoh Tionghoa fenomenal di Indonesia. Selain itu, ada juga Kwik Kian Gie, Marie Elka Pangestu yang pernah berkesempatan menjadi menteri. Ini beberapa bukti yang mendobrak

paradigma lama bahwa etnis Tionghoa dianggap tidak dapat berperan dalam pemerintahan.

Di daerah, misalnya Solo, kaum Tionghoa melalui organisasi kemasyarakatan seperti PMS semakin aktif berperan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, semakin banyak warga Tionghoa yang menekuni profesi di luar kebiasaan sebelumnya, seperti: guru, dosen, tokoh masyarakat, seniman, penulis, hingga artis. Situasi ini berhasil menciptakan pembauran yang lebih baik dibandingkan upaya asimilasi yang pernah ditempuh pada masa Orde Baru. Pembauran bukan berarti meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemudian dilebur menjadi satu, namun justru harus dapat menerima perbedaan yang ada untuk memperkaya khazanah bangsa.

Semakin diterimanya kaum Tionghoa beserta identitas ke-Tionghoa-annya maka sekat perbedaan itu akan luruh seiring dengan pengakuan akan keberadaan warga Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak sekadar konsep untuk menjembatani kenyataan multikultural bangsa, namun juga berarti ada kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa, termasuk masyarakat Tionghoa untuk turut mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Jangan panggil aku Cina (lagi)!

Gardu dan Portal

Bicara Mei 1998, tidak dapat lepas dari Kota Solo. Sejarah Solo mencatat kisah panjang sentimen anti-Tionghoa. Sejak meletusnya Geger Pecinan (1740-1743) yang memaksa keraton berpindah dari Kartasura ke Surakarta, Tionghoa tak pernah absen menorehkan sejarah bagi perkembangan Kota Solo. Di era modern, sikap anti-Tionghoa di Solo mengemuka ketika terjadi pertentangan antara Rekso Rumekso dengan Kong Sing (1911-1912) terkait masalah perdagangan batik.

Kerusuhan anti-Tionghoa juga terjadi pada masa awal kemerdekaan (1940-an), kemudian tahun 1963 sebagai dampak dari PP 10/1959, dan tahun 1980 yang bermula dari ketidaksengajaan gesekan antarindividu. Terakhir tentu saja pada Mei 1998 yang paling banyak memakan kerugian.

Berbagai peristiwa ini seolah menjadi rangkaian yang membentuk siklus konflik anti-Tionghoa di Solo yang disebut bersumbu pendek. Peristiwa (gejala) sejarah memang dapat berulang, namun tidak dapat diteorikan secara kaku. Solo menunjukkan situasi pluralitas yang kuat dalam konstelasi masyarakatnya. Interaksi antaretnis memang beberapa kali menimbulkan masalah, namun secara alamiah sejatinya mereka membaur dengan baik. Benturan kepentingan ekonomi maupun nilai tradisi acapkali menyulut isu sentimen etnis. Maka kesadaran interkultural untuk hidup berdampingan secara harmonis merupakan kunci penting.

Akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru telah menyebabkan warga Tionghoa terus dianggap sebagai *outsider* yang apolitik-asosial. Alhasil perlahan warga Tionghoa lebih memilih menempatkan dirinya sebagai *economic animal.* Situasi inilah yang pada gilirannya menyimpan bara konflik dengan warga lainnya. Orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasikan warga Tionghoa saat itu sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Adanya kecenderungan sikap eksklusif dan menutup diri yang ditunjukkan oleh warga Tionghoa menjadi penyebab ketidaksenangan warga lain. Tentu tidak semua bersikap demikian, namun kalau pun ada sikap tersebut bukan tanpa sebab. Dalam diri mereka tersimpan memori kuat (sindrom) akan pengalaman traumatis yang kerap terjadi. Warga Tionghoa sering kali mendapat penolakan dan tidak ada yang

berani memberi jaminan keselamatan bila terjadi ancaman konflik. Situasi semacam ini menjadi gambaran umum yang terjadi pada masa Orde Baru.

Akibat Peristiwa Mei 1998, pola relasi antara Tionghoa dengan warga lain mulai berubah. Tanpa perlindungan berarti, Tionghoa bersama warga lain berusaha mempertahankan kampung tempat tinggalnya saat kerusuhan Mei 1998 terjadi di Solo. Poskamling (gardu) di kompleks masing-masing diaktifkan dan ronda malam digalakkan (Kusno, 2007). Portal-portal dibangun untuk menghalau masuknya massa yang tidak diinginkan. Warga Tionghoa yang sebelumnya jarang terlibat, saat itu terjun langsung dan berbaur dengan warga lain untuk menjaga keamanan bersama.

Kini keberadaan gardu dan portal lantas menjadi simbol penjaga memori akan peristiwa yang penuh dengan kekacauan, gangguan, dan ketidakamanan itu. Di sisi lain, gardu dan portal juga menjadi sarana yang mempersatukan warga walaupun hanya dalam ruang terbatas di kompleks atau kampung. Persatuan antarwarga ini tanpa disadari menjadi terjalin kuat karena adanya ancaman konflik. Meskipun menyakitkan, tragedi Mei 1998 mendatangkan pula buah positif. Politik asimilasi terkubur dan pintu untuk kembali pada jati diri Tionghoa terbuka lebar. Warga Tionghoa Solo saat ini memiliki ruang yang luas untuk mengaktualisasikan identitas budaya mereka.

Beraneka Arus

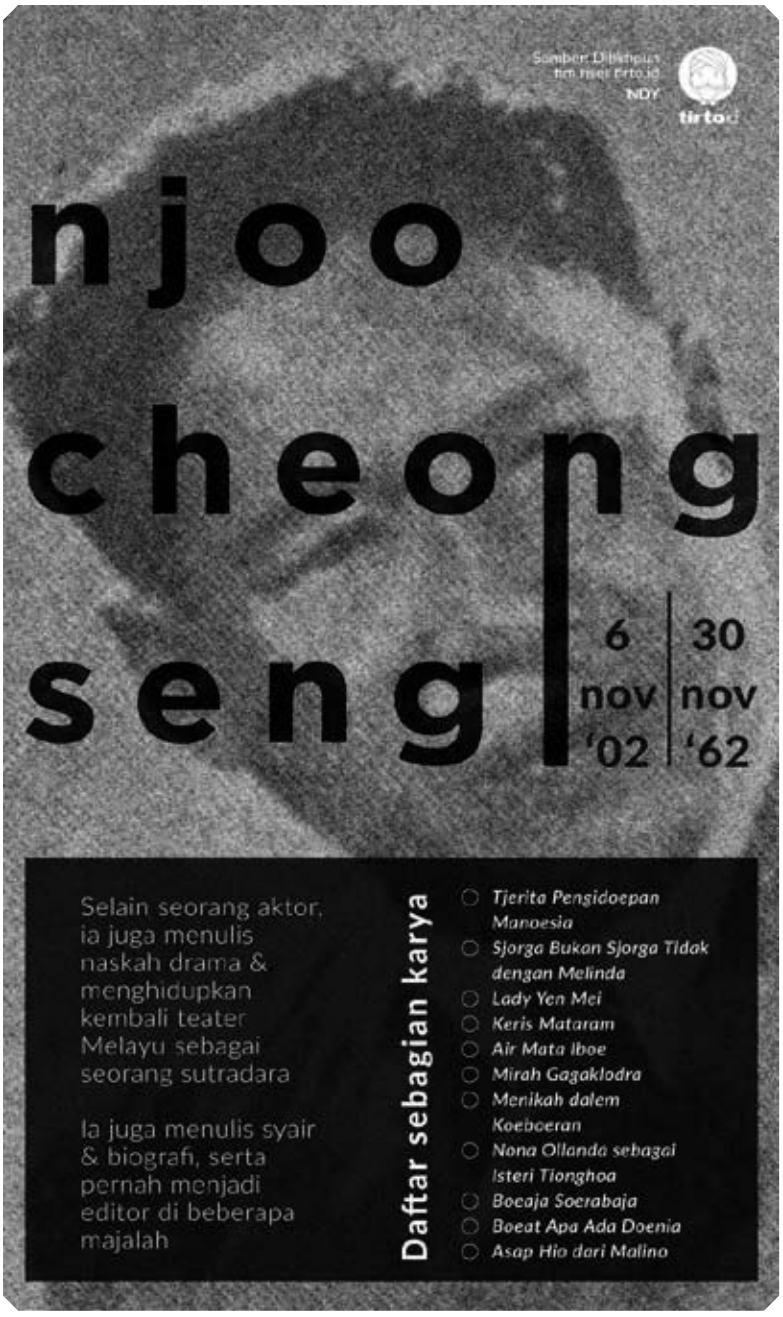

Gambar 58. Infografik Njoo Cheong Seng

Sumber: https://tirto.id/njoo-cheong-seng-legenda-panggung-sandiwara-kisah-kisah-tragis-c7Er

SASTRA DAN JURNALISTIK MELAYU TIONGHOA

Saat ini kebebasan orang Tionghoa dalam berekspresi di bidang budaya maupun lainnya, termasuk politik, sudah dijamin oleh negara. Satu masalah yang sampai kini masih terpendam, yakni belum adanya pengakuan atas kepeloporan Tionghoa dalam proses kebangsaan Indonesia lewat perkembangan kesastraan Melayu Tionghoa. Sastra Melayu Tionghoa didapati telah ada sejak tahun 1870, namun hingga kini yang dianggap sebagai sastra Indonesia modern baru muncul pada akhir Perang Dunia I, yakni tahun 1918. Saat itu Balai Pustaka membentuk Dewan Redaksi untuk mendorong kegiatan menulis di kalangan orang Indonesia.

Akan sia-sia saja mencari tahu sejak kapan orang Tionghoa mulai mempelajari bahasa Melayu di Nusantara. Satu yang pasti, selama hampir 100 tahun (1870-1960), sastra Melayu Tionghoa telah melibatkan 806 penulis dengan 3005 karya (Salmon, 2010). Kepeloporan sastra Melayu Tionghoa sudah didengungkan sejak lama. Nio Joe Lan mengatakan pentingnya peran kesastraan ini yang disebutnya sebagai Kesastraan Indo-Tionghoa. Menurutnya, kelahiran sastra

Indo-Tionghoa sampai pada batas tertentu bertalian erat dengan penerjemahan sastra Tiongkok ke dalam bahasa Melayu Rendah yang dimulai pada akhir abad ke-19 (Joe Lan, 2013: 304).

Munculnya sastra Indo-Tionghoa bermula dari keinginan orang Tionghoa di Indonesia menciptakan suatu riwayat yang berbau Indonesia, bernapaskan Indonesia, dengan tokoh-tokoh yang hidup dalam keadaan sebagai Tionghoa dengan persoalan yang nyata dihadapi sehari-hari. Selain itu, berkembangnya sastra Indo-Tionghoa juga tidak lepas dari kesempatan bersekolah bagi anak-anak Tionghoa, entah lewat Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) maupun Hollands Chinese School yang digagas penjajah Belanda. Hal lain yang juga mendukung, yakni kemampuan menulis secara rapi dan juga perusahaan percetakan yang saat itu mulai bermunculan.

Gambar 59. Kwee Tek Hoay, salah satu sastrawan Tionghoa

Sumber: https://tirto.id/

Sastra Indo-Tionghoa dimulai dari karya Lo Fen Koei yang disusun oleh Gouw Peng Liang tahun 1903. Kisahnya tentang sepak terjang Lo Fen Koei seorang *pakhter* candu dan tuan tanah yang kejam di Banjarnegara. Ada juga kisah Gan

Jan Nio yang dikarang oleh Tan Boen Kim, suatu kisah asmara di Batavia yang *happy ending*. Karya-karya lain, antara lain *The Loan Eng* oleh Hauw San Liang, *Peniti Dasi Barlian* oleh Tan King Tjan, *Boenga Roos dari Tjikembang* oleh Kwee Tek Hoay, dan *Lagoe dari Toedjoeh Surga* oleh Ong Ping Lok. Sastra Indo-Tionghoa sempat berhenti pada masa pendudukan Jepang dan semakin surut memasuki tahun 1960-an.

Salah seorang sastrawan Tionghoa yang terkenal, Kwee Tek Hoay memperoleh piagam penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma atau Pahlawan Sastra Melayu atas karya-karyanya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2011. Sementara nama-nama di era kemerdekaan yang juga menaruh perhatian pada perkembangan sastra, yakni Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem, guru besar bahasa dan kesusastraan Jawa Universitas Indonesia. Beliau merupakan satu-satunya Tionghoa yang menjadi dosen sekaligus ahli di bidang sastra Jawa. Kakaknya juga berkecimpung di dunia akademik, yakni Prof. Dr. Tjan Tjoe Som yang menjadi seorang sinolog (ahli bahasa dan kebudayaan Tionghoa).

Pers Tionghoa

Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya sastra Melayu Tionghoa, berkembang pula pers Melayu Tionghoa. Keduanya saling mengisi dan mendukung. Banyak sastrawan Tionghoa yang merangkap sebagai jurnalis, redaktur, bahkan pimpinan dan pemilik penerbitan dan percetakan. Di antaranya Kwee Tek Hoay, Njoo Cheong Seng, Lie Kim Hok, Nio Joe Lan, Soe Lie Piet, Kwee Kek Beng, Pouw Kioe An, dan lainnya. Melalui sekolah-sekolah seperti THHK, HCS, ELS, MULO, AMS, HBS, dan HCK membuat masyarakat Tionghoa melek bacaan. Pada awalnya, di Hindia Belanda hanya ada pers Belanda seperti *Bataviasche Nouvelles, Vendunieuws, Bataviasche Courant, Memorie de Nouvelles*, dan lainnya. Akan

tetapi, pada tahun 1931 ternyata tercatat sudah terdapat 36 koran Melayu Tionghoa di Hindia Belanda (Setiono, 2008: 435).

Perkembangan sastra dan pers Melayu Tionghoa tidak lepas dari perkembangan usaha penerbitan dan percetakan di Hindia Belanda. Pelopornya tentu para penerbit Belanda. Pada tahun 1883, Yap Goan Ho seorang pengusaha, penerjemah, dan pedagang buku membuka usaha percetakan di Pancoran Batavia. Penerbit Tionghoa lain, misalnya Lie Kim Hok yang mengambilalih percetakan milik Van der Linden, Tjoe Toei Yang, dan Tjiong Hok Liong di Batavia. Ada pula Kwa Wan Hong di Semarang, Sie Dhian Ho di Solo, Kwee Khay Khee di Malang, dan banyak lainnya.

Pada tahun 1856 untuk pertama kalinya terbit koran berbahasa Melayu, yakni *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe*. Selanjutnya, tahun 1868 terbit koran peranakan Tionghoa di Batavia bernama Bintang Soerabaja. Di Semarang muncul mingguan *Slompret Melajoe* tahun 1876. Di Surabaya tahun 1901 menyusul koran *Li Po* dan *Pewarta Soerabaia* tahun 1902. Koran berikutnya yang terkenal, yakni Sin Po terbit di Batavia tahun 1910 dengan pemimpin redaksinya yang pertama bernama Lauw Giok Lan. Tokoh-tokoh Sin Po lainnya, antara lain: Oei Tjioe Yong, Hauw Tek Kong, Tjoe Bou San, Kwee Kek Beng, Ang Yan Goan, dan lainnya.

Sin Po terkenal karena menjadi surat kabar pertama yang memopulerkan penggunaan kata Indonesia menggantikan Nederlandsch-Indie, Hindia Nederlandsch, Hindia Olanda, atau Hindia Belanda. Sin Po pula yang menghapuskan penggunaan kata inlander yang dianggap menghina rakyat Indonesia. Hal ini lantas diikuti oleh surat kabar lain. Sebagai balas budi, semua penerbitan pers Indonesia mengganti kata Cina dengan Tionghoa. Sin Po juga menjadi surat kabar pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan

Wage Rudolf Soepratman. Teks lagu yang aslinya berjudul Indonesia dan kemudian menjadi lagu kebangsaan Republik Indonesia ini pertama kali terpacak di mingguan Sin Po edisi 10 November 1928 (Setiono, 2008: 450).

Sebagai wawasan tambahan, tersebutlah nama Yo Kim Tjam, putra pasangan Yo Sin Seng dan Sim Pipi Nio kelahiran Garut tahun 1899. Kim Tjam adalah sosok yang berjasa dalam membantu terciptanya lagu Indonesia Raya. Pada tahun 1927 banyak perusahaan rekaman yang ketakutan karena Belanda telah mengendus gerakan bawah tanah para pemuda Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Akibatnya, tak ada yang bersedia menerima permintaan W. R. Supratman untuk merekam lagu Indonesia Raya. Hanya Yo Kim Tjam, sahabat W. R. Supratman, yang berani menerimanya. Studio rekaman ini bernama *NV Populair*. Berkat bantuannya maka lagu *Indonesia Raya* dapat tersebar luas. Rekaman ini disimpan dalam piringan hitam dan diperbanyak oleh Firma Tio Tek Hong pada tahun 1929. Ada dua versi lagu *Indonesia Raya* yang disimpan dalam piringan hitam. *Pertama*, dengan iringan biola dan suara W. R. Supratman. *Kedua*, versi keroncong sebagai bagian dari album keroncong orkes populer milik Yo Kim Tjam.

Gambar 60. Surat kabar Sin Po dan Sin Tit Po

Sumber: Dokumentasi penulis

Kendati Sin Po sangat mendukung perjuangan Indonesia merdeka, namun pandangan politiknya condong pada Tiongkok. Sin Po berpendapat bahwa seluruh orang Tionghoa di Hindia Belanda merupakan warga negara Tiongkok dan harus mempertahankan kebudayaan Tionghoa. Pada tahun 1930, terbit harian Siang Po yang dipimpin Phoa Liong Gie. Siang Po awalnya cenderung netral, namun kemudian menjadi corong dari Chung Hwa Hui (CHH). Siang Po berusaha meyakinkan bahwa orang Tionghoa merupakan bagian dari Hindia Belanda dan seharusnya tunduk pada pemerintahan yang ada. Berbeda lagi dengan surat kabar Sin Tit Po di Surabaya yang sejak tahun 1932 menjadi corong Partai Tionghoa Indonesia pimpinan Liem Koen Hian. Sin Tit Po jelas berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan menyatakan sebagai bagian integral dari pers nasional Indonesia (Setiono, 2008: 456).

Pada masa setelah kemerdekaan, tercatat ada harian Keng Po yang memaninkan peran penting. Keng Po pertama kali terbit tahun 1923 dengan 50% saham milik Sin Po. Keng Po berjaya pada masa pimpinan Khoe Woen Sioe dan Injo Beng Goat. Sementara *Sin Po* pernah berubah nama menjadi *Sin Sin Po* (Sin Po Baru), kemudian menjadi *Kung Yung Pao* di bawah pimpinan Oei Tiang Tjoei. Pasca kemerdekaan, dua harian yang mampu bertahan hanyalah *Sin Po* dan *Keng Po*. Dalam konteks Perang Dingin, *Sin Po* cenderung di sayap kiri, sementara *Keng Po* di sayap kanan. *Sin Po* kemudian berubah nama menjadi *Pantja Warna* pada masa Demokrasi Terpimpin dan tak lama sebelum ditutup tahun 1965 sempat berubah lagi menjadi *Warta Bhakti*. *Keng Po* pernah berubah nama menjadi *Pos Indonesia* dan bertahan sampai tahun 1970-an. Terakhir surat kabar berbahasa Tionghoa yang resmi diterbitkan melalui Berita Yudha pada masa Orde Baru diberi nama *Yindunixiya Ribao* (*Harian Indonesia*).

Di luar kisah-kisah seputar perjuangan jurnalistik lewat pers, patut dicatat pula tokoh Tionghoa bernama Tan Khoen Swie. Beliau ini seorang penulis dan penerbit buku yang rasa nasionalisme keindonesiaannya tinggi. Tan Khoen Swie mendirikan usaha penerbitan Boekhandel TKS (Tan Khoen Swie) dan Toko Kelontong Soerabaja di Kediri. Lewat buku-buku terbitannya, Tan Khoen Swie menentang penjajahan Belanda. Tan Khoen Swie juga menaruh perhatian pada penerbitan karya sastra Jawa. Antara lain, versi-versi awal *Serat Kalatidha* (Ranggawarsita) dan *Serat Wedhatama* (Mangkunagara IV) disebarluaskan melalui penerbit ini. Tak hanya itu, sebagai aksi protes pada Belanda, laki-laki Tionghoa yang berasal dari Wonogiri ini memanjangkan rambut sampai sebahu.

Gambar 61. Boekhandel Tan Khoen Swie di Jalan Dhoho Kediri (1925), Toko Surabaya (2019), dan foto diri Tan Khoen Swie

Sumber: https://www.merdeka.com/, dokumentasi penulis, d.wikipedia.org/wiki/Tan_Khoen_Swie

Put On dan Komik Lainnya

Pada 17 Januari 1931 majalah mingguan *Sin Po* pertama kali memuat komik strip yang bernama *Put On* (Sindhunata, 2017). Serial terbitan pertama ini tidak ada nama atau inisial ilustratornya. Komik ini terbit rutin setiap hari Kamis sampai akhirnya majalah *Sin Po* tutup pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1947, tokoh *Put On* muncul kembali di majalah

Pantja Warna, penerus majalah *Sin Po*. Dalam kemunculannya ini pun, ilustrator dari komik *Put On* masih belum membuka diri. Selanjutnya, dalam edisi khusus majalah *Panca Warna* dalam rangka peringatan 10 tahun terbit tahun 1957, ada ulasan Hao Peng Yu mengenai ilustrator komik *Put On*, yakni Kho Wan Gie. Diungkap dalam ulasan tersebut, Kho Wan Gie seorang yang penuh humor, tapi pemalu. Kho Wan Gie lahir di Indramayu tahun 1908 dan wafat tahun 1983. Nama *Put On* juga ternyata bukan berasal dari bahasa Tionghoa, melainkan bahasa Inggris yang dicetuskan Ang Yan Goan, seorang redaktur *Sin Po*.

Komik *Put On* merupakan komik strip pertama di Indonesia yang dicetak lewat media majalah. Goresan-goresan Kho Wan Gie dalam menggambar komik ini juga sangat menarik terutama pada adegan-adegan bergerak seperti lari, memukul, atau gerakan cepat. Goresannya tepat sehingga seakan figurnya bergerak. Komik ini menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Betawi dan sesekali ungkapan-ungkapan khas Tionghoa peranakan atau Melayu Rendah. Hermanu, seorang kurator karya, mengungkap bahwa komik *Put On* mengandung kritik sosial yang digambar secara lucu sehingga tidak menyinggung orang lain. Nama *Put On* menurutnya dapat diartikan sebagai si Sial atau si Tolol. *Put On* tampil bersama Ne (ibunya), Encim Piang Nyong, temannya A Kiong, A Liuk, Oh Tek, kedua keponakan, dan gadis pujaannya Dortji.

Gambar 62. Salah satu serial Komik *Put On*

Sumber: https://www.tembi.net

Selain *Put On*, dikenal luas pula nama Kho Ping Hoo. Penulis cerita silat yang terkenal ini lahir di Sragen tahun 1926 dan meninggal tahun 1994. Nama lengkapnya Sukawati Kho Ping Hoo. Sejak kecil, beliau diajarkan silat oleh ayahnya. Kho Ping Hoo pernah bergabung dalam Barisan Pemberontak Tionghoa. Sekitar tahun 1951, Kho Ping Hoo mulai menulis cerita detektif, novel, cerpen, hingga silat.

Cerita silat pertamanya berjudul Pedang Pusaka Naga Putih sebagai cerita bersambung di majalah Selecta, Roman, dan Monalisa. Sebelum Kho Ping Hoo juga dikenal Oei Kiem Tia sebagai penulis cerita silat. Kho Ping Hoo pernah mencoba menjadi pemain dan sutradara untuk pertunjukkan sandiwara. Kho Ping Hoo telah menulis lebih dari 200 judul cerita silat. Beberapa dibukukan atau disandiwararadiokan. Beberapa judulnya, antara lain Pendekar Baju Putih, Kisah Keluarga Pulau Es, Bu Kek Siansu, Perawan Lembah Wilis, dan lainnya.

TIONGHOA TURUT MENCERDASKAN BANGSA

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei identik dengan ketokohan Ki Hajar Dewantara yang bernama kecil R.M. Suwardi Suryaningrat. Atas jasanya yang luar biasa dalam bidang pendidikan, beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Keberadaan Taman Siswa masih ada sampai saat ini baik dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi.

Taman Siswa merupakan sekolah swasta yang memadukan pendidikan gaya barat yang modern dengan seni budaya tradisional Jawa. Taman Siswa menolak bantuan dari pemerintah Hindia Belanda agar tidak terikat dan bisa berdiri independen. Akibatnya, kala itu Taman Siswa sempat dijuluki sebagai *wildeschoolen* alias sekolah liar. Menariknya pola pendidikan seperti itu jauh telah terlebih dahulu diterapkan oleh Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), sekolah yang digagas oleh masyarakat Tionghoa (Setiono, 2008).

Tiong Hoa Hwee Koan merupakan perintis pendidikan modern pertama di Indonesia, jauh lebih awal dari sekolah Muhammadiyah, NU, maupun Taman Siswa. THHK pertama didirikan pada 17 Maret 1900 di Patekoan, Batavia yang lantas membuat daerah-daerah lain di Jawa giat membangun sekolah-sekolah sejenis. Sebagai pemimpin diangkatlah *Luitenant* Tionghoa, Phoa Keng Hek sebagai Presiden THHK yang pertama. THHK didirikan dengan cita-cita memperbaiki kondisi budaya maupun kondisi sosial orang Tionghoa di Hindia Belanda. THHK bertekad mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa.

Gambar 63. Phoa Keng Hek, guru perintis pendidikan modern pertama di Indonesia, THHK

Sumber: http://baltyra.com/2018/12/06/phoa-keng-hek-sosok-yang-terlupakan/comment-page-1/

Berdirinya THHK semakin mendorong lahirnya surat kabar-surat kabar Tionghoa yang memperkuat rasa persatuan Tionghoa di Hindia Belanda. Maka pemerintah Kolonial Belanda meresponsnya dengan mendirikan Biro Urusan Cina guna mengontrol gerakan masyarakat Tionghoa. Dengan segera kesadaran nasionalisme Indonesia semakin tumbuh di kalangan Tionghoa. Tokoh Tionghoa nasionalis pada masa itu, Liem Koen Hian, menegaskan bahwa Indonesia merupakan Tanah Air dan Negara bagi golongan Tionghoa.

THHK didirikan oleh tokoh-tokoh dari golongan Tionghoa peranakan. Latar belakang ini mendorong THHK tidak mengabaikan kenyataan hidup di negara yang kelak menjadi Indonesia merdeka ini. THHK mengarahkan kegiatan pendidikannya untuk mempersiapkan generasi muda Tionghoa agar siap hidup bersama dengan masyarakat yang ada di Indonesia, bukan untuk kembali ke negeri Tiongkok. Buktinya dalam rencana kerja pendirian sekolah THHK dinyatakan perlunya didirikan empat jenis sekolah. Jenis-jenis sekolah ini dilandasi oleh faktor bahasa yakni sekolah berbahasa Tionghoa, Melayu, Belanda, dan Inggris. Menariknya lagi, THHK terbuka bagi kaum perempuan sebagai calon siswa. Pemikiran ini jelas menandakan para pendiri THHK sudah berpikiran modern dan jauh ke depan.

Sekolah Tionghoa diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dasar THHK yang ingin mengembangkan budaya Tionghoa. Sekolah Melayu menunjukkan kesadaran bahwa generasi muda Tionghoa kelak akan hidup bermasyarakat dengan penduduk lainnya yang berbahasa Melayu (Indonesia) sebagai *lingua franca*. Sekolah Belanda tentu tidak lepas dari kenyataan dominasi Belanda saat itu sebagai bangsa penjajah. Terakhir sekolah Inggris memperlihatkan bahwa THHK telah menyadari pentingnya bahasa Inggris dalam pergaulan internasional.

Di sisi lain, dengan membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk bersekolah maka THHK telah memperjuangkan cita-cita emansipasi. THHK memahami bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan bagi anak yang pertama dan utama berasal dari seorang Ibu. Hasilnya banyak perempuan Tionghoa yang berhasil mencapai jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 1914, di harian *Sin Po* muncul artikel yang ditulis oleh dua perempuan Tionghoa berpendidikan, kakak-beradik

Caroline dan Leonie Tan, yang mendorong perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan.

Peran THHK dalam pendidikan saat itu berhasil menginspirasi berdirinya perkumpulan sejenis. THHK turut mendorong tumbuhnya rasa nasionalisme di kalangan priyayi dan cendekiawan yang kemudian melahirkan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. THHK sempat bertahan melewati masa-masa sulit hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tahun 1966, pasca-Gerakan 30 September, ratusan sekolah THHK ditutup dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan. Pemerintah Orde Baru membubarkannya dan mengubah gedung sekolah THHK menjadi sekolah negeri, asrama tentara, maupun gedung perkantoran.

Tentu amat disayangkan apabila sekarang ini Tionghoa masih absen dalam historiografi Nasional Indonesia. Kisahnya jarang ditulis apalagi diajarkan dalam pelajaran sejarah di sekolah. Padahal peran Tionghoa signifikan bagi perjalanan sejarah bangsa ini. Hampir di setiap kajian peristiwa dan rentetan masa, Tionghoa turut memberi konstribusi. Karena itu, penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia perlu dilakukan dengan memperhatikan peran setiap elemen dari bangunan bangsa dan negara ini.

Gambar 64. Sekolah Terpadu Pahoa di Tangerang, kelanjutan dari THHK

Sumber: http://pahoa.sch.id/

Para Guru Tionghoa

Sejarah THHK dapat dikatakan menjadi inspirasi pada masa sekarang dengan tumbuhnya sekolah-sekolah nasional atau sekolah tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan Tionghoa). Banyak di antaranya dicetuskan, didirikan, dan dikelola oleh kalangan Tionghoa. Pada taraf perguruan tinggi juga pernah berdiri Universitas Res Publica (sekarang menjadi Universitas Tri Sakti) yang digagas oleh Baperki. Orang Tionghoa juga berperan dalam berdirinya Universitas Diponegoro Semarang lewat Oei Tiong Ham yang menghibahkan tanahnya untuk didirikan kampus. Phoa Keng Hek (Presiden THHK), H. H. Kan, dan Nio Hoey Oen juga berjasa besar dalam proses berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka menggalang dana 500.000 Gulden sebagai modal pembangunan ITB yang pada tahun 1914 masih bernama Technische Hoogeschool (THS).

Gambar 65. Para guru THHK Batavia

Sumber: http://pahoa.sch.id/

Hal yang barangkali masih terasa langka, yakni orang Tionghoa yang mengabdi di dunia pendidikan sebagai guru.

Orang Tionghoa umumnya memilih menjadi pedagang atau wirausahawan yang banyak menghasilkan uang. Sebenarnya, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Terbukti cukup banyak orang Tionghoa yang bekecimpung dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mengenal para ilmuwan berdedikasi, seperti: Dr. Lie Tek Tjeng, Dr. Thee Kian Wie, dan Dr. Mely G. Tan yang semuanya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Prof. Dr. Meiling Oey Gardiner, Prof. Dr. H. O. K. Tanzil, Dr. Onghokham, Prof. Dr. James Danandjaja, Prof. Tjan Tjoe Som, dan Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem dari Universitas Indonesia. Prof. Go Ban Hong, ahli Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor. Prof. Tjia May On, Ph.D., ahli Fisika dari Institut Teknologi Bandung maupun Prof. Drs. Yohanes Surya, M.Sc., Ph.D., seorang fisikawan Indonesia. A. J. Liem Sioe Siet penggagas berdirinya Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hingga ahli pendidikan terkenal, Prof. Anita Lie, M.A., Ed.D.

Tak hanya akademisi dan dosen, orang-orang Tionghoa yang menekuni profesi sebagai guru mulai dari PG/TK, SD, SMP, SMA/K juga tak kalah banyak. Tidak benar persepsi bahwa orang-orang Tionghoa hanya memilih bidang-bidang ilmu yang banyak menghasilkan uang. Para ilmuwan, akademisi, dosen, guru, dan siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan menjalani profesi yang sangat mulia. Apalagi pendidikan merupakan sarana penting dalam menginternalisasikan budaya. Dengan bergelut di bidang pendidikan, entah lewat mendirikan atau mengelola sekolah maupun dengan menjadi guru maupun dosen maka turut mengupayakan pelestarian budaya pada generasi berikutnya. Adakah anak muda Tionghoa yang terpanggil menjadi guru atau dosen?

SINSHE DI TOKO OBAT

Di antara deretan ruko-ruko lawas di sepanjang Gang Warung, Semarang, berdiri Toko Obat Toen Djin Tong. Toko obat yang terletak di Gang Warung Nomor 96 (dahulu Nomor 120) ini menyimpan kisah sejarah panjang dua abad yang sayang dilewatkan. Setiap sudut toko kecil ini menjadi saksi bisu kontribusi Tionghoa dalam dunia kesehatan. Toko yang kini terkenal dengan nama Sumber Sehat tersebut berdiri sekitar tahun 1800-an. Tidak sendirian, di kanan kirinya juga ada toko obat lain, seperti Taurus, Cipta Jaya, Panca Jaya, dan Toko Agung. Dalam satu promonya di surat kabar, Toko Obat Toen Djin Tong punya tabib manjur alias *sinshe* bernama Tan Han Ping, lulusan sekolah tabib di Kwangtung.

KAMAR OBAT TIONGHOA

TOEN DJIEN TONG

GANG WAROENG 120

SEMARANG

Kita poenja toko obat soedah berdiri 20 taon lamanja dan soedah terkenal diantara publiek, serta selaloe kasih dateng obat-obatan jang baroe, teroetama kita poenja persediahan Som, Djiong, Yan Koei dan lain obat lagi selaloe toelen, maka toean-toean jang ingin dapetken Som, Djiong dan lain-lain obat oentoek kasehatan badan jang toelen, djangan loepa boeat dateng dalem kita poenja toko.

Selainnja itoe kita poenja toko obat telah oendang Sinshe Tan Han Ping jang telah loeloes dari sekolahan tabib di Kwangtung, jang pande obatin matjem-matjem penjakit boeat orang lelaki, prampoean dan anak-anak; penjakit dalem dan loear, penjakit-penjakit loear biasa sebagi batoek darah, toempah darah, orang prampoean kapan dateng boelan merasa sakit dan sebaginja lagi.

Memoedjiken dengen hormat

TOKO OBAT TOEN DJIEN TONG

GANG WAROENG 120 — SEMARANG

Gambar 66. Potongan iklan Toko Obat Toen Djien Tong Semarang

Sumber: Adrianne & Dwirahmi (2013: 31)

Selain menjual obat racikan, Toen Djien Tong juga menyediakan obat siap pakai yang diimpor dari Tiongkok maupun produksi dalam negeri. Pengobatan tradisional saat ini masih menjadi pilihan bagi sebagian warga. Bahkan sering kali pembelian obat juga diselimuti nuansa kepercayaan tradisi. Caranya orang sakit pergi ke kelenteng, berdoa pada salah satu Dewa Obat, yang terkenal Poo Seng Tay Tee. Setelah berdoa, bilah-bilah kayu tipis bernomor dikocok. Nomor yang keluar dicocokkan dengan kertas *ciam sie* yang tersedia di laci-laci lemari. Kertas *ciam sie* tersebut kemudian dibawa ke toko obat. Layaknya resep, kertas *ciam sie* diterjemahkan oleh *sinshe* untuk kemudian diracikan obat yang sesuai komposisi dan dosisnya. Pada akhirnya, kesembuhan tidak hanya soal obat racikan, namun juga keyakinan si sakit untuk sembuh.

Apabila apotek menyediakan apoteker maka toko obat menyediakan *sinshe*. Akan tetapi, *sinshe* biasanya mahir men-

jalankan fungsi tak hanya sebagai apoteker, melainkan juga dokter. Pemilik toko obat juga tak jarang merangkap sebagai peracik obat. Penataan toko obat sangat khas, lemari-lemari kayu besar berjajar dengan laci-laci berisi koleksi rempah untuk meracik obat. Ada beberapa rempah yang cukup populer dan sering dimanfaatkan seperti *ma huang* untuk melancarkan napas, *pak sok* untuk menghilangkan sakit di badan, *sa jin* untuk menyembuhkan maag, juga ginseng (*shi yang sen*), kayu manis, dan bermacam lainnya (Adrianne & Dwirahmi, 2013: 36). Obat tradisional sebagai alternatif penyembuhan ini tidak pernah kehilangan penggemarnya, tak hanya Tionghoa, namun juga warga lainnya.

Meski terkesan berbeda, namun kini pengobatan modern ala Barat dengan tradisional ala Tionghoa mulai dipersandingkan. Konon ini dimulai sejak abad ke-18, masa Dinasti Ching. Kala itu Kaisar Kang Xi terkena malaria. Para tabib dengan obat-obatan tradisionalnya tak mampu mengobati. Setelah didatangkan dokter orang Eropa, Kaisar sembuh dengan meminum pil kina. Sejak itu pengobatan Barat diterima dan dikembangkan mendampingi pengobatan tradisional. Pada zaman dr. Sun Yat Sen memimpin Tiongkok, pengobatan tradisional sempat terpinggirkan. Akan tetapi, naiknya Mao Ze Dong mengubah keadaan. Pengobatan tradisional kembali mendapat tempat. Bahkan diajarkan di sekolah kedokteran, khususnya di Tiongkok. Kini apotek modern pun menyanding obat-obatan tradisional Tiongkok yang sudah diproduksi massal oleh pabrik, seperti *Pien Tze Huang*, *Angong Nihuang Wan*, *Yunnan Baiyo*, dan lainnya.

UNDANGAN

Kepada sekalian sanak keluarga, Tuan/Njonja/Sdr. dengan djalan ini sebagai pengganti surat undangan, kami mengundang dengan hormat sudi apalah kiranja datang untuk menghadiri perajaan sederhana jang akan kami adakan berhubung dengan perkawinan anak². kami :

YAP PHIE CHEN

dengan

Mr. KHOE JIN FEN

pada hari Minggu, tgl. 6 Maret 1960, mulai dari djam 11 sampai dengan djam 13 siang, bertempat di Hotel Dharma Nirmala, Djalan Segara 14 Djakarta.

Antaran sangat kami harapkan supaja diberikan dalam bentuk uang sadja, karena maksud kami akan diserahkan seluruhnja, bersama dengan biaja perajaan jang kami hematkan, kepada :

Paleng Merah Indonesia Tjabang Djakarta,
Rumah Sakit Jang Seng Ie, dan
Rumah Sakit Sin Ming Hui.

Hormat kami,
Njonja Djanda KHOE KIM TIN
YAP JAM KIE dan Njonja
YAP FOENG KIE dan Njonja
(Toko Yap Pasar Baru).

Gambar 67. Potongan undangan perkawinan Tionghoa yang mendedikasikan sumbangan pernikahannya untuk dua rumah sakit Tionghoa di Jakarta

Sumber: Harian Pos Indonesia, 28 Februari 1960

Perhatian orang Tionghoa pada dunia kesehatan, khususnya di Indonesia cukup tinggi. Terbukti banyak rumah sakit didirikan atas bantuan orang-orang Tionghoa. Selain RS dr. Oen di Solo dan RS Mata dr. Yap di Yogyakarta yang sudah berulangkali dibicarakan di tulisan-tulisan terdahulu, di Jakarta juga didapati dua rumah sakit yang didirikan masyarakat Tionghoa. *Pertama*, Rumah Sakit Jang Seng Ie yang sekarang menjadi RS Husada didirikan pada tanggal 28 Desember 1924 oleh dr. Kwa Tjoan Sioe dan beberapa rekan sejawatnya. Pada zaman Jepang, dr. Kwa Tjoan Sioe diinternir bersama dengan 500-an tokoh Tionghoa lainnya. *Kedua*, Rumah Sakit Sin Ming Hui atau sekarang RS Sumber Waras yang berdiri pada 26 Januari 1946. Selain di kota-kota ini, di beberapa kota lainnya juga didapati rumah sakit yang

dirintis masyarakat Tionghoa. Rumah Sakit Panti Nirmala Malang misalnya, dahulu dikenal sebagai Tiong Hwa Ie Sia (THIS) yang didirikan tahun 1929.

Jamu Tionghoa

Jamu identik dengan obat tradisional khas Jawa. Relasi harmonis Tionghoa-Jawa di Nusantara ternyata menyeret orang-orang Tionghoa yang sejak dahulu juga akrab dengan pengobatan tradisional untuk berkecimpung dalam usaha jamu. Mulanya pedagang jamu atau *mbok jamu* dengan bakul gendongnya menjajakan jamu keliling dari kampung ke kampung. Kini jamu mulai bertransformasi ke berbagai kemasan seperti puyer, pil, hingga cair yang dikemas apik. Jamu non-gendong ini dikembangkan oleh orang Tionghoa lewat industrialisasi jamu sejak zaman kolonial.

Gambar 68. Iklan serta kemasan lama dan baru Tay Pin San atau Puyer Kupu, obat sakit perut yang masih beken sampai sekarang

Sumber: http://festivalramadhan-bekasi.blogspot.com/ dan https://www.tokopedia.com/

Perusahaan jamu pertama yang didirikan di Indonesia, yakni *Djamoe Industrie en Chemicalen Handel "IBOE" Tjap 2 Njonja*. Perusahaan ini didirikan oleh Tan Swan Nio dan putrinya, Siem Tjiong Nio dari Surabaya tahun 1910. Sekarang jamu ini masih ada di bawah naungan PT Jamu Iboe. Berikutnya tahun 1918 menyusul suami istri Phoa Tjong Kwan (T.K. Suprana) dan Tjia Kiat Nio (Mak Jago) yang berkolaborasi membangun bisnis Djamoe Djago. Usaha ini sekarang diteruskan oleh Jaya Suprana, pemilik Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Awalnya di Wonogiri, kini Jamu Jago pindah ke Semarang sejak 1945. Selain itu, ada juga Lauw Ping Nio yang mendirikan perusahan jamu Nyonya Menir. Suaminya seorang pedagang kaya bernama Ong Bian Wan. Lebih muda lagi, pasangan suami istri Siem Thiam Hie dan Go Djing Nio mendirikan pabrik Jamu Sido Muncul tahun 1951. Kendati produk terkenalnya, *Tolak Angin*, yang kala itu dinamai Jamu Tujuh Angin sudah diproduksi sejak 1941. Setelah itu, pada tahun 1963 juga muncul Air Mancur yang didirikan oleh Lambertus Wonosantoso, Rudy Hindrotanojo, dan Kimun Ongkosandjojo, ketiganya merupakan trio Tionghoa dari Solo.

Para Dokter Tionghoa

Seperti guru dan dosen, menjadi dokter berarti menjalani profesi yang amat mulia. Profesi-profesi itu berkaitan erat dengan soal kemanusiaan. Menjadi guru atau dosen berarti menyelamatkan orang muda agar menjadi manusia utuh yang siap terjun ke masyarakat. Menjadi dokter berarti menyelamatkan manusia dari penderitaan atas penyakit untuk meneruskan pengabdian di dunia. Kedua profesi ini bicara soal kehidupan. Cukup banyak orang-orang Tionghoa yang mendedikasikan dirinya di bidang kesehatan dengan menjadi dokter. Bahkan ada dua orang yang namanya

dihormati menjadi nama rumah sakit, yakni dr. Oen Boen Ing (KRMT Obi Darmohoesodo) pendiri RS Panti Kosala yang kini menjadi RS dr. Oen Solo dan dr. Yap Hong Tjoen pendiri RS Mata dr. Yap Yogyakarta.

Orang Solo pasti tahu dan sangat hormat dengan dr. Oen Boen Ing yang begitu baik dengan semua pasiennya. Mereka yang berobat dan tidak memiliki uang, tidak pernah dimintai bayaran. Sifat ini menular pada dr. Lo Siaw Ging. Dokter berjiwa sosial ini juga menjadi salah satu pendiri RS Kasih Ibu Solo. Dalam menolong pasien yang tidak mampu, dr. Lo tidak mau dibayar malahan ikut membiayai pasiennya itu sampai sembuh. Kisah dermawan para dokter Tionghoa ini juga dapat kita dengar dari dr. Lie Tek Bie (Lie Augustinus Dharmawan). Beliau mendirikan rumah sakit apung pertama di Indonesia yang melayani penduduk pulau-pulau terpencil di seluruh pelosok Tanah Air. Beberapa dokter Tionghoa juga berjasa merawat kesehatan para pemimpin bangsa ini. Misalnya, drg. Oei Hong Kian yang merawat kesehatan gigi Bung Karno, juga dr. Sim Kie Ay yang merawat kesehatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Sudirman.

TIONGHOA DALAM PERFILMAN DAN SENI

Hari Film Nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret. Keputusan mengenai peringatan ini diambil dalam Konvensi Dewan Film Nasional tanggal 11 Oktober 1962. Kala itu para peserta konvensi sepakat bahwa sejarah film nasional Indonesia dimulai dengan syuting perdana film Darah dan Doa atau *Long March of Siliwangi* pada tanggal 30 Maret 1950. Film ini disutradarai oleh Usmar Ismail yang kemudian digelari sebagai Bapak Film Nasional, bersama dengan Djamaludin Malik.

Penetapan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional diterima secara luas oleh masyarakat, meskipun secara resmi baru disahkan tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Film Darah dan Doa diproduksi oleh Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) yang juga didirikan oleh Usmar Ismail. Selain sarat unsur lokal, film ini disebut-sebut sebagai film pertama yang mencerminkan *national personality*. Film *Darah dan Doa* dianggap menjadi pendobrak judul-judul film karena kuatnya semangat ke-Indonesia-an yang sejati.

Konon film *Darah dan Doa* tidak dapat dilepaskan dari inspirasi sang sutradara yang bercita-cita membuat film yang mengungkapkan watak, semangat, dan pengalaman hidup orang Indonesia (Heryanto, 2015). Masih ditambah latar belakang Usmar Ismail yang Indonesia "asli". Maka film-film yang diproduksi sebelum tahun 1950 dianggap tidak Indonesia karena diproduksi oleh keturunan Eropa maupun kalangan Tionghoa. Pemikiran macam ini sebenarnya sangat perlu dikritisi.

Menilik sejarahnya, dunia perfilman di Tanah Air sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1926. Jika sebelumnya film yang pernah ada seluruhnya bernuansa Belanda, maka inilah kali pertama diproduksi film lokal dengan judul Loetoeng Kasaroeng. Film bisu ini dibuat oleh perusahaan milik Belanda, yaitu *N.V. Java Film Company* yang didirikan oleh L. Heuveldrop dari Batavia dan G. Krugers dari Bandung. Ide cerita film ini diambil dari kehidupan kaum bumiputra (pribumi) yakni dongeng masyarakat Sunda. Para pemainnya juga didominasi oleh orang-orang bumiputra, bahkan proses produksinya mendapat dukungan dari Bupati Bandung, Wiranatakusumah V (Biran, 2009).

Film Loetoeng Kasaroeng diproduksi oleh orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda. Meskipun mengandung unsur lokal dan melibatkan bumiputra, namun Belanda notabene saat itu merupakan kaum penjajah. Dari sudut pandang Indonesiasentris, tetap sulit diterima bila sejarah perfilman nasional dimulai dari titik ini. Bagaimanapun bangkitnya semangat nasionalisme salah satu faktornya karena perasaan senasib sebagai bangsa yang dijajah.

Peran Tionghoa

Dari kalangan Tionghoa, film pertama yang diproduksi berjudul *Lily van Java*. Awalnya, film ini digagas oleh

perusahaan film pertama milik Tionghoa, yakni *The South Sea Film Co.* pimpinan Liem Goan Lian. Produksi film ini sempat macet, kemudian dilanjutkan oleh Tio Tek Djin yang membawa bendera perusahaan *Miss Riboet Film Syndicaat*. Sayangnya, Tio Tek Djin pun urung merampungkan film ini. Akhirnya, David Wong yang mendirikan perusahaan *Hallimoen Film* berhasil merilis *Lily van Java* pada tahun 1928 (Biran, 2009).

Film *Lily van Java* disebut sebagai film Tionghoa pertama buatan Jawa. Menyusul *Lily van Java* bermunculan film-film lain yang juga diproduksi oleh berbagai perusahan perfilman milik Tionghoa. Salah satunya, *Tan's Film* milik Tan Koen Yauw yang memproduksi film Njai Dasima dan Terpaksa Menikah. Tan Koen Yauw seorang Tionghoa yang dalam kesehariannya sangatlah akrab dan melebur dengan masyarakat lainnya. Karenanya, Tan Koen Yauw banyak menggunakan cerita-cerita dari pertunjukkan Tonil Melayu dalam film-filmnya.

Pada masa pendudukan Jepang, industri perfilman banyak dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda Jepang. Memasuki masa kemerdekaan, industri perfilman lokal mulai menggeliat kembali. Film pertama pasca kemerdekaan diluncurkan tahun 1948 dengan judul Djaoeh di Mata. Pada tahun-tahun ini produksi film terutama banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik Tionghoa dengan modal kuat. The Teng Chun, Tan Koen Hian, David Wong menjadi produser-produser Tionghoa kawakan saat itu.

Peran dan sumbangsih Tionghoa dalam perkembangan dunia perfilman Tanah Air tak dapat diabaikan. Selain itu, Tionghoa juga tercatat banyak berperan dalam bidang media cetak, bahasa, dan kesusastraan. Berbicara soal kebangsaan Indonesia, keberadaan Tionghoa tidak terpisahkan. Mereka menjadi bagian dari bangsa ini sejak zaman Nusantara, jauh

sebelum penjajahan bangsa Barat tiba. Itu artinya, peran dan karya Tionghoa dalam perfilman Indonesia juga harus diakui, termasuk sebelum tahun 1950 yang dianggap sebagai momentum pertama perfilman nasional. Inilah wujud dalam berbangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Tan Tjeng Bok

Karier Tan Tjeng Bok (1898-1985) sebagai penyanyi keroncong dan pemain sandiwara mencapai puncaknya antara tahun 1920-1930. Ia menjadi bintang dalam sandiwara keliling Dardanella. Sampai usia 80-an, Pak Item, demikian julukannya masih bermain di berbagai film termasuk di antaranya dengan Rano Karno. Seperti panggung sandiwara, kehidupan Tan Tjeng Bok naik turun. Ia kaya raya dan dipuja banyak perempuan, namun merana di masa senjanya. Ada dua hal istimewa dari Tan Tjeng Bok. *Pertama*, layak bila Tan Tjeng Bok disebut seniman tiga zaman. *Kedua*, tokoh ini tak pernah mengganti nama aslinya. Maka kendati Orde Baru melarang unsur-unsur budaya Tionghoa, namun nama Tan Tjeng Bok tetap terpampang di poster-poster film nasional maupun sampul kaset rekaman (Hutari & Otara, 2019).

Film pertamanya berjudul Serigala Item (1941) di bawah payung Action Film, grup dari Java Industrial Film (JIF) pimpinan The Teng Chun. Pada zaman kemerdekaan, film pertama yang dibintanginya, yaitu Djula Djuli Bintang Tiga (1954) produksi Ardjuna Film. Sebagai buaya keroncong, Tan Tjeng Bok mengeluarkan album pertamanya bertajuk Kroncong Asli Tahun 1919 (1973) di bawah label Dian Record. Pada tahun 1974 Tan Tjeng Bok mengeluarkan album kaset lawak pertamanya bertajuk *Lawak*: *Tan Tjeng Bok* sampai beberapa volume. Di antaranya bersama Fifi Young, Netty Herawati, Darul Salam, dan lainnya. Pada tahun 2003, bersama dengan Fifi Young, Tan Tjeng Bok mendapatkan

Bintang Parama Dharma (sebuah tanda kehormatan tertinggi dalam bidang kebudayaan) yang diberikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sezaman, apabila Tan Tjeng Bok menjadi aktor yang berjaya maka Fifi Young (1914-1975) menjadi aktrisnya. Fifi Young (Terlahir: Tan Kiem Nio) merupakan istri dari Njoo Cheong Seng (1902-1962), seorang penulis naskah sekaligus tokoh besar dalam dunia pertunjukan sandiwara kala itu. Pada tahun 1930-an ada dua kelompok sandiwara keliling yang kondang, yakni Miss Riboet Orion (nantinya menjadi *Miss Riboet Film Syndicaat*) pimpinan Tio Tek Djien dan Dardanella pimpinan A. Piedro. Awalnya, Njoo Cheong Seng merupakan pengarang cerita di Orion, sementara di Dardanella, pengarang andalannya adalah Andjar Asmara. Njoo Cheong Seng dan Fifi Young sempat bergabung dengan Dardanella, serta pernah mendirikan kelompok serupa bernama Fifi Young's Pagoda. Pertunjukan panggung surut memasuki tahun 1940-an dan industri film mulai menggeliat. Njoo Cheong Seng dan Fifi Young kemudian terjun ke dunia perfilman. Njoo Cheong Seng bekerja di belakang layar (sering sebagai sutradara), sementara Fifi Young tampil menjadi aktris terkenal.

Fifi Young merupakan nama panggung yang diambil dari bintang Prancis, Fifi d'Orsay. Sementara nama keluarga suaminya, Njoo, dalam dialek Mandarin diucapkan Yang/ Young. Kesuksesan Fifi Young dalam bermain peran tidak lepas dari bimbingan suaminya. Debut pertamanya di perfilman dengan menjadi pemain utama dalam film Kris Mataram (1940) yang juga disutradarai oleh Njoo Cheong Seng. Film berikutnya juga dibuat bersama sang suami berjudul Zoebaida (1940). Dalam film-film berikutnya, Fifi Young lebih sering berperan sebagai seorang ibu. Filmnya terakhir berjudul *Ranjang Pengantin* (1975) dengan sutradara

Teguh Karya yang juga tokoh perfilman dari kalangan Tionghoa.

Teguh Karya (1937-2001) bernama asli Steve Liem Tjoan Hok yang pernah mendapat penghargaan enam kali sebagai sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI). Dalam dunia lawak, juga dikenal pelawak legendaris, Kuntjung alias Kwik Tjen Pang. Pada masa setelahnya juga dikenal Ateng yang terlahir dengan nama Kho Tjeng Lie, Andreas Leo Ateng Suripto terkenal lewat grup Kwartet Jaya bersama Eddy Sud, Iskak, dan Bing Slamet. Dalam dunia tarik suara juga dikenal penyanyi legendaris Chrisye yang keturunan Tionghoa-Betawi. Chrisye yang bernama asli Christian Rahadi pernah mengisahkan betapa takutnya dia untuk mengaku keturunan Tionghoa akibat pengalaman rasis yang pernah diterimanya waktu kecil. Selain mereka, tentu masih ada nama lainnya, apalagi sekarang ini semakin banyak bermunculan aktor dan aktris muda berbakat dari kalangan Tionghoa atau campuran Tionghoa-Barat. Wajah-wajah oriental memang lumayan menjual dalam dunia perfilman. Situasi juga telah berbeda maka tak seperti para pendahulunya, artis-artis muda ini malahan bangga menyandang nama berbau Tionghoa.

Gambar 69. Foto langka: Fifi Young (Tan Kim Nio), Liem Tjoan Hok (Teguh Karya), dan Tan Tjeng Bok (Pak Item) dalam satu kesempatan sekaligus

Sumber: https://twitter.com/azmiabubakar12

Seni Lukis

Ada banyak tokoh Tionghoa yang berkiprah di dunia seni. Sebagaimana dipaparkan dalam tulisan ini ada sekian banyak deretan nama Tionghoa yang pegang peran penting bagi kemajuan seni pertunjukan dan film. Demikian pula dalam seni sastra hingga menghasilkan pers melayu Tionghoa. Dalam buku Melipat Air: Jurus Budaya Pendekar Tionghoa (Dermawan T, 2016) tersebutlah tiga tokoh budaya dan seni dari kalangan Tionghoa. Mereka adalah Lee Man Fong, Siauw Tik Kwie, dan Lim Wasim. Mereka ini berkiprah dalam lingkungan seni rupa namun jangkauan pikiran dan karyanya melewati batas profesinya dalam upaya perjuangan bangsa untuk mewujudkan Indonesia sejati.

Lee Man Fong dikenal sebagai pelukis juga pendiri Yin Hua yang mengindonesiakan para seniman Tionghoa seraya menghiasi langit Indonesia dengan aroma kebudayaan Tionghoa. Baginya Tionghoa adalah salah satu suku yang resmi dan sah di Indonesia. Siauw Tik Kwie seorang pelukis yang juga populer sebagai komikus. Karya komiknya yang sanggup menghipnotis lintas kalangan, yakni Sie Djin Koei, cerita kuno dari Tiongkok. Lewat ketekunannya, Siauw Tik Kwie juga menerjemahkan kitab filsafat dan psikologi Jawa dari Ki Ageng Suryomentaram. Lim Wasim seorang pelukis yang memilih jalan hidup berbeda dengan menjadi pelukis istana. Tugasnya merawat koleksi seni di lima istana kepresidenan pada zaman Presiden Soekarno. Selain Lim Wasim, Lee Man Fong juga pelukis istana.

BULU TANGKIS GUDANGNYA TIONGHOA

"Rudy adalah seseorang yang berkepribadian rendah hati, sederhana, dan tahu diri. Rudy sesungguhnya dan sekaligus adalah seorang putra Indonesia terbaik yang kita miliki!"
(Ali Sadikin)

Untaian kata yang terlontar dari bibir Gubernur DKI Jakarta pada era Orde Baru ini cukup menghentak. Bagaimana tidak di kala rezim penguasa saat itu menerapkan praktik diskriminatif bagi kalangan Tionghoa, malahan ada tokoh pemerintah yang memuji Rudy Hartono, seorang Tionghoa. Dia adalah sosok legendaris di jagat bulu tangkis Indonesia pada kisaran tahun 1960-1980-an. Kejuaraan demi kejuaraan dimenangkannya dengan *smash* mematikan dan penampilan memukau. Rudy Hartono menjai maestro ulung dengan mengalahkan Liem Swie King, legenda bulu tangkis keturunan Tionghoa juga pada final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis II di Jakarta tahun 1980 (Nugroho & *et.al*., 2009: 161).

Rudy Hartono yang memiliki nama asli Nio Hap Liang ini memang menunjukkan prestasi yang gemilang. Dia

dijuluki *Wonder Boy* karena nyaris tak terkalahkan dengan memenangkan juara *All England* delapan kali, tujuh kali berturut-turut (1968-1974) dan yang ke-8 pada tahun 1976. *Guinness World Records* mencatat namanya sebagai pemegang rekor pertandingan bulu tangkis, khususnya *All England* sebanyak tujuh kali berturut-turut dan belum terpatahkan sampai sekarang. Berkat nama besarnya, *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjuk Rudy sebagai duta PBB untuk Indonesia. UNDP adalah organisasi PBB yang bertugas melawan kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan mendukung peran perempuan.

Gambar 70. Rudy Hartono saat menjuarai *All England*

Sumber: https://www.bola.com

Rudy Hartono adalah kampiun, pahlawan, dan legenda olahraga yang terus melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia. Tak hanya Rudy, masih banyak nama keturunan Tionghoa lainnya di dunia bulu tangkis Indonesia. Sebutlah Tan Joe Hok, Liem Swie King, Ang Tjin Bik, Hariyanto Arbi, Alan Budikusuma, Susi Susanti, dan beberapa lainnya. Nama-nama ini begitu terkenal dan bukan kaleng-kaleng. Mereka

sudah membawa Merah Putih dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional lewat berbagai laga pertandingan bulu tangkis. Prestasi ini dirintis tahun 1960-an oleh Tan Joe Hok, Ferry Sonnevillle, Eddy Jusuf, Tan King Gwan, Njoo Kiem Bie, Lie Poo Djian, dan Olich Solihin. Sederet nama Tionghoa muncul dalam tim hebat ini bersama dengan mereka yang campuran (*blesteran*) dan Sunda, namun semuanya sepakat satu nama, yakni Indonesia.

Tan Joe Hok berhasil menjadi juara *All England* untuk pertama kalinya dari Indonesia pada tahun 1958. Tan Joe Hok pula yang membuat bendera Merah Putih berkibar saat perhelatan *Asian Games* 1962 di Jakarta. Selanjutnya, muncul Liem Swie King dan Rudy Hartono. Sementara untuk kejuaraan ganda putra pada dekade itu tercatat nama Christian Hadinata/Ade Chandra dan Tjun Tjun/Johan Wahjudi. Dua ganda putra ini secara total merebut delapan gelar juara *All England* pada kurun tahun 1972-1980. Memasuki era 1980-an dan 1990-an juga tidak lepas dari torehan prestasi para pebulu tangkis Tionghoa. Ada Hastomo Arbi, Hariyanto Arbi, Eddy Hartono, Lius Pongoh, Hariamanto Kartono, Ivana Lie, dan lainnya.

Gambar 71. Alan Budikusuma dan Susi Susanti

Sumber: https://www.layar.id/

Dalam Olimpiade Barcelona 1992, untuk pertama kalinya sepasang emas bagi Indonesia di ajang bulu tangkis dipersembahkan oleh Alan Budikusuma dan Susi Susanti. Pada Olimpiade tahun 2000, giliran Candra Wijaya/Tony Gunawan mempersembahkan emas di ganda putra. Selanjutnya, dalam Olimpiade 2008 pasangan ganda putra dari keturunan Tionghoa kembali memberikan emas bagi Indonesia, yakni Hendra Setiawan/Markis Kido. Pada tahun 1990-an hingga 2000-an menjadi masa keemasan di ajang beregu. Indonesia sukses memenangi Piala Thomas sebanyak lima kali dan Piala Uber dua kali. Beberapa pemain andalan kala itu tercatat nama Mia Audina, Hendrawan, dan lainnya.

Sekarang ini kendati tidak segempita dekade-dekade sebelumnya, pebulu tangkis keturunan Tionghoa tetap menjadi jajaran terdepan untuk mempertahankan reputasi Indonesia di berbagai ajang bergengsi dunia. Seperti Liliyana Natsir yang berpasangan dengan Tontowi Ahmad, Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan. Inilah bukti bahwa orang-orang Tionghoa sampai generasi mudanya sekarang pun terus berkontribusi mengibarkan Merah Putih dalam dunia perbulutangkisan. Setiap orang mengelu-elukan saat para atlet ini berjuang bersimbah keringat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Akan tetapi, ironis ketika mereka membutuhkan pengakuan sebagai warga negara Indonesia acap kali dicap non-pribumi dan mengalami diskriminasi. Padahal kurang nasionalis apa lagi?

Cabang Olahraga Lain

Bulu tangkis memang menjadi gudangnya atlet Tionghoa. Akan tetapi, bukan berarti tidak ditemukan di cabang olahraga lain. Ada banyak pesepak bola terkenal dari kalangan Tionghoa pada kisaran tahun 1912, antara lain: Lie

Teng Goan, Matjhon Ho, Tjan A Tian, Soei Hok, Djoen Hin, Nio A Bun, Tjoa Po Seng, Liauw Tek Fung, Lauw Ban Lip, Liauw Kie Fung, Liauw Soci Seng, Liem Djun Ho, dan Liem Djoe Soey. Pada tahun 1956 dalam Olimpiade di Australia, tercatat beberapa atlet sepak bola Tionghoa, antara lain Tan Liong Houw, Kwee Kiat Sek, Thio Him Tjiang, dan Beng Ing Hien. Sayang pada masa-masa berikutnya hampir tidak ditemukan lagi kalangan Tionghoa yang menjadi atlet sepak bola.

Pada cabang tenis lapangan ada nama Angelique Widjaja, Benny Wijaya, Elbert Sie, Suwandi, dan Wynne Prakusa. Renang tercatat nama Felicia Tjandra, Catherine Surya, Sutanto bersaudara, dan Richard Sambera. Atlet tinju, antara lain Chris John, Daud Jordan, Hengky Gun, Setijadi Laksono, Kawanto, dan Wongso Suseno. Atlet angkat besi ada Imron Rosadi dan Liem Siauw Bok. Atlet tenis meja tercatat nama Diana Wuisan. Atlet catur ada nama Edhi Handoko. Atlet taekwondo, Lamting; dan atlet judo, Joe Taslim. Pada bidang balap, ada pembalap terkenal Rio Haryanto. Atlet wushu tercatat Susyana Tjhan dan Lindswell Kwok. Hal yang menarik dalam *Asian Games* 2018 tercatat Michael Bambang Hartono (Oei Hwie Siang), bos PT Djarum sekaligus pemegang saham Bank Central Asia (BCA) yang menjadi atlet cabang *bridge* dan berhasil meraih medali perunggu.

CATATAN AKHIR

Ni sen cai celi, ni cang ta cai celi. Celi se ni de kuo cia.

"Kamu lahir di sini, kamu dibesarkan di sini. Di sinilah Tanah Air, tumpah darahmu". Semangat inilah yang harus dipegang tak hanya oleh kalangan Tionghoa, namun juga setiap rakyat Indonesia. Bagi orang-orang Tionghoa kecintaan terhadap Indonesia tak lagi bisa ditawar. Dari lahir, dibesarkan, dewasa, hingga mati pun Indonesia adalah bangsa dan tumpah darah yang turut diperjuangkan oleh para leluhur Tionghoa. Sementara itu, bagi setiap rakyat Indonesia, dari berbagai suku dan daerah, kehadiran Tionghoa harus diterima sebagai bagian dari bangsa yang sejak dahulu memang beranekaragam ini. Masyarakat Tionghoa dengan budayanya bukanlah orang asing. Bahkan sebagian dari budayanya telah larut dan dihidupi bersama dalam keseharian. Oleh karena itu, semangat ini adalah keharmonisan kita sebagai bangsa Indonesia!

Harus disadari bahwa pengakuan terhadap identitas kultural merupakan hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat termasuk Tionghoa. Orang Tionghoa tidak dapat sepenuhnya menanggalkan nilai-nilai budaya

negeri asalnya yang telah mendarah daging. Di sisi lain, orang Tionghoa memiliki keyakinan untuk wajib *melu handarbeni lan hangrungkebi* terhadap negara tempat mereka dilahirkan, mencari penghidupan, dan menjalani hidup hingga ajal menjemput. Salah besar apabila ada yang mengatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia tidak memiliki rasa nasionalisme dan tidak memiliki sumbangsih bagi negara ini. Sejarah telah mencatat sekian banyak tokoh Tionghoa Indonesia yang turut berperan pada masa pergerakan nasional, mempersiapkan Proklamasi, ikut serta dalam pemerintahan hingga berjasa mengharumkan nama bangsa melalui bidang-bidang yang ditekuninya. Sayangnya, tidak banyak yang paham hal ini. Penguasa politik juga seolah sengaja mengaburkan, sementara pembelajaran sejarah di sekolah juga tidak pernah mengungkapnya.

Gairah perjuangan orang-orang Tionghoa untuk mewujudkan manusia Indonesia yang lebih bermartabat, setara, adil, dan sejahtera dengan bebas dari penjajahan jarang disampaikan dalam upaya pendidikan sejarah. Penulisan sejarah bisa bersifat subjektif yang menyebabkan penyampaian sejarah pun hanya dari satu persepsi atas dasar kepentingan. Akan tetapi, fakta sejarah sesungguhnya tidak pernah berbohong. Lembaran demi lembaran sejarah akan terus terungkap, termasuk soal kontribusi dan sumbangsih masyarakat Tionghoa bagi bangsa dan negara ini. Siapa berani menutup mata dan telinga untuk selama-lamanya tentang hal ini?

Seperti upaya penulisan buku ini, tak mesti angkat senjata, tapi sejarah mencatat banyak orang Tionghoa yang angkat pena. Lewat sastra dan budaya, orang-orang Tionghoa turut berjuang. Bercermin dari kenyataan ini, generasi muda Tionghoa haruslah berbangga dengan leluhur dan budayanya sembari terus mencintai Indonesia yang

telah diperjuangkan oleh para kongco dan makco. Berbicara tentang leluhur, orang-orang Tionghoa sangat erat dengan marga (*she*) keluarganya. Semisal keluarga marga Kwee dan Njoo memiliki sosok hebat yang berjuang lewat sastra dan budaya. Tersebutlah Kwee Thiam Tjing (9 Februari 1900-28 Mei 1974) yang memiliki nama pena Tjamboek Berdoeri dan Njoo Cheong Seng (6 November 1902-30 November 1962) dengan nama pena Monsieur D'Amour.

Buku *Gagaklodra Makassar: Detektif Nasionalisme Njoo Cheong Seng* dengan apik menggambarkan jejak langkah Kwee Thiam Tjing dan Njoo Cheong Seng dalam sastra dan budaya. Karya Kwee Thiam Tjing (Tjamboek Berdoeri) yang fenomenal berjudul *Indonesia Dalem Api dan Bara* (1947) menggambarkan masa-masa kelam di Indonesia dalam kurun tahun 1939-1947. Sementara Njoo Cheong Seng (Monsieur D'Amour) menghasilkan karya monumental berupa serial *Gagaklodra* (penulisan dimulai sejak 1930). Isinya menceritakan pengembaraan Gagaklodra yang di setiap wilayah yang didatanginya berjumpa dengan tindakan kejahatan sebagai akibat kegelapan moral penguasa. Kedua penulis hebat ini sama-sama memiliki pemikiran untuk menghilangkan diskriminasi terhadap Tionghoa. Tidak sekadar melontarkan kritik pada masyarakat di luar kalangan Tionghoa, keduanya juga mengkritik masyarakat Tionghoa yang terbagi-bagi. Mereka menawarkan bayangan akan masyarakat majemuk tanpa diskriminasi, yang tidak dibedakan atas dasar suku, agama, dan kelas sosial (Tarupay, 2018).

Pada era berikutnya, sejarah juga mencatat sastrawan muda Tionghoa yang juga sejarawan bernama Soe Hok Gie (1942-1969). Tokoh yang terkenal dengan jargon Muda: Buku, Pesta, dan Cinta ini menjadi sosok pendobrak pada masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Kritik sosialnya dilancarkan lewat berbagai tulisan, seperti

dalam buku hariannya yang lantas dibukukan sebagai Catatan Seorang Demonstran (1983). Tulisannya di berbagai media massa juga dibukukan dengan judul *Zaman Peralihan* (1995). Soe Hok Gie kecewa dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak heran dia sangat menaruh harapan pada pemerintahan baru di bawah Soeharto. Akan tetapi, ternyata dia harus kecewa dua kali, menurutnya pemerintahan baru tak ada bedanya, bahkan semakin parah. Mewarisi semangat Soe Hok Gie, pada masa Reformasi ketika Soeharto tumbang, tak lepas peran mahasiswa Tionghoa. Hendriawan Sie dari Universitas Tri Sakti ikut tewas bersama tiga temannya, Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, dan Hery Hartanto yang kemudian digelari Pahlawan Reformasi.

Memotret Generasi Tionghoa Milenial

Penjelajahan masa demi masa dalam buku ini membeberkan rekaman gairah perjuangan orang-orang Tionghoa untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan tak pernah padam. Lantas, bagaimana dengan generasi muda Tionghoa saat ini? Masihkah merasa sebagai Tionghoa Indonesia? Apabila kita cermati dewasa ini pascareformasi, kebebasan budaya Tionghoa mengalami euforia. Akan tetapi, upaya genosida budaya Tionghoa selama tiga dekade telah memotong mata rantai generasi. Sekarang ini banyak kaum muda Tionghoa yang kehilangan identitas budayanya. Secara fisik masih tampak ciri ketionghoaan, namun tidak lagi kenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Dalam kehampaan budaya itulah, kaum muda Tionghoa lebur dengan budaya setempat atau malahan mengambil budaya baru (Barat, Korea, dan lainnya) sebagai identitas dirinya.

Pada hari raya tertentu saat para orang tua mengajak generasi mudanya melestarikan budaya dan tradisinya maka yang terjadi dapat dipastikan hanya pada permukaannya

saja. Kebudayaan pada dasarnya memiliki tiga aspek, yaitu: ekspresi, substansi, dan nilai. Sayangnya, orang sering kali terjebak pada ekspresi (permukaan) yang hanya kulit luar saja. Misalnya, simbol kemeriahan Imlek dengan luar biasa bebasnya mendapatkan tempat, memakai baju baru, melakukan gerakan tangan saat *paicia*, sembahyang leluhur, menonton wayang potehi, dan sebagainya. Itu semua dilakukan tanpa disadari substansinya apa, mengapa harus demikian, bagaimana asal mulanya, tujuannya apa, dan lainnya. Apalagi menginternalisasikan nilai budaya tersebut dalam diri masing-masing, seperti menghormati orang tua dan leluhur, menyayangi alam, menghargai rezeki (makanan), dan sebagainya.

Saat Imlek tiba misalnya, kalangan generasi lama yang dianugerahi umur panjang masih sangat kental dalam memaknai tradisi sebelum, saat, bahkan sampai beberapa hari sesudah Imlek. Sementara generasi mudanya saat ini sudah jarang yang mempersiapkan diri untuk menyambut Imlek. Prinsipnya hanya ikut senang merayakan, dapat angpao, makan, berkumpul bersama, dan lainnya. Kebiasaan untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi, melakukan *paicia* sebagai tanda hormat bakti kepada keluarga yang lebih tua, menghindari ucapan-ucapan yang buruk, hingga sikap peduli lingkungan dan berbagi pada sesama sebagai wujud syukur dan rasa persaudaraan juga sering kali tidak diutamakan.

Pewarisan tradisi menjadi sangat penting agar jangan sampai perayaan-perayaan Tionghoa hanya fokus pada kemeriahan dan simbolisasi, namun miskin makna. Menjadi ironis di saat euforia kebebasan ini tiba, nilai-nilai tradisi Tionghoa menjadi pudar karena kehilangan jejak para pewarisnya, yakni generasi mudanya. Hampir tidak ada generasi muda Tionghoa yang menyenangi wayang potehi

apalagi berkeinginan menjadi dalang atau pemain musiknya. Atas dasar pertimbangan agama modern yang dianut maka adat sembahyang leluhur sudah ditinggalkan, bahkan memegang dupa saja tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Makanan-makanan khas saat perayaan tertentu tidak pernah tahu apalagi menikmatinya. Sementara itu, justru banyak kalangan di luar Tionghoa yang malahan tertarik untuk mengenal budaya Tionghoa. Para pemain barongsai dan liong misalnya, didominasi oleh mereka yang bukan Tionghoa.

Pemberian nama untuk anak-anak Tionghoa sekarang pun cenderung berbau kebarat-baratan daripada menggunakan nama yang khas Tionghoa, setidaknya tetap mencantumkan marga (*she*). Padahal nama menjadi penanda kesadaran yang paling awal bagi menghidupkan dan menghidupi kembali budaya Tionghoa. Kini setiap Imlek hadir perayaan-perayaan festival budaya Tionghoa di hampir setiap kota besar. Ini merupakan wujud upaya mengenali dan mencintai kembali budaya Tionghoa. Di Yogyakarta dengan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Ketandan, Solo dengan Grebeg Sudiro, dan lainnya tentu diharapkan ini menjadi pemantik lebih lanjut dalam pelestarian budaya dan bukan sekadar euforia di permukaan saja.

Salah satu cara yang cukup ampuh dan sedang menjadi tren beberapa waktu terakhir untuk menggiring kembali generasi muda mencintai budaya Tionghoa, yakni lewat pemilihan Koko-Cici, Ako-Amoy, dan sejenisnya. Kendati tentunya kegiatan seperti ini tidak bisa merangkul banyak orang. Anak-anak muda sangat menyukai hal-hal seperti ini maka kesempatan terbuka untuk mengenalkan kembali budaya Tionghoa. Apalagi saat ini untuk berkecimpung dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti: politik, ekonomi, dan sosial menjadi peluang yang tidak disia-siakan.

Lantas, bagaimana dengan soal budaya? Budaya Tionghoa tentu saja harus dihidupi oleh generasi muda Tionghoa Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya. Upaya ini juga harus didasari oleh semangat untuk menghadirkan sejarah dan budaya Tionghoa sebagai bagian dari keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianne, A. A., & Dwirahmi, A. (2013). *Pecinan Semarang: Sepenggal Kisah, Sebuah Perjalanan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Agustina, S. *et.al*. (2016). *Tionghoa Membangun Peradaban Lampung*. Lampung: Lampung Post.

Al Qurtuby, S. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI*. Yogyakarta/Jakarta: Inspeal Ahimsakarya Press dan Perhimpunan INTI.

Anwari. (1999). *Indonesia Tertawa: Srimulat sebagai Sebuah Subkultur*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Biran, M. Y. (2009). *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Carey, P. (1985). *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*. Jakarta: Pustaka Azet.

Carey, P. (2014). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*. Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas.

Castles, L. (2017). *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Masup Jakarta.

Chaer, A. (2015). *Betawi Tempo Doeloe: Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi*. Depok: Masup Jakarta.

Chang, Y. H. (2012). *Identitas Tionghoa Pasca-Suharto: Budaya, Politik, dan Media*. Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES.

Coppel, C. A. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Daradjadi. (2013). *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

De Graaf, H.J dan Pigeud, T. (1974). *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

De Graaf, H.J dan Pigeud, T. (1997). *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). *Buku Petunjuk Museum Wayang*. Jakarta: Depdikbud.

Dermawan T, A. (2016). *Melipat Air: Jurus Budaya Pendekar Tionghoa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Effendi (Tjoa Jiu Tie), W., & Prasetyadji. (2008). *Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI*. Jakarta: Visi Media.

Gunarti, W. (2010). *Putri Ong Tien: Kisah Perjalanan Putri China Menjadi Istri Ulama Besar Tanah Jawa*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan, H. (2013). *Yok Tjae & Chung Hwa: Menelusuri Jejak-jejak Komunitas Tionghoa di Manado*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hamdani, N. (2012). *Komunitas Cina di Medan: Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*. Jakarta: LIPI Press.

Handinoto. (2015). *Lasem: Kota Tua Bernuansa Cina di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Harthawan, I. D. N. P. (2011). *Uang Kepeng Cina dalam Ritual Masyarakat Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Heuken, A. (1997). *Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.

Hoetink, B. (2007). *Ni Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawie dalem Tahon 1740*. Jakarta: Masup Jakarta.

Hutari, F., & Otara, D. (2019). *Tan Tjeng Bok: Seniman Tiga Zaman 1898-1985*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Intisari, & Indonesia, K. L. B. (2009). *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*. (A. H. Kustara, Ed.). Jakarta: PT Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya Indonesia.

Joe Lan, N. (2013). *Peradaban Tionghoa: Selayang Pandang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jusuf, I. (2012). *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Pahoa 2008*. Jakarta: Sekolah Terpadu Pahoa.

Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.

Kinasih, A. W. (2005). *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

Kleden, I. (1986). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.

Kong, Y. (1999). *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Kong, Y. (2013). *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kuardhani, H. (2012). *Mengenal Wayang Potehi di Jawa*. Yogyakarta: Yensen Project Network.

Kusno, A. (2007). *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Liem, T. J. (2004). *Riwayat Semarang* (Kedua). Jakarta: Hasta Wahana.

Liem, T. L. (2013). *Oei Tiong Ham: Raja Gula dari Semarang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Lim, S. M. (2009). *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lohanda, M. (2001). *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Lohanda, M. (2004). Batavia di Bawah Penguasaan Kolonial. In *Seminar Periodisasi Sejarah Masyarakat Betawi*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta.

Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Makmur, R. (2018). *Orang Padang Tionghoa: Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Mastuti, D. W. R. (2014). *Wayang Potehi di Gudo: Seni Pertunjukan Peranakan Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Harapan Persada dan PT Aksara Warta Mandarin (Indonesia Shangbao).

Moertono, S. (2017). *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Muljana, S. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.

Mulyana, A., & Darmiasti. (2009). *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nasikun. (2015). *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Nugroho, A. S., & et.al. (2009). *10 Tokoh Tionghoa Paling Populer di Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.

Onghokham. (2008). *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Parlindungan, M. O. (2007). *Tuanku Rao*. Yogyakarta: LKiS.

Poerwanto, H. (2014). *Cina Khek di Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.

Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Rahman, F. (2016a). *Jejak Rasa Nusantara: Sejarah Makanan Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, F. (2016b). *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahmayani, A. (2014). *Pemukiman Tionghoa di Singkawang: Dari Masa Kongsi hingga Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Ravando. (2017). *dr. Oen: Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Rustopo. (2008). *Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*. Yogyakarta/Jakarta: Penerbit Ombak dan Yayasan Nabil.

Salmon, C. (2010). *Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Santosa, I. (2012). *Peranakan Tionghoa di Nusantara: Catatan Perjalanan dari Barat ke Timur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Setiawan, E. (2018). *Tionghoa Medan: Komunitas Paling Kontroversial di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Pintar Indonesia.

Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia.

Sindhunata, G. P. (2017). *Komik Strip Kho Wan Gie: Put On Reborn*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta.

Sonobudoyo, M. (2015). *Kajian Wacinwa: Silang Budaya Cina Jawa*. Yogyakarta: Museum Sonobudoyo.

Sulardi. (2015). *Pao An Tui 1947-1949: Tentara Cina Jakarta*. Depok: Masup Jakarta.

Suryadinata, L. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

Suryadinata, L. (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suryadinata, L. (Ed.). (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Suwarno, P. J. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tan, T. Sen. (2010). *Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Tanggok, I. (2016). *Agama dan Kebudayaan Orang Hakka di Singkawang: Memuja Lelhur dan Menanti Datangnya Rezeki*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Tarupay, H. K. (2018). *Gagaklodra Makassar: Detektif Nasionalisme Njoo Cheong Seng*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Theo, R., & Lie, F. (2014). *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Toer, P. A. (1998). *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.

Usman, A. R. (2009). *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Vermeulen, J. T. (2010). *Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Wahid, A. (2009). *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Wardani, N. E., & Widiyastuti, E. (2013). *Jenis-jenis Teater Wayang di Surakarta*. Surakarta: UNS Press.

Werdoyo, T. S. (1990). *Tan Jin Sing: Dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wibisana, W. (2016). *Cinbeng: Eksistensi Peranakan Tionghoa Tangerang*. Jakarta: Pustaka Klasik.

Wijayakusuma, H. (2005). *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Putaka Populer Obor.

Winarni, R. (2009). *Cina Pesisir: Jaringan Bisnis Orang-orang Cina di Pesisir Utara Hawa Timur Sekitar Abad XVIII*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Wirawan, Y. (2013). *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 hingga ke-20*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan EFEO KITLV.

Xi, C. (2014). *Pelepasan Kebijakan Dwikewarganegaraaan oleh Tiongkok (1955): Studi Hubungan Urusan Perantauan dan Diplomasi*. Jakarta: Yayasan Nabil.

GLOSARIUM

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Deutro Melayu atau Melayu Muda adalah Ras Melayu yang datang sebagai gelombang kedua ke wilayah Nusantara sekitar tahun 400 SM. Mereka dianggap memiliki kebudayaan yang relatif lebih maju dari Proto Melayu. Keturunan Deutro Melayu saat ini, antara lain suku Jawa, melayu, Bugis, Bali dan Makassar.

Hanafi adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern.

Hiolo adalah tempat menancapkan hioswa yang oleh masyarakat Tionghoa menjadi salah satu pelengkap dalam ritual ibadah (persembahyangan).

Hioswa adalah adalah dupa yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa sebagai pelengkap dalam ritual ibadah. Sesuai dengan arti namanya, *hioswa* mengeluarkan wangi (keharuman) yang khas ketika dibakar.

Historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis dan secara luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu.

Inferior adalah bermutu rendah atau merasa rendah diri.

Interkultural adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini).

Kelenteng adalah istilah yang bersifat generik untuk tempat ibadah yang bernuansa arsitektur Tionghoa (biasanya untuk Tri Dharma, Tao, Konghucu, Buddha) dan sebutan ini hanya dikenal di Pulau Jawa,

Keplek Ilat adalah membanting lidah atau makan. Keplek ilat itu mengarah ke aktivitas berburu kuliner yang enak atau wisata kuliner.

Kongsi adalah istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Hokkian yang mempunyai dua makna dalam bahasa Indonesia, yakni kerja sama atau menjalin hubungan antara dua atau lebih orang dan berbagi atau memberikan sesuatu kepada orang lain.

Lingua Franca adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.

Proto Melayu atau Melayu Tua adalah Ras Melayu yang memiliki kebudayaan asli dan datang ke wilayah Nusantara sebagai gelombang pertama sekitar tahun 1500 SM. Mereka disebut sebagai Melayu Tua sebab

datang lebih dahulu dibanding Deutro Melayu. Keturunan Proto Melayu saat ini, antara lain suku Dayak, Mentawai, Batak, dan juga Toraja.

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Resistansi menunjukan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Pada umumnya, sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang jelas.

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.

She atau marga adalah nama keluarga yang menjadi pertanda dari keluarga mana seorang berasal.

Shinshe adalah tabib atau dokter tradisional Tionghoa.

***Sino-Javanese Muslim* (*Culture*)** adalah istilah akulturasi budaya Tionghoa-Jawa dengan Islam yang banyak dijumpai di Indonesia. Gagasan ini dicetuskan oleh Sumanto Al Qurtuby.

Sinophobia atau anti-Cina adalah suatu ketakutan dari ketidaksukaan terhadap Tiongkok, Tionghoa, atau pun budaya Tionghoa dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Sultan adalah gelar dalam dunia Muslim yang digunakan untuk merujuk berbagai kedudukan yang beragam dalam sepanjang sejarah penggunaannya. Biasanya sultan digunakan untuk mengacu pada kepala monarki Muslim yang berkuasa atas sebuah negara Islam.

Sunan adalah adalah sebutan (budaya Jawa) bagi orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. Kata ini merupakan penyingkatan dari susuhunan. Kata ini berarti tempat

penerima "susunan" jari yang sepuluh atau dengan kata lain "sesembahan".

Superior adalah orang atasan atau merasa lebih tinggi derajat, status, dan kelasnya.

Syafi'i adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Banyak dianut di Indonesia.

Volksraad diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat" adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda.

Walisanga adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di pulau Jawa karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Walisongo berasal dari kata Wali adalah "orang yang dipercaya" atau "orang yang ditugaskan", sedangkan kata Sanga (bahasa Jawa) berarti sembilan. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai "Sembilan Wali".

INDEKS

A
Abdurrahman Wahid 42, 43, 67
B
barongsai 28, 44, 45, 59, 61, 215, 269
batik pesisiran vi, 19, 97, 98
Betawi 17, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 62, 88, 131, 237, 258, 271, 274
bong 152, 194
bongpay 54, 56, 131, 132, 194
Bung Karno 12, 186, 252
C
Cap Go Meh 28, 37, 46, 52, 117, 122, 123, 124, 125, 126
CENG BENG 52
CHENG HO 102
Cina Benteng 29, 30
D
Djiauw Kie Siong 186
F
Fifi Young 256, 257, 258
G
gambang 20, 84
Gus Dur 16, 42, 43, 44, 46, 67, 121, 221
H
Habibie 151, 207, 253
H.H. Kan 170, 171, 172, 175
historiografi 82, 243
Hoakiau 208, 209, 276
I
Imlek 14, 15, 20, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 117, 122, 123, 124, 125, 136, 153, 215, 221, 268, 269, 270
Injo Beng Goat 190, 235
K
Kapitan 26, 31, 32, 42, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 149, 159, 171, 274
Kapitan Sepanjang 42, 136
Kartini 90
kebaya encim 19, 88, 97, 117
Kekawulaan Belanda 170, 179, 202, 203
kelenteng 25, 28, 44, 62, 64, 66, 91, 105, 112, 113, 114, 115, 120, 140, 146, 156, 157, 159, 163, 164, 215, 247
Keng Po 171, 190, 235

Khe Panjang 42, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 197
Kue Keranjang 48
Kwee Kek Beng 167, 232, 233

L

Liem Koen Hian 42, 172, 173, 174, 183, 197, 221, 235, 241
Liong 25, 42, 179, 180, 195, 233, 235, 264

M

Muara Angke 134, 136, 139, 156, 178

N

Nie Hoe Kong 134, 136, 137, 139

O

Oei Tiong Ham 97, 134, 160, 244, 274
Oen Boen Ing 153, 154, 251, 252
Orde Baru 6, 10, 42, 44, 45, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 153, 154, 177, 204, 212, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 235, 243, 256, 260

P

Pao An Tui 189, 190, 191, 276
Peh Cun 14, 57, 58, 59
Pesisiran ix
potehi 11, 44, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 215, 268, 269
Put On 18, 19, 236, 237, 238, 275

R

Reformasi 44, 46, 183, 207, 268, 280
Revolusi 160, 189, 194, 280
ronde 59, 80, 81, 98
Rudy Hartono 260, 261, 262

S

SBKRI 204, 205, 207, 217, 272
sehu 64, 65, 66, 67
She 25, 280
Shinshe 280
Siauw Giok Tjhan 184, 187, 197, 212, 213, 222
Sie Kong Liong 42, 179, 180
Sin Po 18, 93, 96, 170, 171, 173, 174, 175, 233, 234, 235, 236, 237, 242
Sin Tit Po 171, 173, 175, 234, 235
Soeharto 207, 267, 268
Soekarno 182, 183, 185, 186, 208, 209, 210, 213, 214, 243, 259, 267
Souw Beng Kong 132, 133
Susi Susanti 202, 261, 262, 263

T

Tang Ceh 59, 60, 80
Tan Tjeng Bok 256, 258, 273
THHK 85, 168, 169, 170, 175, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 244
Tiong Hoa Hwee Koan 85, 168, 231, 240

U

Universitas Res Publica 212, 213, 244

W

Wacinwa 10, 11, 13, 276

Y

Yap Hong Tjoen 154, 252
Yap Tjwan Bing 153, 183, 184, 185, 197, 221
Yunnan 7, 8, 103, 107, 248

TENTANG PENULIS

Hendra Kurniawan, M.Pd. lahir di Gombong, Kebumen pada 21 Agustus 1986. Berkarya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Masa kecilnya dihabiskan di Gombong dengan bersekolah di TK, SD, SMP Pius Bakti Utama Gombong dan SMA Negeri 1 Gombong. Pendidikan sarjana ditempuhnya di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008). Pernah mengajar di SMP Pius Bakti Utama Gombong (2008-2011) dan SMA Regina Pacis Surakarta (2011-2013). Pada 2012 menyelesaikan Magister Pendidikan Sejarah di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menekuni studi Kajian Kurikulum, Pengembangan Bahan Ajar, Perencanaan Pembelajaran Sejarah, Sejarah Sosial, Sejarah Tionghoa, dan Sejarah Indonesia Modern. Mata kuliah yang diampu, antara lain: Kajian Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar Sejarah, Peren-

canaan Pembelajaran Sejarah, Pembelajaran Mikro, Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Sosial, Sejarah Afrika, dan Pendidikan Pancasila. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2015-2019).

Artikel ilmiah yang ditulis cukup banyak, baik dalam jurnal nasional maupun internasional, di antaranya "*The Role of Chinese in Coming of Islam to Indonesia: Teaching Materials Development Based on Multiculturalism*" dimuat dalam *Paramita: Historical Studies Journal* Vol. 27, No. 2, Tahun 2017 (Nasional Terakreditasi); "*Democratic Education Through History Learning Using Social History Teaching Materials*" dimuat dalam *International Journal of Indonesian Education and Teaching (IJIET)* Vol. 1, No. 2, July 2017; "*Potehi in New Order's Restraint: The Lost of Inheritor Generation of Chinese Wayang Culture*" dalam *International Journal of Humanity Studies (IJHS)* Vol. 1, No. 1, September 2017.

Di samping itu, karyanya dalam bentuk buku, antara lain: *"Gendu-Gendu Rasa"* berisi kumpulan artikel pilihan di media massa diterbitkan Penerbit Bimotry (2015); Buku ajar "*Kajian Kurikulum dan Bahan Ajar Sejarah SMA Menurut Kurikulum 2013*" diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press (2018); "Literasi dalam Pembelajaran Sejarah" diterbitkan oleh Penerbit Gava Media (2018); Buku ajar "*Benua Hitam: Sejarah Afrika dari Abad Kuno Sampai Kontemporer*" diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press (2019); "*Pembelajaran Literasi Menuju Society 5.0*" diterbitkan oleh Deepublisher (2019); "*Pembelajaran Era 4.0: Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter, Keterampilan Abad 21, HOTS, dan Literasi dalam Perspektif Merdeka Belajar*" diterbitkan oleh Media Akademi-Penerbit CV Graha Ilmu (2020).

Beberapa prosiding, di antaranya "*Menempatkan Sejarah Tionghoa dalam Ruang Kurikulum Sejarah Indonesia yang Berbasis*

Multikulturalisme" dalam Seminar Nasional Prodi Sejarah Se-Indonesia; "*Kajian Muatan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah di Kurikulum 2013*" di Universitas Negeri Yogyakarta (2016); "*Pembelajaran Sejarah yang Indonesiasentris: Reformulasi Bahan Ajar Sejarah Berbasis Kebinekaan*" dalam Seminar Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama 1957-2017; "*Sejarah untuk Kebinnekaan dan Ke-Indonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia*" di Universitas Gadjah Mada (2017).

Penulis pernah memberi pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru-guru SMA Pangudi Luhur St. Louis Sedayu (2013); pelatihan *active learning* bagi guru-guru SMA Petra Surabaya (2015); pelatihan peningkatan kemampuan pembelajaran bagi guru-guru SD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (2016); pendampingan Penelitian Tindakan Kelas bagi guru-guru SMP Kanisius Muntilan (2016); pendampingan Gerakan Literasi Sekolah di SMP Kanisius Muntilan (2017) dan SMP Pangudi Luhur St. Vincentius Sedayu (2019); pendampingan kegiatan karya ilmiah bagi para siswi di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta (2018); pelatihan *student centered learning* untuk guru-guru IPS di sekolah-sekolah Yayasan Bala Keselamatan Palu (2018); terlibat sebagai instruktur dalam program Pendidikan Profesi Guru (2017-sekarang); dan mengelola program edukasi sejarah publik untuk pendidikan lewat media sosial untuk siswa-siswa SMA di Yogyakarta (2019-sekarang).

Selain itu, tak jarang penulis juga diminta sebagai narasumber untuk media massa cetak, radio, dan televisi lokal. Aktif menulis di media massa, seperti *Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Solopos, Tribun Jateng, Tribun Jogja, Harian Bernas, Koran Jakarta,* dan *Majalah BASIS*. Pernah meraih penghargaan sebagai dosen berprestasi tingkat Universitas Sanata Dharma untuk kategori penulis artikel

terproduktif di media massa (2014 dan 2015) dan penulis buku terproduktif (2018).

Kegemaran angkat pena berhasil mendorong para mahasiswanya untuk menulis. Sebagai editor, beberapa buku berisi kumpulan artikel karya para mahasiswa telah dihasilkan dalam mata kuliah yang diampunya. Pertama berjudul "*Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam*" (2017) dari perkuliahan Sejarah Sosial; "*Pancasila dalam Racikan Obatku*" (2017) dan *"Rayakan Pancasila*" (2018), keduanya hasil dari perkuliahan Pendidikan Pancasila. Sementara dari perkuliahan Sejarah Afrika telah lahir buku "*Mosaik Afrika: Kapita Selekta Afrika dalam Sejarah*" (2018) dan "*Catatan Pinggir Mosaik Afrika: Tanggapan terhadap Kumpulan Tulisan Mosaik Afrika*" (2020). Pernah pula terlibat sebagai salah satu penelaah buku teks Sejarah SMA/MA Kelas X Peminatan IPS dari Pusat Perbukuan Kemendikbud RI (2019). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: hendrayang7@gmail.com atau hendrak@usd.ac.id.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Ad
Dei
Maiorem
Gloriam

Ada banyak kisah tentang masyarakat Tionghoa Indonesia yang telah menjadi sejarah maupun yang masih berlangsung yang tidak diketahui banyak orang. Menyatukan kepingan-kepingan fakta yang terserak, tak berbentuk lagi, bahkan nyaris raib menjadi kerja akademik yang digali dan dihadirkan dalam buku ringan ini. Untuk memperkaya, beberapa kisah sejarah keluarga turut diangkat. Harus diakui, keluarga (diperkuat dengan adanya marga dan sistem patrilineal) menjadi embrio penulisan sejarah Tionghoa Indonesia. Dari segi penyajian, buku ini sengaja disuguhkan dalam bentuk narasi-narasi lepas yang tidak memaksa pembaca untuk menyimaknya runtut dari A sampai Z agar mengerti isinya. Pembaca dapat menjelajah setiap topik yang mana saja dengan nyaman.

Penjelajahan masa demi masa dalam buku ini membeberkan rekaman gairah perjuangan orang-orang Tionghoa untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan tak pernah padam. Lantas bagaimana dengan generasi muda Tionghoa saat ini? Masihkah merasa sebagai Tionghoa Indonesia? Apabila kita cermati dewasa ini pascareformasi, kebebasan budaya Tionghoa mengalami euforia. Akan tetapi upaya genosida budaya Tionghoa selama tiga dekade telah memotong mata rantai generasi. Sekarang ini banyak kaum muda Tionghoa yang kehilangan identitas budayanya. Secara fisik masih tampak ciri ketionghoaan, namun tidak lagi kenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Dalam kehampaan budaya itulah, kaum muda Tionghoa lebur dengan budaya setempat, atau malahan mengambil budaya baru sebagai identitas dirinya.

Untuk itulah adagium tak kenal maka tak sayang kiranya tepat untuk menggambarkan situasi yang melatarbelakangi hadirnya buku ini. Kesadaran sejarah akan menggerakkan siapa saja orang Indonesia untuk mulai memungut keping demi keping sejarah yang terserak. Pun halnya bagi generasi muda Tionghoa perlu menemukenali (kembali) identitas diri yang sempat hilang. Tentu saja identitas diri ini harus ditempatkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sementara bagi yang lain seyogianya dapat membuka mata dan hati untuk mengenal lebih jauh tentang masyarakat Tionghoa dan menerima secara terbuka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Inilah harmoni Nusantara yang sejak dahulu ada dan harus dirawat bersama.

PENERBIT PT KANISIUS
ISBN 978-979-21-6392-6
1020003016
9 789792 163926